



# **LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024**



**BUPATI KAMPAR  
AHMAD YUZAR, S.Sos., MT**



**WAKIL BUPATI KAMPAR  
Dr. MISHARTI, S.Ag., M.Si**

## **PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025**





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.,**

**P**uji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua dan dengan izin-Nya, kami telah dapat menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini merupakan laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar selama 1 (satu) tahun anggaran yang bertujuan sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan dan kelemahan atas pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Kampar tahun 2024 yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur Riau.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2024, yang diantaranya memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan selama Tahun 2024.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Kampar yang telah berperan aktif menyampaikan data dan informasi dalam penyusunan Laporan ini, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Kampar yakni **“Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”.**

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**



Bangkinang, Maret 2025  
BUPATI KAMPAR,

**AHMAD YUZAR, S.Sos, MT**



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR INSPEKTORAT

Jalan Pramuka Nomor 16 Telp.(0762) 20044 Fax. 20203 BANGKINANG KOTA  
e-mail : [inspektorat.kampar77@gmail.com](mailto:inspektorat.kampar77@gmail.com) / [inspektorat.kamparkab.go.id](http://inspektorat.kamparkab.go.id)  
KODE POS : 28412

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Ini .

Bangkinang Kota,     Maret 2025

Inspektur,



Febrinaldi Tridarmawan, S.STP, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770210 199512 1 001



# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                               | <b>Halaman</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN APIP</b>                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                                                                                                                                                                         | i              |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                                                                                                                                                                             | ii             |
| <b>DAFTAR TABEL</b>                                                                                                                                                                                           | iv             |
| <b>DAFTAR GRAFIK</b>                                                                                                                                                                                          | vii            |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b>                                                                                                                                                                                          | viii           |
| <b>BAB I       PENDAHULUAN</b>                                                                                                                                                                                | <b>1</b>       |
| <b>1.1    LATAR BELAKANG</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1</b>       |
| <b>1.1.1    Penjelasan Umum</b>                                                                                                                                                                               | <b>7</b>       |
| a    Undang-Undang Pembentukan Daerah                                                                                                                                                                         | 10             |
| b    Data Geografis Wilayah                                                                                                                                                                                   | 11             |
| c    Jumlah Penduduk                                                                                                                                                                                          | 19             |
| d    Jumlah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan                                                                                                                                                                      | 28             |
| e    Jumlah Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                  | 29             |
| f    Jumlah ASN                                                                                                                                                                                               | 30             |
| g    Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah                                                                                                                                                         | 31             |
| h    Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja | 35             |
| <b>1.1.2    PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                                                                                                                                | <b>49</b>      |
| a    Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                 | 50             |
| b    Visi Dan Misi Kepala Daerah                                                                                                                                                                              | 64             |
| c    Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah                                                                                                                               | 73             |
| d    Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan                                                                                                                                      | 95             |



|                |              |                                                            |            |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                | <b>1.1.3</b> | <b>PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>                 | <b>245</b> |
| <b>BAB II</b>  |              | <b>CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> | <b>255</b> |
|                | 2.1          | Capaian Kinerja Makro                                      | 255        |
|                | 2.1.1        | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                           | 256        |
|                | 2.1.2        | Angka Kemiskinan                                           | 258        |
|                | 2.1.3        | Angka Pengangguran                                         | 261        |
|                | 2.1.4        | Pertumbuhan Ekonomi                                        | 263        |
|                | 2.1.5        | Pendapatan Perkapita                                       | 264        |
|                | 2.1.6        | Rasio Gini                                                 | 265        |
|                | 2.2          | Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan        | 267        |
|                | 2.3          | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah                    | 301        |
| <b>BAB III</b> |              | <b>CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b>        | <b>342</b> |
| <b>BAB IV</b>  |              | <b>PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>  | <b>352</b> |
|                | 4.1          | Pendidikan                                                 | 352        |
|                | 4.2          | Kesehatan                                                  | 362        |
|                | 4.3          | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                          | 396        |
|                | 4.4          | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman                     | 402        |
|                | 4.5          | Trantibumas                                                | 405        |
|                | 4.6          | Sosial                                                     | 419        |
| <b>BAB V</b>   |              | <b>PENUTUP</b>                                             | <b>430</b> |

## DAFTAR TABEL/LIST OF TABLES

|       |    |    |                                                                                                                                   |    |
|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABEL | 1. | 1  | Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                             | 12 |
| TABEL | 1. | 2  | Ibu Kota, Ketinggian Tempat dan Jarak Ibu Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2024                                   | 14 |
| TABEL | 1. | 3  | Luas Tanah Menurut Penggunaan (Ha) Tahun 2024                                                                                     | 17 |
| TABEL | 1. | 4  | Pos Duga, Sungai Induk dan Luas Daerah Pengaliran Sungai di Kabupaten Kampar Tahun 2024                                           | 18 |
| TABEL | 1. | 5  | Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                                              | 19 |
| TABEL | 1. | 6  | Pertambahan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024                                                                                     | 21 |
| TABEL | 1. | 7  | Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2024                                                                               | 22 |
| TABEL | 1. | 8  | Sebarandan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2024                                                       | 23 |
| TABEL | 1. | 9  | Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024                                                                         | 24 |
| TABEL | 1. | 10 | Jumlah Penduduk Usia Produktif Dan Non Produktif Per Kecamatan Se Kabupaten Kampar Tahun 2024                                     | 25 |
| TABEL | 1. | 11 | Jumlah Penduduk Produktif Dan Non Produktif Kabupaten Kampar Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024                   | 25 |
| TABEL | 1. | 12 | Aggregat Penduduk Berdasarkan Rasio Ketergantungan Kecamatan Tahun 2024                                                           | 27 |
| TABEL | 1. | 13 | Daftar Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                   | 28 |
| TABEL | 1. | 14 | Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                              | 33 |
| TABEL | 1. | 15 | Anggaran Dan Realisasi Belanja Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                        | 34 |
| TABEL | 1. | 16 | Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Tahun 2024                                                                                 | 35 |
| TABEL | 1. | 17 | Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Kebijakan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar                                       | 54 |
| TABEL | 1. | 18 | Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar Tahun 2024                             | 58 |
| TABEL | 1. | 19 | Sasaran dan Strategi Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026                                                                             | 67 |
| TABEL | 1. | 20 | Visi dan Misi Berdasarkan RPJPD Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau                                                     | 73 |
| TABEL | 1. | 21 | Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar                                                                                       | 74 |
| TABEL | 1. | 22 | Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024                                                                                    | 90 |
| TABEL | 1. | 23 | Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 | 92 |
| TABEL | 1. | 24 | Indikator dan Target Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 Dalam RKPDP Tahun 2024                                          | 93 |
| TABEL | 1. | 25 | Fokus dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar Dalam RKPDP Tahun 2024                                                           | 94 |

|       |    |    |                                                                                                                                                           |     |
|-------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TABEL | 1. | 26 | Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan Strategis Yang Mendukung Langsung Pencapaian Kinerja, Serta Sasaran Yang Ingin Dicapai | 97  |
| TABEL | 1. | 27 | Program Prioritas dan pagu Anggaran Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                  | 104 |
| TABEL | 1. | 28 | Matrik Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kampar                                                                               | 136 |
| TABEL | 1. | 29 | Rekap Program dan Pendanaan Standart Pelayanan Minimum dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                             | 252 |

## **BAB II**

|       |    |    |                                                                                                                                              |     |
|-------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TABEL | 2. | 1  | Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                                            | 255 |
| TABEL | 2. | 2  | Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2020–2024                                                                | 256 |
| TABEL | 2. | 3  | Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu) Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                             | 259 |
| TABEL | 2. | 4  | Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kampar Tahun 2016–2024                                                                               | 261 |
| TABEL | 2. | 5  | Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kampar                                                              | 261 |
| TABEL | 2. | 6  | Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Kabupaten Kampar                           | 262 |
| TABEL | 2. | 7  | Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kampar (persen), 2020–2024 | 263 |
| TABEL | 2. | 8  | Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kampar Tahun 2020-2024 (Rp. miliar)                                                                               | 265 |
| TABEL | 2. | 9  | Indikator Kinerja Kunci Outcome Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                                  | 267 |
| TABEL | 2. | 10 | Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Kinerja                                                                                                  | 303 |
| TABEL | 2. | 11 | Pencapaian Target Misi                                                                                                                       | 304 |
| TABEL | 2. | 12 | Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1                                                                                                         | 305 |
| TABEL | 2. | 13 | Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 2                                                                                                         | 307 |
| TABEL | 2. | 14 | Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1                                                                                                         | 309 |
| TABEL | 2. | 15 | Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 2                                                                                                         | 311 |
| TABEL | 2. | 16 | Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 1                                                                                                         | 317 |
| TABEL | 2. | 17 | Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 2                                                                                                         | 319 |
| TABEL | 2. | 18 | Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 3                                                                                                         | 321 |
| TABEL | 2. | 19 | Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 4                                                                                                         | 322 |
| TABEL | 2. | 20 | Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 5                                                                                                         | 323 |
| TABEL | 2. | 21 | Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 1                                                                                                         | 324 |
| TABEL | 2. | 22 | Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 2                                                                                                         | 328 |
| TABEL | 2. | 23 | Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 3                                                                                                         | 329 |
| TABEL | 2. | 24 | Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 4                                                                                                         | 331 |
| TABEL | 2. | 25 | Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 1                                                                                                         | 332 |
| TABEL | 2. | 26 | Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 2                                                                                                         | 334 |
| TABEL | 2. | 27 | Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 3                                                                                                         | 335 |
| TABEL | 2. | 28 | Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                           | 338 |



|                |    |    |                                                                                         |     |
|----------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| TABEL          | 2. | 29 | Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024                                          | 333 |
| <b>BAB III</b> |    |    |                                                                                         |     |
| TABEL          | 3. | 1  | Realisasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Desa                                       | 349 |
| TABEL          | 3. | 2  | Data Pagu Dana Desa Kabupaten Kampar Tahun 2024                                         | 350 |
| TABEL          | 3. | 3  | Monitoring Penyaluran Dana Desa Tahun 2024                                              | 350 |
| TABEL          | 3. | 4  | Daftar Desa Se-Kabupaten Kampar Penerima Ambulance Desa<br>Tahun Anggaran 2020 s/d 2024 | 350 |

# DAFTAR GRAFIK

|        |    |   |                                                                                                                                            |     |
|--------|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| GRAFIK | 1. | 1 | Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2020 - 2024                                                                             | 20  |
| GRAFIK | 1. | 2 | Jumlah Penduduk Produktif Dan Non Produktif Kabupaten Kampar Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024                            | 26  |
| GRAFIK | 1. | 3 | Perbandingan Jumlah Penduduk Produktif Dan Non Produktif Kabupaten Kampar Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 4 (Empat) Tahun terakhir | 26  |
| GRAFIK | 2. | 1 | IPM Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024                                                                                 | 258 |
| GRAFIK | 2. | 2 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2024                                                      | 258 |
| GRAFIK | 2. | 3 | Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2024                                                                                | 172 |
| GRAFIK | 2. | 4 | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kampar tahun 2020 – 2023                                                                      | 260 |
| GRAFIK | 2. | 5 | Indek Gini Rasio Kabupaten Kampar Tahun 2019 -2023                                                                                         | 265 |
| GRAFIK | 2. | 6 | Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024                                                                                    | 310 |
| GRAFIK | 2. | 7 | Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024                                                                                      | 313 |
| GRAFIK | 2. | 8 | Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024                                                                                    | 316 |
| GRAFIK | 2. | 9 | Angka Harapan Hidup                                                                                                                        | 318 |
| GRAFIK | 4. | 1 | Capain SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024                                                                                                    | 348 |
| GRAFIK | 4. | 2 | Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                       | 400 |

# DAFTAR GAMBAR

|        |    |   |                                                       |    |
|--------|----|---|-------------------------------------------------------|----|
| GAMBAR | 1. | 1 | Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar | 12 |
| GAMBAR | 1. | 2 | Peta Hidrologi Kabupaten Kampar                       | 19 |

## BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat.

Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas :

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah :
  - a. Capaian Kinerja Makro  
Capaian kinerja makro mengukur kinerja pemerintahan daerah dengan menggunakan berbagai indikator makro antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan.
  - b. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah  
Mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja kunci pada masing-masing urusan kinerja kunci yang digunakan dapat diukur secara objektif dan dapat diperbandingkan antar Daerah.
  - c. Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah  
Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan capaian atas perjanjian kinerja kepala daerah yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- 2) LPPD juga memuat laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.
- 3) Capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan.
- 4) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan merupakan informasi yang terdiri atas capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah Provinsi. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dimaksud akan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi yang dicapai dari aspek fisik dan keuangan.
- 5) Dasar Hukum Penyusunan LPPD Tahun 2024, disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
  9. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1678);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

29. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 9);
30. Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023 Nomor 17);
31. Peraturan Bupati Kampar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor 26).
32. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 terkait Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

#### **1.1.1 Penjelelasan Umum**

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah Nomor : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus

rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Kabupaten Kampar terbentuk melalui Ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah No. 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950 tentang Penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Kemudian pada tahun 1956 dikukuhkan dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Kabupaten Kampar sebagai Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah, dengan luas wilayah  $\pm 30.569,56 \text{ Km}^2$  dengan pusat pemerintahan di Bangkinang. Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati.

Penetapan hari jadi ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor : 02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah Tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun faktor- faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain:

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau dan Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kota Madya.
2. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruhan wilayah Kabupaten Kampar.
4. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
5. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci. Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 dan PP Nomor: 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor: 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 75 Tahun 1999 tanggal 24



Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten, maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 Kecamatan.

Pemekaran Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan, hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar tahun 1949 sampai sekarang tahun 2024, sudah 25 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar.

#### **a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Kampar Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (Tiga Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu Dan Kampar Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;

## **b. Data Geografis Wilayah**

### **1] Batas administrasi dan Luas wilayah**

Kabupaten Kampar terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai dengan 00° 27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" sampai dengan 101° 14'30" Bujur Timur, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Siak;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Prov Sumatera Barat;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak dan Kota Pekanbaru.

**Gambar 1.1**

**Peta Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Kampar**



Luas wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11,289.28 km<sup>2</sup> atau  $\pm 11,62$  % dari luas wilayah Provinsi Riau [94.561,60 km<sup>2</sup>], Luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar disajikan pada berikut :

**Tabel 1.1**  
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kampar**

| No. | Kecamatan          | Ibukota        | Luas Wilayah |      |
|-----|--------------------|----------------|--------------|------|
|     |                    |                | Ha           | (%)  |
| 1   | Kampar Kiri        | Lipat Kain     | 91.533       | 8,1  |
| 2   | Kampar Kiri Hulu   | Gema           | 130.125      | 11,5 |
| 3   | Kampar Kiri Hilir  | Sungai Pagar   | 75.974       | 6,7  |
| 4   | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | 33.059       | 2,9  |
| 5   | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | 59.797       | 5,3  |
| 6   | XIII Koto Kampar   | Batu Bersurat  | 73.240       | 6,5  |
| 7   | Koto Kampar Hulu   | Tanjung        | 67.400       | 6    |
| 8   | Kuok               | Kuok           | 15.141       | 1,3  |
| 9   | Salo               | Salo           | 20.783       | 1,8  |
| 10  | Tapung             | Patapahan      | 136.597      | 12,1 |
| 11  | Tapung Hulu        | Senama Nenek   | 116.915      | 10,4 |
| 12  | Tapung Hilir       | Kota Garo      | 101.356      | 9    |
| 13  | Bangkinang Kota    | Bangkinang     | 17.718       | 1,6  |
| 14  | Bangkinang         | Muara Uwai     | 25.350       | 2,2  |
| 15  | Kampar             | Air Tiris      | 13.628       | 1,2  |

| No.    | Kecamatan       | Ibukota        | Luas Wilayah |     |
|--------|-----------------|----------------|--------------|-----|
|        |                 |                | Ha           | (%) |
| 16     | Kampar Timur    | Kampar         | 17.308       | 1,5 |
| 17     | Rumbio Jaya     | Teratak        | 7.692        | 0,7 |
| 18     | Kampar Utara    | Sawah          | 7.984        | 0,7 |
| 19     | Tambang         | Sungai Pinang  | 37.194       | 3,3 |
| 20     | Siak Hulu       | Pangkalan Baru | 68.980       | 6,1 |
| 21     | Perhentian Raja | Pantai Raja    | 11.154       | 1   |
| Jumlah |                 |                | 1.128.928    | 100 |

Sumber Data : Kabupaten Kampar Dalam Angka

Dari tabel diatas dapat kita lihat, 21 (dua puluh satu) Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 1.365,97 km<sup>2</sup> [12,10%], diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hulu yakni 1.301,25 km<sup>2</sup> [11,53%] dan Kecamatan Tapung Hulu 1.169,15km<sup>2</sup> [10,36%]. Sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Rumbio Jaya merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil yakni 76,92 km<sup>2</sup> [0,68%] diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 79,84 km<sup>2</sup> [0,71%] dan Kecamatan Perhentian Raja 111,54 km<sup>2</sup> [0,99%].

## 2] Topografi

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0– 500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 40%. Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 220C – 330C, kelembaban nisbi rata-rata 78 – 94 persen, dan curah hujan rata-rata 283 mili meter per tahun.

Sedangkan tingkat kemiringan wilayah adalah berkisar antara 0-40%. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, dan terobosan yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah bagian barat ke arah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorfosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen. Wilayah Kampar juga dilalui sesar membujur dari timur laut ke arah

tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat.

Jarak ibu kota kecamatan terjauh dari ibu kota Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan jarak sejauh 140 km dan dapat ditempuh dalam waktu 2,33 jam dengan rata-rata kecamatan 60 km/jam. Sedangkan Jarak ibu kota kecamatan terdekat dari ibu kota Kabupaten Kampar adalah Kecamatan Bangkinang dengan jarak sejauh 3 km dan dapat ditempuh dalam waktu 0,05 jam dengan rata-rata kecamatan 60 km/jam, lihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1. 2**  
**Ibu Kota, Ketinggian Tempat dan Jarak Ibu Kota**  
**Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No                      | Kecamatan          | Ibu Kota          | Ketinggian Tempat (mdpl) | Jarak Ibukota (km) | Waktu Tempuh (jam) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 1                       | Kampar Kiri        | Lipat Kain        | 51,00                    | 110,00             | 1,83               |
| 2                       | Kampar Kiri Hulu   | Gema              | 100,00                   | 140,00             | 2,33               |
| 3                       | Kampar Kiri Hilir  | Sungai Pagar      | 51,00                    | 85,00              | 1,42               |
| 4                       | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan    | 51,00                    | 98,00              | 1,63               |
| 5                       | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang       | 51,00                    | 83,00              | 1,38               |
| 6                       | XIII Koto Kampar   | Batu Bersurat     | 85,00                    | 50,00              | 0,83               |
| 7                       | Koto Kampar Hulu   | Tanjung           | 92,00                    | 65,00              | 1,08               |
| 8                       | Kuok               | Kuok              | 44,00                    | 10,00              | 0,17               |
| 9                       | Salo               | Salo              | 40,00                    | 6,00               | 0,10               |
| 10                      | Tapung             | Petapahan         | 51,00                    | 30,00              | 0,50               |
| 11                      | Tapung Hulu        | Sinama Nenek      | 50,00                    | 80,00              | 1,33               |
| 12                      | Tapung Hilir       | Kota Garo         | 48,00                    | 75,00              | 1,25               |
| 13                      | Bangkinang Kota    | Bangkinang        | 40,00                    | 0,00               | 0,00               |
| 14                      | Bangkinang         | Muara Uwai        | 40,00                    | 3,00               | 0,05               |
| 15                      | Kampar             | Air tiris         | 38,00                    | 10,00              | 0,17               |
| 16                      | Kampar Timur       | Kampar            | 38,00                    | 25,00              | 0,42               |
| 17                      | Rumbio Jaya        | Teratak           | 38,00                    | 25,00              | 0,42               |
| 18                      | Kampar Utara       | Sawah             | 38,00                    | 15,00              | 0,25               |
| 19                      | Tambang            | Sungai Pinang     | 26,00                    | 34,00              | 0,57               |
| 20                      | Siak Hulu          | Pangkalan Baru    | 35,00                    | 65,00              | 1,08               |
| 21                      | Perhentian Raja    | Pantai Raja       | 35,00                    | 86,00              | 1,43               |
| <b>Kabupaten Kampar</b> |                    | <b>Bangkinang</b> | <b>40,00</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka

### 3] Geologi

Geologi dan geomorfologi Kabupaten Kampar pada umumnya tersusun dari endapan gunung api yang berasal dari gunung api kuartar tua dan gunung api kuartar muda (peta geologi lembar Pekanbaru dan Sri Indrapura, Tanjung Pinang). Proses pelapukan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, temperatur dan kelembaban udara. Jenis geologi yang ada sebagian besar adalah aluvium muda dan patahan (sesar)

masih berjalan. Aluvium muda ini merupakan formasi geologi yang terbesar di Kabupaten Kampar dan penyebarannya hampir ada pada seluruh Kecamatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Kampar bagian Tengah dan Barat termasuk zona lipatan (folded zone). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian Barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatra Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Kabupaten Kampar umumnya datar, kecuali sebagian wilayah Barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Dengan kondisi lahan tanah yang relative subur dan pada umumnya struktur tanah bersifat arganosol, glei humus, aluvial, hidromorfik kelabu, podzolik merah kuning, litosol dan regosol. Jenis tanah arganosol tersebar luas di dataran rendah berawa-rawa dan berasosiasi dengan humus, semakin jauh dari pinggir sungai semakin tebal bahan gambutnya dan dikenal dengan gambut ombrogen.

Fisiografi lahan Kabupaten Kampar didominasi oleh grup kubah gambut, aluvial, dataran, dataran tufmasam, perbukitan, dan pegunungan. Kondisi fisiografi tersebut terdiri dari :

1. Grup Kubah Gambut.

Satuan lahan ini berkembang di daerah cekungan rawa belakang pantai tua akibat penimbunan bahan organik dalam keadaan selalu jenuh air, sehingga proses dekomposisi minim terhadap bahan organik. Ketebalan gambut berangsur semakin tinggi ke bagian tengah sehingga permukaannya membentuk kubah dengan ketinggian tempat 10 - 20 meter di atas permukaan laut;

2. Grup Aluvial.

Satuan lahan ini merupakan bentukan muda, oleh aktivitas danau, pelebaran sungai, dan koluviasi. Bahan pembentuknya berupa bahan endapan aluvial, koluvial, dan kadang ditutupi endapan bahan organik. Ketinggian tempat 15 - 475 meter di atas permukaan laut;

3. Dataran Tuf Masam.

Merupakan dataran luas dan terbentuk dari bahan tuf vulkanik masam dan sedimen halus mempunyai ciri khas berupa punggung memanjang yang dipisahkan lembah dengan pola drainase dendritik dan aliran sungai satu arah lereng yang menyatu ke dalam sungai besar. Grup ini dijumpai berdekatan dengan grup dataran yang penyebarannya di sebelah timur laut jalur patahan utama Sumatera. Bahan tuf masam makin menipis ke arah utara dan sedikit menutupi dataran dan perbukitan. Ketinggian tempat adalah 40 – 250 meter di atas permukaan laut;

4. Dataran.

Daerah yang tidak termasuk grup dataran tuf masam karena terbentuk dari sedimen halus sampai kasar dan telah mengalami lipatan, pengikisan dan penorehan merupakan grup tersendiri sebagai grup dataran. Umumnya lereng hampir seragam (lereng  $< 16\%$  dan beda tinggi  $< 50$  meter). Dataran memiliki sejarah yang cukup kompleks, yaitu telah mengalami berbagai proses geomorfik di permukaannya termasuk proses erosi dan sedimentasi serta pelipatan. Banyak sisa tanda proses pembentukan tanah yang dijumpai, seperti tutupan konkresi besi, lapisan plintit, dan lain-lain;

5. Perbukitan

terbentuk oleh proses orogenesis dan erosi terdiri atas bukit-bukit kecil dan besar masing-masing dengan perbedaan tinggi 10 - 50 m atau 50 - 300 m serta berkembang dari batuan sedimen dan metamorfik yang telah mengalami proses pengangkatan dan atau pelipatan serta perbukitan yang terbentuk oleh intrusi batuan plutonik masam;

6. Pegunungan dan Plato.

Terbentuk dari batuan sedimen halus sampai kasar, granit dan batuan vulkanik yang telah mengalami lipatan/ patahan dan merupakan rangkaian Pegunungan Barisan. Puncak-puncak berada pada ketinggian  $> 1.000$  m di atas permukaan laut.



Penggunaan lahan di Kabupaten Kampar terbagi menjadi sembilan jenis penggunaan yaitu lahan sawah; pekarangan, bangunan dan lahan sekitarnya; tegal kebun; ladang huma; padang rumput; sementara tidak diusahakan; hutan negara dan hutan rakyat; perkebunan; dan lain-lain. Jenis penggunaan lahan terbesar adalah lahan perkebunan dengan luasan sebesar 415.705 ha atau 37,11 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Sedangkan luasan terkecil adalah lahan sawah dengan jumlah luasan sebesar 6.546 ha atau sekitar 0,58 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar.

**Tabel 1.3**  
**Luas Tanah Menurut Penggunaan Tahun 2024**

| No | Jenis Penggunaan Lahan        | Jumlah (Ha)      | Persentase (%) |
|----|-------------------------------|------------------|----------------|
| 1  | Lahan Sawah                   | 4.542            | 0,40           |
| 2  | Lahan Bukan Pertanian         | 325.093          | 28,80          |
| 3  | Tegal Kebun                   | 91.770           | 8,13           |
| 4  | Ladang Huma                   | 15.655           | 1,39           |
| 5  | Padang Rumput                 | 3.390            | 0,30           |
| 6  | Rawa                          | -                | -              |
| 7  | Kolam                         | -                | -              |
| 8  | Sementara Tidak Diusahakan    | 88.594           | 7,85           |
| 9  | Hutan Negara dan Hutan Rakyat | 125.252          | 11,09          |
| 10 | Perkebunan                    | 449.691          | 39,83          |
| 11 | Lain-lain                     | 24.291           | 2,21           |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>1.128.928</b> | <b>100,00</b>  |

*Sumber Data : Kabupaten Kampar dalam Angka 2025*

#### 4] Hidrologi

Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk perikanan darat dan tempat penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak dan Sungai Tapung) dimanfaatkan untuk jalur perhubungan antar desa. Memiliki dua sungai besar dan beberapa anak sungai, diantaranya:

- 1) Sungai Kampar Tahun mengalir dari punggung Bukit Barisan ke arah timur membelah wilayah Kabupaten Kampar dengan melalui beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar Tahun Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang, yang dilalui oleh Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Sungai Kampar dengan panjang  $\pm 413,5$  kilometer dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter.
- 2) Sungai Tapung yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri, kedua hilir sungai ini menyatu ke Sungai Siak. Sungai Siak bagian hulu mempunyai panjang  $\pm 90$  kilometer dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter.

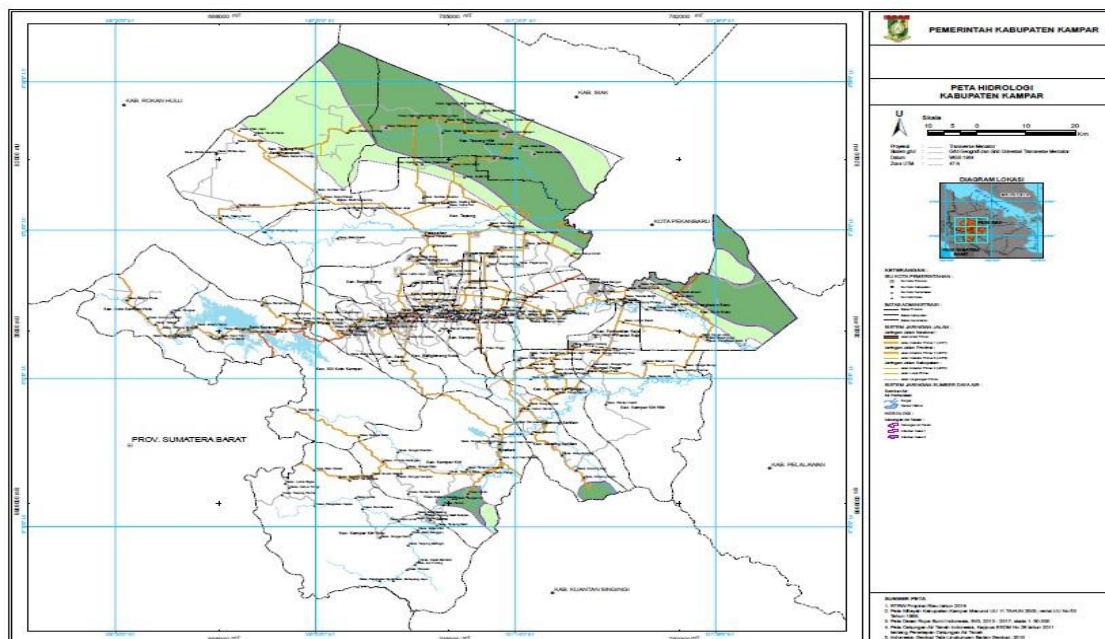
**Tabel 1.4**  
**Pos Duga, Sungai Induk dan Luas Daerah Pengaliran Sungai**  
**di Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Nama Pos Duga Air      | Induk Sungai | Data Geografi |               | Luas Daerah Pengaliran (km <sup>2</sup> ) |
|----|------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
|    |                        |              | Lintang       | Bujur         |                                           |
| 1. | BT. Kampar-D.Bengkuang | BT. Kampar   | 0°21'00" LU   | 101°14'00" BT | 4.000,00                                  |
| 2. | BT. Kampar-Lipat Kain  | BT. Rokan    | 0°00'57" LU   | 101°11'53" BT | 3.431,00                                  |
| 3. | BT KPR Kanan-Mr. Takus | BT. Kampar   | 0°17'34" LU   | 101°38'31" BT | 1.675,00                                  |
| 4. | BT. Lipai-KB. Durian   | BT. Kampar   | 0°07'50" LU   | 101°13'55" BT | 556,9                                     |

Sumber: BPS, Kabupaten Kampar Dalam Angka

Sungai Kampar merupakan salah satu sungai besar di Pulau Sumatera. Secara administrasi, Sungai Kampar berada di dua provinsi, bagian hulu sungai Kampar terletak di Kabupaten Lima Puluh Koto, Pasaman dan Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat, sedangkan bagian tengah wilayah sungai hingga muara terletak di Provinsi Riau. Sungai Kampar memiliki dua anak sungai, yaitu sungai Kampar Kanan dan sungai Kampar Kiri, bertemu di Langgam, Kabupaten Pelalawan. Sungai ini memiliki panjang  $\pm 580$  km dengan luas daerah aliran sungai (DAS)  $\pm 24.586$  km<sup>2</sup> (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015).

**Gambar 1.2**  
**Peta Hidrologi Kabupaten Kampar**



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kampar Tahun 2019-2039

### c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah, berdasarkan laporan perkembangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar per tanggal 31 Desember 2024 jumlah penduduk Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 898.973 Jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.5**  
**Penduduk Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | URAIAN                              | TAHUN 2024 | %     |
|----|-------------------------------------|------------|-------|
| 1  | Jumlah penduduk                     | 898.973    | 100   |
| 2  | Kepala Keluarga                     | 268.103    |       |
| 3  | Penduduk berdasarkan Jenis kelamin: |            |       |
|    | - Laki-laki                         | 459.172    | 51.08 |
|    | - Perempuan                         | 439.801    | 48.92 |

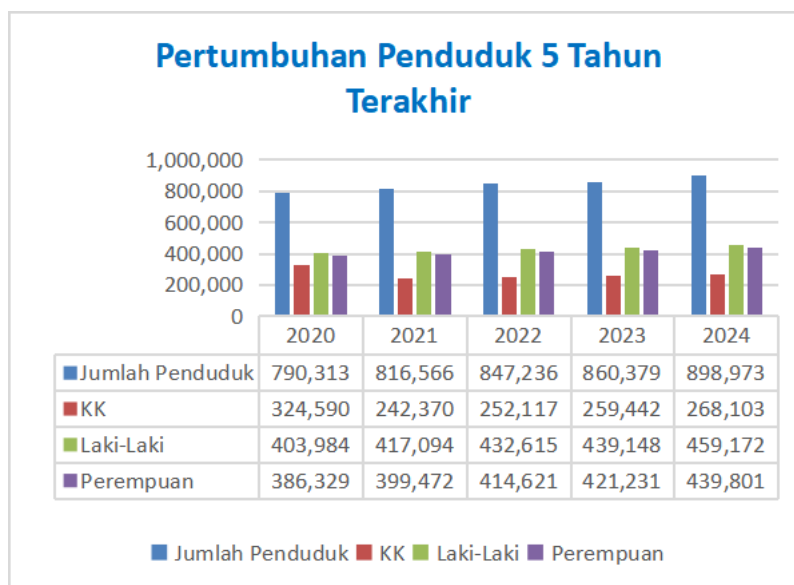
Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Disdukcapil Kab. Kampar

Komposisi berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia, jenis pekerjaan dan kelompok pendidikan diuraikan sebagai berikut :

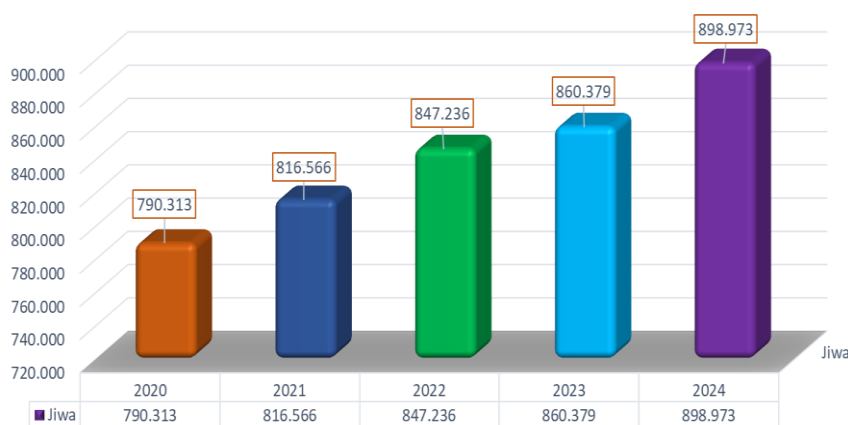
## • Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kampar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dimana Untuk Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar berkisar 38.594 jiwa dari tahun 2023, dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 1.1**  
**Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kampar**



### PERTUMBUHAN PENDUDUK KABUPATEN KAMPAR



**Tabel 1. 6**  
**Pertambahan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN          | PENDUDUK       |                |                | LAJU        |
|----|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|    |                    | 2022           | 2023           | 2024           | PERTUMBUH   |
|    |                    | (Jiwa)         | (Jiwa)         | (Jiwa)         | n(Jiwa)     |
| 1  | BANGKINANG KOTA    | 39.024         | 39.085         | 40.451         | 1,01        |
| 2  | KAMPAR             | 53.199         | 53.630         | 55.704         | 1,14        |
| 3  | TAMBANG            | 86.359         | 90.797         | 97.803         | 2,19        |
| 4  | XIII KOTO KAMPAR   | 24.395         | 24.646         | 25.550         | 1,08        |
| 5  | KUOK               | 26.429         | 26.816         | 27.845         | 1,09        |
| 6  | SIK HULU           | 93.898         | 95.789         | 101.181        | 1,62        |
| 7  | KAMPAR KIRI        | 35.564         | 36.252         | 38.224         | 1,24        |
| 8  | KAMPAR KIRI HILIR  | 14.099         | 14.566         | 15.312         | 1,55        |
| 9  | KAMPAR KIRI HULU   | 11.367         | 11.441         | 11.833         | 0,79        |
| 10 | TAPUNG             | 104.169        | 106.454        | 111.975        | 1,33        |
| 11 | TAPUNG HILIR       | 59.436         | 59.619         | 61.397         | 0,93        |
| 12 | TAPUNG HULU        | 81.418         | 82.051         | 84.861         | 0,92        |
| 13 | SALO               | 27.094         | 27.448         | 28.330         | 0,89        |
| 14 | RUMBIO JAYA        | 19.118         | 19.151         | 19.869         | 1,03        |
| 15 | BANGKINANG         | 35.708         | 35.867         | 37.012         | 0,92        |
| 16 | PERHENTIAN RAJA    | 20.268         | 20.507         | 21.501         | 1,35        |
| 17 | KAMPA              | 24.964         | 25.239         | 25.982         | 0,96        |
| 18 | KAMPAR UTARA       | 19.552         | 19.652         | 20.221         | 0,75        |
| 19 | KAMPAR KIRI TENGAH | 28.857         | 29.081         | 30.143         | 1,00        |
| 20 | GUNUNG SAHILAN     | 21.565         | 21.752         | 22.715         | 1,23        |
| 21 | KOTO KAMPAR HULU   | 20.753         | 20.536         | 21.064         | 0,65        |
|    | <b>KAB. KAMPAR</b> | <b>847.236</b> | <b>860.379</b> | <b>898.973</b> | <b>1,25</b> |

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Disdukcapil Kab. Kampar

Pertambahan penduduk terbanyak pada tahun 2024 terdapat pada Kecamatan Tambang sebanyak 7.006 jiwa/tahun (2,19%), Kecamatan Tapung yaitu sebesar 5.521 jiwa/tahun (1,33 %) dan Kecamatan Siak Hulu 5.392 jiwa/tahun (1,62%). Tinggi jumlah pertambahan penduduk pada Kecamatan Tambang, Siak Hulu dan Tapung disebabkan karena 3 kecamatan ini adalah kecamatan penyangga yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau.

- **Kepala Keluarga (KK)**

Jumlah Kepala Keluarga terbanyak Tahun 2024 berada pada Kecamatan Tapung dan Siak Hulu, masing-masing 33.435 KK (12.47%) dan 29.778 KK (11.11%), sedangkan jumlah Kepala keluarga yang paling sedikit berada pada Kecamatan Kampar Kiri Hilir dan

Kampar Kiri Hulu masing-masing 4.592 KK (1.72 %) dan 3.595 KK (1.34 %).

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2024**

| NO    | KECAMATAN          | KEPALA KELUARGA |           |         |
|-------|--------------------|-----------------|-----------|---------|
|       |                    | LAKI-LAKI       | PEREMPUAN | JML     |
| 1     | BANGKINANG KOTA    | 9.766           | 2.176     | 11.942  |
| 2     | KAMPAR             | 13.476          | 3.235     | 16.711  |
| 3     | TAMBANG            | 24.011          | 4.262     | 28.273  |
| 4     | XIII KOTO KAMPAR   | 6.443           | 1.332     | 7.775   |
| 5     | KUOK               | 6.803           | 1.631     | 8.434   |
| 6     | SIK HULU           | 25.065          | 4.713     | 29.778  |
| 7     | KAMPAR KIRI        | 9.668           | 1.695     | 11.363  |
| 8     | KAMPAR KIRI HILIR  | 3.992           | 600       | 4.592   |
| 9     | KAMPAR KIRI HULU   | 2.994           | 601       | 3.595   |
| 10    | TAPUNG             | 29.067          | 4.368     | 33.435  |
| 11    | TAPUNG HILIR       | 16.048          | 2.228     | 18.276  |
| 12    | TAPUNG HULU        | 21.732          | 3.085     | 24.817  |
| 13    | SALO               | 7.028           | 1.342     | 8.370   |
| 14    | RUMBIO JAYA        | 5.189           | 1.170     | 6.359   |
| 15    | BANGKINANG         | 9.167           | 1.775     | 10.942  |
| 16    | PERHENTIAN RAJA    | 5.653           | 892       | 6.545   |
| 17    | KAMPA              | 6.426           | 1.389     | 7.815   |
| 18    | KAMPAR UTARA       | 4.836           | 1.260     | 6.096   |
| 19    | KAMPAR KIRI TENGAH | 8.036           | 1.343     | 9.379   |
| 20    | GUNUNG SAHLAN      | 5.975           | 913       | 6.888   |
| 21    | KOTO KAMPAR HULU   | 5.691           | 1.027     | 6.718   |
| TOTAL |                    | 227.066         | 41.037    | 268.103 |

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Disdukcapil Kab. Kampar

- **Sebaran dan Kepadatan Penduduk**

Secara umum, tingkat kepadatan penduduk (population density) adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu.

Apabila dibandingkan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2024 sebesar 79,63 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Kampar yaitu 408,75 jiwa/ Km<sup>2</sup>, diikuti dengan kecamatan Kecamatan Rumbio Jaya 258,31 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan Kampar Utara yaitu 253,27 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 9,09 jiwa/ Km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Kampar Kiri Hilir yaitu 20,15 jiwa/ Km<sup>2</sup> dan Koto Kampar Hulu yaitu 31,25 jiwa/ Km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tapung yaitu 111.975 jiwa (12,46%) diikuti Kecamatan Siak Hulu yaitu 101.181 jiwa (11,26%), dan Kecamatan Tapung Hulu yaitu 84.861 jiwa (9,44%) sementara itu Penduduk yang paling sedikit berada di kecamatan Kampar Kiri Hulu yaitu 11.833 jiwa (1,32%) diikuti oleh Kampar Kiri Hilir yaitu 15.312 (1,70%) dan Kecamatan Rumbio Jaya yaitu 19.869 jiwa (2,21%), dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.8**  
**Sebaran dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kampar**  
**Menurut Kecamatan Tahun 2024**

| NO | KECAMATAN          | JENIS KELAMIN  |                | PENDUDUK       | LUAS             | KEPADATAN<br>PENDUDUK | LAJU<br>PERTUMBUHAN |
|----|--------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------------|
|    |                    | LAKI-LAKI      | PEREMPUAN      |                |                  |                       |                     |
|    |                    | n(Jiwa)        | n(Jiwa)        |                | (KM2)            | n(Jiwa)               | n(Jiwa)             |
| 1  | BANGKINANG KOTA    | 20.268         | 20.183         | 40.451         | 177,18           | 228,30                | 1,01                |
| 2  | KAMPAR             | 28.258         | 27.446         | 55.704         | 136,28           | 408,75                | 1,14                |
| 3  | TAMBANG            | 49.666         | 48.137         | 97.803         | 371,94           | 262,95                | 2,19                |
| 4  | XIII KOTO KAMPAR   | 13.175         | 12.375         | 25.550         | 732,40           | 34,89                 | 1,08                |
| 5  | KUOK               | 14.192         | 13.653         | 27.845         | 151,41           | 183,90                | 1,09                |
| 6  | SIK HULU           | 51.664         | 49.517         | 101.181        | 689,80           | 146,68                | 1,62                |
| 7  | KAMPAR KIRI        | 19.636         | 18.588         | 38.224         | 915,33           | 41,76                 | 1,24                |
| 8  | KAMPAR KIRI HILIR  | 7.863          | 7.449          | 15.312         | 759,74           | 20,15                 | 1,55                |
| 9  | KAMPAR KIRI HULU   | 6.159          | 5.674          | 11.833         | 1.301,25         | 9,09                  | 0,79                |
| 10 | TAPUNG             | 57.423         | 54.552         | 111.975        | 1.365,97         | 81,97                 | 1,33                |
| 11 | TAPUNG HILIR       | 31.406         | 29.991         | 61.397         | 1.013,56         | 60,58                 | 0,93                |
| 12 | TAPUNG HULU        | 43.658         | 41.203         | 84.861         | 1.169,15         | 72,58                 | 0,92                |
| 13 | SALO               | 14.527         | 13.803         | 28.330         | 207,83           | 136,31                | 0,89                |
| 14 | RUMBIO JAYA        | 10.160         | 9.709          | 19.869         | 76,92            | 258,31                | 1,03                |
| 15 | BANGKINANG         | 18.833         | 18.179         | 37.012         | 253,50           | 146,00                | 0,92                |
| 16 | PERHENTIAN RAJA    | 10.955         | 10.546         | 21.501         | 111,54           | 192,76                | 1,35                |
| 17 | KAMPA              | 13.216         | 12.766         | 25.982         | 173,08           | 150,12                | 0,96                |
| 18 | KAMPAR UTARA       | 10.235         | 9.986          | 20.221         | 79,84            | 253,27                | 0,75                |
| 19 | KAMPAR KIRI TENGAH | 15.402         | 14.741         | 30.143         | 330,59           | 91,18                 | 1,00                |
| 20 | GUNUNG SAHILAN     | 11.682         | 11.033         | 22.715         | 597,97           | 37,99                 | 1,23                |
| 21 | KOTO KAMPAR HULU   | 10.794         | 10.270         | 21.064         | 674,00           | 31,25                 | 0,65                |
|    | <b>KAB. KAMPAR</b> | <b>459.172</b> | <b>439.801</b> | <b>898.973</b> | <b>11.289,28</b> | <b>79,63</b>          | <b>1,25</b>         |

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Disdukcapil Kab. Kampar

- Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin**

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun 2024 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 1.9**  
**Jumlah Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

| KELOMPOK<br>UMUR | JENIS KELAMIN  |            |                |            | PENDUDUK       |            |
|------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
|                  | LAKI-LAKI      |            | PEREMPUAN      |            |                |            |
|                  | n (JIWA)       | %          | n (JIWA)       | %          | n (JIWA)       | %          |
| 00-04            | 35.872         | 7,81       | 33.061         | 7,52       | 68.933         | 7,67       |
| 05-09            | 46.142         | 10,05      | 42.765         | 9,72       | 88.907         | 9,89       |
| 10-14            | 46.865         | 10,21      | 43.908         | 9,98       | 90.773         | 10,10      |
| 15-19            | 36.644         | 7,98       | 34.646         | 7,88       | 71.290         | 7,93       |
| 20-24            | 40.953         | 8,92       | 39.418         | 8,96       | 80.371         | 8,94       |
| 25-29            | 38.135         | 8,31       | 36.408         | 8,28       | 74.543         | 8,29       |
| 30-34            | 35.570         | 7,75       | 35.057         | 7,97       | 70.627         | 7,86       |
| 35-39            | 34.722         | 7,56       | 35.341         | 8,04       | 70.063         | 7,79       |
| 40-44            | 35.127         | 7,65       | 34.552         | 7,86       | 69.679         | 7,75       |
| 45-49            | 30.690         | 6,68       | 28.978         | 6,59       | 59.668         | 6,64       |
| 50-54            | 25.637         | 5,58       | 24.295         | 5,52       | 49.932         | 5,55       |
| 55-59            | 19.972         | 4,35       | 18.899         | 4,30       | 38.871         | 4,32       |
| 60-64            | 14.199         | 3,09       | 13.866         | 3,15       | 28.065         | 3,12       |
| 65-69            | 9.216          | 2,01       | 8.517          | 1,94       | 17.733         | 1,97       |
| 70-74            | 5.159          | 1,12       | 4.958          | 1,13       | 10.117         | 1,13       |
| >75              | 4.269          | 0,93       | 5.132          | 1,17       | 9.401          | 1,05       |
| <b>JUMLAH</b>    | <b>459.172</b> | <b>100</b> | <b>439.801</b> | <b>100</b> | <b>898.973</b> | <b>100</b> |

Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024  
Disdukcapil Kabupaten Kampar

Berdasarkan tabel kelompok umur diatas, penduduk terbanyak Kabupaten Kampar berusia antara 10-14 tahun sebanyak 90.773 jiwa (10,10 %) dan usia 05-09 tahun sebanyak 88.907 jiwa (9,89%) diikuti usia antara 20-24 tahun sebanyak 80.371 jiwa (8,94%) dan Usia 25-29 tahun sebanyak 74.543 jiwa (8,29%). Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada pada kelompok usia >75 yaitu 9.401 jiwa (1,05%) dan usia 70-74 tahun yaitu 10.117 jiwa (1,13%) dan diikuti kelompok usia 65-69 yaitu 17.733 jiwa (1,97%).

- **Usia Produktif**

Perkembangan kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2024 jumlah usia produktif mengalami peningkatan 31.786 jiwa dari tahun sebelumnya, tahun 2024 usia produktif sebanyak 613.109 jiwa, dapat kita lihat pada data dibawah ini:



**Tabel 1.10**  
**Jumlah Penduduk Usia Produktif Dan Non Produktif**  
**Per Kecamatan Se Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| NO    | KECAMATAN          | USIA MUDA | USIA PRODUKTIF | USIA NON PRODUKTIF |
|-------|--------------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1     | BANGKINANG KOTA    | 10.530    | 27.864         | 2.057              |
| 2     | KAMPAR             | 15.075    | 37.186         | 3.443              |
| 3     | TAMBANG            | 29.855    | 64.891         | 3.057              |
| 4     | XIII KOTO KAMPAR   | 6.700     | 17.432         | 1.418              |
| 5     | KUOK               | 7.182     | 18.982         | 1.681              |
| 6     | SIK HULU           | 27.822    | 70.069         | 3.290              |
| 7     | KAMPAR KIRI        | 10.830    | 25.768         | 1.626              |
| 8     | KAMPAR KIRI HILIR  | 4.199     | 10.506         | 607                |
| 9     | KAMPAR KIRI HULU   | 3.089     | 8.090          | 654                |
| 10    | TAPUNG             | 31.629    | 76.751         | 3.595              |
| 11    | TAPUNG HILIR       | 17.008    | 42.512         | 1.877              |
| 12    | TAPUNG HULU        | 23.873    | 58.598         | 2.390              |
| 13    | SALO               | 7.581     | 19.413         | 1.336              |
| 14    | RUMBIO JAYA        | 5.272     | 13.330         | 1.267              |
| 15    | BANGKINANG         | 9.929     | 25.237         | 1.846              |
| 16    | PERHENTIAN RAJA    | 5.881     | 14.833         | 787                |
| 17    | KAMPA              | 7.010     | 17.613         | 1.359              |
| 18    | KAMPAR UTARA       | 5.384     | 13.446         | 1.391              |
| 19    | KAMPAR KIRI TENGAH | 7.947     | 20.617         | 1.579              |
| 20    | GUNUNG SAHILAN     | 6.314     | 15.400         | 1.001              |
| 21    | KOTO KAMPAR HULU   | 5.503     | 14.571         | 990                |
| TOTAL |                    | 248.613   | 613.109        | 37.251             |

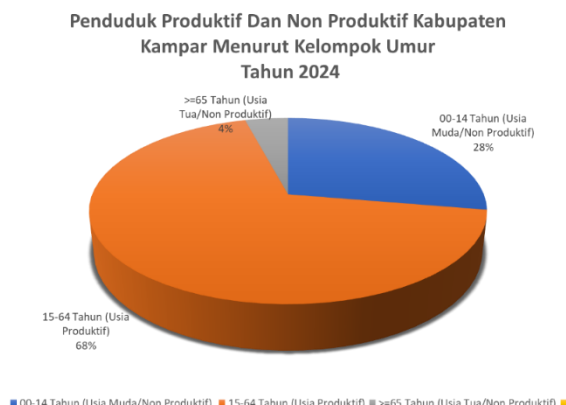
Sumber Data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024  
Disdukcapil Kabupaten Kampar

**Tabel 1.11**  
**Jumlah Penduduk Produktif Dan Non Produktif Kabupaten Kampar**  
**Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024**

| NO. | USIA NON PRODUKTIF DAN PRODUKTIF      | JENIS KELAMIN |           | PENDUDUK | PERSEN |
|-----|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|--------|
|     |                                       | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |          |        |
|     |                                       | n(JIWA)       | n(JIWA)   | n(JIWA)  | (%)    |
| 1   | 00-14 Tahun (Usia Muda/Non Produktif) | 128.879       | 119.734   | 248.613  | 27,66  |
| 2   | 15-64 Tahun (Usia Produktif)          | 311.649       | 301.460   | 613.109  | 68,20  |
| 3   | >=65 Tahun (Usia Tua/Non Produktif)   | 18.644        | 18.607    | 37.251   | 4,14   |
|     |                                       | 459.172       | 439.801   | 898.973  | 100    |

Sumber : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Disdukcapil Kab. Kampar

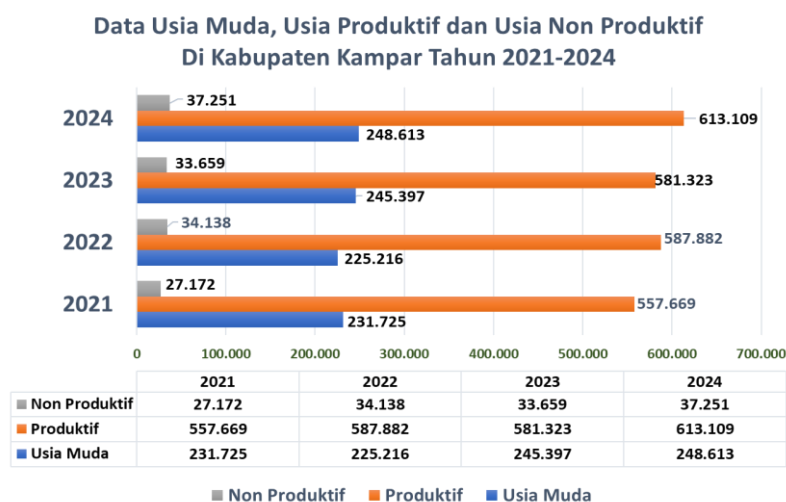
## Grafik 1.2 Jumlah Penduduk Produktif Dan Non Produktif Kabupaten Kampar Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber Data : Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Disdukcapil Kab. Kampar

Dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2024, terbanyak pada Usia Produktif kelompok umur 15 – 64 tahun yaitu sebanyak 613.109 jiwa atau 68,20 persen. Pada kelompok umur 0 – 14 tahun tercatat Jumlah Usia Muda pada Kabupaten Kampar sebanyak 248.613 jiwa (27,66 persen) dan kelompok 65 tahun keatas juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 33.659 jiwa (3,91 persen) menjadi 37.251 jiwa (4,14 persen).

## Grafik 1.3 Perbandingan Jumlah Penduduk Produktif Dan Non Produktif Kabupaten Kampar Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin 4 (Empat) Tahun terakhir



Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

Dari data di atas dapat didapati bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar terbanyak berada pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah.

- Angka Ketergantungan

Disisi lain rasio ketergantungan penduduk (defendency ratio) yang menggambarkan seberapa banyak penduduk usia produktif (15-64 Tahun) harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif yang terdiri dari usia belum produktif (0-14 Tahun) dan uisa tidak produktif lagi yaitu usia >65 Tahun).

Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Angka ketergantungan tahun 2024 di Kabupaten Kampar, dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 12**  
**Aggregat Penduduk Berdasarkan**  
**Rasio Ketergantungan Kecamatan Tahun 2024**

| NO    | KECAMATAN          | USIA_MUDA | USIA_PRODUKTIF | USIA_TUA | RK_MUDA | RK_TUA | RK_TOTAL |
|-------|--------------------|-----------|----------------|----------|---------|--------|----------|
| 1     | BANGKINANG KOTA    | 10.530    | 27.864         | 2.057    | 37,79   | 7,38   | 45,17    |
| 2     | KAMPAR             | 15.075    | 37.186         | 3.443    | 40,54   | 9,26   | 49,80    |
| 3     | TAMBANG            | 29.855    | 64.891         | 3.057    | 46,01   | 4,71   | 50,72    |
| 4     | XIII KOTO KAMPAR   | 6.700     | 17.432         | 1.418    | 38,44   | 8,13   | 46,57    |
| 5     | KUOK               | 7.182     | 18.982         | 1.681    | 37,84   | 8,86   | 46,69    |
| 6     | SIAK HULU          | 27.822    | 70.069         | 3.290    | 39,71   | 4,70   | 44,40    |
| 7     | KAMPAR KIRI        | 10.830    | 25.768         | 1.626    | 42,03   | 6,31   | 48,34    |
| 8     | KAMPAR KIRI HILIR  | 4.199     | 10.506         | 607      | 39,97   | 5,78   | 45,75    |
| 9     | KAMPAR KIRI HULU   | 3.089     | 8.090          | 654      | 38,18   | 8,08   | 46,27    |
| 10    | TAPUNG             | 31.629    | 76.751         | 3.595    | 41,21   | 4,68   | 45,89    |
| 11    | TAPUNG HILIR       | 17.008    | 42.512         | 1.877    | 40,01   | 4,42   | 44,42    |
| 12    | TAPUNG HULU        | 23.873    | 58.598         | 2.390    | 40,74   | 4,08   | 44,82    |
| 13    | SALO               | 7.581     | 19.413         | 1.336    | 39,05   | 6,88   | 45,93    |
| 14    | RUMBIO JAYA        | 5.272     | 13.330         | 1.267    | 39,55   | 9,50   | 49,05    |
| 15    | BANGKINANG         | 9.929     | 25.237         | 1.846    | 39,34   | 7,31   | 46,66    |
| 16    | PERHENTIAN RAJA    | 5.881     | 14.833         | 787      | 39,65   | 5,31   | 44,95    |
| 17    | KAMPA              | 7.010     | 17.613         | 1.359    | 39,80   | 7,72   | 47,52    |
| 18    | KAMPAR UTARA       | 5.384     | 13.446         | 1.391    | 40,04   | 10,35  | 50,39    |
| 19    | KAMPAR KIRI TENGAH | 7.947     | 20.617         | 1.579    | 38,55   | 7,66   | 46,20    |
| 20    | GUNUNG SAHILAN     | 6.314     | 15.400         | 1.001    | 41,00   | 6,50   | 47,50    |
| 21    | KOTO KAMPAR HULU   | 5.503     | 14.571         | 990      | 37,77   | 6,79   | 44,56    |
| TOTAL |                    | 248.613   | 613.109        | 37.251   | 40,55   | 6,08   | 46,63    |

Sumber Data : Konsolidasi Bersih (DKB) Semester II Tahun 2024 Disdukcapil Kab. Kampar

Angka Ketergantungan adalah persentase jumlah penduduk non produktif atas penduduk produktif. Rumusannya yaitu jumlah penduduk non-produktif dibagi penduduk yang produktif dikalikan 100%. Artinya dari 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 46,63 orang penduduk usia non-produktif.

**d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**

Kabupaten Kampar terdiri dari 21 Kecamatan dan memiliki 8 Kelurahan dan 242 desa. Jumlah desa/kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1.13**  
**Daftar Kecamatan, Kelurahan/Desa di Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No     | Kecamatan          | Ibukota        | Jumlah    |      |
|--------|--------------------|----------------|-----------|------|
|        |                    |                | Kelurahan | Desa |
| 1      | Kampar Kiri        | Lipat Kain     | 1         | 19   |
| 2      | Kampar Kiri Hulu   | Gema           | -         | 24   |
| 3      | Kampar Kiri Hilir  | Sungai Pagar   | 1         | 7    |
| 4      | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | -         | 11   |
| 5      | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | -         | 9    |
| 6      | XIII Koto Kampar   | Batu Bersurat  | 1         | 12   |
| 7      | Koto Kampar Hulu   | Tanjung        | -         | 6    |
| 8      | Kuok               | Kuok           | -         | 9    |
| 9      | Salo               | Salo           | -         | 6    |
| 10     | Tapung             | Patapahan      | -         | 25   |
| 11     | Tapung Hulu        | Senama Nenek   | -         | 14   |
| 12     | Tapung Hilir       | Kota Garo      | -         | 16   |
| 13     | Bangkinang Kota    | Bangkinang     | 2         | 2    |
| 14     | Bangkinang         | Muara Uwai     | 2         | 7    |
| 15     | Kampar             | Air Tiris      | 1         | 17   |
| 16     | Kampar Timur       | Kampar         | -         | 9    |
| 17     | Rumbio Jaya        | Teratak        | -         | 7    |
| 18     | Kampar Utara       | Sawah          | -         | 8    |
| 19     | Tambang            | Sungai Pinang  | -         | 17   |
| 20     | Siak Hulu          | Pangkalan Baru | -         | 12   |
| 21     | Perhentian Raja    | Pantai Raja    | -         | 5    |
| Jumlah |                    |                | 8         | 242  |

Sumber data : Kabupaten Kampar Dalam Angka Tahun 2025

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Tapung yaitu sebanyak 25 desa atau 10% dari desa yang terdapat di Kabupaten Kampar. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Bangkinang Kota

yaitu sebanyak 4 desa atau 1,60% dari desa yang terdapat di Kabupaten Kampar.

**e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.**

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat daerah Kabupaten Kampar, terdiri atas :

| No | Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah                           | Dasar Hukum        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                           | 3                  |
| 1  | Sekretariat Daerah                                                          | Perda 6 Tahun 2020 |
| 2  | Sekretariat DPRD                                                            | Perda 6 Tahun 2020 |
| 3  | Inspektorat                                                                 | Perda 6 Tahun 2020 |
|    | Dinas Daerah :                                                              |                    |
| 4  | Dinas Pendidikan, Kepemudaan & Olahraga                                     | Perda 6 Tahun 2020 |
| 5  | Dinas Kesehatan                                                             | Perda 6 Tahun 2020 |
| 6  | Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang                                       | Perda 6 Tahun 2020 |
| 7  | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman                                | Perda 6 Tahun 2020 |
| 8  | Dinas Sosial                                                                | Perda 6 Tahun 2020 |
| 9  | Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak | Perda 6 Tahun 2020 |
| 10 | Dinas Ketahanan Pangan                                                      | Perda 6 Tahun 2020 |
| 11 | Dinas Lingkungan Hidup                                                      | Perda 6 Tahun 2020 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa                                      | Perda 6 Tahun 2020 |
| 13 | Dinas Perhubungan                                                           | Perda 6 Tahun 2020 |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informasi Dan Persandian                                  | Perda 6 Tahun 2020 |
| 15 | Dinas Perdagangan , Koperasi Dan Usaha Mikro                                | Perda 6 Tahun 2020 |
| 16 | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu                              | Perda 6 Tahun 2020 |
| 17 | Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan                                             | Perda 6 Tahun 2020 |
| 18 | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                                            | Perda 6 Tahun 2020 |
| 19 | Dinas Perikanan                                                             | Perda 6 Tahun 2020 |
| 20 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Holtikultura                            | Perda 6 Tahun 2020 |
| 21 | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan                            | Perda 6 Tahun 2020 |
| 22 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                                        | Perda 6 Tahun 2020 |
| 23 | Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil                                       | Perda 6 Tahun 2020 |
| 24 | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan                                    | Perda 6 Tahun 2020 |
| 25 | Satuan Polisi Pamong Praja                                                  | Perda 6 Tahun 2020 |

| No | Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah | Dasar Hukum                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                 | 3                                                                                               |
|    | Badan Daerah terdiri dari :                       |                                                                                                 |
| 26 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah              | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 27 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah        | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 28 | Badan Pendapatan Daerah                           | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 29 | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM            | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah               | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                 | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
|    | Kecamatan Kabupaten Kampar terdiri atas:          |                                                                                                 |
| 32 | Kecamatan Bangkinang Kota                         | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 33 | Kecamatan Kampar                                  | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 34 | Kecamatan Tambang                                 | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 35 | Kecamatan XIII Koto Kampar                        | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 36 | Kecamatan Kuok                                    | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 37 | Kecamatan Siak Hulu                               | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 38 | Kecamatan Kampar Kiri                             | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 39 | Kecamatan Kampar Kiri Hilir                       | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 40 | Kecamatan Kampar Kiri Hulu                        | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 41 | Kecamatan Tapung                                  | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 42 | Kecamatan Tapung Hilir                            | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 43 | Kecamatan Tapung Hulu                             | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 44 | Kecamatan Salo                                    | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 45 | Kecamatan Rumbio Jaya                             | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 46 | Kecamatan Bangkinang                              | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 47 | Kecamatan Perhentian Raja                         | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 48 | Kecamatan Kampa                                   | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 49 | Kecamatan Kampar Utara                            | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 50 | Kecamatan Kampar Kiri Tengah                      | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 51 | Kecamatan Gunung Sahilan                          | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
| 52 | Kecamatan Koto Kampar Hulu                        | Perda 6 Tahun 2020                                                                              |
|    | Rumah Sakit Umum                                  |                                                                                                 |
| 53 | RSUD Bangkinang Kabupaten Kampar                  | Peraturan Bupati Kampar Nomor 37 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah RSUD Bangkinang |

- f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.

Jumlah data pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum Kabupaten Kampar berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Kampar per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

| Jabatan<br>Occupation                                                        | Aparatur Sipil Negara<br>State Civil Apparatus |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                                              | Laki-laki<br>Male                              | Perempuan<br>Female | Jumlah<br>Total |
| (1)                                                                          | (8)                                            | (9)                 | (10)            |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Utama<br>Senior Executives                           | -                                              | -                   | -               |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Madya<br>Middle Executives                           | -                                              | -                   | -               |
| Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama<br>Junior Executives                         | 28                                             | 2                   | 30              |
| Administrator/Administrator                                                  | 132                                            | 35                  | 167             |
| Pengawas/Supervisor                                                          | 140                                            | 73                  | 213             |
| Eselon V/5 <sup>th</sup> Echelon                                             | -                                              | -                   | -               |
| Jabatan Fungsional Dosen<br>Certain Functional Position for Lecturer         | -                                              | -                   | -               |
| Jabatan Fungsional Guru<br>Certain Functional Position for Teacher           | 1.721                                          | 5.380               | 7.101           |
| Jabatan Fungsional Medis<br>Certain Functional Position for Medical Field    | 333                                            | 1.106               | 1.439           |
| Jabatan Fungsional Teknis<br>Certain Functional Position for Technical Field | 360                                            | 228                 | 588             |
| Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana<br>General Functional Position             | 726                                            | 425                 | 1.151           |
| <b>Jumlah/Total</b>                                                          | <b>3.440</b>                                   | <b>7.249</b>        | <b>10.689</b>   |

**g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah).**

Laporan realisasi anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar Tahun 2024, capaian penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dari target pendapatan

daerah sebesar Rp. 3.174.719.555.451,00 terealisasi sebesar Rp. 3.008.917.736.831,00 atau 94,78%, dan anggaran belanja daerah sebesar Rp. 3.312.217.677.835,00 terealisasi sebesar Rp. 3.075.185.723.117,71 atau 92,84%.

Penjelasan pos-pos laporan realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2024 per tanggal 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- **Realisasi Pendapatan Daerah**

Pada tahun 2024 realisasi pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebesar Rp. 3.008.917.736.831,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yaitu Rp. 2.734.805.625.683,08 maka terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp. 274.112.111.147,92 (10,02 %).

Untuk Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dari target anggaran sebesar Rp. 462.827.600.519,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 437.120.839.441,00 (94,45%). Jika diperbandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 298.626.546.420,08 realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 138.494.293.020,92 (46,38%). Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar 14,58%.

Untuk Pendapatan Transfer Tahun 2024 terealisasi sebesar 94,83%, dari target anggaran sebesar Rp. 2.709.653.954.932,00 terealisasi Rp. 2.569.554.788.349,00. Jika diperbandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2.434.058.392.989,00 realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 135.496.395.360,00 (5,57%). Persentase kontribusi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah sebesar 85,35 %.

Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp. 2.242.109.041,00 Jika diperbandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2023 yaitu sebesar Rp.



2.120.686.274,00 realisasi Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 121.422.767,00 (5,73%). Persentase kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 0,07 %. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.14**  
**Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| Kode Rek    | Uraian                                            | Anggaran                    | Realisasi                   | %            | Realisasi 2023              |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>4.</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>3.174.719.555.451,00</b> | <b>3.008.917.736.831,00</b> | <b>94,78</b> | <b>2.734.805.625.683,08</b> |
| <b>4.1.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | 462.827.600.519,00          | 437.120.839.441,00          | 94,45        | 298.626.546.420,08          |
| 4.1.01.     | Pajak Daerah                                      | 171.385.188.647,00          | 155.125.662.992,00          | 90,51        | 153.800.441.758,00          |
| 4.1.02.     | Retribusi Daerah                                  | 11.251.637.000,00           | 9.779.786.000,00            | 86,92        | 12.315.324.270,00           |
| 4.1.03.     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 170.307.027.807,00          | 170.157.029.091,00          | 99,91        | 36.299.309.804,00           |
| 4.1.04.     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 109.883.747.065,00          | 102.058.361.358,00          | 92,88        | 96.211.470.588,08           |
| <b>4.2.</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | 2.709.653.954.932,00        | 2.569.554.788.349,00        | 94,83        | 2.434.058.392.989,00        |
| 4.2.01.     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 2.475.823.201.000,00        | 2.426.554.852.432,00        | 98,01        | 2.133.499.528.840,00        |
| 4.2.02.     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 233.830.753.932,00          | 142.999.935.917,00          | 61,16        | 300.558.864.149,00          |
| <b>4.3.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | 2.238.000.000,00            | 2.242.109.041,00            | 100,18       | 2.120.686.274,00            |
| 4.3.01.     | Pendapatan Hibah                                  | 2.238.000.000,00            | 2.242.109.041,00            | 100,18       | 2.120.686.274,00            |

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

#### • Realisasai Belanja Daerah

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

Adapun anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 digambarkan melalui tabel di bawah ini :

**Tabel 1.15**  
**Anggaran Dan Realisasi Belanja Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| Kode Rek    | URAIAN                 | ANGGARAN                    | REALISASI                   | %            | REALISASI 2023              |
|-------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>5.</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>  | <b>3.312.217.677.835,00</b> | <b>3.075.185.723.117,71</b> | <b>92,84</b> | <b>2.619.084.986.875,00</b> |
| <b>5.1.</b> | <b>BELANJA OPERASI</b> | <b>2.380.877.607.216,22</b> | <b>2.217.901.996.355,71</b> | <b>93,15</b> | <b>1.900.788.191.664,50</b> |
| 5.1.01      | Belanja Pegawai        | 1.222.827.236.111,73        | 1.179.156.395.317,68        | 96,43        | 936.576.698.454,00          |

|             |                                            |                           |                           |              |                           |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| 5.1.02      | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.013.545.084.429,49      | 898.449.950.027,00        | 88,64        | 849.561.732.279,45        |
| 5.1.04      | Belanja Subsidi                            | 0                         | 0                         | 0            | 122.000.000,00            |
| 5.1.05      | Belanja Hibah                              | 128.264.705.317,00        | 126.804.443.761,03        | 98,86        | 102.176.510.903,05        |
| 5.1.06      | Belanja Bantuan Sosial                     | 16.240.581.358,00         | 13.491.207.250,00         | 83,07        | 12.351.250.028,00         |
| <b>5.2.</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>502.498.445.596,78</b> | <b>430.427.399.857,00</b> | <b>85,66</b> | <b>324.522.994.637,50</b> |
| 5.2.01      | Belanja Modal Tanah                        | 290.000.000,00            | 0                         | 0            | 1.117.743.930,00          |
| 5.2.02      | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 115.101.080.292,00        | 100.176.009.636,00        | 87,03        | 54.246.432.888,50         |
| 5.2.03      | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 125.490.683.598,00        | 105.190.158.943,00        | 83,82        | 55.491.835.674,00         |
| 5.2.04      | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 248.514.115.306,78        | 212.269.367.655,00        | 85,42        | 200.185.637.334,00        |
| 5.2.05      | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 12.295.566.400,00         | 12.241.947.582,00         | 99,56        | 13.242.462.641,00         |
| 5.2.06      | Belanja Modal Aset Lainnya                 | 807.000.000,00            | 549.916.041,00            | 68,14        | 238.882.170,00            |
| <b>5.3.</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>1.486.084.358,00</b>   | <b>122.578.409,00</b>     | <b>8,25</b>  | <b>66.645.582,00</b>      |
| 5.3.01      | Belanja Tidak Terduga                      | 1.486.084.358,00          | 122.578.409,00            | 8,25         | 66.645.582,00             |
| <b>5.4.</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>427.355.540.664,00</b> | <b>426.733.748.496,00</b> | <b>99,85</b> | <b>393.707.154.991,00</b> |
| 5.4.01      | Belanja Bagi Hasil                         | 18.263.682.565,00         | 17.824.295.997,00         | 97,59        | 16.808.319.340,00         |
| 5.4.02      | Belanja Bantuan Keuangan                   | 409.091.858.099,00        | 408.909.452.499,00        | 99,96        | 376.898.835.651,00        |

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran 2024 sebesar 92,84 % yaitu Rp. 3.075.185.723.117,71 dari Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.312.217.677.835,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar tahun 2023 yaitu Rp. 2.619.084.986.875,00, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 456.100.736.242,71 (17,41%).

Belanja Operasi pada tahun 2024 terealisasi 93,15%, dari anggaran sebesar Rp.2.380.877.607.216,22 terealisasi sebesar Rp. 2.217.901.996.355,71. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 yaitu Rp. 1.900.788.191.664,50, realisasi belanja di Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 317.113.804.691,21 (16,68%).

Belanja Modal pada tahun 2024 terealisasi 85,65%, dari anggaran sebesar Rp.502.498.445.596,78, terealisasi sebesar Rp. 430.427.399.857,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal tahun 2023 yaitu Rp. 324.522.994.637,50 realisasi belanja di Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 105.904.405.219,50 (32,63%).

Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 terealisasi 8,25%, dari anggaran sebesar Rp. 1.486.084.358,00 terealisasi sebesar Rp. 122.578.409,00. Belanja Tidak terduga digunakan untuk mengintervensi kegiatan yang sifatnya insidental yang memerlukan penanganan secara khusus dan mendesak.

Belanja Transfer pada tahun 2024 terealisasi 99,85%, dari anggaran sebesar Rp. 427.355.540.664,00 terealisasi sebesar Rp. 426.733.748.496,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer tahun 2023 yaitu Rp. 393.707.154.991,00 realisasi belanja Transfer di Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.026.593.505,00 (8,39%).

**h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.**

Pelaksanaan Program di Kabupaten Kampar pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.16**  
**Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Tahun 2024**

**• Urusan Pemerintahan**

| NO | Urusan Pemerintahan Daerah                          | Nama Program | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja    | %     |
|----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------|-------|
| 1  | 2                                                   | 3            | 4                        | 5                    | 6     |
| A  | URUSAN PEMERINTAHAN                                 |              |                          |                      |       |
| I  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR |              |                          |                      |       |
| 1  | URUSAN PENDIDIKAN                                   |              | 1.057.454.598.690,73     | 1.016.376.582.916,00 | 96,12 |



|   |                                          |                                                                             |                      |                      |       |
|---|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
|   | Dinas Pendidikan                         |                                                                             | 1.045.656.744.578,73 | 1.005.094.329.450,00 | 96,12 |
|   |                                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 719.750.985.253,73   | 701.816.511.819,00   | 97,51 |
|   |                                          | Program Pengelolaan Pendidikan                                              | 325.075.263.525,00   | 302.794.856.731,00   | 93,15 |
|   |                                          | Program Pengembangan Kurikulum                                              | 716.316.800,00       | 377.204.100,00       | 52,66 |
|   |                                          | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | 150.999.000,00       | -                    | -     |
| 2 | URUSAN KESEHATAN                         |                                                                             |                      |                      |       |
|   | Dinas Kesehatan                          |                                                                             | 345.104.889.178,00   | 324.212.224.505,89   | 90,78 |
|   |                                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 204.066.032.784,00   | 194.713.318.686,00   | 95,42 |
|   |                                          | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 27.614.186.010,00    | 25.859.980.024,00    | 93,65 |
|   |                                          | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 100.955.836.984,00   | 91.648.453.205,89    | 90,78 |
|   |                                          | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 10.626.251.400,00    | 10.440.170.200,00    | 98,25 |
|   |                                          | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuma                  | 504.337.800,00       | 338.735.600,00       | 67,16 |
|   |                                          | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 1.338.244.200,00     | 1.211.566.790,00     | 90,53 |
|   | RSUD                                     |                                                                             | 184.637.384.786,00   | 169.432.705.484,00   | 91,77 |
|   |                                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 141.587.371.202,00   | 129.287.403.805,00   | 91,31 |
|   |                                          | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 29.775.631.584,00    | 27.639.176.999,00    | 92,82 |
|   |                                          | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 13.024.382.000,00    | 12.506.124.680,00    | 96,02 |
|   |                                          | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 250.000.000,00       | 230.000.000,00       | 92,00 |
| 3 | URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |                                                                             |                      |                      |       |
|   |                                          | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                 | 31.471.912.769       | 17.078.822.945       | 54,27 |
|   |                                          | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                   | 3.349.363.900        | 622.912.706          | 18,60 |
|   |                                          | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            | 7.130.964.535        | 3.373.357.696        | 47,31 |



|          |                                                                         |                                                                                                                             |                          |                          |              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|          |                                                                         | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                      | 6.202.336.979            | 5.205.753.536            | 83,93        |
|          |                                                                         | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                        | 9.718.403.502            | 3.906.158.500            | 40,19        |
|          |                                                                         | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                                            | 66.401.814.673           | 13.781.355.455           | 20,75        |
|          |                                                                         | Program Penyelenggara Jalan                                                                                                 | 198.489.835.584          | 19.731.364.222           | 9,94         |
|          |                                                                         | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                      | 1.131.462.850            | 437.698.200              | 38,68        |
|          |                                                                         | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                        | 72.681.800               | 51.205.230               | 70,45        |
| <b>4</b> | <b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>                                          |                                                                                                                             | <b>76.417.660.368,28</b> | <b>71.593.490.023</b>    | <b>93,69</b> |
|          | <b>Perkim</b>                                                           |                                                                                                                             | <b>76.417.660.368,28</b> | <b>71.593.490.023</b>    | <b>93,69</b> |
|          |                                                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 6.586.465.834            | 6.399.733.140            | 97,16        |
|          |                                                                         | Program Pengembangan Perumahan                                                                                              | 925.323.900              | 841.626.510              | 90,95        |
|          |                                                                         | Program Kawasan Permukiman                                                                                                  | 650.000.000              | 572.937.697              | 88,14        |
|          |                                                                         | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                              | 22.065.772.350           | 22.020.430.660           | 99,79        |
|          |                                                                         | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)                                                               | 46.040.303.034,28        | 41.615.818.096           | 90,39        |
|          |                                                                         | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman | 149.795.250              | 142.943.920              | 95,43        |
| <b>5</b> | <b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |                                                                                                                             |                          |                          |              |
|          | <b>Satpol PP</b>                                                        |                                                                                                                             | <b>26.342.397.759</b>    | <b>25.588.114.413</b>    | <b>97,14</b> |
|          |                                                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 22.753.948.859           | 22.305.737.129           | 98,03        |
|          |                                                                         | Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum                                                                        | 3.588.448.900            | 3.282.377.284            | 91,47        |
|          | <b>Damkar</b>                                                           |                                                                                                                             | <b>17.616.609.107,00</b> | <b>16.605.859.130,00</b> | <b>84,80</b> |
|          |                                                                         | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | 16.022.232.857,00        | 15.438.122.862,00        | 96,35        |
|          |                                                                         | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran                                   | 1.594.376.250,00         | 1.167.736.268,00         | 73,24        |
|          | <b>BPBD</b>                                                             |                                                                                                                             | <b>10.699.998.004,00</b> | <b>8.835.957.472,00</b>  | <b>82,58</b> |



|    |                                                                                |                                                           |                         |                         |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|    |                                                                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota     | 9.536.271.134,00        | 7.989.002.922,00        | 83,77        |
|    |                                                                                | Program Penanggulangan Bencana                            | 1.163.726.870,00        | 846.954.550,00          | 72,78        |
| 6  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>                                       |                                                           | <b>16.886.305.413</b>   | <b>13.180.256.186</b>   | <b>78,05</b> |
|    | <b>DINAS SOSIAL</b>                                                            |                                                           | <b>16.886.305.413</b>   | <b>13.180.256.186</b>   | <b>78,05</b> |
|    |                                                                                | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota      | 7.091.376.695           | 6.721.571.327           | 94,79        |
|    |                                                                                | Program Pemberdayaan Sosial                               | 3.763.327.100           | 3.408.697.378           | 91,42        |
|    |                                                                                | Program Rehabilitasi Sosial                               | 964.879.236             | 873.243.696             | 90,50        |
|    |                                                                                | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                   | 4.045.845.226           | 1.217.526.460           | 67,67        |
|    |                                                                                | Program Penanganan Bencana                                | 695.455.556             | 663.283.022             | 95,37        |
|    |                                                                                | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                  | 325.421.600             | 295.934.303             | 90,94        |
| II | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>               |                                                           |                         |                         |              |
| 1  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                 |                                                           |                         |                         |              |
|    | <b>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</b>                                    |                                                           | <b>3.352.257.350,00</b> | <b>3.085.779.255,00</b> | <b>92,05</b> |
|    |                                                                                | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja    | 2.785.558.000,00        | 2.688.340.105,00        | 96,51        |
|    |                                                                                | Program Penempatan Tenaga Kerja                           | 566.699.350,00          | 397.439.150,00          | 70,13        |
| 2. | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |                                                           | <b>6.099.399.000</b>    | <b>5.826.310.407</b>    | <b>95,52</b> |
|    | <b>Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA</b>                              |                                                           | <b>6.099.399.000</b>    | <b>5.826.310.407</b>    | <b>95,52</b> |
|    |                                                                                | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 4.234.891.500           | 3.995.977.183,00        | 94,36        |
|    |                                                                                | Program Perlindungan Perempuan                            | 446.017.200             | 443.970.650,00          | 99,54        |
|    |                                                                                | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | 190.000.000             | 187.865.640,00          | 98,88        |
|    |                                                                                | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak           | 153.292.700             | 143.259.120,00          | 93,45        |
|    |                                                                                | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                          | 462.750.200             | 456.612.460,00          | 98,67        |
|    |                                                                                | Program Perlindungan Khusus Anak                          | 612.447.400             | 598.625.354,00          | 97,74        |
| 3  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                       |                                                           |                         |                         |              |
|    | <b>Dinas Ketahanan Pangan</b>                                                  |                                                           |                         |                         |              |



|          |                                                    |                                                                                                                         |                       |                       |              |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          |                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                             | 6.396.385.821,00      | 5.827.967.820,00      | 91,11        |
|          |                                                    | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan                                         | 424.319.350,00        | 408.413.820,00        | 96,25        |
|          |                                                    | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                                       | 1.978.051.100,00      | 1.107.871.215,00      | 56,01        |
|          |                                                    | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                                     | 119.972.300,00        | 117.573.480,00        | 98,00        |
|          |                                                    | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                                      | 132.540.400,00        | 132.535.900,00        | 100,00       |
| <b>4</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>       |                                                                                                                         |                       |                       |              |
|          | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                |                                                                                                                         |                       |                       |              |
|          |                                                    | Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                                                        | 327.938.500           | 0                     | -            |
|          |                                                    | Pengelolaan Tanah Kosong                                                                                                | 168.372.000           | 19.350.000            | 11,49        |
|          |                                                    | Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                                                                          | 75.120.350            | 0                     | -            |
| <b>5</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b> |                                                                                                                         | <b>29.062.029.921</b> | <b>28.119.995.904</b> | <b>96,76</b> |
|          | <b>Dinas Lingkungan Hidup</b>                      |                                                                                                                         | <b>29.062.029.921</b> | <b>28.119.995.904</b> | <b>96,76</b> |
|          |                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota                                                            | 19.812.530.571        | 19.082.272.368        | 96,31        |
|          |                                                    | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | 304.687.500           | 303.548.300           | 99,63        |
|          |                                                    | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | 2.239.915.550         | 2.188.735.836         | 97,72        |
|          |                                                    | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)                                                                      | 2.657.188.900         | 2.653.328.700         | 99,85        |
|          |                                                    | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 157.194.900           | 157.058.600,00        | 99,91        |
|          |                                                    | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH           | 499.388.000           | 499.305.000           | 99,98        |
|          |                                                    | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                   | 52.001.400            | 52.001.400            | 100,00       |
|          |                                                    | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | 71.267.300            | 71.187.300            | 99,89        |



|   |                                                                                  |                                                                                     |                          |                          |              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|   |                                                                                  | Program Pengelolaan Persampahan                                                     | 3.267.855.800            | 3.112.558.400            | 95,25        |
| 6 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> |                                                                                     | <b>13.453.932.066,00</b> | <b>12.794.219.614,00</b> | <b>95,10</b> |
|   | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil                                             |                                                                                     | <b>13.453.932.066,00</b> | <b>12.794.219.614,00</b> | <b>95,10</b> |
|   |                                                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 13.349.702.066,00        | 12.691.039.614,00        | 95,07        |
|   |                                                                                  | Program Pendaftaran Penduduk                                                        | 75.000.000,00            | 74.850.000,00            | 99,80        |
|   |                                                                                  | Program Pencatatan Sipil                                                            | 29.230.000,00            | 28.330.000,00            | 96,92        |
| 7 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>               |                                                                                     |                          |                          |              |
|   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                           |                                                                                     |                          |                          |              |
|   |                                                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 6.170.873.417            | 5.773.937.668            | 93,57        |
|   |                                                                                  | Program Penataan Desa                                                               | 328.629.100              | 319.441.292              | 97,20        |
|   |                                                                                  | Program Peningkatan Kerja Sama Desa                                                 | 85.883.700               | 55.842.996               | 65,02        |
|   |                                                                                  | Program Administrasi Pemerintahan                                                   | 4.612.338.500            | 4.523.287.921            | 98,07        |
|   |                                                                                  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 645.135.200              | 602.779.529              | 93,43        |
| 8 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>   |                                                                                     | <b>9.962.700.100</b>     | <b>9.455.124.414</b>     | <b>94,35</b> |
|   | <b>Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA</b>                                |                                                                                     | <b>9.962.700.100</b>     | <b>9.455.124.414</b>     | <b>94,35</b> |
|   |                                                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                         | 9.186.205.660            | 8.612.528.720,00         | 93,76        |
|   |                                                                                  | Program Pengendalian Penduduk                                                       | 85.712.200               | 82.168.700,00            | 95,87        |
|   |                                                                                  | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                           | 5.147.791.600            | 4.919.398.684,00         | 95,56        |
|   |                                                                                  | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                        | 4.729.196.300            | 4.453.557.030,00         | 94,17        |
| 9 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                    |                                                                                     |                          |                          |              |
|   | Dinas Perhubungan                                                                |                                                                                     |                          |                          |              |
|   |                                                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                           | 13.307.395.816           | 13.043.455.535           | 98,02        |
|   |                                                                                  | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                       | 26.640.173.780           | 23.016.966.398           | 86,40        |





|    |                                                                       |                                                               |                          |                          |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|    |                                                                       | Program Pengelolaan Pelayaran                                 | 1.746.050.000            | 1.250.805.219            | 71,64         |
| 10 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>          |                                                               | <b>21.874.384.764</b>    | <b>21.153.256.143</b>    | <b>96,70</b>  |
|    | <b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>                   |                                                               | <b>21.874.384.764</b>    | <b>21.153.256.143</b>    | <b>96,70</b>  |
|    |                                                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 8.185.570.920,00         | 7.578.452.219,00         | 92,58         |
|    |                                                                       | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik           | 12.027.611.000           | 11.941.889.531           | 99,29         |
|    |                                                                       | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika                      | 1.661.202.844            | 1.632.914.393            | 98,30         |
| 11 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b> |                                                               | <b>8.441.717.874,00</b>  | <b>8.025.924.040,00</b>  | <b>95,07</b>  |
|    | <b>Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK</b>                            |                                                               | <b>8.441.717.874,00</b>  | <b>8.025.924.040,00</b>  | <b>95,07</b>  |
|    |                                                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 8.208.828.074,00         | 7.796.761.240,00         | 94,98         |
|    |                                                                       | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                   | 160.311.500,00           | 159.431.500,00           | 99,45         |
|    |                                                                       | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                  | 72.578.300,00            | 69.731.300,00            | 96,08         |
| 12 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                     |                                                               | <b>17.099.567.191,00</b> | <b>15.571.729.888,00</b> | <b>91,07</b>  |
|    | <b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu</b>                    |                                                               | <b>17.099.567.191,00</b> | <b>15.571.729.888,00</b> | <b>91,07</b>  |
|    |                                                                       | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 14.833.235.391,00        | 13.665.692.224,00        | 92,13         |
|    |                                                                       | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | 335.996.600,00           | 265.761.090,00           | 79,10         |
|    |                                                                       | Program Promosi Penanaman Modal                               | 41.820.600,00            | 35.428.000,00            | 84,71         |
|    |                                                                       | Program Pelayanan Penanaman Modal                             | 775.980.100,00           | 640.248.290,00           | 82,51         |
|    |                                                                       | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | 614.215.000,00           | 483.190.800,00           | 78,67         |
|    |                                                                       | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 498.319.500,00           | 481.409.484,00           | 96,61         |
| 13 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>             |                                                               | <b>11.810.783.812,00</b> | <b>11.810.783.812,00</b> | <b>100,00</b> |
|    | <b>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</b>                          |                                                               | <b>11.810.783.812,00</b> | <b>11.810.783.812,00</b> | <b>100,00</b> |
|    |                                                                       | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan          | 600.000.000,00           | 645.994.250,00           | 107,67        |



|     |                                                          |                                                               |                          |                          |              |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|     |                                                          | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan        | 335.000.000,00           | 331.627.500,00           | 98,99        |
|     |                                                          | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                    | 335.000.000,00           | 331.627.500,00           | 98,99        |
| 14  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>              |                                                               | <b>58.740.000</b>        | <b>53.895.000,00</b>     | <b>91,75</b> |
|     | <b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>      |                                                               | <b>58.740.000</b>        | <b>53.895.000,00</b>     | <b>91,75</b> |
|     |                                                          | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                    | 58.740.000               | 53.895.000,00            | 91,75        |
| 15  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>             |                                                               | <b>23.604.800</b>        | <b>19.814.800</b>        | <b>83,94</b> |
|     | <b>Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian</b>      |                                                               | <b>23.604.800</b>        | <b>19.814.800</b>        | <b>83,94</b> |
|     |                                                          | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 23.604.800               | 19.814.800               | 83,94        |
| 16  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>             |                                                               |                          |                          |              |
|     | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                          |                                                               |                          |                          |              |
|     |                                                          | Program Pengembangan Kebudayaan                               | 280.088.100,00           | 166.764.000,00           | 59,54        |
|     |                                                          | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                     | 1.068.894.800,00         | 1.017.214.700,00         | 95,17        |
|     |                                                          | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya              | 100.000.000,00           | 68.892.400,00            | 68,89        |
| 17  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>           |                                                               |                          |                          |              |
|     | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan                         |                                                               |                          |                          |              |
|     |                                                          | Program Penunjang Urusan Pemerinatahan Daerah Kabupaten/ Kota | 11.456.454.401,00        | 10.759.096.867,00        | 93,91        |
|     |                                                          | Program Pembinaan Perpustakaan                                | 1.126.697.400,00         | 1.084.195.966,00         | 96,23        |
|     |                                                          | Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno          | 94.466.700,00            | 89.166.228,00            | 94,39        |
|     |                                                          |                                                               |                          |                          |              |
| 18  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>              |                                                               |                          |                          |              |
|     | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                         |                                                               |                          |                          |              |
|     |                                                          | Program Pengelolaan Arsip                                     | 210.519.350,00           | 203.917.190,00           | 96,86        |
|     |                                                          | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                   | 192.603.400,00           | 187.875.520,00           | 97,55        |
| III | <b>URUSAN PILIHAN</b>                                    |                                                               |                          |                          |              |
| 1   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |                                                               | <b>24.566.574.891,00</b> | <b>22.958.424.650,00</b> | <b>93,45</b> |
|     | Dinas Perikanan                                          |                                                               | <b>24.566.574.891,00</b> | <b>22.958.424.650,00</b> | <b>93,45</b> |



|          |                                                  |                                                                                 |                   |                   |        |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|          |                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                     | 11.206.464.991,00 | 10.151.201.420,00 | 90,58  |
|          |                                                  | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                           | 4.352.217.800,00  | 4.241.016.680,00  | 97,44  |
|          |                                                  | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                          | 8.041.632.600,00  | 7.779.665.336,00  | 96,74  |
|          |                                                  | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan                           | 481.240.000,00    | 423.632.100,00    | 88,03  |
|          |                                                  | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                | 485.019.500,00    | 362.909.114,00    | 74,82  |
| <b>2</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>     |                                                                                 |                   |                   |        |
|          | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                  |                                                                                 |                   |                   |        |
|          |                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                     | 6.931.328.484,00  | 6.509.063.334,00  | 93,91  |
|          |                                                  | Program Peningkatan Dayatarik Destinasi Pariwisata                              | 3.481.429.800,00  | 3.288.490.654,00  | 94,46  |
|          |                                                  | Program Pemasaran Pariwisata                                                    | .561.862.400,00   | 1.543.149.109,00  | 98,80  |
|          |                                                  | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                 | 1.473.092.300,00  | 1.466.318.601,00  | 99,54  |
| <b>3</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>      |                                                                                 |                   |                   |        |
|          | Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura    |                                                                                 |                   |                   |        |
|          |                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                     | 6.396.385.821,00  | 5.827.967.820,00  | 93,668 |
|          |                                                  | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan | 424.319.350,00    | 408.413.820,00    | 100    |
|          |                                                  | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat               | 1.978.051.100,00  | 1.107.871.215,00  | 97,66  |
|          |                                                  | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                             | 119.972.300,00    | 117.573.480,00    | 100    |
|          |                                                  | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                              | 132.540.400,00    | 132.535.900,00    | 100    |
|          | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan |                                                                                 |                   |                   |        |
|          |                                                  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                     | 10.634.145.726    | 8.843.233.161     |        |
|          |                                                  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                            | 2.028.654.139     | 1.894.422.534     |        |
|          |                                                  | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                         | 4.085.211.966     | 4.019.698.067,03  |        |
|          |                                                  | Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan                              | 614.141.290       | 413.630.500       |        |



|          |                                                 |                                                                         |                         |                         |              |
|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|          |                                                 | Masyarakat Veteriner                                                    |                         |                         |              |
|          |                                                 | Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | 186.846.484             | 172.259.900             |              |
|          |                                                 | Program Perizinan Usaha Pertanian                                       | 1.309.853.225           | 336.873.560             |              |
|          |                                                 | Program Penyuluhan Pertanian                                            | 4.260.743.095           | 2.963.566.600           |              |
| <b>4</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>   |                                                                         | <b>3.316.838.707,00</b> | <b>3.169.215.711,00</b> | <b>95,55</b> |
|          | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK             |                                                                         | <b>3.316.838.707,00</b> | <b>3.169.215.711,00</b> | <b>95,55</b> |
|          |                                                 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) | 1.697.739.075,00        | 1.622.173.187,00        | 95,55        |
|          |                                                 | Program Pengembangan UMKM                                               | 279.791.300,00          | 270.938.000,00          | 96,84        |
|          |                                                 | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                            | 147.722.400,00          | 146.624.197,00          | 99,26        |
|          |                                                 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | 349.963.282,00          | 348.773.082,00          | 99,66        |
|          |                                                 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting     | 555.152.800,00          | 511.895.375,00          | 92,21        |
|          |                                                 | Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen                          | 217.550.650,00          | 210.542.670,00          | 96,78        |
|          |                                                 | Program Penggunaan Produk dalam Negeri                                  | 68.919.200,00           | 58.269.200,00           | 84,55        |
| <b>5</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b> |                                                                         |                         |                         |              |
|          | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja            |                                                                         |                         |                         |              |
|          |                                                 | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkh) | 1.697.739.075           | 1.622.173.187           | 95,549       |
|          |                                                 | Program Pengembangan Umkm                                               | 279.791.300             | 270.938.000             | 96,84        |
|          |                                                 | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                            | 147.722.400             | 146.624.197             | 99,26        |
|          |                                                 | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                       | 349.963.282             | 348.773.082             | 99,66        |
|          |                                                 | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting     | 555.152.800             | 511.895.375             | 92,21        |
|          |                                                 | Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen                          | 217.550.650             | 210.542.670             | 96,78        |
|          |                                                 | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                    | 68.919.200              | 58.269.200              | 84,55        |
|          | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI         |                                                                         |                         |                         |              |



• Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

| NO       | Uusan Pemerintahan Daerah                                    | Nama Program                                                       | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja     | %            |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| 1        | 2                                                            | 3                                                                  | 4                        | 5                     | 6            |
| <b>B</b> | <b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                  |                                                                    |                          |                       |              |
| <b>1</b> | <b>PERENCANAAN</b>                                           |                                                                    |                          |                       |              |
|          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                         |                                                                    | <b>24.898.299.837</b>    | <b>24.189.358.385</b> | <b>97,15</b> |
|          |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota               | 16.077.711.337           | 15.560.171.601        |              |
|          |                                                              | Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah   | 3.905.128.150            | 3.877.920.659         |              |
|          |                                                              | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.895.236.250            | 2.774.622.551         |              |
|          |                                                              | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah                         | 2.020.224.100            | 1.976.643.574         |              |
| <b>2</b> | <b>KEUANGAN</b>                                              |                                                                    |                          |                       |              |
|          | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                   |                                                                    |                          |                       |              |
|          |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota               | 11.041.836.012,00        | 9.883.737.511,00      | 89,51        |
|          |                                                              | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | 431.833.615.722,00       | 429.111.348.818,00    | 99,37        |
|          |                                                              | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | 1.702.859.650,00         | 1.441.550.600,00      | 84,65        |
|          | <b>Badan Pendapatan Daerah</b>                               |                                                                    | <b>25.527.485.781</b>    | <b>21.543.967.295</b> | <b>84,40</b> |
|          |                                                              | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota          | 19.949.705.180           | 17.402.959.232        | 87,23        |
|          |                                                              | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                              | 5.577.780.601            | 4.141.008.063         | 74,24        |
| <b>3</b> | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                           |                                                                    | <b>12.738.448.661,00</b> | <b>10.876.482.520</b> | <b>85,38</b> |
|          | <b>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia</b> |                                                                    | <b>12.738.448.661,00</b> | <b>10.876.482.520</b> | <b>85,38</b> |
|          |                                                              | Program Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan                        | 8.552.347.161            | 7.972.382.927         | 93,22        |
|          |                                                              | Program Kepegawaian Daerah                                         | 2.856.952.200            | 1.978.847.684         | 69,26        |
|          |                                                              | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                           | 1.329.149.300            | 925.251.909           | 69,61        |

• Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

| NO       | Uusan Pemerintahan Daerah                                                | Nama Program                                            | Alokasi Anggaran Belanja | Realisasi Belanja | %     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 1        | 2                                                                        | 3                                                       | 4                        | 5                 | 6     |
| <b>C</b> | <b>URUSAN FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                                                         |                          |                   |       |
| <b>1</b> | <b>URUSAN FUNGSI PENGAWASAN</b>                                          |                                                         |                          |                   |       |
|          | <b>Inspektorat</b>                                                       |                                                         |                          |                   |       |
|          |                                                                          | Unsur Penunjang Urusan pmerintahan                      | 22.876.928.628,00        | 19.749.155.156,00 | 86,33 |
|          |                                                                          | Program Penyelenggaraan Pengawasan                      | 4.625.381.000,00         | 1.522.101.050,00  | 32,91 |
|          |                                                                          | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 662.817.000,00           | 662.817.000,00    | 47,92 |



|           |                                                    |                                                                                                                                        |                           |                           |              |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|           | <b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>           |                                                                                                                                        |                           |                           |              |
|           |                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota                                                                                   | 7.493.192.165,00          | 7.302.496.200,00          | 97,46        |
|           |                                                    | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Arakter Kebangsaan                                                                            | 2.967.681.300,00          | 2773329245                | 93,45        |
|           |                                                    | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 56.209.678.063,00         | 56.055.845.756,00         | 99,73        |
|           |                                                    | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | 909.618.400,00            | 895.652.400,00            | 98,46        |
|           |                                                    | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | 2.583.238.100,00          | 2.412.682.771,00          | 93,4         |
|           |                                                    | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial                             | 2.731.302.950,00          | 2.385.621.722,00          | 87,34        |
| <b>II</b> | <b>URUSAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |                                                                                                                                        |                           |                           |              |
| <b>a</b>  | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>                          |                                                                                                                                        |                           |                           |              |
|           | <b>Sekretariat Daerah</b>                          |                                                                                                                                        |                           |                           |              |
|           |                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota                                                                                   | 104.384.068.369,00        | 92.674.913.701,68         | 88,78        |
|           |                                                    | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                                                                          | 21.384.959.000,00         | 19.394.008.544,00         | 90,69        |
|           |                                                    | Program Perekonomian Dan Pembangunan                                                                                                   | 4.332.150.350,00          | 4.044.489.439,00          | 93,36        |
|           |                                                    | Program Pengelolaan Perbatasan                                                                                                         | 212.770.400,00            | 152.556.513,00            | 71,70        |
|           |                                                    |                                                                                                                                        |                           |                           |              |
| <b>b</b>  | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                            |                                                                                                                                        |                           |                           |              |
|           | <b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b>  |                                                                                                                                        | <b>137.735.663.277,00</b> | <b>113.786.374.994,00</b> | <b>82,61</b> |
|           |                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota                                                                                   | 61.321.940.792,00         | 57.824.360.396,00         | 94,30        |
|           |                                                    | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd                                                                                     | 76.413.722.485,00         | 55.962.014.598,00         | 73,24        |
| <b>c</b>  | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                           |                                                                                                                                        |                           |                           |              |
|           | <b>KAMPAR KIRI</b>                                 |                                                                                                                                        | <b>3.286.969.175,00</b>   | <b>2.832.282.245,00</b>   | <b>86,17</b> |
|           |                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota                                                                                   | 3.125.148.275,00          | 2.795.661.345,00          |              |
|           |                                                    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                              | 161.820.900,00            | 36.620.900,00             |              |
|           | <b>KAMPAR KIRI HULU</b>                            |                                                                                                                                        | <b>2.818.908.256,00</b>   | <b>2.651.067.049,00</b>   |              |
|           |                                                    | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota                                                                                   | 2.667.440.856,00          | 2.599.599.649,00          |              |
|           |                                                    | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik                                                                              | 151.467.400,00            | 51.467.400,00             |              |



|  |                           |                                                             |                         |                         |        |
|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
|  | <b>KAMPAR KIRI HILIR</b>  |                                                             | <b>2.975.733.428,00</b> | <b>2.474.752.297,00</b> |        |
|  |                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.269.931.378,00        | 1.895.929.247,00        |        |
|  |                           | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 109.301.750,00          | 9.302.200,00            | 8,51   |
|  |                           | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 596.500.300,00          | 569.520.850,00          | 95,48  |
|  | <b>GUNUNG SAHILAN</b>     |                                                             | <b>2.135.735.187,00</b> | <b>1.711.671.252,00</b> |        |
|  |                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.029.103.987,00        | 1.706.271.252,00        |        |
|  |                           | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 106.631.200,00          | 5.400.000,00            |        |
|  | <b>KAMPAR KIRI TENGAH</b> |                                                             | <b>3.005.063.743,00</b> | <b>2.769.707.466,00</b> |        |
|  |                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.879.605.093,00        | 2.747.613.466,00        |        |
|  |                           | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 108.780.000,00          | 8.780.000,00            | 8,07   |
|  |                           | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 16.678.650,00           | 13.314.000,00           | 79,83  |
|  | <b>XIII KOTO KAMPAR</b>   |                                                             | <b>3.085.357.234,00</b> | <b>2.821.061.710,00</b> |        |
|  |                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.568.873.488,00        | 2.304.577.964,00        |        |
|  |                           | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 516.483.746,00          | 516.483.746,00          |        |
|  | <b>KOTO KAMPAR HULU</b>   |                                                             | <b>2.172.413.063,00</b> | <b>1.944.325.858,00</b> |        |
|  |                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.064.608.663,00        | 1.942.849.458,00        |        |
|  |                           | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 106.328.000,00          | 0                       | 0      |
|  |                           | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 1.476.400,00            | 1.476.400,00            | 100    |
|  | <b>Kuok</b>               |                                                             | <b>2.682.799.181,00</b> | <b>2.406.086.533,00</b> |        |
|  |                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.576.267.181,00        | 2.399.554.533,00        |        |
|  |                           | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 103.880.000,00          | 3.880.000,00            | 3,74   |
|  |                           | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 2.652.000,00            | 2.652.000,00            | 100,00 |
|  | <b>Salo</b>               |                                                             | <b>1.866.758.903,00</b> | <b>1.466.187.224,00</b> |        |
|  |                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.766.758.903,00        | 1.466.187.224,00        |        |
|  |                           | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100.000.000,00          | -                       |        |
|  | <b>Tapung</b>             |                                                             | <b>2.931.687.807,00</b> | <b>2.770.346.061,00</b> |        |
|  |                           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.766.505.007,00        | 2.705.163.261,00        |        |
|  |                           | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 165.182.800,00          | 65.182.800,00           | 100    |



|  |                        |                                                             |                         |                         |               |
|--|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|  | <b>Tapung Hulu</b>     |                                                             | <b>2.469.932.012,00</b> | <b>2.094.819.562,00</b> |               |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 2.361.708.012,00        | 2.086.595.562,00        |               |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 108.224.000,00          | 8.224.000,00            | <b>7,6</b>    |
|  | <b>Tapung Hilir</b>    |                                                             | <b>3.149.412.841,00</b> | <b>2.737.253.321,00</b> |               |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 3.041.432.841,00        | 2.729.273.321,00        |               |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 104.080.000,00          | 4.080.000,00            | 3,92          |
|  |                        | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 3.900.000,00            | 3.900.000,00            | 100           |
|  | <b>Bangkinang Kota</b> |                                                             | <b>5.646.516.574,00</b> | <b>4.984.333.145,00</b> |               |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 3.757.266.674,00        | 3.276.083.245,00        |               |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 276.553.300,00          | 176.553.300,00          | 63,84         |
|  |                        | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 1.612.696.600,00        | 1.531.696.600,00        | 94,98         |
|  | <b>Bangkinang</b>      |                                                             | <b>4.771.007.409,00</b> | <b>4.244.021.344,00</b> |               |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 3.492.519.013,00        | 3.115.532.948,00        |               |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 154.978.000,00          | 4.978.000,00            | 3,21          |
|  |                        | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 1.123.510.396,00        | 1.123.510.396,00        | 100           |
|  | <b>Kampar</b>          |                                                             | <b>5.010.028.616,00</b> | <b>4.655.605.085,00</b> |               |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 4.276.645.005,00        | 4.022.221.474,00        |               |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 100.000.000,00          | -                       |               |
|  |                        | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan          | 613.629.611,00          | 613.629.611,00          |               |
|  |                        | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 19.754.000,00           | 19.754.000,00           |               |
|  | <b>Kampa</b>           |                                                             | <b>2.214.494.996,00</b> | <b>1.964.211.026,00</b> |               |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 2.103.544.996,00        | 1.953.261.026,00        |               |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 110.950.000,00          | 10.950.000,00           | <b>100,00</b> |
|  | <b>Rumbio Jaya</b>     |                                                             | <b>2.188.524.567,00</b> | <b>1.989.493.064,00</b> |               |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | <b>2.068.154.067,00</b> | <b>1.969.147.464,00</b> |               |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 116.600.000,00          | 16.600.000,00           | 14,24         |
|  |                        | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 3.770.500,00            | 3.745.600,00            | <b>99,34</b>  |
|  | <b>Kampar Utara</b>    |                                                             | <b>1.932.653.642,00</b> | <b>1.585.154.401,00</b> |               |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 1.815.425.492,00        | 1.567.926.251,00        |               |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 117.228.150,00          | 17.228.150,00           | 100           |



|  |                        |                                                             |                         |                         |             |
|--|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
|  | <b>Tambang</b>         |                                                             | <b>3.598.865.413,00</b> | <b>3.377.961.136,00</b> |             |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 3.489.865.413,00        | 3.368.961.136,00        |             |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 109.000.000,00          | 9.000.000,00            | <b>8,26</b> |
|  | <b>Siak Hulu</b>       |                                                             | <b>3.752.109.870,00</b> | <b>3.305.354.762,00</b> |             |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 3.642.509.870,00        | 3.295.754.762,00        |             |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 109.600.000,00          | 9.600.000,00            | 8,76        |
|  | <b>Perhentian Raja</b> |                                                             | <b>2.609.880.575,00</b> | <b>2.463.870.681,00</b> |             |
|  |                        | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah | 2.500.935.575,00        | 2.454.925.681,00        |             |
|  |                        | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik   | 104.385.000,00          | 4.385.000,00            | 4,2         |
|  |                        | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa          | 4.560.000,00            | 4.560.000,00            | 100         |

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kampar menyusun rencana pembangunan daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Pemerintah Daerah diharuskan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPKD) sesuai dengan tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses peyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari periode perencanaan jangka menengah atau RPD tahun 2023-2026. Walaupun periode perencanaan Jangka Menengah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang baru belum ditetapkan, namun arah, acuan, keterkaitan, konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan tetap harus dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Selanjutnya Pemerintah Daerah juga akan mempedomani Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024.

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, di tahun 2024 rencana pembangunan daerah Kabupaten Kampar telah memasuki tahapan ke lima RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025. Adapun prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2024 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target visi dan misi Kabupaten Kampar yang tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD Tahun 2023-2026.

#### **a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;**

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar berhubungan dengan prioritas daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berpedoman pada norma-norma: 1) mendukung prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan daerah; 2) mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; 3) memiliki nilai ekonomi yang berdampak nyata pada pertumbuhan jasa, ekonomi kreatif, dan usaha kecil menengah; 4) terintegrasi sehingga dapat mengifisenkan anggaran yang terbatas namun dapat menghasilkan output yang memiliki nilai tambah dengan peluang keberhasilan tinggi; dan 5) memiliki indikator keberhasilan yang terukur.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Berdasarkan data dan informasi capaian pembangunan Kabupaten Kampar 5 (lima) tahun terakhir.

Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Kampar merupakan kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu strategis di level internasional, nasional dan regional Provinsi Riau. Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan pembangunan Kabupaten Kampar pada pencapaian visi pembangunan lima tahun ke depan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut rumusan permasalahan hubungan antara prioritas dan sasaran pembangunan daerah kabupaten Kampar Pada RKPD Tahun 2024.

#### 1) Bidang Ekonomi

- a) Masih rendahnya dayabeli masyarakat terutama keluarga miskin
- b) Belum maksimalnya dukungan dan pemberdayaan UMKM;
- c) Belum maksimalnya peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan)

melalui peningkatan ketersediaan sarana pembenihan dan praktek pertanian terbaik (GAP);

- d) Masih rendahnya dan belum berkembangnya pendapatan masyarakat dari perluasan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif terutama sector industry (pengelolaan Kawasan industry dan pendalaman struktur industri);
- e) Belum maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- f) Masih rendahnya pemberdayaan BUMD dalam pengelolaan pengembangan ekonomi daerah.
- g) Masih maksimalnya sinergitas dan koordinasi seluruh stakeholder untuk peningkatan pembangunan ekonomi;

## 2) Bidang Infrastruktur

- a) Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar di desa tertinggal di Kabupaten Kampar;
- b) Masih terbatasnya penataan kota terutama pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;
- c) Masih terbatasnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah sumber sumber ekonomi potensial.
- d) Masih terbatasnya pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi (sektor pertanian, industri dan lainnya)

## 3) Bidang Pendidikan

- a) Masih rendahnya Angka Kompetensi Minimum (AKM) untuk SD/SMP
- b) Masih rendahnya kualitas pendidikan berkarakter;
- c) Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang layak dengan lokus prioritas pada desa tertinggal untuk pemerataan pembangunan pendidikan;
- d) Masih terbatasnya kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendidikan secara tematik yang mengarah

pada isu-isu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah;

- e) Belum maksimalnya percepatan peningkatan kualitas sistem dan pelaksanaan pendidikan pasca *Covid-19*;
- f) Masih rendahnya kualifikasi guru dan belum meratanya penempatan guru-guru terutama pada desa-desa tertinggal dan/atau daerah yang jauh dari perkotaan.

#### 4) Bidang Kesehatan

- a) Belum meratanya penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat;
- b) Masih belum maksimalnya kemampuan dan kualitas pelayanan Puskesmas dan RSUD Bangkinang;
- c) Belum maksimalnya gerakan kampanye masyarakat hidup sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d) Masih tingginya angka balita kurus, stunting, gizi kurang dan gizi buruk dan masih rendahnya asupan gizi bayi dan balita ibu melahirkan dalam rangka mengurangi angka kematian bayi/ Balita dan ibu melahirkan serta mengurangi angka stunting;
- e) Masih rendahnya kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit menular.

#### 5) Bidang Sosial

- a. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terutama keterampilan tematik dengan mengacu pada fokus dan prioritas pembangunan;
- b. Masih tingginya angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- c. Masih rendahnya kesempatan kerja akibat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan UMKM yang masih terbatas.
- d. Belum maksimalnya Pengamalan Nilai Keagamaan
- e. Masih rendahnya tingkat pelestarian Budaya Melayu

6) Masih belum maksimalnya Pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah

Perumusan isu strategis dan masalah mendesak didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi saat ini dan diselaraskan dengan Prioritas Nasional maupun Provinsi Riau. Identifikasi dilakukan terhadap prioritas pembangunan dan persoalan yang mendesak pada kebijakan Nasional, Provinsi dan kaitannya dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kampar dalam RKPD tahun 2024. Identifikasi terhadap isu strategis nasional dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah (provinsi dan kabupaten), sehingga penentuan arah kebijakan sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional. Beberapa isu strategis yang menjadi prioritas utama perlu mendapat perhatian dalam RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1.17**  
**Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Kebijakan**  
**Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar**

| No | Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Provinsi Riau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kabupaten Kampar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1  | <p>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya pengembangan industri, pariwisata, dan investasi</li><li>• Nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, perikanan masih rendah</li><li>• Belum optimalnya pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan</li><li>• Nilai tambah dan daya saing produk industri masih rendah</li><li>• Terbatasnya kesiapan destinasi dan industri pariwisata untuk merespon kunjungan wisatawan dan menyediakan jasa</li><li>• Perkembangan ekonomi kreatif dan digital belum dimanfaatkan optimal.</li></ul> | <p>Industri, Pertanian, dan pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rendahnya laju pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh menurun/ melambatnya produksi migas dan hasil tambang</li><li>• Terbatasnya kapasitas perekonomian daerah menyediakan lapangan kerja baru</li><li>• Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung</li><li>• Produksi produk IKM yang belum memenuhi kebutuhan pasar</li><li>• Perizinan dan sertifikasi produk IKM serta HAKKI</li></ul> | <p>Industri, Pertanian dan Pariwisata</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belum beroperasinya kawasan industri</li><li>• Nilai tambah sektor unggulan yang masih rendah</li><li>• Belum berkembangnya produk industri kreatif sebagai pendukung pengembangan sektor pariwisata</li><li>• Rasio pemenuhan pangan pokok secara mandiri baru mencapai sekitar 22%</li><li>• Rendahnya intensitas pemanfaatan lahan tanaman pangan dan belum tergarapnya lahan pertanian berkelanjutan secara maksimal</li></ul> |



| No | Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provinsi Riau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kabupaten Kampar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ekspor didominasi produk bernilai tambah rendah dan perdagangan dalam negeri belum efisien.</li> <li>Kemitraan usaha belum dikembangkan optimal untuk mengatasi <i>missing middle</i> dalam rantai pasok/nilai.</li> <li>Akses pembiayaan usaha produktif yang terbatas</li> <li>Produktivitas tenaga kerja masih rendah.</li> <li>Pemanfaatan lptek dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah masih rendah</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online</li> <li>Luas tanam dan luas panen semakin menurun</li> <li>Sarana dan prasarana belum merata sesuai kebutuhan usaha tani</li> <li>Produktivitas tanaman pangan dari hortikultura masih rendah</li> <li>Penerapan teknologi pertanian belum optimal</li> <li>Masih terdapatnya destinasi wisata yang belum memenuhi standar pariwisata berkelanjutan</li> <li>Promosi pariwisata yang belum optimal</li> <li>Atraksi wisata belum beragam</li> <li>SDM pariwisata yang belum seluruhnya tersertifikasi</li> <li>Belum berkembangnya ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat</li> <li>Masih rendahnya kontribusi sektor potensial (industri pengolahan, pertanian, dan ekonomi kreatif berbasis UMKM) dalam mendukung pergeseran sektor basis dari sektor migas kepada sektor potensial dan belum optimalnya hilirisasi sektor-sektor potensial berbasis sumberdaya alam</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemanfaatan lahan pangan yang intensitas penggunaan yang rendah untuk peningkatan produksi tanaman hortikultura dan pemafaatan lahan perkebunan untuk sentra peternakan ruminansia</li> <li>Rendahnya kunjungan wisatawan ke wilayah ini disebabkan oleh minimnya fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung, masih rendahnya kualitas pelayanan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.</li> <li>Belum maksimalnya dukungan sektor industri kreatif terhadap pengembangan sektor pariwisata</li> <li>Masihnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>              |
| 2  | <p>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar serta membangun lingkungan hidup untuk meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya jaringan pelabuhan utama terpadu</li> <li>Terbatasnya transformasi digital (infrastruktur, pemanfaatan dan enabler)</li> <li>Belum optimalnya keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi</li> <li>Terbatasnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing</li> <li>Terbatasnya kapasitas mitigasi dan penanganan bencana</li> <li>Belum optimalnya penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektifitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>Permasalahan tumpang tindih perizinan pemanfaatan ruang melalui pelaksanaan kebijakan satu peta.</li> <li>Belum optimalnya peningkatan</li> </ul> | <p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan di Provinsi Riau dalam kondisi mantap masih rendah</li> <li>Belum optimalnya peningkatan angkutan orang dan barang melalui terminal/pelabuhan/bandara</li> <li>Terbatasnya layanan air minum lintas kabupaten/kota dan layanan sanitasi</li> <li>Berlum tersedianya layanan penanganan sampah lintas kabupaten/kota</li> <li>Terbatasnya sistim irigasi di 8 DI dan 34 DIR</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Infrastruktur dan Pembangunan Berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum merata pembangunan infrastruktur dasar terutama di wilayah desa tertinggal</li> <li>Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung kemandirian ekonomi khususnya bidang pangan</li> <li>Kecepatan rasio kerusakan jalan yang tinggi dibanding ketersediaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan</li> <li>Belum optimalnya pemanfaatan kebijakan pembangunan emisi rendah karbon untuk kompensasi ekonomi dari wilayah paru-paru dunia.</li> <li>Belum maksimalnya pengembangan SDGs Desa sebagai model pembangunan berkelanjutan secara tematik</li> </ul> |



| 3                                    | Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan dasar penduduk belum merata</li> <li>Partisipasi sekolah penduduk miskin masih selalu lebih rendah pada setiap jenjang pendidikan</li> </ul>   | Sumberdaya Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan</li> <li>Belum optimalnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan</li> <li>Belum optimalnya penurunan kejadian mortalitas dan morbiditas</li> <li>Belum optimalnya peningkatan pengembangan layanan menuju rumah sakit umum dan khusus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | Sumber Daya Manusia <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Literasi dan Numerasi dibawah Kompetensi Minimum (Kuning)</li> <li>Masih rendahnya pengembangan SDM secara tematik</li> <li>Masih terdapat angka stunting sekitar 1,28%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keterkaitan Isu dan Masalah Mendesak |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No                                   | Nasional                                                                                                                                                                                                                                                      | Provinsi Riau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kabupaten Kampar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya sistem perlindungan sosial</li> </ul>                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)</li> <li>Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan panti</li> <li>Belum optimalnya pemberdayaan melalui peningkatan peran dan fungsi serta pembinaan terhadap PSKS</li> <li>Belum terintegrasinya pelayanan sosial melalui pembentukan layanan sosial terpadu satu pintu (SLRT) serta pembinaan unsur sosial pemberi layanan</li> <li>Belum optimalnya peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Budaya</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih terdapat Angka Kemiskinan Ektrim</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                                    | Memperkuat stabilitas Polhukhanakam dan transformasi pelayanan publik <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM aparatur.</li> </ul> | Tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang prima <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peningkatan implementasi nilai reformasi birokrasi dan peningkatan budaya kerja</li> <li>Rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Peningkatan pelayanan publik dan kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pemanfaatan Informasi teknologi (IT) oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan</li> <li>Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengembangan kebudayaan Melayu Riau dan pariwisata sebagai perekat dan penguat nilai-nilai luhur yang membantu terbangunnya kehidupan sosial yang sehat, harmonis, agamis,</li> </ul> |
| 6                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, pola-pola kolaborasi multi- pihak, dan menghasilkan inovasi daerah</li> </ul>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi</li> <li>Belum optimalnya peningkatan implementasi pemantauan dan evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) atas resiko perangkat daerah</li> <li>Belum optimalnya peningkatan penanganan gratifikasi implementasi SPBE</li> <li>Belum terintegrasinya penyusunan kebijakan tata kelola pemerintahan</li> </ul>                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya keselarasan kemampuan dan kapasitas aparatur sipil negara dengan perkembangan, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika sosial, ekonomi dan politik</li> <li>Desa sebagai basis masyarakat dan pemerintahan daerah yang terendah, belum optimal kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola tata pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi manajemen pemerintahan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.</li> </ul>                     |

Sumber data : RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024



Berdasarkan prioritas pembangunan, isu strategis yang menjadi permasalahan pokok untuk ditangani melalui pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kampar maka kebijakan untuk prioritas pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2024 perlu mempertimbangkan beberapa kebijakan lainnya. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan daerah, implementasi otonomi daerah merupakan momentum strategis dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang dan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan wilayah tempatan.

Penyusunan prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 mengacu pada prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024 dan Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2024. Untuk melihat arah kebijakan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Kampar terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi dan Nasional Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 1. 18**

**Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | RKP Tahun 2024                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RKPD Provinsi Riau Tahun 2024                                                          |                                                                                                                                                                           | RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                      |                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | Prioritas                                                                  | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prioritas                                                                              | Sasaran                                                                                                                                                                   | Prioritas                                                                             | Sasaran                                            |
| 1  | Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | 1) Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumberdaya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan mendorong (a) Porsi EBT dalam bauran ekonomi nasional, (b) Skor Pola pangan harapan, (c) Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) Daya Saing Daerah (Peningkatan perekonomian bidang pangan dan energi)               | 1) Meningkatnya ketahanan pangan daerah dan energi                                                                                                                        | 1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan | 1) Meningkatnya rasio ketersediaan pangan          |
|    |                                                                            | 2) Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha dengan mendorong (a) Rasio kewirausahaan nasional, (b) Pertumbuhan PDB pertanian, (c) Pertumbuhan PDB perikanan, (d) Pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) Kontribusi PDB industri pengolahan, (f) Nilai devisa pariwisata, (g) Kontribusi PDB pariwisata, (h) Penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) Pertumbuhan investasi (PMTB), (j) Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (k) Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, dan (1) Rasio perpajakan terhadap PDB | 2) Daya Saing Daerah (Peningkatan Perekonomian bidang Industri, pertanian, pariwisata) | 2) Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan, Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan Meningkatnya kenyamanan wisatawan mancanegara | 2) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan | 2) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah |
| 2  | Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) IPM KTI, dan (c) Persentase penduduk miskin KTI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) Daya Saing Daerah (Peningkatan perekonomian bidang Industri, pertanian, pariwisata) | 1) Meningkatnya Kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan                                                                                                 | 1) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan | 1) Meningkatnya Kontribusi sector unggulan         |
|    |                                                                            | 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) Laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM KBI, dan (c) Persentase penduduk miskin KBI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                    |



| No | RKP Tahun 2024                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RKPD Provinsi Riau Tahun 2024                                                               |         | RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                          |                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | Prioritas                                                      | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prioritas                                                                                   | Sasaran | Prioritas                                                                                 | Sasaran                                                                |
| 3  | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), dan (b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1) Daya Saing Daerah (Peningkatan sumberdaya manusia Bidang Kesehatan)                      |         | 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial                   | 1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                           |
|    |                                                                | 2) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan mendorong (a) Angka Kematian Ibu (AKI), (b) Angka Kematian Bayi (AKB), (c) Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan, (d) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, (e) Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita, (f) Insidensi tuberkulosis, (g) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, (h) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta, (i) Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun, (j) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (k) Nilai rata-rata hasil PISA: Membaca, (l) Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika, (m) Nilai rata-rata hasil PISA: Sains, (n) Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (o) Harapan lama sekolah. | 2) Daya Saing Daerah (Peningkatan sumberdaya manusia Bidang Kesehatan dan pendidikan)       |         | 2) Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat; | 2) Meningkatnya kualitas dan derajat kesehatan dan kualitas pendidikan |
|    |                                                                | 3) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda dengan mendorong (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3) Daya Saing Daerah (Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang Gender)                         |         |                                                                                           |                                                                        |
|    |                                                                | 4) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong (a) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4) Kesejahteraan (Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat melalui penurunan Kemiskinan) |         | 4) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial                   | 4) Menurunnya Tingkat kemiskinan                                       |



| No | RKP Tahun 2024                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RKPD Provinsi Riau Tahun 2024                                                               |                                                                                                                                         | RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024                                        |                                                                |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Prioritas                                  | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prioritas                                                                                   | Sasaran                                                                                                                                 | Prioritas                                                               | Sasaran                                                        |
|    |                                            | 5) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong (a) Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan memperoleh bantuan sosial pemerintah                                                                                                                                                                                                                     | 5) Kesejahteraan (Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sosial Terkait Penurunan Kemiskinan) |                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                |
|    |                                            | 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing mendorong (a) Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (c) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 200, (d) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 300, (e) Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university Top 500, dan (f) Peringkat Global Innovation Index. | 6) Daya Saing Daerah (Peningkatan sumberdaya manusia Bidang Pendidikan)                     |                                                                                                                                         | 6) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial | 6) Menurunnya TPT                                              |
|    |                                            | 7) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan mendorong (a) Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR), dan (b) Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK)                                                                                                                                                                                                                       | 7) Daya Saing Daerah (Peningkatan sumberdaya manusia Bidang Kesehatan)                      |                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                |
| 4  | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong Indeks Capaian Revolusi Mental dan (b) Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1) Daya Saing Daerah (Peningkatan sumberdaya manusia Bidang Pendidikan)                     | 1) Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat                                                                                           |                                                                         |                                                                |
|    |                                            | 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan mendorong Indeks Pembangunan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2) Bermartabat (Pelestarian Kebudayaan Melayu)                                              | 2) Meningkatnya Keberlanjutan Budaya Melayu Riau, Meningkatnya pengembangan budaya melayu riau dan Meningkatnya pemanfaatan melayu riau | 2) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial | 2) Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kampar Yang Agamis |



| No | RKP Tahun 2024                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RKPD Provinsi Riau Tahun 2024                                                                  |                                                                                                                                         | RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024                                        |                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|    | Prioritas                                                                         | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas                                                                                      | Sasaran                                                                                                                                 | Prioritas                                                               | Sasaran                                                       |
|    |                                                                                   | 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong Indeks Pembangunan Masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                       | 3) Daya Saing Daerah (Peningkatan sumberdaya manusia Bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi) | 3) Meningkatnya derajat pendidikan, kesehatan masyarakat dan meningkatnya Kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan     | 3) Peningkatan AKM, kualitas pendidikan berkarakter                     | 4) Meningkatnya kualitas dan tingkat Pendidikan dan kesehatan |
|    |                                                                                   | 5) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan mendorong Indeks Kerukunan Umat Beragama                                                                                                                                                                                                   | 4) Bermartabat (Peningkatan Pengamalan Keagamaan)                                              | 4) Meningkatnya kerukunan hidup beragama                                                                                                |                                                                         |                                                               |
|    |                                                                                   | 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mendorong (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) Median Usia Kawin Pertama Perempuan.                                                                                                                                                                                                         | 5) Daya Saing Daerah (Peningkatan sumberdaya manusia Bidang Gender)                            | 5) Meningkatnya kesetaraan gender                                                                                                       |                                                                         | 5) Meningkatnya kesetaraan gender                             |
|    |                                                                                   | 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong Nilai Budaya Literasi.                                                                                                                                                                                                                                 | 6) Bermartabat (Pelestarian budaya Melayu)                                                     | 6) Meningkatnya Keberlanjutan Budaya Melayu Riau, Meningkatnya pengembangan budaya melayu riau dan Meningkatnya pemanfaatan melayu Riau |                                                                         | 6) Meningkatnya pengamalan budaya melayu                      |
| 5  | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif). | 1) Daya Saing Daerah (Peningkatan Layanan Infrastruktur perumahan dan pemukiman serta Irigasi) | 1) Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman dan Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air                                  | 1) Meningkatkan Kualitas LH Ketersediaan Infrastruktur Yang Berkualitas | 2) Terkendalinya dan lestariannya lingkungan hidup            |
|    |                                                                                   | 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) Waktu tempuh pada jalan                                                                                                                                                                                                                               | 2) Daya Saing Daerah (Bidang Transportasi)                                                     | 2) Meningkatnya pelayanan transportasi                                                                                                  |                                                                         |                                                               |



| No | RKP Tahun 2024                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RKPD Provinsi Riau Tahun 2024                                                                  |                                                                                                        | RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024                 |                                                                       |
|----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | Prioritas                                | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prioritas                                                                                      | Sasaran                                                                                                | Prioritas                                        | Sasaran                                                               |
|    |                                          | lintas utama pulau, Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop), (c) Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara.                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                        |                                                  |                                                                       |
|    |                                          | 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan, dan (b) Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan.                                                                                                       | 3) Daya Saing Daerah (Peningkatan Kondisi Jalan Mantap)                                        | 3) Meningkatnya pelayanan transportasi                                                                 |                                                  |                                                                       |
|    |                                          | 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong (a) Rasio elektrifikasi, (b) Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik, dan (c) Penurunan emisi GRK sektor energi.                                                                                                                                                                           | 4) Daya Saing Daerah (Peningkatan Cakupan Layanan Kelistrikan dan Penurunan Emisi GRK)         | 4) Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga                                              | 4) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar | 4) Meningkatnya rasio elektrifikasi                                   |
|    |                                          | 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK dengan mendorong Persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pitalabar (4G).                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                        |                                                  |                                                                       |
|    |                                          | 6) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif). | 6) Daya Saing Daerah (Peningkatan Layanan Infrastruktur perumahan dan pemukiman serta Irigasi) | 6) Meningkatnya kualitas Kawasan permukiman dan Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air | 6) Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar    | 6) Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni                         |
| 6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan | 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan mendorong Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).                                                                                                                                                                                                                                                                | 1) Daya Saing Daerah (Pelestarian lingkungan hidup Bidang Lingkungan Hidup)                    | 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                                              | 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup        | 3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan menurunnya emisi GRK |



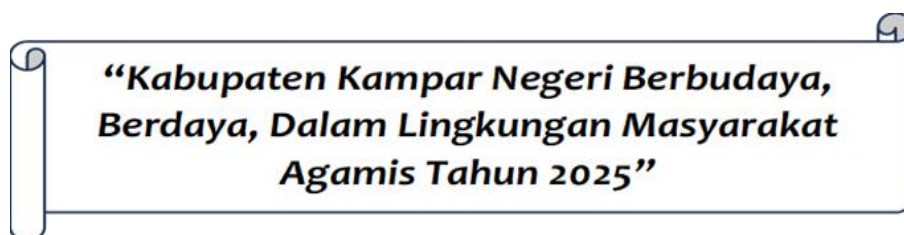
| No | RKP Tahun 2024                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RKPD Provinsi Riau Tahun 2024                                                  |                                                    | RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024                                                                                            |                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Prioritas                                                             | Sasaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prioritas                                                                      | Sasaran                                            | Prioritas                                                                                                                   | Sasaran                                                          |
|    | Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,                               | 2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB.                                                                                                                                                                                               | 2) Daya Saing Daerah (Pelestarian lingkungan hidup Bidang Lingkungan Hidup)    | 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup          |                                                                                                                             |                                                                  |
|    |                                                                       | 3) Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline dengan (a) mendorong Persentase penurunan emisi GRK - kumulatif, (b) Persentase penurunan emisi GRK - tahunan, dan (c) Persentase penurunan intensitas emisi GRK.                                                                                               | 3) Daya Saing Daerah (Pelestarian lingkungan hidup Bidang penurunan emisi GRK) | 3) Menurunnya emisi gas rumah kaca                 |                                                                                                                             |                                                                  |
| 7  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. | 1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan mendorong (a) Indeks Demokrasi Indonesia, dan (b) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah. | 1) Unggul (Penyelenggaraan Pemerintahan)                                       | 1) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah | 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Layanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi | 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan                         |
|    |                                                                       | 5) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan mendorong Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |
|    |                                                                       | 2) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong Indeks Pembangunan Hukum.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3) Unggul (Penyelenggaraan Pemerintahan)                                       | 3) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah | 3) Penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel                                                               | 3) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan |
|    |                                                                       | 4) Meningkatnya kualitas pelayanan public dengan mendorong Indeks Pelayanan Publik Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4) Unggul (Peningkatan Pelayanan Publik)                                       | 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik          | 4) Peningkatan pelayanan publik                                                                                             | 4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik                        |
|    |                                                                       | 5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                    |                                                                                                                             |                                                                  |

Sumber Data : RKPD 2024 Kabupaten Kampar

## b. Visi Dan Misi Kepala Daerah;

- **Visi**

Visi dan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kampar merupakan cita-cita masyarakat Kabupaten Kampar yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2023-2026. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan Visi Kabupaten Kampar, yaitu ;



Penjabaran Visi tersebut sebagai berikut :

### ↳ **PUSAT AGRIBISNIS**

- a. Mewujudkan penataan kepemilikan lahan serta pengembangan SDM dan teknologi dalam pembangunan agro industri dan agro bisnis.
- b. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasana daerah sebagai pusat agribisnis.
- c. Terwujudnya manajemen pemerintahan daerah yang responsif, akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan profesional.

### ↳ **BERBUDAYA**

- a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai Kabupaten Kampar yang agamis ke dalam etika bermasyarakat dan bernegara di Kabupaten Kampar.
- b. Meningkatkan etos kerja, kreativitas dan memberdayakan nilai-nilai gotong royong.
- c. Memasyarakatkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan konflik.



↳ **SEJAHTERA**

- a. Terpenuhi hak dasar masyarakat.
- b. Tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai.
- c. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, budaya yang berbasis kerakyatan.

↳ **AGAMIS**

- a. Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama.
- b. Terpenuhi hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama.
- c. Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan.

• **Misi Kabupaten Kampar**

Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Kampar, maka dirumuskanlah 5 misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
- 2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat.
- 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan.
- 4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.

- 5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Kampar menjabarkan visi dan misi ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara kualitatif maupun kuantitatif, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, secara garis besar tujuan dan sasaran dari misi kabupaten kampar dapat dilihat pada tabel berikut :



**Tabel. 1.19**  
**Sasaran dan Strategi Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026**

| Misi RPJPD                                                   | Tujuan                                               | Indikator Tujuan                        | Sasaran                                                     | Indikator Sasaran                                              | Strategi                                                                                              | Arah kebijakan                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 1                                                       |                                                      |                                         |                                                             |                                                                |                                                                                                       |                                                                                                           |
| Mewujudkan pembangunan nilai- nilai budaya masyarakat Kampar | Tujuan (1) = Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis | IK = indeks pemajuan budaya yang agamis | Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis | Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamankan | Peningkatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan serta pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis | Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara |
|                                                              |                                                      |                                         | Terciptanya toleransi antar multikultur                     | Indeks toleransi                                               | Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman                    | Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman                       |



| Misi RPJPD                                                                                          | Tujuan                                                                  | Indikator Tujuan                | Sasaran                                                                                                     | Indikator Sasaran                        | Strategi                                                                                                                           | Arah kebijakan                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi 2                                                                                              |                                                                         |                                 |                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |
| Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat | Tujuan (2) = Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih | IK = indeks reformasi birokrasi | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan<br><br>Meningkatnya kualitas pelayanan publik | SAKIP, Opini BPK<br><br>IKM, Indeks SPBE | Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis Kinerja<br><br>Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi | Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja<br><br>Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi |



| Misi RPJPD                                                                                                                            | Tujuan                                                                       | Indikator Tujuan                     | Sasaran                                                                                        | Indikator Sasaran                                                                        | Strategi                                                                                             | Arah kebijakan                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 3</b>                                                                                                                         |                                                                              |                                      |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                    |
| Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan | Tujuan (3.1) = Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing | IK = Indek Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                                      | Angka harapan hidup                                                                      | Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan                                     | Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan                                                  |
|                                                                                                                                       |                                                                              |                                      | Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan                                                   | Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah                                          | Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan                                    | Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan                                                 |
|                                                                                                                                       | Tujuan (3.2) Mengurangkan tingkat kriminalitas                               | IK= Tingkat Kriminlaitas             | Berkurangnya tingkat kriminalitas                                                              | Persentase Pengurangan kriminalitas                                                      | Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat                                                       | Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat                                                                    |
|                                                                                                                                       | Tujuan (3.3) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan                             | Ik= Pengamalan Agama                 | Meningkatkatnya pengamalan agama<br>Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama | Persentase Melek Kitab Suci (Alquran)<br>Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama | Peningkatan akses dan kualitas pendidikan alquran Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana agama | Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran<br>Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama |



| Misi RPJPD                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tujuan                                                                                            | Indikator Tujuan              | Sasaran                                         | Indikator Sasaran                                      | Strategi                                                                                 | Arah kebijakan                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   |                               |                                                 |                                                        |                                                                                          |                                                                                                        |
| Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional, dan internasional | Tujuan (4.1) = Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan | IK = Laju Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah | Kontribusi PDRB sektor pertanian, industri, pariwisata | Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian                                  | Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                               |                                                 |                                                        | Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan                              | Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                               |                                                 |                                                        | Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan                             | Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                   |                               |                                                 |                                                        | Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan dan promosi pariwisata | Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah            |



| Misi RPJPD | Tujuan                                         | Indikator Tujuan                                 | Sasaran                       | Indikator Sasaran                                            | Strategi                                                                         | Arah kebijakan                                                                    |
|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                |                                                  | Meningkatnya investasi daerah | Pertumbuhan investasi                                        | Peningkatan dayatarik destinasi, Pengelolaan dan promosi pariwisata              | Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata              |
|            |                                                |                                                  |                               |                                                              | Peningkatan iklim investasi yang kondusif                                        | Meningkatkan iklim investasi yang kondusif                                        |
|            |                                                |                                                  |                               |                                                              | Peningkatan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah | Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah |
|            | Tujuan (4.2) Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan | IK= Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | Menurunnya TPT                | Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah | Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan             | Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan             |



|                                                            | Tujuan (4.3)<br>Meningkatkan<br>Daya beli<br>masyarakat   | IK= Penurunan Tingkat<br>Kemiskinan | Menurunnya<br>Tingkat Kemiskinan                          | Persentase<br>Penurunan<br>tingkat<br>kemiskinan | Peningkatan<br>daya beli<br>masyarakat<br>dan<br>pengendalian<br>inflasi daerah | Meningkatkan daya beli<br>masyarakat dan<br>pengendalian inflasi daerah |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Misi RPJPD                                                 | Tujuan                                                    | Indikator Tujuan                    | Sasaran                                                   | Indikator<br>Sasaran                             | Strategi                                                                        | Arah kebijakan                                                          |
| <b>Misi 5</b>                                              |                                                           |                                     |                                                           |                                                  |                                                                                 |                                                                         |
| Mewujudkan<br>pembangunan<br>kawasan yang<br>seimbang yang | Tujuan (5.1) =<br>Mewujudkan<br>pemerataan<br>pembangunan | IK=Indek Infrastruktur<br>daerah    | Meningkatnya<br>kesesuaian<br>pemanfaatan ruang<br>sesuai | Persentase<br>Kesesuaian<br>pemanfaatan<br>ruang | Peningkatan<br>pembangunan<br>infrastruktur dan<br>jaringan                     | Meningkatkan<br>pembangunan infrastruktur<br>dan jaringan sarana        |

Sumber Data : RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026



**Tabel 1. 20**  
**Visi dan Misi Berdasarkan RPJPD Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau**

| No | Visi Pembangunan                                                                                                                       | Misi Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPD 2023-2026<br>"Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025" | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.</li> <li>2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan.</li> <li>4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.</li> <li>5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan</li> </ol> |
| 2  | RPJMD Provinsi Riau 2019-2024<br>"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya</li> <li>2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.</li> <li>3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing</li> <li>4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing</li> <li>5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3  | RPJM Nasional 2020-2024<br>"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia</li> <li>2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing</li> <li>3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan</li> <li>4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan</li> <li>5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa</li> <li>6. Penegakan sistim hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya</li> <li>7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga</li> <li>8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya</li> <li>9. Sinergi pemerintah daerah, dalam kerangka negara kesatuan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                         |

Sumber: RPJPD 2005-2025 dan RPD Kampar 2023-2026, Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 dan RPJM Nasional 2020 - 2024

### c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah; Dan

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kampar akan dijabarkan dalam program. Program adalah penjabaran

kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program pembangunan daerah, yaitu program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Program pembangunan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 disusun dalam RPD untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih.

Visi dan Misi RPJPD menjadi dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah melalui program dan kegiatan perangkat daerah secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, penyajian program pembangunan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 disajikan per misi yang selanjutnya dijabarkan berdasarkan tujuan dan sasarannya masing-masing, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. 21**  
**Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar**

| Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah                                                                                                  |                                         |                                                             | Indikator Kinerja (tujuan/impact/<br>outcome)                  | Perangkat Daerah<br>Penanggung Jawab |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                |                                         |                                                             | 2                                                              | 3                                    |
| Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar Yang Menjamin Sistem Bermasyarakat Dan Bernegara Untuk Menghadapi Tantangan Global |                                         |                                                             |                                                                |                                      |
| 1.1                                                                                                                                              | Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis |                                                             | Indeks pemajuan budaya yang agamis                             | OPD Terkait                          |
|                                                                                                                                                  | 1.1.1                                   | Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis | Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan | OPD Terkait                          |
|                                                                                                                                                  |                                         | Program Pengembangan Kebudayaan                             | Jumlah Kebudayaan yang dikembangkan                            | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan      |
|                                                                                                                                                  |                                         | Program Pengembangan Kesenian Tradisional                   | Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang dibina                | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan      |
|                                                                                                                                                  |                                         | Program Pembinaan Sejarah                                   | Jumlah Dokumen sejarah                                         | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan      |
|                                                                                                                                                  |                                         | Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya            | Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Dilestarikan                    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan      |



|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                            | Program Pengelolaan Permuseuman                                                                                                        | Persentase Peningkatan Pengelolaan Museum                                                                                                  | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan              |
|                                                                                                            | 1.1.2                                                      | Terciptanya toleransi antar multikultur                                                                                                | Indeks toleransi                                                                                                                           | OPD Terkait                                  |
|                                                                                                            |                                                            | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan                                                                           | Persentase Meningkatnya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan                                                               | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik            |
|                                                                                                            |                                                            | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Persentase Meningkatnya Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik            |
|                                                                                                            |                                                            | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                                          | Persentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan                                                              | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik            |
|                                                                                                            |                                                            | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                                               | Persentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya                                                    | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik            |
|                                                                                                            |                                                            | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial                              | Persentase Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Meningkatnya Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik sosial                             | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik            |
| Misi 2: Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat |                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                              |
| 2.1                                                                                                        | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih |                                                                                                                                        | Indeks reformasi birokrasi                                                                                                                 | OPD Terkait                                  |
|                                                                                                            | 2.1.1                                                      | Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan                                                                          | SAKIP, Opini BPK                                                                                                                           | OPD Terkait                                  |
|                                                                                                            |                                                            | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                           | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga     |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Dinas Kesehatan                              |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Rumah Sakit Umum Daerah                      |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Satuan Polisi Pamong Praja                   |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah          |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan     |
|                                                                                                            |                                                            |                                                                                                                                        | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota                                                                | Dinas Sosial                                 |



|  |  |  |                                                                                   |                                                                                           |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Perindustrian<br>Dan Tenaga Kerja                                                   |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Ketahanan<br>Pangan                                                                 |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Lingkungan<br>Hidup                                                                 |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Kependudukan<br>Dan Pencatatan Sipil                                                |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Pemberdayaan<br>Masyarakat Dan Desa                                                 |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Kb,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Perhubungan                                                                         |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Komunikasi,<br>Informatika Dan<br>Persandian                                        |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Penanaman<br>Modal Dan Pelayanan<br>Terpadu Satu Pintu                              |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Pariwisata Dan<br>Kebudayaan                                                        |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Perpustakaan<br>Dan Kearsipan                                                       |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Perikanan                                                                           |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Pertanian<br>Tanaman Pangan Dan<br>Hortikultura                                     |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Perkebunan,<br>Peternakan Dan<br>Kesehatan Hewan                                    |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi Dan Usaha<br>Mikro Kecil                                   |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Sekretariat Daerah                                                                        |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Sekretariat Dewan<br>Perwakilan Rakyat<br>Daerah                                          |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah                                                   |



|  |  |  |                                                                                   |                                                             |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Badan Pengelola<br>Keuangan Dan Aset<br>Daerah              |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Badan Pendapatan<br>Daerah                                  |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Badan Kepegawaian<br>Dan Pengembangan<br>Sumberdaya Manusia |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Inspektorat                                                 |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Kampar<br>Kiri                                    |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Tapung<br>Hilir                                   |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Tapung<br>Hulu                                    |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Tapung                                            |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Tambang                                           |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Kampar                                            |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Kampar<br>Kiri Hulu                               |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Siak Hulu                                         |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Xiii Koto<br>Kampar                               |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Rumbio<br>Jaya                                    |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Kampar<br>Utara                                   |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Kampa                                             |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Salo                                              |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Bangkinang                                        |
|  |  |  | Persentase Pelaksanaan Penunjang<br>Urusan Pemerintahan Daerah<br>Kabupaten/ Kota | Kecamatan Kuok                                              |



|  |       |                                                                    |                                                                             |                                                       |
|--|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |       |                                                                    | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kecamatan Bangkinang Kota                             |
|  |       |                                                                    | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kecamatan Kampar Kiri Tengah                          |
|  |       |                                                                    | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kecamatan Kampar Kiri Hilir                           |
|  |       |                                                                    | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kecamatan Gunung Sahilan                              |
|  |       |                                                                    | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kecamatan Perhentian Raja                             |
|  |       |                                                                    | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kecamatan Koto Kampar Hulu                            |
|  |       |                                                                    | Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik                     |
|  |       | Program Penyelenggaraan Pengawasan                                 | Persentase Penyelenggaraan Pengawasan                                       | Inspektorat                                           |
|  |       | Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi             | Persentase Pelaksanaan Perumusan Kebijakan Pendampingan dan asistensi       | Inspektorat                                           |
|  |       | Program Kepegawaian Daerah                                         | Persentase Pemenuhan Program Kepegawaian Daerah                             | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
|  |       | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                           | Persentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia              | Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |
|  |       | Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | Persentase Konsistensinya antar dokumen Pembangunan Daerah.                 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
|  |       | Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah       | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
|  |       | Program Penelitian dan Pengembangan Daerah                         | Persentase terlaksananya Penelitian dan Pengembangan daerah                 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                  |
|  |       | Program Pengelolaan Keuangan Daerah                                | Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah                                      | BPKAD                                                 |
|  |       | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah                            | Persentase pengelolaan BMD                                                  | BPKAD                                                 |
|  |       | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                 | Persentase Terpenuhinya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD          | Sekretariat DPRD                                      |
|  |       | Program Pengelolaan Arsip                                          | Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah                         | Dinas Perpustakaan dan Arsip                          |
|  |       | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                        | Terlaksananya penataan dan pengelolaan arsip daerah                         | Dinas Perpustakaan dan Arsip                          |
|  | 2.1.2 | Meningkatnya kualitas pelayanan publik                             | IKM, Indeks SPBE                                                            | OPD Terkait                                           |
|  |       | Program Pemberdayaan Sosial                                        | Jumlah PSKS yang Menangani PMKS                                             | Dinas Sosial                                          |



|  |  |                                                                                           |                                                                                                              |                                             |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  |  | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan                            | Persentase warga migran yang dilakukan penanganan                                                            | Dinas Sosial                                |
|  |  | Program Rehabilitasi Sosial                                                               | Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial                                               | Dinas Sosial                                |
|  |  | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                                                   | Jumlah Masyarakat Miskin yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial                                    | Dinas Sosial                                |
|  |  | Program Penanganan Bencana                                                                | Persentase Korban Bencana yang Tertangani                                                                    | Dinas Sosial                                |
|  |  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                                                  | Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara                                            | Dinas Sosial                                |
|  |  | Program Pendaftaran Penduduk                                                              | Terlaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Kependudukan                                                  | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil     |
|  |  | Program Pencatatan Sipil                                                                  | Terlaksananya Pelayanan dan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil                                              | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil     |
|  |  | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                   | Tercapainya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                                                  | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil     |
|  |  | Program Pengelolaan Profil Kependudukan                                                   | Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan                                                                   | Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil     |
|  |  | Program Penataan Desa                                                                     | Persentase penataan desa yang tertib administrasi                                                            | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa      |
|  |  | Program Administrasi Pemerintahan Desa                                                    | Persentase peningkatan kapasitas penatakelolaan pemerintahan desa yang akuntabel dan tertib administrasi     | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa      |
|  |  | Program Peningkatan Kerja Sama Desa                                                       | Meningkatnya kerjasama antar desa dalam pengembangan ekonomi perdesaan                                       | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa      |
|  |  | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat       | Persentase pemberdayaan lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang dibina | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa      |
|  |  | Program Informasi dan Komunikasi Publik                                                   | Persentase Informasi Publik yang disediakan                                                                  | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian |
|  |  | Program Aplikasi Informatika                                                              | Persentase Jumlah OPD yang Terintegritas                                                                     | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian |
|  |  | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                                | Jumlah Ketersediaan data dan Informasi                                                                       | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian |
|  |  | Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi                             | Index Keamanan Informasi                                                                                     | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian |
|  |  | Program Penanggulangan Bencana                                                            | Persentase Program Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kampar                                                | Badan Penanggulangan Bencana Daerah         |
|  |  | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persentase Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran                  | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan    |
|  |  | Program Perekonomian Dan Pembangunan                                                      | Persentase Pemenuhan Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                       | Sekretariat Daerah                          |
|  |  | Program Pengelolaan Perbatasan                                                            | Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan                                              | Sekretariat Daerah                          |



|  |  | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah                     | Terselenggaranya Pengelolaan Pendapatan Daerah                                      | Bappenda                     |
|--|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Kampar Kiri        |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Tapung Hilir       |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Tapung Hulu        |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Tapung             |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Tambang            |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Kampar             |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Kampar Kiri Hulu   |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Siak Hulu          |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Xiii Koto Kampar   |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Rumbio Jaya        |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Kampar Utara       |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Kampa              |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Salo               |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Bangkinang         |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Kuok               |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Bangkinang Kota    |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Kampar Kiri Tengah |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Kampar Kiri Hilir  |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Gunung Sahilan     |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Perhentian Raja    |
|  |  |                                                           | Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan publik                                          | Kecamatan Koto Kampar Hulu   |
|  |  | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa        | Persentase Terlaksananya program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Kampar Kiri        |
|  |  |                                                           | Persentase Terlaksananya program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Tapung Hilir       |
|  |  |                                                           | Persentase Terlaksananya program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Tapung Hulu        |
|  |  |                                                           | Persentase Terlaksananya program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Tapung             |





|  |  |                                                    |                                                                                      |                              |
|--|--|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa  | Kecamatan Tambang            |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa  | Kecamatan Kampar             |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa  | Kecamatan Kampar Kiri Hulu   |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa  | Kecamatan Siak Hulu          |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Xiii Koto Kampar   |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Rumbio Jaya        |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Kampar Utara       |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Kampa              |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Salo               |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Bangkinang         |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Kuok               |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Bangkinang Kota    |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Kampar Kiri Tengah |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Kampar Kiri Hilir  |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Gunung Sahilan     |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Perhentian Raja    |
|  |  |                                                    | Persentase Terlaksananya program -program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | Kecamatan Koto Kampar Hulu   |
|  |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi                                         | Kecamatan Kampar Kiri        |
|  |  |                                                    | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi                                         | Kecamatan Tambang            |



|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi                                                                                                  | Kecamatan Kampar                                                              |
|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi                                                                                                  | Kecamatan Xiii Koto Kampar                                                    |
|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi                                                                                                  | Kecamatan Bangkinang                                                          |
|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi                                                                                                  | Kecamatan Bangkinang Kota                                                     |
|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             | Persentase kegiatan masyarakat terfasilitasi                                                                                                  | Kecamatan Kampar Kiri Hilir                                                   |
| Misi 3: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan |                                                               |                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                               |
| 3.1                                                                                                                                                            | Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing |                                                                             | Indek Pembangunan Manusia (IPM)                                                                                                               |                                                                               |
|                                                                                                                                                                | 3.1.1                                                         | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat                                   | Angka harapan hidup                                                                                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                |                                                               | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar | Dinas Kesehatan                                                               |
|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             | Persentase Puskesmas dan Fasilitas kesehatan yang menjalankan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sesuai dengan standar | RSUD                                                                          |
|                                                                                                                                                                |                                                               | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan                                                                   | Dinas Kesehatan                                                               |
|                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                             | Cakupan Pemberdayaan dan pelayanan kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan                                                                   | RSUD                                                                          |
|                                                                                                                                                                |                                                               | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | Persentase Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya memenuhi sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman                             | Dinas Kesehatan                                                               |
|                                                                                                                                                                |                                                               | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | Persentase Puskesmas dan fasilitas kesehatan yang menjalankan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                                        | Dinas Kesehatan                                                               |
|                                                                                                                                                                |                                                               | Program Pengendalian Penduduk                                               | Total Fertility rate (TFR)                                                                                                                    | Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                                                                                |                                                               | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                   | Ratio Akseptor KB                                                                                                                             | Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                                                                                |                                                               | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)                | Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga                                                         | Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |



|     |                                   |                                                           |                                                                                 |                                                                                           |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 3.1.2                             | Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan              | Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah                                 |                                                                                           |
|     |                                   | Program Pengelolaan Pendidikan                            | Rata-rata Lama Sekolah                                                          | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan Dan<br>Olahraga                                            |
|     |                                   | Program Pengembangan Kurikulum                            | Rata-rata Nilai UN SD dan SMP                                                   | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan Dan<br>Olahraga                                            |
|     |                                   | Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan                  | Persentase Guru Berkualifikasi PAUD/SD/SMP/Non Formal                           | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan Dan<br>Olahraga                                            |
|     |                                   | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                 | Persentase Peningkatan Sistem Informasi Layanan Pendidikan                      | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan Dan<br>Olahraga                                            |
|     |                                   | Program Pengembangan Bahasa dan Sastra                    | Terjaganya Kelestarian Bahasa Daerah Kampar                                     | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan Dan<br>Olahraga                                            |
|     |                                   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan    | Persentase Sarana Olahraga Masyarakat dengan kondisi baik                       | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan Dan<br>Olahraga                                            |
|     |                                   | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan      | Persentase Peningkatan Kegiatan Kepemudaan                                      | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan Dan<br>Olahraga                                            |
|     |                                   | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                | Peingkatan Kegiatan Kepramukaan bagi pemuda dan Siswa/i                         | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan Dan<br>Olahraga                                            |
|     |                                   | Program Pembinaan Perpustakaan                            | Meningkatnya kualitas dan kuantitas perpustakaan                                | Dinas Perpustakaan dan Arsip                                                              |
|     |                                   | Program Pelestarian Koleksi Nasional Kuno                 | Adanya pengumpulan naskah kuno                                                  | Dinas Perpustakaan dan Arsip                                                              |
| 3.2 | Mengurangkan Tingkat Kriminalitas |                                                           | Persentase Tingkat Kriminltas                                                   |                                                                                           |
|     | 3.2.1                             | Berkurangnya Tingkat Kriminalitas                         | Persentase penurunan Tingakt Kriminalitas                                       |                                                                                           |
|     |                                   | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan                        | Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Kb,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak |
|     |                                   | Program Perlindungan Perempuan                            | Persentase Pelayanan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak                | Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Kb,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak |
|     |                                   | Program Peningkatan Kualitas Keluarga                     | Meningkatnya kualitas keluarga melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan | Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Kb,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak |
|     |                                   | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak           | tercapainya APE                                                                 | Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Kb,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak |
|     |                                   | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)                          | Persentase pemenuhan hak anak                                                   | Dinas Pengendalian<br>Penduduk, Kb,<br>Pemberdayaan<br>Perempuan Dan<br>Perlindungan Anak |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Perlindungan Khusus Anak                                                   | Persentase pemenuhan perlindungan khusus anak                              | Dinas Pengendalian Penduduk, Kb, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban                                     | Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dilaksanakan   | Satuan Polisi Pamong Praja                                                    |
| 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan                                                | Pengamalan Agama                                                           |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.1 | Meningkatkatnya pengamalan agama                                                   | Persentase indek melek Alquran (Kitab Suci)                                |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.3.2 | Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama                         | Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama                            |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat                                      | Persentase Pemenuhan Dokumen Admininstrasi Tata Pemeritahahan              | Sekretariat Daerah                                                            |
| Misi 4: Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional |       |                                                                                    |                                                                            |                                                                               |
| 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan | Laju Pertumbuhan Ekonomi                                                   |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.1.1 | Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah                                    | Kontribusi PDRB sektor pertanian, industri dan pariwisata                  |                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian                               | Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                    | Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                            | Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                    | Persentase Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner            | Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian                          | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian   | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                    | Persentase Pelaksanaan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian   | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Perizinan Usaha Pertanian                                                  | Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian  | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                    | Persentase Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian  | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Program Penyuluhan Pertanian                                                       | Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                | Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura                               |



|  |       |                                                                                                    |                                                                                             |                                                        |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  |       |                                                                                                    | Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                 | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan       |
|  |       | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                                       | Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri                                          | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
|  |       | Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                                            | Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten                                    | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
|  |       | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                             | Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional ruang lingkup Kabupaten Kampar | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
|  |       | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                                              | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap                                                           | Dinas Perikanan                                        |
|  |       | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                                             | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)                                                    | Dinas Perikanan                                        |
|  |       | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan                                              | Persentase Peningkatan Pengawasan dan Terjaganya Kelestarian Sumberdaya Perairan/Perikanan  | Dinas Perikanan                                        |
|  |       | Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan                                                  | Jumlah Produksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (ton)                        | Dinas Perikanan                                        |
|  |       | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                                                | Jumlah Daya Tarik Wisata                                                                    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |
|  |       | Program Pemasaran Pariwisata                                                                       | Persentase publikasi dan event wisata                                                       | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |
|  |       | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase Pelaku Industri Pariwisata                                                       | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |
|  |       | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif                                              | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |
|  |       | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan                    | Terlaksananya pemanfaatan pekarangan sebagai tambahan sumber gizi keluarga                  | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|  |       | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                  | Angka Pola Pangan Harapan                                                                   | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|  |       | Program Penanganan Kerawanan Pangan                                                                | Tersusunnya peta kerentanan dan rawan pangan                                                | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|  |       | Program Pengawasan Keamanan Pangan                                                                 | Terpantaunya mutu dan keamanan pangan                                                       | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|  | 4.1.2 | Meningkatnya investasi daerah                                                                      | Pertumbuhan investasi                                                                       | OPD Terkait                                            |
|  |       | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                                                         | Persentase capaian program pengembangan iklim penanaman modal                               | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|  |       | Program Promosi Penanaman Modal                                                                    | Persentase capaian program promosi penanaman modal                                          | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|  |       | Program Pelayanan Penanaman Modal                                                                  | Persentase capaian program pelayanan penanaman modal                                        | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|  |       | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                                   | Persentase Capaian Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |



|                                                                                                           |       |                                                                          |                                                                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                           |       | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | Persentase Capaian Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal              | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4.2                                                                                                       |       | Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan                                       | Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                                                  | OPD Terkait                                            |
|                                                                                                           | 4.2.1 | Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                            | Persentase penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah                                  | OPD Terkait                                            |
|                                                                                                           |       | Program Perencanaan Tenaga Kerja                                         | Terlaksananya program -program perencanaan tenaga kerja                                       | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
|                                                                                                           |       | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                   | Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan                                           | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
|                                                                                                           |       | Program Penempatan Tenaga Kerja                                          | Persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan.                                      | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
|                                                                                                           |       | Program Hubungan Industrial                                              | Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB). | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
| 4.3                                                                                                       |       | Meningkatkan Daya beli masyarakat                                        | Penurunan Tingkat Kemiskinan                                                                  | OPD Terkait                                            |
|                                                                                                           | 4.3.1 | Menurunnya Tingkat Kemiskinan                                            | Persentase penurunan tingkat kemiskinan                                                       | OPD Terkait                                            |
|                                                                                                           |       | Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian                             | Peningkatan Kualitas Pengurus Dan Pengawas Koperasi                                           | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Peningkatan UMK Terbina                                                                       | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Pengembangan UMKM                                                | Peningkatan Pemasaran Produk Unggulan Lokal UMK                                               | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan                             | Peningkatan Perizinan Bagi Pelaku Usaha                                                       | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        | Cakupan Layanan Sarana pasar                                                                  | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting      | Cakupan Pengendalian Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting                          | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                          | Peningkatan standarisasi Kemetrolagian                                                        | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                     | Cakupan Event Pemasaran yang Diikuti                                                          | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen                          | Peningkatan standarisasi Peralatan Kemetrolagian                                              | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
|                                                                                                           |       | Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                     | Persentase Peningkatan penggunaan Produk dalam negeri                                         | Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil      |
| Misi 5: Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan |       |                                                                          |                                                                                               |                                                        |
| 5.1                                                                                                       |       | Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah                         | Indek Infrastruktur Daerah                                                                    |                                                        |
|                                                                                                           | 5.1.1 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan              | Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang                                                       |                                                        |



|  |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                              |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  |       | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)                                                                                  | Rasio Irigasi Dalam Kondisi                                                                                                                                                 | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum                                                           | Meningkatnya Rasio Penduduk Berakses Air Bersih                                                                                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                                                                     | Terlaksananya Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi yang Layak untuk mencegah terjadinya Permukiman Kumuh, pencegahan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan di Kab. Kampar | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                                                                       | Menurunnya kawasan rawan genangan/banjir                                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Penataan Bangunan Gedung                                                                                           | Terwujudnya penyelenggaraan dan penataan bangunan gedung yang tertib                                                                                                        | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Pengembangan Jasa Konstruksi                                                                                       | Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Jasa Konstruksi                                                                                                                       | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Penyelenggaraan Jalan                                                                                              | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan Dan Jembatan                                                                                                                      | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                                                                     | Terlaksananya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang melalui Rencana Tata                                                                                     | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan                                                   | Terlaksananya Kegiatan pembangunan untuk kepentingan Umum dengan penyediaan lahan melalui proses ganti kerugian                                                             | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Pengelolaan Tanah Kosong                                                                                           | Terlaksananya Penataan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Kampar                                                                                                              | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                                                                     | Pendataan Tanah Masyarakat Di Dalam Kawasan Hutan Negara                                                                                                                    | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |
|  |       | Program Pengembang Perumahan                                                                                               | Terlaksananya Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota                                                                         | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
|  |       | Program Kawasan Permukiman                                                                                                 | Terlaksananya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dbawah 10 Ha pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
|  |       | Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                             | Terlaksananya Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
|  |       | Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)                                                              | Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU)                                                                                                          | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
|  |       | Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman | Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                             | Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman |
|  | 5.1.2 | Meningkatnya pelayanan transportasi                                                                                        | Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi                                                                                                                               |                                              |

|     |       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     |       | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan angkutan Jalan (LLAJ)                                                           | Persentase keberhasilan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(LLAJ)                                                                   | Dinas Perhubungan      |
|     |       | Program Pengelolaan Pelayaran                                                                                           | Persentase Keberhasilan Pengelolaan Pelayaran                                                                                                  | Dinas Perhubungan      |
|     |       | Program Pengelolaan Penerbangan                                                                                         | Persentase Pengelolaan Penerbangan                                                                                                             | Dinas Perhubungan      |
|     |       | Program Pengelolaan Perkeretaapian                                                                                      | Persentase pengelolaan Perkeretaapian                                                                                                          | Dinas Perhubungan      |
| 5.2 |       | Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan                                                          | IKLH                                                                                                                                           |                        |
|     | 5.1.2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam informasi                                       | Persentase Penurunan emisi GRK terhadap baseline                                                                                               |                        |
|     |       | Program Perencanaan Lingkungan Hidup                                                                                    | Persentase Kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup Terlaksana                                                                                    | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                     | Persentase Kegiatan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terlaksana                                                     | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)                                                                      | Persentase Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Terlaksana                                                                      | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | Persentase Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) Terlaksana                | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) Terlaksana | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH           | Persentase Kegiatan Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh Terlaksana           | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | Persentase Kegiatan Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksana                              | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                                                                   | Persentase Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Terlaksana                                                                    | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                                                                           | Persentase Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Terlaksana                                                                            | Dinas Lingkungan Hidup |
|     |       | Program Pengelolaan Persampahan                                                                                         | Persentase Program Pengelolaan Persampahan Terlaksana                                                                                          | Dinas Lingkungan Hidup |

Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024, mengacu kepada:

- 1) Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;



- 2) Telaah Pelaksanaan RPD Tahun Berjalan Triwulan II 2023;
- 3) Kondisi lingkungan eksternal (kondisi global) dan pokok-pokok pikiran DPRD;
- 4) Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional;
- 5) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan; dan
- 6) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2024.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: 1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs; Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; 2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi RPJPD yang dituangkan dalam RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026; 3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah; dan 4) Korelasinya terhadap isu-isu strategis daerah.

Berdasarkan ketentuan normatif tentang prioritas pembangunan Nasional dan pembangunan Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar wajib memberikan perhatian penting terhadap semua indikasi prioritas pembangunan nasional dan provinsi ke dalam rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dianggarkan pada tahun 2024, dengan tetap memperhatikan kondisi objektif daerah.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program pembangunan Daerah dari masing-masing urusan pemerintahan.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang akan diuraikan pada bagian ini terdiri dari tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2010-2024 dan target sasaran tahun 2024 yang tertuang dalam RKP tahun 2024, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Riau dalam Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan target sasaran tahun 2024 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kampar dalam RPD tahun 2023-2026 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kampar Tahun 2024, secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 1. 22**  
**Tujuan dan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024**

| No | Tujuan                                                                          | Sasara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan | 1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan<br>2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian                                                                                                                                          |
| 2  | Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan      | 1. Menurunnya kesenjangan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, akan dicapai melalui pengembangan kawasan strategis, pengembangan sektor unggulan, pengembangan kawasan perkotaan, pembangunan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan trans-migrasi, serta pengelolaan kelembagaan dan keuangan daerah |
| 3  | Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing             | 1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan<br>2. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk<br>3. Terpenuhinya layanan dasar<br>4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda<br>5. Meningkatnya produktivitas dan daya saing                                                                                 |

|   |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan                                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya</li><li>2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan</li><li>3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial</li><li>4. Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat</li><li>5. Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa</li><li>6. Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif</li></ol> |
| 5 | Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar</li><li>2. Meningkatnya konektivitas wilayah</li><li>3. Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan</li><li>4. Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien</li><li>5. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi</li></ol>                                                                                                                                                         |
| 6 | Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li><li>2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim</li><li>3. Pembangunan rendah karbon</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 | Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsolidasi demokrasi</li><li>2. Optimalisasi kebijakan luar negeri</li><li>3. Penegakan hukum nasional yang mantap</li><li>4. Reformasi birokrasi dan tata kelola</li><li>5. Menjaga stabilitas keamanan nasional</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Sumber: RPJMN Nasional 2020-2024

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang berkualitas harus terkait erat dengan permasalahan daerah yang akan ditangani. Tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada RPJPD tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026,

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 23**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJPD**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dan RPD Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2023-2026**

| No | Tujuan                                                                             | Sasaran                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis                                            | 1. Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis<br>2. Terciptanya toleransi antar multikultur  |
| 2  | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih                         | 1. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan<br>2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik |
| 3  | Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing                      | 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat<br>2. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan               |
| 4  | Mengurangkan tingkat kriminalitas                                                  | 1. Berkurangnya tingkat kriminalitas                                                                          |
| 5  | Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan                                                | 1. Meningkatnya pengamalan agama<br>2. Meningkatnya kualitas pemanfaatan                                      |
| 6  | Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan | 1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah<br>2. Meningkatnya investasi daerah                |
| 7  | Meningkatkan Akses Ketenagakerjaan                                                 | 1. Menurunnya TPT                                                                                             |
| 8  | Meningkatkan Daya beli masyarakat                                                  | 1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan                                                                              |
| 9  | Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah                                   | 1. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan<br>2. Meningkatnya pelayanan transportasi      |
| 10 | Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan                     | 1. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam                                    |

Sumber: RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai sasaran RPD tahun kedua dan Rekomendasi Tim KEM Bappeda Provinsi Riau yang dituangkan dalam sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar tahun 2024, ditetapkan target sasaran yang harus dicapai sebagaimana pada Tabel berikut:

**Tabel 1. 24**  
**Indikator dan Target Sasaran RPD Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2023-2026 Dalam RKPD Tahun 2024**

| No | Indikator                      | Target Sasaran | Satuan    |
|----|--------------------------------|----------------|-----------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi            | 3,13-3,95      | %         |
| 2  | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca | 34.102,87      | (GgCO2-e) |
| 3  | Tingkat Pengangguran Terbuka   | 2,71-2,95      | %         |
| 4  | Rasio Gini                     | 0,316 - 0,324  | Nilai     |
| 5  | Indeks Pembangunan Manusia     | 73,70-73,77    | Indek     |
| 6  | Tingkat Kemiskinan             | 6,89-7,19      | %         |

*Sumber: RPD Kabupaten Kampar 2023-2026 dan Balitbang Provinsi Riau, Indikator Makro Kabupaten Kota Tahun 2024*

Prioritas Pembangunan daerah tahun 2024 merupakan bagian pertama dalam agenda pelaksanaan perencanaan pembangunan RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026. Namun karena adanya perubahan terhadap pemilihan kepala daerah di tahun 2024, RKPD tahun 2024 untuk mempedomani RPJPD dan RPD Kabupaten Kampar, RPJMD Provinsi Riau dan RPJM Nasional. Selain itu terkait juga dengan isu-isu strategis yang terdapat dalam RPD Kabupaten Kampar, RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau. Prioritas pembangunan daerah juga ditetapkan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.

Pertimbangan lain dalam menetapkan prioritas pembangunan tahun 2024 adalah dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD. Ini merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD, yang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan reses, maka Tema RKPD tahun 2024 “Menjadikan Kampar yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Provinsi Riau” dengan fokus dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

**Tabel 1.25**  
**Fokus dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar**  
**Dalam RKPD Tahun 2024**

| No | Fokus Pembangunan | Prioritas Pembangunan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Daya Saing Daerah | <p>1) Bidang Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan dayabeli masyarakat terutama keluarga miskin</li> <li>b. Peningkatan dukungan dan pemberdayaan UMKM;</li> <li>c. Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan) melalui peningkatan ketersediaan sarana pembenihan dan praktek pertanian terbaik (GAP);</li> <li>d. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui perluasan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif terutama sector industry (pengelolaan Kawasan industry dan pendalaman struktur industri);</li> <li>e. Peningkatan pendapatan daerah melauai optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah</li> <li>f. Pemberdayaan BUMD dalam pengelolaan pengembangan ekonomi daerah.</li> <li>g. Peningkatan Sinergitas dan koordinasi seluruh stakeholder untuk peningkatan Pembangunan ekonomi;</li> </ul> <p>2) Bidang Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di desa tertinggal di Kabupaten Kampar;</li> <li>b. Meningkatkan penataan kota terutama pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau;</li> <li>c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diwilayah sumber sumber ekonomi potensial.</li> <li>d. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi (sektor pertanian, industri dan lainnya)</li> </ul> |
| 2  | Kesejahteraan     | <p>1) Bidang Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Angka Kompetensi Minimum (AKM) untukSD/SMP</li> <li>b. Peningkatan kualitas pendidikan berkarakter;</li> <li>c. Pemenuhan sarana dan prasaran Pendidikan yang layak dengan lokus prioritas pada desa tertinggal untuk pemerataan pembangunan pendidikan;</li> <li>d. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan pendidikan secara tematik yang mengarah pada isu-isu peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dayaasaing daerah;</li> <li>e. Peningkatan kualitas sistem dan pelaksanaan pendidikan pasca Covid-19;</li> <li>f. Peningkatan kualifikasi guru dan penempatan guru-guru terutama pada desa-desa tertinggal dan/atau daerah yang jauh dari perkotaan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |             | <ul style="list-style-type: none"><li>2) Bidang Kesehatan<ul style="list-style-type: none"><li>a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai dan terjangkau oleh masyarakat;</li><li>b. Peningkatan kualitas pelayanan Puskesmas dan RSUD Bangkinang;</li><li>c. Gerakan kampanye masyarakat hidup sehat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;</li><li>d. Peningkatan asupan gizi bayi dan balita ibu melahirkan dalam rangka mengurangi angka kematian bayi/ Balita dan ibu melahirkan serta mengurangi angka stunting;</li><li>e. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit-penyakit menular.</li></ul></li></ul> |
| 3 | Bermartabat | <ul style="list-style-type: none"><li>1) Bidang Sosial<ul style="list-style-type: none"><li>a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan secara tematik dengan mengacu pada focus dan prioritas pembangunan;</li><li>b. Peningkatan penanganan angka penyandang masalah kesejahteraan social;</li><li>c. Peningkatan kesempatan kerja melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dan UMKM.</li><li>d. Pengamalan Nilai Keagamaan</li><li>e. Pelestarian Budaya Melayu</li></ul></li></ul>                                                                                                                          |
| 4 | Unggul      | <ul style="list-style-type: none"><li>1) Peningkatan Pelayanan publik</li><li>2) Penyelenggaraan Pemerintahan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Perencanaan pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah yang dilengkapi dengan pagu anggaran/pendanaan. Perumusan program dan kegiatan juga harus terukur dan jelas kemanfaatannya bagi pencapaian pembangunan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan merupakan tindakan untuk mencapai target pembangunan dalam penyelenggaraan setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kampar sehingga memerlukan perhitunagn yang cermat dalam penetapan pagu anggaran agar capaian target fisik dapat direalisasikan.

Dalam setiap arah kebijakan Kabupaten Kampar akan memberikan *advice* program dan kegiatan yang tepat dalam hal pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada penyusunan RKPD Kabupaten Kampar tahun 2024, pemerintah

Kabupaten Kampar telah menetapkan bidang prioritas dan program prioritas, kegiatan prioritas yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian program dan urusan sebagaimana hal dimaksud.

Berdasarkan lima bidang prioritas pembangunan di atas (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, social dan ekonomi) maka disusun program prioritas. Program prioritas adalah program yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Kegiatan prioritas merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan dalam pencapaian program prioritas. Selanjutnya dari program prioritas tersebut selanjutnya ditetapkan kegiatan prioritas. Kegiatan prioritas tersebut dimaksudkan agar fokus pada pencapaian target menjadi sasaran program. Kegiatan prioritas dibuat dalam rangka perancangan agenda, evaluasi tugas, alokasi waktu, dan juga tingkat kepentingan masing-masing pekerjaan terhadap capaian program. Selain itu, prioritas bersifat fleksibel untuk mengantisipasi apabila terdapat tugas yang tidak begitu penting namun mendesak.

Prioritas Pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, kegiatan prioritas dan sub kegiatan yang mendukung langsung pencapaian kinerja, serta sasaran yang ingin dicapai dapat dilihat pada Tabel berikut :





**Tabel 1. 26**  
**Prioritas Pembangunan, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Kegiatan Strategis Yang Mendukung**  
**Langsung Pencapaian Kinerja, Serta Sasaran Yang Ingin Dicapai**

| No | Prioritas                                                                         | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Program Prioritas                                                               | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                                                  | Keterangan                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Ekonomi (Industri, Perikanan, Pertanian, Koperasi dan UKM Perdagangan serta BUMD) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan</li> <li>- Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin</li> <li>- Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa</li> <li>- Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja</li> <li>- Meningkatkan kompetensi wirausaha muda</li> <li>- Meningkatkan produksi hasil industri</li> <li>- Meningkatkan produksi pertanian</li> <li>- Memperbaiki iklim dan promosi investasi</li> <li>- Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata</li> <li>- Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata</li> <li>- Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu</li> </ul> | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                        | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                    | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja                   |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat               | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan                          | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                                         | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                                                    | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program penanganan kerawanan pangan                                             | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                                           | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program pengawasan keamanan pangan                                              | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                  | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pelayanan Penanaman Modal                                               | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                             | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                                | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                              | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                             | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                             | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                                     | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |
|    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Pemasaran Pariwisata                                                    | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                        |



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas | Arah Kebijakan | Program Prioritas                                         | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                       | Keterangan                                       |
|----|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |           |                | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi   | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                                                       | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan                  |
|    |           |                | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                     | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Perikanan                                  |
|    |           |                |                                                           | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                   | Dinas Perikanan                                  |
|    |           |                | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                    | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil                                                                                                                      | Dinas Perikanan                                  |
|    |           |                |                                                           | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan                                                                                                                           | Dinas Perikanan                                  |
|    |           |                | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan     | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota              | Dinas Perikanan                                  |
|    |           |                | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan          | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil                                                                | Dinas Perikanan                                  |
|    |           |                |                                                           | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                                                    | Dinas Perikanan                                  |
|    |           |                |                                                           | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota                                                      | Dinas Perikanan                                  |
|    |           |                | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                                                                   | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  |
|    |           |                | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                         | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  |
|    |           |                |                                                           | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                          | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  |
|    |           |                | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                         | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  |
|    |           |                | Program Perizinan Usaha Pertanian                         | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                       | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  |
|    |           |                | Program Penyuluhan Pertanian                              | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                         | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  |
|    |           |                | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                                                     | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |



| No | Prioritas | Arah Kebijakan | Program Prioritas                                                       | Kegiatan Prioritas                                                                                                                               | Keterangan                                           |
|----|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |           |                |                                                                         | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota                               | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                |                                                                         | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                                                        | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                |                                                                         | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota                    | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                |                                                                         | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain                                  | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                                                 | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                |                                                                         | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                                                  | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota                              | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                |                                                                         | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner                                                                       | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                |                                                                         | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                                                                                  | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian               | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                                                                 | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                | Program Perizinan Usaha Pertanian                                       | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                | Program Penyuluhan Pertanian                                            | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                                                                 | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan     |
|    |           |                | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi                             | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |           |                | Program Penilaian Kesehatan SP/USP Koperasi                             | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |           |                | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                            | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                          | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |



| No | Prioritas                                                             | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Program Prioritas                                                        | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                     | Keterangan                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pengembangan UMKM                                                | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                                                  | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Perizinan dan Pendaftaran                                        | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko                                                                      | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                        | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya                                                              | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                                      | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                                 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                          | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan                                                                                   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri                     | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri                                                                          | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                                                                                      | Inspektorat                                          |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi                  | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                                                              | Inspektorat                                          |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Perekonomian dan Pembangunan                                     | Koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD                                                                              | Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah                     |
| 2  | Infrastruktur (Pekerjaan Umum) dan (Perumahan Dan Kawasan Permukiman) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas</li> <li>- Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi</li> <li>- Meningkatkan akses dan infrastruktur energi keseluruhan wilayah</li> <li>-</li> </ul> | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Dinas PUPR                                           |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan                   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Dinas PUPR                                           |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                   | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | Dinas PUPR                                           |
|    |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                     | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah                                                        | Dinas PUPR                                           |



| No | Prioritas  | Arah Kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Program Prioritas                                             | Kegiatan Prioritas                                                                              | Keterangan                               |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh</li> <li>- Memantapkan jalan dan jembatan</li> <li>- Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir</li> <li>- Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlanjar secara terkoordinasi</li> </ul>       | Program Penyelenggaraan Jalan                                 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                            | Dinas PUPR                               |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Program Pengembangan                                          | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi                                                           | Dinas PERKIM                             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Program Kawasan Permukiman                                    | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program                         | Dinas PERKIM                             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh                | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                 | Dinas PERKIM                             |
|    |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana</li> <li>- Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati secara berkelanjutan</li> <li>- Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS</li> <li>- Menurunkan emisi gas rumah kaca</li> </ul> |                                                               | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | Dinas PERKIM                             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              | Dinas PERKIM                             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                    | Dinas PERKIM                             |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                            | Dinas PERKIM                             |
| 3  | Pendidikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan</li> <li>- Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik</li> <li>- Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas</li> </ul>                                                                                                                 | Program Pengelolaan Pendidikan                                | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                                            | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                 | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                                                    | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga |
|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                     | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga |



| No | Prioritas | Arah Kebijakan                                                                                                                                    | Program Prioritas                                                           | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                 | Keterangan                               |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    |           |                                                                                                                                                   | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga |
|    |           |                                                                                                                                                   | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan                                   | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                                                                              | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga |
| 4  | Kesehatan | - Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                        | Dinas Kesehatan                          |
|    |           |                                                                                                                                                   |                                                                             | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                               | Dinas Kesehatan                          |
|    |           | - Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana                                                                                          |                                                                             | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                                                                                     | Dinas Kesehatan                          |
|    |           |                                                                                                                                                   | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                        | RSUD                                     |
|    |           | - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan                                                                                                       |                                                                             | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                               | RSUD                                     |
| 5  | Sosial    | - Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau                                                                       | Program Pemberdayaan Sosial                                                 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | Dinas Sosial                             |
|    |           | - Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan                                                                              | Program Rehabilitasi Sosial                                                 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Dinas Sosial                             |
|    |           |                                                                                                                                                   |                                                                             | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial                    | Dinas Sosial                             |
|    |           |                                                                                                                                                   | Program Perlindungan Dan Jaminan                                            | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                        | Dinas Sosial                             |
|    |           | - Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan                                                                  | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                                                  | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja     |
|    |           | - Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan                                                                     | Program Penempatan Tenaga Kerja                                             | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                     | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja     |
|    |           | - Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang                                         | Program Hubungan Industrial                                                 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                        | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja     |
|    |           |                                                                                                                                                   | Program Pengembangan Kebudayaan                                             | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                             | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan          |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                                                          |                                 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |  | <p>dan kelangsungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat</li><li>- Meningkatkan pembangunan dan pelayanan sarana keagamaan</li></ul> | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

Sumber Data : RKPD Kabupaten Kampar 2024



**Tabel 1. 27**  
**Program Prioritas dan pagu Anggaran Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan                                                             | Program Prioritas                                                               | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pagu Anggaran | Keterangan                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1  | Ekonomi (Industri, Perikanan, Pertanian, Koperasi dan UKM Perdagangan serta BUMD) | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000.000   | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
|    |                                                                                   |                                                                                 | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100.000.000   |                                      |
|    |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                              | 50.000.000    |                                      |
|    |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA | 50.000.000    |                                      |
|    |                                                                                   | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.246.742.506 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
|    |                                                                                   |                                                                                 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.246.742.506 |                                      |
|    |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industr                                                                                                                                                                                                                   | 250.000.000   |                                      |
|    |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri                                                                                                                                                                                                         | 396.742.506   |                                      |
|    |                                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                                                                                     | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                                                                                                                  | 600.000.000   |                                      |
|    |                                                                                   | Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 513.621.700   | Dinas Ketahanan Pangan               |





**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                                        | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                              | Pagu Anggaran        | Keterangan                    |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|    |                       |                                                                          | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                           | <b>513.621.700</b>   |                               |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                            | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                             | 513.621.700          |                               |
|    |                       | <b>Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</b> |                                                                                                                                                            |                                                                                           | <b>1.288.908.100</b> | <b>Dinas Ketahanan Pangan</b> |
|    |                       |                                                                          | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan |                                                                                           | 508.685.100          |                               |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                            | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota    | 271.308.400          |                               |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                            | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis     | 237.376.700          |                               |
|    |                       |                                                                          | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                |                                                                                           | 148.156.500          | Dinas Ketahanan Pangan        |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                            | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal                                                 | 71.310.000           |                               |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                            | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                       | 76.846.500           |                               |
|    |                       |                                                                          | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                           |                                                                                           | 632.066.500          | Dinas Ketahanan Pangan        |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                            | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                      | 276.036.400          |                               |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                            | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 356.030.100          |                               |
|    |                       | <b>Program penanganan kerawanan pangan</b>                               |                                                                                                                                                            |                                                                                           | <b>143.775.900</b>   | <b>Dinas Ketahanan Pangan</b> |
|    |                       |                                                                          | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                                                                                                  |                                                                                           | 143.775.900          |                               |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                            | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                | 143.775.900          |                               |



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                | Kegiatan Prioritas                                                                                                                      | Sub Kegiatan                                                                                                             | Pagu Anggaran | Keterangan                                             |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|    |                       | Program pengawasan keamanan pangan               |                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 180.662.400   | Dinas Ketahanan Pangan                                 |
|    |                       |                                                  | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                                                                      |                                                                                                                          | 180.662.400   |                                                        |
|    |                       |                                                  |                                                                                                                                         | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                           | 180.662.400   |                                                        |
|    |                       | Program Pelayanan Penanaman Modal                |                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 412.000.000   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu            |
|    |                       |                                                  | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                                          | 412.000.000   |                                                        |
|    |                       |                                                  |                                                                                                                                         | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                | 87.000.000    |                                                        |
|    |                       |                                                  |                                                                                                                                         | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 75.000.000    |                                                        |
|    |                       |                                                  |                                                                                                                                         | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                         | 100.000.000   |                                                        |
|    |                       |                                                  |                                                                                                                                         | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                               | 150.000.000   |                                                        |
|    |                       | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 655.000.000   | Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|    |                       |                                                  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                          | 655.000.000   |                                                        |
|    |                       |                                                  |                                                                                                                                         | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 | 430.000.000   |                                                        |
|    |                       |                                                  |                                                                                                                                         | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                     | 100.000.000   |                                                        |
|    |                       |                                                  |                                                                                                                                         | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                               | 125.000.000   |                                                        |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                   | Kegiatan Prioritas                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pagu Anggaran | Keterangan                      |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|
|    |                       | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.802.000.000 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
|    |                       |                                                     | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.402.000.000 |                                 |
|    |                       |                                                     |                                                                                                                 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                       | 1.402.000.000 |                                 |
|    |                       |                                                     | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400.000.000   | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
|    |                       |                                                     |                                                                                                                 | Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.000.000   |                                 |
|    |                       |                                                     |                                                                                                                 | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                                                                                                                                                                                                        | 200.000.000   |                                 |
|    |                       | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.050.000.000 | Dinas Perikanan                 |
|    |                       |                                                     | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200.000.000   |                                 |
|    |                       |                                                     |                                                                                                                 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | 100.000.000   |                                 |
|    |                       |                                                     |                                                                                                                 | Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing                          | 100.000.000   |                                 |
|    |                       |                                                     | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 850.000.000   | Dinas Perikanan                 |
|    |                       |                                                     |                                                                                                                 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350.000.000   |                                 |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                     | Kegiatan Prioritas                                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                    | Pagu Anggaran | Keterangan      |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|    |                       |                                                       |                                                                                                                                             | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil                                                                          | 200.000.000   |                 |
|    |                       |                                                       |                                                                                                                                             | Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha                                                                                    | 50.000.000    |                 |
|    |                       |                                                       |                                                                                                                                             | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan                               | 250.000.000   |                 |
|    |                       | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | 2.100.000.000 | Dinas Perikanan |
|    |                       |                                                       | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                 | 2.100.000.000 |                 |
|    |                       |                                                       |                                                                                                                                             | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota                   | 800.000.000   |                 |
|    |                       |                                                       |                                                                                                                                             | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | 1.300.000.000 |                 |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                    | Kegiatan Prioritas                                                                                    | Sub Kegiatan                                                                                                          | Pagu Anggaran | Keterangan                                      |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|    |                       | Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan     |                                                                                                       |                                                                                                                       | 1.900.000.000 | Dinas Perikanan                                 |
|    |                       |                                                      | Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil             |                                                                                                                       | 100.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                      |                                                                                                       | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota     | 100.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |                                                                                                                       | 300.000.000   | Dinas Perikanan                                 |
|    |                       |                                                      |                                                                                                       | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau tandar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 300.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                      | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota   |                                                                                                                       | 1.500.000.000 | Dinas Perikanan                                 |
|    |                       |                                                      |                                                                                                       | Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                | 600.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                      |                                                                                                       | Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota            | 900.000.000   |                                                 |
|    |                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian |                                                                                                       |                                                                                                                       | 1.037.493.720 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|    |                       |                                                      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian                                                                |                                                                                                                       | 1.037.493.720 |                                                 |
|    |                       |                                                      |                                                                                                       | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi               | 219.480.045   |                                                 |
|    |                       |                                                      |                                                                                                       | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian                                                                    | 818.013.675   |                                                 |
|    |                       |                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                       |               |                                                 |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                         | Kegiatan Prioritas               | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                 | Pagu Anggaran | Keterangan                                      |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|    |                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian   |                                  |                                                                                                                                                                              | 8.250.931.984 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |
|    |                       |                                                           | Pengembangan Prasarana Pertanian |                                                                                                                                                                              | 1.522.833.515 |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya                                                                                                            | 375.134.978   |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | 897.698.537   |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota                                                                           | 250.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                           | Pembangunan Prasarana Pertanian  |                                                                                                                                                                              | 6.728.098.469 | Dinas Pertanian Tanaman                         |
|    |                       |                                                           |                                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian                                                                                                                  | 250.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                                                                  | 860.924.469   |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit                                                                                                                         | 190.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air                                                                                                                         | 198.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya                                                                             | 450.000.000   |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                                                                                       | 3.879.174.000 |                                                 |
|    |                       |                                                           |                                  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani                                                                                                                    | 900.000.000   |                                                 |
|    |                       | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |                                  |                                                                                                                                                                              | 150.012.640   | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura |



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                           | Kegiatan Prioritas                                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                  | Pagu Anggaran        | Keterangan                                              |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                             | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                                     |                                                                                               | 150.012.640          |                                                         |
|    |                       |                                                             |                                                                                                      | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 150.012.640          |                                                         |
|    |                       | <b>Program Perizinan Usaha Pertanian</b>                    |                                                                                                      |                                                                                               | <b>132.568.910</b>   | <b>Dinas Pertanian Tanaman</b>                          |
|    |                       |                                                             | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                   |                                                                                               | 132.568.910          |                                                         |
|    |                       |                                                             |                                                                                                      | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                           | 132.568.910          |                                                         |
|    |                       | <b>Program Penyuluhan Pertanian</b>                         |                                                                                                      |                                                                                               | <b>1.014.596.940</b> | <b>Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>  |
|    |                       |                                                             | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                                     |                                                                                               | 1.014.596.940        |                                                         |
|    |                       |                                                             |                                                                                                      | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                  | 497.932.659          |                                                         |
|    |                       |                                                             |                                                                                                      | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                               | 246.664.281          |                                                         |
|    |                       |                                                             |                                                                                                      | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                          | 270.000.000          |                                                         |
|    |                       | <b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b> |                                                                                                      |                                                                                               | <b>3.051.273.584</b> | <b>Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan</b> |
|    |                       |                                                             | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                               | 1.433.727.738        |                                                         |
|    |                       |                                                             |                                                                                                      | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman                                                        | 586.780.000          |                                                         |
|    |                       |                                                             |                                                                                                      | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                 | 846.947.738          |                                                         |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                             | Pagu Anggaran | Keterangan                                     |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|    |                       |                   | Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                          | 120.995.000   | Dinas Pkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                   |                                                                                                                    | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak | 120.995.000   |                                                |
|    |                       |                   | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer                                                                          |                                                                          | 158.451.000   | Dinas Pkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                   |                                                                                                                    | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan              | 158.451.000   |                                                |
|    |                       |                   | Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit                                                   |                                                                          | 559.767.000   | Dinas Pkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                   | Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                       |                                                                          |               |                                                |
|    |                       |                   |                                                                                                                    | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                  | 559.767.000   |                                                |
|    |                       |                   | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain    |                                                                          | 778.332.846   | Dinas Pkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                   |                                                                                                                    | Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain    | 778.332.846   |                                                |





| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                                       | Kegiatan Prioritas                                                                                                  | Sub Kegiatan                                                                           | Pagu Anggaran | Keterangan                                     |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|    |                       | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 |                                                                                                                     |                                                                                        | 1.777.270.000 | Dinas Pkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                                                                         | Pengembangan Prasarana Pertanian                                                                                    |                                                                                        | 284.412.000   |                                                |
|    |                       |                                                                         |                                                                                                                     | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian               | 284.412.000   |                                                |
|    |                       |                                                                         | Pembangunan Prasarana Pertanian                                                                                     |                                                                                        | 1.492.858.000 | Dinas Pkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                                                                         |                                                                                                                     | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                            | 1.300.858.000 |                                                |
|    |                       |                                                                         |                                                                                                                     | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                 | 192.000.000   |                                                |
|    |                       | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner |                                                                                                                     |                                                                                        | 813.086.000   | Dinas Pkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                                                                         | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota |                                                                                        | 544.336.000   |                                                |
|    |                       |                                                                         |                                                                                                                     | Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular                           | 86.693.000    |                                                |
|    |                       |                                                                         |                                                                                                                     | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 457.643.000   |                                                |



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                         | Kegiatan Prioritas                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                            | Pagu Anggaran | Keterangan                                       |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|
|    |                       |                                                           | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner         |                                                                                                         | 98.254.000    | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                                                           |                                                                                    | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                                             | 98.254.000    |                                                  |
|    |                       |                                                           | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan                    |                                                                                                         | 170.496.000   | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                                                           |                                                                                    | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha                                                 | 170.496.000   |                                                  |
|    |                       | Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian |                                                                                    |                                                                                                         | 362.637.000   | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                                                           | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                   |                                                                                                         | 362.637.000   |                                                  |
|    |                       |                                                           |                                                                                    | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan           | 199.641.000   |                                                  |
|    |                       |                                                           |                                                                                    | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 162.996.000   |                                                  |
|    |                       | Program Perizinan Usaha Pertanian                         |                                                                                    |                                                                                                         | 189.000.000   | Dinas Pekarbunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|    |                       |                                                           | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                         | 189.000.000   |                                                  |
|    |                       |                                                           |                                                                                    | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                                     | 189.000.000   |                                                  |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                           | Kegiatan Prioritas                                                              | Sub Kegiatan                                                                                             | Pagu Anggaran | Keterangan                                                       |
|----|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
|    |                       | Program Penyuluhan Pertanian                |                                                                                 |                                                                                                          | 1.104.126.000 | Dinas<br>Pekerbunan,<br>Peternakan<br>dan<br>Kesehatan<br>Hewan  |
|    |                       |                                             | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                                |                                                                                                          | 1.104.126.000 |                                                                  |
|    |                       |                                             |                                                                                 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa                             | 375.098.000   |                                                                  |
|    |                       |                                             |                                                                                 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa                                          | 256.598.000   |                                                                  |
|    |                       |                                             |                                                                                 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                                     | 401.649.000   |                                                                  |
|    |                       |                                             |                                                                                 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota                      | 70.781.000    |                                                                  |
|    |                       | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi |                                                                                 |                                                                                                          | 100.000.000   | Dinas<br>Perdagangan,<br>Koperasi dan<br>Usaha Kecil<br>Menengah |
|    |                       |                                             | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit                |                                                                                                          | 100.000.000   |                                                                  |
|    |                       |                                             | Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |                                                                                                          |               |                                                                  |
|    |                       |                                             |                                                                                 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000   |                                                                  |



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                                        | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                             | Sub Kegiatan                                                                                       | Pagu Anggaran | Keterangan                                           |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|    |                       | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                    | 150.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                                          | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                         |                                                                                                    | 150.000.000   |                                                      |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                                | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota                         | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                                | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan | 100.000.000   |                                                      |
|    |                       | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian                             |                                                                                                                                                                |                                                                                                    | 50.000.000    | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                                          | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                    | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                                | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi    | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) |                                                                                                                                                                |                                                                                                    | 210.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                                          | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui endataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan an Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                                                                                                    | 210.000.000   |                                                      |
|    |                       |                                                                          |                                                                                                                                                                | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro                                                         | 60.000.000    |                                                      |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                 | Kegiatan Prioritas                                                                        | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Pagu Anggaran | Keterangan                                           |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                   |                                                                                           | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro                                                                                                                                       | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                   |                                                                                           | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                    | 100.000.000   |                                                      |
|    |                       | Program Pengembangan UMKM                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 50.000.000    | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                   | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha                         |                                                                                                                                                                                  | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                   |                                                                                           | Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                                         | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       | Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan      |                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 50.000.000    | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                   | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin                    |                                                                                                                                                                                  | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                   |                                                                                           | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan |                                                                                           |                                                                                                                                                                                  | 100.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                   | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya |                                                                                                                                                                                  | 100.000.000   |                                                      |



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                                   | Kegiatan Prioritas                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                         | Pagu Anggaran | Keterangan                                           |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|    |                       |                                                                     |                                                                                                        | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                   | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                                     |                                                                                                        | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                 | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting |                                                                                                        |                                                                                                      | 360.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                                     | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/           |                                                                                                      | 80.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                                     |                                                                                                        | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat | 80.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                                     | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota |                                                                                                      | 130.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                                     |                                                                                                        | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada                             | 50.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                                     |                                                                                                        | Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                                         |               |                                                      |
|    |                       |                                                                     |                                                                                                        | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota      | 80.000.000    |                                                      |
|    |                       |                                                                     | Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                                      | 150.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                                     |                                                                                                        | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                  | 150.000.000   |                                                      |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                    | Kegiatan Prioritas                                                            | Sub Kegiatan                                                                 | Pagu Anggaran | Keterangan                                           |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|    |                       | Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen      |                                                                               |                                                                              | 450.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan          |                                                                              | 450.000.000   |                                                      |
|    |                       |                                                      |                                                                               | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                         | 300.000.000   |                                                      |
|    |                       |                                                      |                                                                               | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                        | 150.000.000   |                                                      |
|    |                       | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri |                                                                               |                                                                              | 100.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |                                                                              | 100.000.000   |                                                      |
|    |                       |                                                      |                                                                               | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 100.000.000   |                                                      |
|    |                       | Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri |                                                                               |                                                                              | 100.000.000   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
|    |                       |                                                      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri |                                                                              | 100.000.000   |                                                      |



| No | Prioritas Pembangunan                                                | Program Prioritas                                       | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                     | Sub Kegiatan                                                                          | Pagu Anggaran | Keterangan                       |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|
|    |                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                        | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota          | 100.000.000   |                                  |
|    |                                                                      | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |                                                                                                                                                        |                                                                                       | 11.100.000    | Inspektorat                      |
|    |                                                                      |                                                         | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                                                                              |                                                                                       |               |                                  |
|    |                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                        | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                                       | 11.100.000    |                                  |
|    |                                                                      | Program Perekonomian dan Pembangunan                    |                                                                                                                                                        |                                                                                       | 784.740.220   | Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah |
|    |                                                                      |                                                         | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian                                                                                                                     |                                                                                       | 784.740.220   |                                  |
|    |                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                        | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 283.203.250   |                                  |
|    |                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                        | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian                                              | 330.025.300   |                                  |
|    |                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                        | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                        | 171.511.670   |                                  |
| 2  | Infrastruktur Pekerjaan Umum) dan (Perumahan Dan Kawasan Permukiman) | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)               |                                                                                                                                                        |                                                                                       | 5.500.000.000 | Dinas PUPR                       |
|    |                                                                      |                                                         | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                       | 5.500.000.000 |                                  |





| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                                | Kegiatan Prioritas                                                                       | Sub Kegiatan                                                                             | Pagu Anggaran | Keterangan |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan                                                   | 250.000.000   |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Pembangunan Bendung Irigasi                                                              | 1.000.000.000 |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa                                                        | 250.000.000   |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan                                                   | 250.000.000   |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                  | 250.000.000   |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                             | 1.000.000.000 |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                      | 1.000.000.000 |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                 | 1.000.000.000 |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi                                                | 250.000.000   |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | 250.000.000   |            |
|    |                       | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |                                                                                          |                                                                                          | 1.500.000.000 | Dinas PUPR |
|    |                       |                                                                  | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                          | 1.500.000.000 |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    | 250.000.000   |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa           | 250.000.000   |            |
|    |                       |                                                                  |                                                                                          | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                        | 1.000.000.000 |            |



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                    | Kegiatan Prioritas                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                             | Pagu Anggaran  | Keterangan |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|    |                       | Program Pengelolaan Dan                              |                                                                                                 |                                                                                                          | 1.400.000.000  | Dinas PUPR |
|    |                       | Penge,mbangan Sistem Air Limbah                      |                                                                                                 |                                                                                                          |                |            |
|    |                       |                                                      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota             |                                                                                                          | 1.400.000.000  |            |
|    |                       |                                                      |                                                                                                 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 1.000.000.000  |            |
|    |                       |                                                      |                                                                                                 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                      | 200.000.000    |            |
|    |                       |                                                      |                                                                                                 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu               | 200.000.000    |            |
|    |                       | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase |                                                                                                 |                                                                                                          | 11.200.000.000 | Dinas PUPR |
|    |                       |                                                      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah |                                                                                                          | 11.200.000.000 |            |
|    |                       |                                                      |                                                                                                 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                    | 10.000.000.000 |            |
|    |                       |                                                      |                                                                                                 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan                             | 200.000.000    |            |
|    |                       |                                                      |                                                                                                 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                       | 1.000.000.000  |            |
|    |                       | Program Penyelenggaraan Jalan                        |                                                                                                 |                                                                                                          | 80.000.000.000 | Dinas PUPR |
|    |                       |                                                      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                                                            |                                                                                                          | 80.000.000.000 |            |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas              | Kegiatan Prioritas                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                               | Pagu Anggaran  | Keterangan   |
|----|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|    |                       |                                |                                                                                                 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 500.000.000    |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                        | 1.000.000.000  |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Pembangunan Jalan                                                                                                                          | 43.000.000.000 |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | 10.000.000.000 |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                                                                                                 | 2.000.000.000  |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                           | 1.000.000.000  |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                                                                                                | 1.000.000.000  |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | 5.000.000.000  |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | 10.000.000.000 |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | 1.000.000.000  |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Rehabilitasi Jalan                                                                                                                         | 4.000.000.000  |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | 1.500.000.000  |              |
|    |                       | Program Pengembangan Perumahan |                                                                                                 |                                                                                                                                            | 910.000.000    | Dinas PERKIM |
|    |                       |                                | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota |                                                                                                                                            | 510.000.000    |              |
|    |                       |                                |                                                                                                 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                                       | 100.000.000    |              |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                 | Kegiatan Prioritas                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                 | Pagu Anggaran        | Keterangan   |
|----|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                              | 75.000.000           |              |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                             | 75.000.000           |              |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                   | 50.000.000           |              |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                | 160.000.000          |              |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                             | 50.000.000           |              |
|    |                       |                                   | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota          |                                                                                                                              | 400.000.000          |              |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana                                                                                       | 200.000.000          |              |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana                                                                                        | 200.000.000          |              |
|    |                       | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b> |                                                                                                 |                                                                                                                              | <b>2.665.666.800</b> | Dinas PERKIM |
|    |                       |                                   | Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman                                 |                                                                                                                              | 160.000.000          |              |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 100.000.000          |              |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman                                                               | 60.000.000           |              |
|    |                       |                                   | Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                                                                                                                              | 895.666.800          | Dinas PERKIM |
|    |                       |                                   |                                                                                                 | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                            | 795.666.800          |              |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                                    | Kegiatan Prioritas                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                                                                               | Pagu Anggaran         | Keterangan          |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                                                                                 | 100.000.000           |                     |
|    |                       |                                                                      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |                                                                                                                                                                            | 1.610.000.000         | Dinas PERKIM        |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                                                                                           | 500.000.000           |                     |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU                                                                                                                    | 100.000.000           |                     |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                                                                             | 110.000.000           |                     |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                          | 100.000.000           |                     |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                                                         | 300.000.000           |                     |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                                                                                             | 500.000.000           |                     |
|    |                       | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>                |                                                                                    |                                                                                                                                                                            | <b>12.000.000.000</b> | <b>Dinas PERKIM</b> |
|    |                       |                                                                      | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota       |                                                                                                                                                                            | 12.000.000.000        |                     |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha | 12.000.000.000        |                     |
|    |                       | <b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)</b> |                                                                                    |                                                                                                                                                                            | <b>14.077.121.601</b> | <b>Dinas PERKIM</b> |
|    |                       |                                                                      | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                               |                                                                                                                                                                            | 14.077.121.601        |                     |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                       | 185.000.000           |                     |
|    |                       |                                                                      |                                                                                    | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                 | 13.292.121.601        |                     |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas              | Kegiatan Prioritas                   | Sub Kegiatan                                                                                       | Pagu Anggaran  | Keterangan                                |
|----|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
|    |                       |                                |                                      | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | 100.000.000    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                                            | 500.000.000    |                                           |
| 3  | Pendidikan            | Program Pengelolaan Pendidikan |                                      |                                                                                                    | 99.716.620.867 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga |
|    |                       |                                | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar |                                                                                                    | 58.702.463.002 |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                           | 709.800.000    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                                                           | 450.000.000    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                   | 236.600.000    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                 | 3.728.440.000  |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                     | 592.200.000    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                            | 1.800.000.000  |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                            | 200.000.000    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                       | 338.584.900    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                   | 28.536.795.669 |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar           | 155.000.000    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                        | 152.239.750    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                                                 | -              |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                           | 65.149.904     |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                             | 250.000.000    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                      | 171.259.620    |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                               | 2.972.928.000  |                                           |
|    |                       |                                |                                      | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                       | 7.312.400.000  |                                           |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas                              | Sub Kegiatan                                                                                        | Pagu Anggaran  | Keterangan                                     |
|----|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|    |                       |                   |                                                 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                   | 5.152.715.159  |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 5.878.350.000  |                                                |
|    |                       |                   | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |                                                                                                     | 31.360.361.865 | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan<br>Dan Olahraga |
|    |                       |                   |                                                 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 1.132.600.000  |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 740.250.000    |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | 680.000.000    |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             | 863.250.000    |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                        | 367.394.306    |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 24.256.790.046 |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 150.000.000    |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                 | 75.000.000     |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       | 269.001.608    |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                   | 1.613.500.905  |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | 1.212.575.000  |                                                |
|    |                       |                   | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)    |                                                                                                     | 7.734.196.000  | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan<br>Dan Olahraga |
|    |                       |                   |                                                 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                           | 450.000.000    |                                                |
|    |                       |                   |                                                 | Pengadaan Mebel PAUD                                                                                | 175.000.000    |                                                |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas                          | Sub Kegiatan                                                                                    | Pagu Anggaran | Keterangan                                     |
|----|-----------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
|    |                       |                   |                                             | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                                    | 400.000.000   |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                             | 597.403.000   |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                    | 1.420.000.000 |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                        | 155.000.000   |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                       |               |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                 | 75.000.000    |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                   | 271.593.000   |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                    | 4.190.200.000 |                                                |
|    |                       |                   | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                                                 | 1.919.600.000 | Dinas Pendidikan<br>Kepemudaan<br>Dan Olahraga |
|    |                       |                   |                                             | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 150.000.000   |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                | 95.000.000    |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                               | -             |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                 | 150.000.000   |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                   | 150.000.000   |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                               | 624.600.000   |                                                |
|    |                       |                   |                                             | Pembangunan Ruang Laboratorium                                                                  | 750.000.000   |                                                |





| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                                          | Kegiatan Prioritas                                                                                                                         | Sub Kegiatan                                                                                                                      | Pagu Anggaran  | Keterangan                               |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
|    |                       | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 151.000.000    | Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga |
|    |                       |                                                                            | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                                                                                                                   | 151.000.000    |                                          |
|    |                       |                                                                            |                                                                                                                                            | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | 76.000.000     |                                          |
|    |                       |                                                                            |                                                                                                                                            | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 75.000.000     |                                          |
| 4  | Kesehatan             | Program Pemenuhan paya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |                                                                                                                                            |                                                                                                                                   | 20.425.876.530 | Dinas Kesehatan                          |
|    |                       |                                                                            | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                   | 5.744.140.530  |                                          |
|    |                       |                                                                            |                                                                                                                                            | Pembangunan Puskesmas                                                                                                             | 1.000.000.000  |                                          |
|    |                       |                                                                            |                                                                                                                                            | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                           | 1.737.210.530  |                                          |
|    |                       |                                                                            |                                                                                                                                            | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                       | 20.000.000     |                                          |
|    |                       |                                                                            |                                                                                                                                            | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                         | 20.000.000     |                                          |
|    |                       |                                                                            |                                                                                                                                            | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan                   | 2.966.930.000  |                                          |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas | Kegiatan Prioritas                                                                   | Sub Kegiatan                                                                                                        | Pagu Anggaran  | Keterangan      |
|----|-----------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|    |                       |                   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                     | 14.261.855.000 | Dinas Kesehatan |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                           | 30.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                        | -              |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                     | 20.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                              | 20.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                                          | 25.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                                                                 | 20.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                                                                    | 20.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                | 45.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                          | 65.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                                                    | 15.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                          | 30.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                                  | 30.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)                                | 40.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 60.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | 20.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                                                                  | 25.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | 25.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             | 25.000.000     |                 |
|    |                       |                   |                                                                                      | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya                     | -              |                 |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                                                  | Kegiatan Prioritas                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                           | Pagu Anggaran        | Keterangan      |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                       | 400.000.000          |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)                             | 5.000.000            |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                                         | 2.000.000            |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                 | 69.000.000           |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                               | 12.000.900.000       |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah                                             | 3.000.000            |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                                                   | 25.000.000           |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                      | 600.000.000          |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota                                           | 150.000.000          |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | -                    |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                             | 455.955.000          |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                                              | 10.000.000           |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                                               | 1.000.000            |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                                                                | 10.000.000           |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                                                        | 15.000.000           |                 |
|    |                       |                                                                                    | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                              |                                                                                                        | 419.881.000          | Dinas Kesehatan |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                 | 419.881.000          |                 |
|    |                       | <b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b> |                                                                                             |                                                                                                        | <b>2.455.000.000</b> | <b>RSUD</b>     |
|    |                       |                                                                                    | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                        | 2.000.000.000        |                 |
|    |                       |                                                                                    |                                                                                             | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                      | 500.000.000          |                 |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas           | Kegiatan Prioritas                                                                                                                                 | Sub Kegiatan                                                                                                    | Pagu Anggaran | Keterangan   |
|----|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                       | 500.000.000   |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas                                                         | 500.000.000   |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                       | 250.000.000   |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 250.000.000   |              |
|    |                       |                             | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                 | 455.000.000   | RSUD         |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                          | 455.000.000   |              |
| 5  | Sosial                | Program Pemberdayaan Sosial |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | 2.804.000.000 | Dinas Sosial |
|    |                       |                             | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |                                                                                                                 | 2.804.000.000 |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                               | 570.000.000   |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | 285.000.000   |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                    | 914.000.000   |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota      | 950.000.000   |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)         | 85.000.000    |              |
|    |                       | Program Rehabilitasi Sosial |                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | 1.485.400.000 | Dinas Sosial |
|    |                       |                             | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                                                                                                                 | 1.115.400.000 |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Penyediaan Permakanan                                                                                           | 120.400.000   |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Penyediaan Sandang                                                                                              | 25.000.000    |              |
|    |                       |                             |                                                                                                                                                    | Penyediaan Alat Bantu                                                                                           | 395.000.000   |              |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                                      | Kegiatan Prioritas                                                                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                 | Pagu Anggaran | Keterangan                           |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                     | 250.000.000   |                                      |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                | 325.000.000   |                                      |
|    |                       |                                                        | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |                                                                                                                                              | 370.000.000   | Dinas Sosial                         |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Penyediaan Sandang                                                                                                                           | 20.000.000    |                                      |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                     | 350.000.000   |                                      |
|    |                       | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial                |                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 2.889.900.000 | Dinas Sosial                         |
|    |                       |                                                        | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                     |                                                                                                                                              | 2.889.900.000 |                                      |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                         | 85.000.000    |                                      |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | 183.500.000   |                                      |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                             | 2.056.000.000 |                                      |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                           | 565.400.000   |                                      |
|    |                       | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 1.550.000.000 | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
|    |                       |                                                        | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi                                                                               |                                                                                                                                              | 1.550.000.000 |                                      |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi                                   | 1.000.000.000 |                                      |
|    |                       |                                                        |                                                                                                                                 | Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja | 50.000.000    |                                      |



| No | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas               | Kegiatan Prioritas                                                                                                          | Sub Kegiatan                                                                                                                                                     | Pagu Anggaran | Keterangan                           |
|----|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                                                                                  | 500.000.000   |                                      |
|    |                       | Program Penempatan Tenaga Kerja |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | 250.000.000   |                                      |
|    |                       |                                 | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                                  | 250.000.000   |                                      |
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Pelayanan antar Kerja                                                                                                                                            | 50.000.000    |                                      |
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas                                                                                                                         | 100.000.000   |                                      |
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                                                                       | 100.000.000   |                                      |
|    |                       | Program Hubungan Industrial     |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                  | 380.000.000   | Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja |
|    |                       |                                 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                  | 380.000.000   |                                      |
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan                                                                               | 90.000.000    |                                      |
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 100.000.000   |                                      |
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | 90.000.000    |                                      |
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                       | 50.000.000    |                                      |
|    |                       |                                 |                                                                                                                             | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                         | 50.000.000    |                                      |



**Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No                                                           | Prioritas Pembangunan | Program Prioritas                         | Kegiatan Prioritas                                                                     | Sub Kegiatan                                                                                                                                         | Pagu Anggaran   | Keterangan                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
|                                                              |                       | Program Pengembangan Kebudayaan           |                                                                                        |                                                                                                                                                      | 527.150.890     | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
|                                                              |                       |                                           | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                      | 527.150.890     |                                 |
|                                                              |                       |                                           |                                                                                        | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan | 527.150.890     |                                 |
|                                                              |                       | Program Pengembangan Kesenian Tradisional |                                                                                        |                                                                                                                                                      | 890.000.000     | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan |
|                                                              |                       |                                           | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                                      | 890.000.000     |                                 |
|                                                              |                       |                                           |                                                                                        | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                                       | 890.000.000     |                                 |
| Total Pagu Prioritas Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2024 |                       |                                           |                                                                                        |                                                                                                                                                      | 298.441.284.292 |                                 |



**Tabel 1. 28**  
**Matrik Anggaran dan Realisasi Kegiatan**  
**Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Kampar**

| NO       | Usan<br>Pemerintahan<br>Daerah                             | Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                               | Alokasi Anggaran<br>Belanja | Realisasi Belanja           | %            |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1        | 2                                                          | 3                                                                                  | 4                           | 5                           | 6            |
| <b>A</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>                                 |                                                                                    |                             |                             |              |
| <b>I</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b> |                                                                                    |                             |                             |              |
| <b>1</b> | <b>URUSAN PENDIDIKAN</b>                                   |                                                                                    | <b>1.057.454.598.690,73</b> | <b>1.016.376.582.916,00</b> |              |
|          | Dinas Pendidikan                                           |                                                                                    | 1.057.454.598.690,73        | 1.016.376.582.916,00        |              |
|          |                                                            | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>             | <b>719.750.985.253,73</b>   | <b>701.816.511.819,00</b>   | <b>97,51</b> |
|          |                                                            | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                | <b>1.089.471.900,00</b>     | <b>801.055.892,00</b>       | <b>73,53</b> |
|          |                                                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan<br>Perangkat Daerah                                 | 298.667.200,00              | 215.904.677,00              | 72,29        |
|          |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                      | 91.846.300,00               | 74.011.900,00               | 80,58        |
|          |                                                            | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | 698.958.400,00              | 511.139.315,00              | 73,13        |
|          |                                                            | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                      | <b>708.499.989.259,73</b>   | <b>692.293.675.687,00</b>   | <b>97,71</b> |
|          |                                                            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                  | 708.382.399.059,73          | 692.176.640.487,00          | 97,71        |
|          |                                                            | Pelaksanaan Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan<br>SKPD             | 100.000.000,00              | 99.469.000,00               | 99,47        |
|          |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Akhir Tahun<br>SKPD                  | 8.795.200,00                | 8.783.100,00                | 99,86        |
|          |                                                            | Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Keuangan Bulanan<br>/triwulan/semesteran SKPD | 8.795.000,00                | 8.783.100,00                | 99,86        |
|          |                                                            | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</b>                               | <b>456.306.200,00</b>       | <b>303.306.200,00</b>       | <b>66,47</b> |
|          |                                                            | Monitoring, Evaluasi dan Penilaian<br>Kinerja Pegawai                              | 456.306.200,00              | 303.306.200,00              | 66,47        |
|          |                                                            | <b>Administrasi Umum Perangkat daerah</b>                                          | <b>2.166.911.500,00</b>     | <b>2.010.551.269,00</b>     | <b>92,78</b> |
|          |                                                            | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/ Penerangan Bangunan<br>Kantor            | 220.951.500,00              | 217.424.000,00              | 98,40        |
|          |                                                            | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                   | 51.228.000,00               | 25.844.000,00               | 50,45        |
|          |                                                            | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                         | 101.682.000,00              | 91.245.400,00               | 89,74        |





|  |  |  |                                                                                                                  |                           |                           |              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                         | 838.000.000,00            | 831.520.000,00            | 99,23        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 351.985.000,00            | 279.522.369,00            | 79,41        |
|  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                                           | 603.065.000,00            | 564.995.500,00            | 93,69        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                      | <b>6.443.656.394,00</b>   | <b>5.515.946.121,00</b>   | <b>85,60</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 329.930.440,00            | 283.104.739,00            | 85,81        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                | 1.921.216.100,00          | 1.898.512.100,00          | 98,82        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 4.192.509.854,00          | 3.334.329.282,00          | 79,53        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>494.650.000,00</b>     | <b>343.676.650,00</b>     | <b>69,48</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 494.650.000,00            | 343.676.650,00            | 69,48        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                            | <b>325.075.263.525,00</b> | <b>302.794.856.731,00</b> | <b>93,15</b> |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                                                      | <b>196.818.041.379,00</b> | <b>182.518.826.123,00</b> | <b>92,73</b> |
|  |  |  | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                                                                         | 2.056.320.000,00          | 1.962.003.648,00          | 95,41        |
|  |  |  | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                                                                 | 2.513.280.000,00          | 2.407.737.480,00          | 95,80        |
|  |  |  | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                               | 22.321.678.980,00         | 22.321.678.980,00         | 100,00       |
|  |  |  | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                                                                   | 256.390.000,00            | 245.561.360,00            | 95,78        |
|  |  |  | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                                          | 8.470.511.000,00          | 5.887.656.600,00          | 69,51        |
|  |  |  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga                                                                                | 3.143.132.800,00          | 3.118.282.460,00          | 99,21        |
|  |  |  | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                                                     | 737.760.200,00            | 588.631.088,00            | 79,79        |
|  |  |  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                                 | 22.482.643.656,00         | 20.241.253.902,00         | 90,03        |
|  |  |  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                         | 1.528.055.300,00          | 1.364.715.900,00          | 89,31        |
|  |  |  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                                      | 2.996.779.250,00          | 2.974.447.410,00          | 99,25        |
|  |  |  | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                                                                              | 93.265.586.193,00         | 93.244.600.000,00         | 99,98        |
|  |  |  | Peningkatan Kpasitas Pengelolah Dana Bos Sekolah dasar                                                           | 499.999.500,00            | 495.131.850,00            | 99,03        |



|  |  |  |                                                                                                     |                           |                          |              |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |  | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                                                              | 4.341.120.000,00          | 4.170.305.860,00         | 96,07        |
|  |  |  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       | 567.482.700,00            | 512.513.200,00           | 90,31        |
|  |  |  | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                | 3.349.770.800,00          | 2.906.118.184,00         | 86,76        |
|  |  |  | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | 9.988.862.400,00          | 9.505.770.165,00         | 95,16        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik                                                   | 404.259.100,00            | 384.728.121,00           | 95,17        |
|  |  |  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 17.495.834.100,00         | 10.187.689.915,00        | 58,23        |
|  |  |  | <b>Pengelola Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                                | <b>100.404.181.426,00</b> | <b>93.967.218.474,00</b> | <b>93,59</b> |
|  |  |  | Pembangunan Sarana Prasarana Dan Utilitas Sekolah                                                   | 11.301.270.240,00         | 10.898.084.000,00        | 96,43        |
|  |  |  | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 9.598.305.800,00          | 8.882.106.620,00         | 92,54        |
|  |  |  | Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | 5.037.689.000,00          | 2.508.554.760,00         | 49,80        |
|  |  |  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             | 3.082.184.400,00          | 2.461.356.407,00         | 79,86        |
|  |  |  | Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa                                                        | 703.414.750,00            | 598.706.005,00           | 85,11        |
|  |  |  | Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 23.868.356.486,00         | 22.539.575.756,00        | 94,43        |
|  |  |  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 2.004.305.600,00          | 1.790.071.514,00         | 89,31        |
|  |  |  | Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama                                                       | 38.265.300.000,00         | 38.265.300.000,00        | 100,00       |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Menengah Pertama                                 | 74.999.650,00             | 74.282.700,00            | 99,04        |
|  |  |  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       | 1.109.528.400,00          | 912.922.041,00           | 82,28        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                   | 194.661.100,00            | 185.303.931,00           | 95,19        |
|  |  |  | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | 5.164.166.000,00          | 4.850.954.740,00         | 93,93        |
|  |  |  | <b>Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                                                   | <b>22.958.213.920,00</b>  | <b>21.840.602.860,00</b> | <b>95,13</b> |
|  |  |  | Rehabilitasi Sedang Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                           | 3.056.716.420,00          | 2.788.139.950,00         | 91,21        |
|  |  |  | Pengadaan Mebel PAUD                                                                                | 196.110.000,00            | 176.005.000,00           | 89,75        |
|  |  |  | Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Siswa PAUD                                                        | 2.795.000.000,00          | 2.789.553.000,00         | 99,81        |



|  |  |  |                                                                                                                                                    |                         |                         |              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD                                                                                                                | 973.122.800,00          | 508.690.800,00          | 52,27        |
|  |  |  | Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD                                                                                       | 1.695.949.500,00        | 1.695.939.000,00        | 100,00       |
|  |  |  | Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD                                                                                                           | 155.000.200,00          | 122.358.400,00          | 78,94        |
|  |  |  | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                                          | 11.002.800.000,00       | 10.808.394.000,00       | 98,23        |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                                                                                    | 74.999.500,00           | 47.675.800,00           | 63,57        |
|  |  |  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                                                                      | 760.517.500,00          | 692.777.850,00          | 91,09        |
|  |  |  | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                                                                       | 2.247.998.000,00        | 2.211.069.060,00        | 98,36        |
|  |  |  | <b>Pengelola Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                                                                                   | <b>4.705.972.800,00</b> | <b>3.764.517.220,00</b> | <b>79,99</b> |
|  |  |  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                                    | 149.942.000,00          | -                       | -            |
|  |  |  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                   | 94.942.100,00           | -                       | -            |
|  |  |  | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                                                                                  | 3.708.300.000,00        | 3.615.174.000,00        | 97,49        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                                                                      | 289.050.800,00          | -                       | -            |
|  |  |  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                                                                      | 149.979.600,00          | 149.343.220,00          | 99,58        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik                                                                                                  | 313.758.300,00          | -                       | -            |
|  |  |  | Program Pengembangan Kurikulum                                                                                                                     | 716.316.800,00          | 377.204.100,00          |              |
|  |  |  | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>                                                                                           | <b>641.373.100,00</b>   | <b>337.256.000,00</b>   | <b>52,58</b> |
|  |  |  | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                                   | 275.000.000,00          | -                       | -            |
|  |  |  | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                                                                                       | 366.373.100,00          | 337.256.000,00          | 92,05        |
|  |  |  | <b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usian Dini Dan Pendidikan Nonformal</b>                                                        | <b>74.943.700,00</b>    | <b>39.948.100,00</b>    | <b>53,30</b> |
|  |  |  | Penyusun Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usian Dini Dan Pendidikan Nonformal                                                      | 74.943.700,00           | 39.948.100,00           | 53,30        |
|  |  |  | <b>Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</b>                                                                                                    | <b>150.999.000,00</b>   | <b>0</b>                |              |
|  |  |  | <b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b> | <b>150.999.000,00</b>   | <b>-</b>                | <b>-</b>     |



|   |                         |                                                                              |                                                                                                                                    |                           |                           |              |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|   |                         |                                                                              | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan       | 75.999.100,00             | -                         | -            |
|   |                         |                                                                              | Penataan Pendistribusian Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | 74.999.900,00             | -                         | -            |
| 2 | <b>URUSAN KESEHATAN</b> |                                                                              |                                                                                                                                    | <b>347.427.755.778,00</b> | <b>326.476.745.944,89</b> | <b>93,97</b> |
|   | Dinas Kesehatan         |                                                                              |                                                                                                                                    | <b>347.427.755.778,00</b> | <b>326.476.745.944,89</b> | <b>93,97</b> |
|   |                         | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>           |                                                                                                                                    | <b>206.388.899.384,00</b> | <b>196.977.840.125,00</b> | 95,44        |
|   |                         | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      |                                                                                                                                    | <b>1.595.150.900,00</b>   | <b>1.075.412.553,00</b>   | 67,42        |
|   |                         |                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                    | 957.283.100,00            | 695.960.453,00            | 72,70        |
|   |                         |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd                                                                                         | 39.918.900,00             | 18.939.000,00             | 47,44        |
|   |                         |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd                                                                               | 44.530.700,00             | 26.229.500,00             | 58,90        |
|   |                         |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                                              | 231.748.900,00            | 105.793.600,00            | 45,65        |
|   |                         |                                                                              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                  | 321.669.300,00            | 228.490.000,00            | 71,03        |
|   |                         | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |                                                                                                                                    | <b>154.676.549.715,00</b> | <b>151.052.873.157,00</b> | 97,66        |
|   |                         |                                                                              | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                                  | 154.397.145.715,00        | 150.920.369.157,00        | 97,75        |
|   |                         |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                                        | 279.404.000,00            | 132.504.000,00            | 47,42        |
|   |                         | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             |                                                                                                                                    | <b>228.149.200,00</b>     | <b>196.809.200,00</b>     | 86,26        |
|   |                         |                                                                              | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi                                                                      | 76.900.000,00             | 76.710.000,00             | 99,75        |
|   |                         |                                                                              | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                         | 151.249.200,00            | 120.099.200,00            | 79,40        |
|   |                         | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                                                                                                                                    | <b>3.526.676.333,00</b>   | <b>3.140.548.290,00</b>   | 89,05        |
|   |                         |                                                                              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                   | 20.113.000,00             | 19.875.000,00             | 98,82        |
|   |                         |                                                                              | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                                       | 2.037.434.333,00          | 1.930.715.615,00          | 94,76        |
|   |                         |                                                                              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                   | 162.238.000,00            | 150.220.000,00            | 92,59        |
|   |                         |                                                                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                            | 61.150.000,00             | 15.000.000,00             | 24,53        |
|   |                         |                                                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                               | 1.245.741.000,00          | 1.024.737.675,00          | 82,26        |
|   |                         | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                                                                                    | <b>659.136.000,00</b>     | <b>571.500.000,00</b>     | 86,70        |
|   |                         |                                                                              | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                  | 659.136.000,00            | 571.500.000,00            | 86,70        |
|   |                         | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                                                    | <b>7.121.938.800,00</b>   | <b>6.501.782.500,00</b>   | 91,29        |
|   |                         |                                                                              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                            | 370.802.800,00            | 330.154.500,00            | 89,04        |
|   |                         |                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | 6.751.136.000,00          | 6.171.628.000,00          | 91,42        |
|   |                         | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                                    | <b>2.322.866.600,00</b>   | <b>2.264.521.439,00</b>   | 97,49        |



|  |  |  |                                                                                                                                 |                           |                           |        |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan             | 294.651.500,00            | 291.684.909,00            | 98,99  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                 | 772.091.500,00            | 742.666.530,00            | 96,19  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                                        | 60.100.000,00             | 38.185.000,00             | 63,54  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                              | 1.196.023.600,00          | 1.191.985.000,00          | 99,66  |
|  |  |  | <b>Peningkatan Pelayanan Blud</b>                                                                                               | <b>36.258.431.836,00</b>  | <b>32.174.392.986,00</b>  | 88,74  |
|  |  |  | Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud                                                                                          | 36.258.431.836,00         | 32.174.392.986,00         | 88,74  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                              | <b>27.614.186.010,00</b>  | <b>25.859.980.024,00</b>  | 93,65  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                              | <b>27.614.186.010,00</b>  | <b>25.859.980.024,00</b>  | 93,65  |
|  |  |  | Pembangunan Puskesmas                                                                                                           | 5.926.855.000,00          | 5.541.999.000,00          | 93,51  |
|  |  |  | Pengembangan Puskesmas                                                                                                          | 7.661.405.000,00          | 7.553.302.050,00          | 98,59  |
|  |  |  | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                                        | 197.349.000,00            | 562.552.000,00            | 285,05 |
|  |  |  | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Puskesmas                                                                                         | 4.252.801.500,00          | 4.137.878.500,00          | 97,30  |
|  |  |  | Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                       | 1.627.647.700,00          | 816.616.600,00            | 50,17  |
|  |  |  | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                                     | 2.963.260.000,00          | 2.861.000.000,00          | 96,55  |
|  |  |  | Pengadaan Dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                                       | 13.500.000,00             | 0                         | 0,00   |
|  |  |  | Pemeliharaan Rutin Dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                | 266.000.400,00            | 183.303.624,00            | 68,91  |
|  |  |  | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Di Fasilitas Kesehatan                  | 4.545.127.410,00          | 4.047.947.250,00          | 89,06  |
|  |  |  | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan Dan Minuman Ke Fasilitas Kesehatan | 160.240.000,00            | 155.381.000,00            | 96,97  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                              | <b>111.582.088.384,00</b> | <b>102.088.623.405,89</b> | 91,49  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     | <b>100.386.602.984,00</b> | <b>91.245.588.198,89</b>  | 90,89  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                                                                                       | 1.359.722.650,00          | 1.276.949.600,00          | 93,91  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                    | 432.434.000,00            | 308.675.644,00            | 71,38  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                                                                 | 202.374.200,00            | 201.842.100,00            | 99,74  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                                                                                          | 236.536.300,00            | 234.771.300,00            | 99,25  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar                                                                      | 1.922.811.300,00          | 1.833.840.550,00          | 95,37  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif                                                                             | 208.837.200,00            | 206.501.154,00            | 98,88  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut                                                                                | 19.998.800,00             | 19.950.000,00             | 99,76  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                                                                            | 43.710.000,00             | 43.110.000,00             | 98,63  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                                                      | 1.487.077.900,00          | 1.443.248.550,00          | 97,05  |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat                                                                | 13.030.000,00             | 12.621.741,00             | 96,87  |



|  |  |  |                                                                                                                     |                       |                       |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                          | 3.453.301.500,00      | 3.396.416.250,00      | 98,35        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv                                                  | 144.975.000,00        | 121.720.000,00        | 83,96        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (Klb)                                | 39.270.000,00         | 36.070.000,00         | 91,85        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana Dan/Atau Berpotensi Bencana | 90.312.200,00         | 60.152.200,00         | 66,60        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                                                     | 7.322.336.240,00      | 5.832.343.743,00      | 79,65        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga                                                                  | 201.325.700,00        | 200.991.500,00        | 99,83        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                                                          | 1.274.653.000,00      | 1.244.568.000,00      | 97,64        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                                                             | 1.342.483.800,00      | 1.251.594.500,00      | 93,23        |
|  |  |  | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                                                                    | 1.473.976.000,00      | 1.217.609.124,00      | 82,61        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (Odmk)                                          | 3.960.000,00          | 3.960.000,00          | 100,00       |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza                                                                      | 80.240.000,00         | 74.890.000,00         | 93,33        |
|  |  |  | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular                                                              | 5.393.019.950,00      | 4.818.339.282,00      | 89,34        |
|  |  |  | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                                                                            | 61.625.867.444,00     | 56.631.151.708,00     | 91,90        |
|  |  |  | Deteksi Dini Penyalahgunaan Napza Di Fasyankes Dan Sekolah                                                          | 15.840.000,00         | 15.840.000,00         | 100,00       |
|  |  |  | Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Klb Ke Laboratorium Rujukan/Nasional                         | 29.902.500,00         | 883.200,00            | 2,95         |
|  |  |  | Operasional Pelayanan Puskesmas                                                                                     | 5.491.895.000,00      | 4.805.807.153,89      | 87,51        |
|  |  |  | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                                                   | 1.310.702.000,00      | 1.235.634.330,00      | 94,27        |
|  |  |  | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota                                                        | 107.320.000,00        | 105.734.000,00        | 98,52        |
|  |  |  | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Dan Pemberian Obat Massal)              | 158.075.000,00        | 130.635.000,00        | 82,64        |
|  |  |  | Penyediaan Dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (Spgdt)                                          | 416.364.300,00        | 384.530.000,00        | 92,35        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis                                                           | 259.755.000,00        | 250.805.000,00        | 96,55        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Hiv (Od hiv)                                                           | 97.633.000,00         | 65.506.000,00         | 67,09        |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria                                                                             | 45.000.000,00         | 37.999.085,00         | 84,44        |
|  |  |  | Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok                                                                                     | 184.560.000,00        | 184.560.000,00        | 100,00       |
|  |  |  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                                                                          | 1.002.466.000,00      | 863.675.484,00        | 86,16        |
|  |  |  | Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu Dan Anak                                                                            | 2.870.895.000,00      | 2.674.532.000,00      | 93,16        |
|  |  |  | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</b>                                               | <b>150.000.000,00</b> | <b>0</b>              | <b>0,00</b>  |
|  |  |  | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                                                                              | 150.000.000,00        | 0                     | 0,00         |
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>       | <b>419.234.000,00</b> | <b>402.865.007,00</b> | <b>96,10</b> |
|  |  |  | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan                                                                      | 365.764.000,00        | 352.345.007,00        | 96,33        |
|  |  |  | Penyiapan Perumusan Dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan                                                     | 53.470.000,00         | 50.520.000,00         | 94,48        |
|  |  |  | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                         |                       |                       | #DIV/0 !     |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                         |        |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|
|  |  | <b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                  | <b>33.140.000,00</b>    | <b>32.370.000,00</b>    | 97,68  |
|  |  | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                                                                                                           | 16.680.000,00           | 16.200.000,00           | 97,12  |
|  |  | Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                                                                                                                          | 16.460.000,00           | 16.170.000,00           | 98,24  |
|  |  | <b>Perencanaan Kebutuhan Dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk Ukp Dan Ukm Di Wilayah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                  | <b>8.738.425.000,00</b> | <b>8.622.096.000,00</b> | 98,67  |
|  |  | Perencanaan Dan Distribusi Serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                 | 17.030.000,00           | 16.512.000,00           | 96,96  |
|  |  | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                                                                                                                                          | 8.432.016.000,00        | 8.381.331.000,00        | 99,40  |
|  |  | Pembinaan Dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                                                                                                                                                    | 289.379.000,00          | 224.253.000,00          | 77,49  |
|  |  | <b>Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                    | <b>1.854.686.400,00</b> | <b>1.785.704.200,00</b> | 96,28  |
|  |  | Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                           | 1.854.686.400,00        | 1.785.704.200,00        | 96,28  |
|  |  | <b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMA</b>                                                                                                                                                                         | <b>504.337.800,00</b>   | <b>338.735.600,00</b>   | 67,16  |
|  |  | <b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)</b>                                                                                                                             | <b>63.696.400,00</b>    | <b>50.273.200,00</b>    | 78,93  |
|  |  | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)                                                                             | 63.696.400,00           | 50.273.200,00           | 78,93  |
|  |  | <b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga</b>                                          | <b>246.364.500,00</b>   | <b>133.284.000,00</b>   | 54,10  |
|  |  | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga | 246.364.500,00          | 133.284.000,00          | 54,10  |
|  |  | <b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (Dam)</b>                                                                                 | <b>23.030.000,00</b>    | <b>23.030.000,00</b>    | 100,00 |
|  |  | Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (Tpm) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (Dam)                             | 23.030.000,00           | 23.030.000,00           | 100,00 |
|  |  | <b>Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>                                                                                                         | <b>171.246.900,00</b>   | <b>132.148.400,00</b>   | 77,17  |
|  |  | Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan                                                                                                      | 171.246.900,00          | 132.148.400,00          | 77,17  |
|  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1.338.244.200,00</b> | <b>1.211.566.790,00</b> | 90,53  |
|  |  | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                     | 467.277.400,00          | 436.222.600,00          | 93,35  |



|  |      |  |                                                                                                                    |                           |                           |               |
|--|------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|  |      |  | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat                               | 467.277.400,00            | 436.222.600,00            | 93,35         |
|  |      |  | <b>Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                             | <b>106.734.900,00</b>     | <b>105.085.000,00</b>     | 98,45         |
|  |      |  | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat                                               | 106.734.900,00            | 105.085.000,00            | 98,45         |
|  |      |  | <b>Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbm) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>764.231.900,00</b>     | <b>670.259.190,00</b>     | 87,70         |
|  |      |  | Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (Ukbm)       | 764.231.900,00            | 670.259.190,00            | 87,70         |
|  | RSUD |  |                                                                                                                    | <b>184.637.384.786,00</b> | <b>169.432.705.484,00</b> | <b>91,77</b>  |
|  |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                 | <b>141.587.371.202,00</b> | <b>129.287.403.805,00</b> | <b>91,31</b>  |
|  |      |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                            | <b>45.600.000,00</b>      | <b>45.600.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|  |      |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                         | 11.400.000,00             | 11.400.000,00             | 100,00        |
|  |      |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 11.400.000,00             | 11.400.000,00             | 100,00        |
|  |      |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                 | 11.400.000,00             | 11.400.000,00             | 100,00        |
|  |      |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                                                      | 11.400.000,00             | 11.400.000,00             | 100,00        |
|  |      |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>45.960.994.267,00</b>  | <b>43.547.954.361,00</b>  | <b>94,75</b>  |
|  |      |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 45.960.994.267,00         | 43.547.954.361,00         | 94,75         |
|  |      |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>549.070.000,00</b>     | <b>546.894.840,00</b>     | <b>99,60</b>  |
|  |      |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                                                | 199.320.000,00            | 199.320.000,00            | 100,00        |
|  |      |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         | 349.750.000,00            | 347.574.840,00            | 99,38         |
|  |      |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>7.972.727.168,00</b>   | <b>7.308.152.467,00</b>   | <b>91,66</b>  |
|  |      |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 150.018.800,00            | 140.705.000,00            | 93,79         |
|  |      |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 2.868.816.800,00          | 2.813.789.000,00          | 98,08         |
|  |      |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                  | 2.104.298.336,00          | 1.889.368.936,00          | 89,79         |
|  |      |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 1.583.512.160,00          | 1.306.543.275,00          | 82,51         |
|  |      |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 608.295.072,00            | 505.165.515,00            | 83,05         |
|  |      |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 657.786.000,00            | 652.580.741,00            | 99,21         |
|  |      |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                          | <b>8.202.085.764,00</b>   | <b>7.899.820.184,00</b>   | <b>96,31</b>  |





|  |  |  |                                                                                                                  |                          |                          |              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 2.049.155.460,00         | 1.980.819.544,00         | 96,67        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 6.152.930.304,00         | 5.919.000.640,00         | 96,20        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                       | <b>1.652.670.000,00</b>  | <b>1.458.541.350,00</b>  | <b>88,25</b> |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                         | 1.652.670.000,00         | 1.458.541.350,00         | 88,25        |
|  |  |  | <b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>                                                                                | <b>77.204.224.003,00</b> | <b>68.526.040.603,00</b> | <b>88,76</b> |
|  |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                           | 77.204.224.003,00        | 68.526.040.603,00        | 88,76        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                               | <b>29.775.631.584,00</b> | <b>27.639.176.999,00</b> | <b>92,82</b> |
|  |  |  | <b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>               | <b>29.681.344.584,00</b> | <b>27.545.379.224,00</b> | <b>92,80</b> |
|  |  |  | Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                                                | 16.257.458.904,00        | 15.934.198.914,00        | 98,01        |
|  |  |  | Rehabilitas dan Pemeliharaan Rumah Sakit                                                                         | 929.000.000,00           | 708.472.000,00           | 76,26        |
|  |  |  | Pengadaan alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                      | 6.055.420.076,00         | 5.921.238.756,00         | 97,78        |
|  |  |  | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                                                        | 899.414.474,00           | 764.478.020,00           | 85,00        |
|  |  |  | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan   | 5.540.051.130,00         | 4.216.991.534,00         | 76,12        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | <b>94.287.000,00</b>     | <b>93.797.775,00</b>     | <b>99,48</b> |
|  |  |  | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                                           | 94.287.000,00            | 93.797.775,00            | 99,48        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                               | <b>13.024.382.000,00</b> | <b>12.506.124.680,00</b> | <b>96,02</b> |
|  |  |  | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 13.024.382.000,00        | 12.506.124.680,00        | 96,02        |
|  |  |  | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar                                                 | 13.024.382.000,00        | 12.506.124.680,00        | 96,02        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                          | <b>250.000.000,00</b>    | <b>230.000.000,00</b>    | <b>92,00</b> |



|          |                                                 |                                                                                                                       |                       |                       |              |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          |                                                 | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 250.000.000,00        | 230.000.000,00        | 92,00        |
|          |                                                 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  | 250.000.000,00        | 230.000.000,00        | 92,00        |
| <b>3</b> | <b>URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b> |                                                                                                                       |                       |                       |              |
|          |                                                 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                    | <b>31.471.912.769</b> | <b>17.078.822.945</b> | <b>54,27</b> |
|          |                                                 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                       | <b>865.891.000</b>    | <b>733.865.499</b>    | <b>84,75</b> |
|          |                                                 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                       | 522.205.000           | 516.865.000           | 98,98        |
|          |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                            | 83.425.500            | 78.790.000            | 94,44        |
|          |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                    | 104.760.500           | 103.230.499           | 98,54        |
|          |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                 | 155.500.000           | 34.980.000            | 22,50        |
|          |                                                 | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>13.089.952.917</b> | <b>12.447.198.537</b> | <b>95,09</b> |
|          |                                                 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                     | 13.019.695.417        | 12.447.198.537        | 95,60        |
|          |                                                 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD                                                           | 70.257.500            | 0                     | -            |
|          |                                                 | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>227.030.500</b>    | <b>32850498</b>       | <b>14,47</b> |
|          |                                                 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                | 132.030.500           | 0                     | -            |
|          |                                                 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan                                                          | 95.000.000            | 32.850.498            | 34,58        |
|          |                                                 | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                             | <b>2.788.151.600</b>  | <b>1656980002</b>     | <b>59,43</b> |
|          |                                                 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                      | 23.082.000            | 0                     | -            |
|          |                                                 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                          | 770.731.600           | 0                     | -            |
|          |                                                 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                      | 220.964.000           | 152.851.000           | 69,17        |
|          |                                                 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                               | 145.729.000           | 106.958.000           | 73,40        |
|          |                                                 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                  | 1.589.750.000         | 1.395.072.202         | 87,75        |
|          |                                                 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan                                                            | 37.895.000            | 2.098.800             | 5,54         |



|  |  |  |                                                                                                                                                               |                       |                      |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                   | <b>2.786.381.600</b>  | <b>1.781.168.842</b> | <b>63,92</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                       | 316.056.000           | 200.666.467          | 63,49        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                              | 193.430.000           | 108.806.875          | 56,25        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                         | 2.276.895.600         | 1.471.695.500        | 64,64        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                  | <b>1.343.544.000</b>  | <b>426.759.567</b>   | <b>31,76</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                            | 224.994.000           | 93.631.999           | 41,62        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                             | 388.550.000           | 194.508.618          | 50,06        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar                                                                                     | 730.000.000           | 138.618.950          | 18,99        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                     | <b>10.370.961.152</b> | <b>0</b>             | <b>-</b>     |
|  |  |  | Pengadaan Alat Berat                                                                                                                                          | 10.370.961.152        | 0                    | -            |
|  |  |  | <b>PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>                                                                                                                       | <b>3.349.363.900</b>  | <b>622.912.706</b>   | <b>18,60</b> |
|  |  |  | <b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>3.349.363.900</b>  | <b>622.912.706</b>   | <b>18,60</b> |
|  |  |  | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa                                                                      | 661.945.600           | 0                    | -            |
|  |  |  | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                                       | 41.845.100            | 29.942.882           | 71,56        |
|  |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan                                                                                                           | 1.007.911.400         | 240.730.514          | 23,88        |
|  |  |  | Rehabilitasi Bendung Irigasi                                                                                                                                  | 1.503.845.100         | 352.239.310          | 23,42        |
|  |  |  | Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi                                                                                                                      | 133.816.700           | 0                    | -            |
|  |  |  | <b>PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                                                                                                | <b>7.130.964.535</b>  | <b>3.373.357.696</b> | <b>47,31</b> |
|  |  |  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                               | <b>7.130.964.535</b>  | <b>3.373.357.696</b> | <b>47,31</b> |
|  |  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                                                                         | 923.151.270           | 15.210.000           | 1,65         |
|  |  |  | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                                                                             | 6.207.813.265         | 3.358.147.696        | 54,10        |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  |  | <b>PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6.202.336.979</b>  | <b>5.205.753.536</b>  | <b>83,93</b> |
|  |  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6.202.336.979</b>  | <b>5.205.753.536</b>  | <b>83,93</b> |
|  |  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat                                                                                                                                                                                               | 5.639.119.979         | 5.197.043.536         | 92,16        |
|  |  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                                                                                                                                                                                                                    | 563.217.000           | 8.710.000             | 1,55         |
|  |  | <b>PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9.718.403.502</b>  | <b>3.906.158.500</b>  | <b>40,19</b> |
|  |  | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                                                                                  | <b>9.718.403.502</b>  | <b>3.906.158.500</b>  | <b>40,19</b> |
|  |  | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.983.267.217         | 3.604.359.000         | 40,12        |
|  |  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan                                                                                                                                                                                                                                                     | 735.136.285           | 301.799.500           | 41,05        |
|  |  | <b>PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>66.401.814.673</b> | <b>13.781.355.455</b> | <b>20,75</b> |
|  |  | <b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>                                                                                                                                           | <b>66.401.814.673</b> | <b>13.781.355.455</b> | <b>20,75</b> |
|  |  | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | 20.065.900            | 18.987.000            | 94,62        |
|  |  | Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                           | 19.997.500            | 18.987.000            | 94,95        |
|  |  | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                               | 48.295.101.630        | 10.677.182.440        | 22,11        |
|  |  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung                                                                                                                                                                                                                                               | 19.997.500            | 18.987.000            | 94,95        |
|  |  | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 633.497.500           | 381.972.500           | 60,30        |
|  |  | Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                     | 17.413.154.643        | 2.665.239.515         | 15,31        |



|  |  |                                                                                                                                            |                        |                       |              |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
|  |  | <b>PENYELENGGARA JALAN</b>                                                                                                                 | <b>198.489.835.584</b> | <b>19.731.364.222</b> | <b>9,94</b>  |
|  |  | <b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                                                | <b>198.489.835.584</b> | <b>19.731.364.222</b> | <b>9,94</b>  |
|  |  | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | 1.343.982.700          | 188.466.400           | 14,02        |
|  |  | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                                                                                              | 562.978.800            | 0                     | -            |
|  |  | Pembangunan Jalan                                                                                                                          | 70.994.733.601         | 7.148.340.850         | 10,07        |
|  |  | Rekonstruksi Jalan                                                                                                                         | 91.532.796.290         | 6.887.723.345         | 7,52         |
|  |  | Pemeliharaan Rutin Jalan                                                                                                                   | 4.393.349.694          | 2.911.293.400         | 66,27        |
|  |  | Pembangunan Jembatan                                                                                                                       | 20.613.049.900         | 2.492.803.900         | 12,09        |
|  |  | Rehabilitasi Jembatan                                                                                                                      | 3.003.371.100          | 0                     | -            |
|  |  | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa                                                                        | 6.045.573.500          | 102.736.327           | 1,70         |
|  |  | <b>PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>                                                                                                      | <b>1.131.462.850</b>   | <b>437.698.200</b>    | <b>38,68</b> |
|  |  | <b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</b>                                      | <b>777.605.900</b>     | <b>344.352.100</b>    | <b>44,28</b> |
|  |  | Pelaksanaan Penataan Ruang Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                                     | 777.605.900            | 344.352.100           | 44,28        |
|  |  | <b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                 | <b>353.856.950</b>     | <b>93.346.100</b>     | <b>26,38</b> |
|  |  | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang                                                                                                      | 155.345.250            | 47.660.300            | 30,68        |
|  |  | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                                                                         | 198.511.700            | 45.685.800            | 23,01        |
|  |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                                                                                                | <b>72.681.800</b>      | <b>51.205.230</b>     | <b>70,45</b> |
|  |  | <b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      | <b>37.454.500</b>      | <b>35.584.500</b>     | <b>95,01</b> |
|  |  | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                                                                       | 18.727.250             | 17.792.250            | 95,01        |
|  |  | Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI                                                                                                    | 18.727.250             | 17.792.250            | 95,01        |
|  |  | <b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</b>                                              | <b>35.227.300</b>      | <b>15.620.730</b>     | <b>44,34</b> |
|  |  | Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi                                              | 18.727.250             | 15.620.730            | 83,41        |
|  |  | Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi                                                                                       | 16.500.050             | 0                     | -            |



|   |                         |                                                                  |                                                                                       |                   |                  |        |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------|
|   |                         |                                                                  | Kabupaten/Kota                                                                        |                   |                  |        |
| 4 | URUSAN PERUMAHAN RAKYAT |                                                                  |                                                                                       | 76.417.660.368,28 | 71.593.490.023   | 93,69  |
|   | PERKIM                  |                                                                  |                                                                                       | 76.417.660.368,28 | 71.593.490.023   | 93,69  |
|   |                         | PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA                              | PENUNJANG URUSAN DAERAH                                                               | 6.586.465.834,00  | 6.399.733.140,00 | 97,16  |
|   |                         | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                                                                                       | 46.788.250,00     | 46.469.260,00    | 99,32  |
|   |                         |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 15.483.100,00     | 15.406.410,00    | 99,50  |
|   |                         |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 20.711.500,00     | 20.653.000,00    | 99,72  |
|   |                         |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 3.393.900,00      | 3.327.600,00     | 98,05  |
|   |                         |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | 3.423.000,00      | 3.364.600,00     | 98,29  |
|   |                         |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.776.750,00      | 3.717.650,00     | 98,44  |
|   |                         | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |                                                                                       | 4.066.910.669,00  | 4.023.876.757,00 | 98,94  |
|   |                         |                                                                  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 4.011.883.769,00  | 3.969.001.717,00 | 98,93  |
|   |                         |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 14.275.900,00     | 14.203.640,00    | 99,49  |
|   |                         |                                                                  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | 40.751.000,00     | 40.671.400,00    | 99,80  |
|   |                         | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        |                                                                                       | 35.688.900,00     | 13.618.640,00    | 38,16  |
|   |                         |                                                                  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 35.688.900,00     | 13.618.640,00    | 38,16  |
|   |                         | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               |                                                                                       | 794.576.400,00    | 776.093.466,00   | 97,67  |
|   |                         |                                                                  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 10.924.500,00     | 10.924.500,00    | 100,00 |
|   |                         |                                                                  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 226.201.800,00    | 211.027.000,00   | 93,29  |
|   |                         |                                                                  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 59.257.500,00     | 59.257.500,00    | 100,00 |
|   |                         |                                                                  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 33.635.600,00     | 30.328.460,00    | 90,17  |
|   |                         |                                                                  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 7.392.000,00      | 7.392.000,00     | 100,00 |
|   |                         |                                                                  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 457.165.000,00    | 457.164.006,00   | 100,00 |
|   |                         | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                                                                                       | 982.058.000,00    | 926.135.400,00   | 94,31  |



|  |  |  |                                                                                                                              |                       |                       |              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                      | 46.728.000,00         | 42.890.400,00         | 91,79        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                            | 63.910.000,00         | 63.890.000,00         | 99,97        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                        | 871.420.000,00        | 819.355.000,00        | 94,03        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                 | <b>660.443.615,00</b> | <b>613.539.617,00</b> | <b>92,90</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan           | 196.689.600,00        | 181.333.222,00        | 92,19        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan             | 262.348.315,00        | 230.950.225,00        | 88,03        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                 | 201.405.700,00        | 201.256.170,00        | 99,93        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                                                        | <b>925.323.900,00</b> | <b>841.626.510,00</b> | <b>90,95</b> |
|  |  |  | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                       | <b>170.015.800,00</b> | <b>151.336.235,00</b> | <b>89,01</b> |
|  |  |  | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                              | 170.015.800,00        | 151.336.235,00        | 89,01        |
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>                                                                | <b>755.308.100,00</b> | <b>690.290.275,00</b> | <b>91,39</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik          | 380.000.700,00        | 315.522.969,00        | 83,03        |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                              | 375.307.400,00        | 374.767.306,00        | 99,86        |
|  |  |  | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                                            | <b>650.000.000,00</b> | <b>572.937.697,00</b> | <b>88,14</b> |
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>                                                       | <b>65.000.000,00</b>  | <b>58.340.000,00</b>  | <b>89,75</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan permukiman Terintegrasi Secara Elektronik | 65.000.000,00         | 58.340.000,00         | 89,75        |
|  |  |  | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                       | <b>275.000.000,00</b> | <b>259.004.320,00</b> | <b>94,18</b> |
|  |  |  | Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP                                                                            | 275.000.000,00        | 259.004.320,00        | 94,18        |
|  |  |  | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>                                    | <b>310.000.000,00</b> | <b>255.593.377,00</b> | <b>82,45</b> |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh                                            | 310.000.000,00        | 255.593.377,00        | 82,45        |



|   |                                                                         |  |                                                                                                                                                                                              |                          |                          |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|   |                                                                         |  | <b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>                                                                                                                                        | <b>22.065.772.350,00</b> | <b>22.020.430.660,00</b> | <b>99,79</b> |
|   |                                                                         |  | Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | 22.065.772.350,00        | 22.020.430.660,00        | 99,79        |
|   |                                                                         |  | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha                    | 22.065.772.350,00        | 22.020.430.660,00        | 99,79        |
|   |                                                                         |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                                                                                                         | <b>45.690.098.534,28</b> | <b>41.266.674.296,00</b> | <b>90,32</b> |
|   |                                                                         |  | Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                                                                                                         | 45.690.098.534,28        | 41.266.674.296,00        | 90,32        |
|   |                                                                         |  | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                                                                                                         | 170.929.200,00           | 70.525.100,00            | 41,26        |
|   |                                                                         |  | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                                                                                                   | 45.329.345.584,28        | 41.008.505.490,00        | 90,47        |
|   |                                                                         |  | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                                                           | 189.823.750,00           | 187.643.706,00           | 98,85        |
|   |                                                                         |  | Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang                                                                                                                                     | 350.204.500,00           | 349.143.800,00           | 99,70        |
|   |                                                                         |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                           | <b>149.795.250,00</b>    | <b>142.943.920,00</b>    | <b>95,43</b> |
|   |                                                                         |  | Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil | 149.795.250,00           | 142.943.920,00           | 95,43        |
|   |                                                                         |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil                                                                              | 149.795.250,00           | 142.943.920,00           | 95,43        |
| 5 | <b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |                                                                                                                                                                                              |                          |                          |              |
|   | Satpol PP                                                               |  |                                                                                                                                                                                              | 26.342.397.759           | 25.588.114.413           | 97,14        |
|   |                                                                         |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAMPAR</b>                                                                                                                           | <b>22.753.948.859</b>    | <b>22.305.737.129</b>    | <b>98,03</b> |
|   |                                                                         |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | 343.316.000              | 339.871.000              | 99,00        |
|   |                                                                         |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                              | 95.003.000               | 94.373.000               | 99,34        |
|   |                                                                         |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                   | 19.400.000               | 16.771.000               | 86,45        |





|  |  |  |                                                                                                                    |                      |                      |              |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD                              | 228.913.000          | 228.727.000          | 99,92        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>4.989.303.769</b> | <b>4.874.657.079</b> | <b>97,70</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 4.983.094.769        | 4.868.448.079        | 97,70        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 6.209.000            | 6.209.000            | 100,00       |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>1.294.291.000</b> | <b>1.215.609.729</b> | <b>93,92</b> |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 1.151.595.000        | 1.114.793.000        | 96,80        |
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                      | 142.696.000          | 100.816.729          | 70,65        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>3.361.811.400</b> | <b>3.287.399.423</b> | <b>97,79</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 31.740.000           | 31.500.000           | 99,24        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 235.675.200          | 193.480.875          | 82,10        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 351.514.000          | 347.109.000          | 98,75        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 142.810.700          | 130.317.500          | 91,25        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 1.461.469.500        | 1.457.660.000        | 99,74        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 1.138.602.000        | 1.127.332.048        | 99,01        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>343.304.600</b>   | <b>340.743.000</b>   | <b>99,25</b> |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 343.304.600          | 340.743.000          | 99,25        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 10.871.820.840       | 10.773.269.402       | 99,09        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 34.370.100           | 30.532.100           | 88,83        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 10.837.450.740       | 10.742.737.302       | 99,13        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1.550.101.250</b> | <b>1.474.187.496</b> | <b>95,10</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 84.290.000           | 81.240.000           | 96,38        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas                             | 659.661.250          | 621.163.900          | 94,16        |



|  |                                                 |  |                                                                                                                                                                     |                          |                          |              |
|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |                                                 |  | Operasional atau Lapangan                                                                                                                                           |                          |                          |              |
|  |                                                 |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                            | 263.750.000              | 261.591.000              | 99,18        |
|  |                                                 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                        | 542.400.000              | 510.192.596              | 94,06        |
|  |                                                 |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>                                                                                                          | <b>3.588.448.900</b>     | <b>3.282.377.284</b>     | <b>91,47</b> |
|  |                                                 |  | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                                                   | <b>3.588.448.900</b>     | <b>3.282.377.284</b>     | <b>91,47</b> |
|  |                                                 |  | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota                                                     | 40.852.000               | 25.030.000               | 61,27        |
|  |                                                 |  | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                   | 119.818.000              | 69.031.200               | 57,61        |
|  |                                                 |  | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Palisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia             | 1.103.708.900            | 1.041.346.500            | 94,35        |
|  |                                                 |  | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 1.421.728.000            | 1.366.896.840            | 96,14        |
|  |                                                 |  | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | 849.842.000              | 743.322.744              | 87,47        |
|  |                                                 |  | Penyediaan Layanan Dalam rangka Dampak Penegakan perda dan Perkada                                                                                                  | 15.000.000               |                          | -            |
|  |                                                 |  | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     | 37.500.000               | 36.750.000               | 98,00        |
|  | <b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b> |  |                                                                                                                                                                     | <b>17.616.609.107,00</b> | <b>16.605.859.130,00</b> | <b>84,80</b> |
|  |                                                 |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                                                                                                 | <b>16.022.232.857,00</b> | <b>15.438.122.862,00</b> | <b>96,35</b> |
|  |                                                 |  | <b>Perencanaan ,Penggangan,dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>                                                                                                | <b>75.220.000,00</b>     | <b>73.490.171,00</b>     | <b>97,70</b> |
|  |                                                 |  | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah                                                                                                                     | 50.273.750,00            | 48.706.250,00            | 99,95        |
|  |                                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                          | 2.941.500,00             | 2.940.000,00             | 99,95        |



|  |  |  |                                                                               |                         |                         |              |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                          | 13.180.250,00           | 13.020.921,00           | 98,79        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                    | 2.941.500,00            | 2.940.000,00            | 99,95        |
|  |  |  | Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                  | 5.883.000,00            | 5.883.000,00            | 100,00       |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                 | <b>4.787.441.723,00</b> | <b>4.488.181.605,00</b> | <b>93,75</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                             | 4.757.264.573           | 4.458.255.655,00        | 93,71        |
|  |  |  | pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD             | 24.000.000,00           | 23.750.000,00           | 98,96        |
|  |  |  | koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhirtahun SKPD                    | 3.823.950,00            | 3.823.950,00            | 100,00       |
|  |  |  | 'koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran SKPD | 2.353.200,00            | 2.352.000,00            | 99,95        |
|  |  |  | <b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>                 | <b>2.353.200,00</b>     | <b>2.352.000,00</b>     | <b>99,95</b> |
|  |  |  | Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD             | 2.353.200,00            | 2.352.000,00            | 99,95        |
|  |  |  | <b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                              | <b>361.621.350,00</b>   | <b>359.621.146,00</b>   | <b>99,45</b> |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian dinas dan atribut kelengkapannya                            | 361.621.350,00          | 359.621.146,00          | 99,45        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>1.133.872.128,00</b> | <b>1.114.911.217,00</b> | <b>98,33</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | 9.247.410,00            | 9.228.000,00            | 99,79        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 223.950.048,00          | 223.591.932,00          | 99,84        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                              | 401.000.000,00          | 383.871.900,00          | 95,73        |
|  |  |  | penyediaan barang cetak dan penggandaan                                       | 76.845.670,00           | 76.799.299,00           | 99,94        |
|  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                      | 99.900.000,00           | 99.000.000,00           | 99,10        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 322.929.000,00          | 322.420.086,00          | 99,84        |
|  |  |  | <b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>       | <b>1.090.487.564,00</b> | <b>1.086.600.000,00</b> | <b>99,64</b> |
|  |  |  | Pengadaan meubel                                                              | 167.086.200,00          | 166.765.000,00          | 99,81        |
|  |  |  | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                         | 123.401.364,00          | 121.955.000,00          | 98,83        |
|  |  |  | Pengadaan gedung kantor dan bangun lainnya                                    | 800.000.000,00          | 797.880.000,00          | 99,74        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                   | <b>7.294.320.868,00</b> | <b>7.084.047.023,00</b> | <b>97,12</b> |



|  |  |  |                                                                                                                                      |                         |                         |              |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                                       | 7.020.000,00            | 7.020.000,00            | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                              | 86.232.060,00           | 86.232.060,00           | 100,00       |
|  |  |  | penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor                                                                                    | 8.547.000,00            | 8.540.000,00            | 99,92        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (THL)                                                                                          | 7.192.521.808,00        | 6.982.254.963,00        | 97,08        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1.276.916.024,00</b> | <b>1.228.919.700,00</b> | <b>96,24</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan                   | 186.446.824,00          | 164.226.500,00          | 88,08        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan                   | 887.719.200,00          | 862.830.800,00          | 97,20        |
|  |  |  | Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya                                                                         | 175.000.000,00          | 174.960.000,00          | 99,98        |
|  |  |  | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya                                              | 27.750.000,00           | 26.902.400,00           | 96,95        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                                     | <b>1.594.376.250,00</b> | <b>1.167.736.268,00</b> | <b>73,24</b> |
|  |  |  | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota</b> | <b>1.134.859.750,00</b> | <b>745.079.976,00</b>   | <b>65,65</b> |
|  |  |  | Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/kota                                                                                     | 51.676.100,00           | 50.124.620,00           | 97,00        |
|  |  |  | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                     | 48.073.700,00           | 45.071.500,00           | 93,76        |
|  |  |  | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran                                                                         | 44.874.900,00           | 41.893.500,00           | 93,36        |
|  |  |  | Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota                                                         | 60.017.150,00           | 56.719.186,00           | 94,50        |
|  |  |  | Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri                                       | 22.872.700,00           | 18.442.600,00           | 80,63        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                          | 427.388.880,00          | 424.543.500,00          | 99,33        |
|  |  |  | Pembinaan aparatur pemadam kebakaran                                                                                                 | 405.079.150,00          | 39.556.000,00           | 9,77         |
|  |  |  | Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)                                                        | 17.859.400,00           | 15.307.700,00           | 85,71        |



|  |             |  |                                                                                                                                     |                          |                         |              |
|--|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|  |             |  | Pelatihan keluarga tanggap bencana Rumah tangga                                                                                     | 57.017.770,00            | 53.421.370,00           | 93,69        |
|  |             |  | <b>Inspeksi peralatan proteksi kebakaran</b>                                                                                        | <b>52.824.900,00</b>     | <b>46.496.722,00</b>    | <b>88,02</b> |
|  |             |  | Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran                                                                                   | 31.163.800,00            | 28.100.422,00           | 90,17        |
|  |             |  | Penilaian sarana dan prasarana proteksi kebakaran                                                                                   | 21.661.100,00            | 18.396.300,00           | 84,93        |
|  |             |  | <b>Investigasi kejadian kebakaran</b>                                                                                               | <b>47.790.200,00</b>     | <b>47.733.000,00</b>    | <b>99,88</b> |
|  |             |  | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran                                       | 47.790.200,00            | 47.733.000,00           | 99,88        |
|  |             |  | <b>Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran</b>                                                                           | <b>218.593.450,00</b>    | <b>203.666.170,00</b>   | <b>93,17</b> |
|  |             |  | pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat                    | 64.602.000,00            | 60.089.920,00           | 93,02        |
|  |             |  | Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran                                                                                 | 96.985.450,00            | 88.636.030,00           | 91,39        |
|  |             |  | Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana                                  | 57.006.000,00            | 54.940.220,00           | 96,38        |
|  |             |  | <b>Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</b>                                      | <b>140.307.950,00</b>    | <b>124.760.400,00</b>   | <b>88,92</b> |
|  |             |  | Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia | 50.017.800,00            | 36.093.400,00           | 72,16        |
|  |             |  | Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi         | 22.177.300,00            | 21.555.000,00           | 97,19        |
|  |             |  | Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi            | 53.853.550,00            | 53.672.000,00           | 99,66        |
|  | <b>BPBD</b> |  |                                                                                                                                     | <b>10.699.998.004,00</b> | <b>8.835.957.472,00</b> | <b>82,58</b> |
|  |             |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>                                                                 | <b>9.536.271.134,00</b>  | <b>7.989.002.922,00</b> | <b>83,77</b> |
|  |             |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                             | <b>131.577.200,00</b>    | <b>101.925.200,00</b>   | <b>77,46</b> |
|  |             |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                     | 97.718.200,00            | 68.066.200              | 69,66        |
|  |             |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                          | 10.063.000,00            | 10.063.000              | 100,00       |



|  |  |  |                                                                                                                    |                         |                         |               |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                               | 7.932.000,00            | 7.932.000               | 100,00        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                         | 7.932.000,00            | 7.932.000               | 100,00        |
|  |  |  | Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                       | 7.932.000,00            | 7.932.000               | 100,00        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>4.746.137.113,00</b> | <b>4.423.373.736,00</b> | <b>191,11</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 4.743.792.053,00        | 4.421.077.736           | 93,20         |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 2.345.060,00            | 2.296.000,00            | 97,91         |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>1.082.517.473,00</b> | <b>637.051.084,00</b>   | <b>57,11</b>  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 10.000.000,00           | 10.000.000,00           | 100,00        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 227.242.888,00          | 150.672.179,00          | 66,30         |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik kantor                                                                                   | 60.384.000,00           | 14.955.000,00           | 24,77         |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 38.731.785,00           | 36.465.442,00           | 94,15         |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan                                                                         | 6.432.800,00            | 0                       | 0,00          |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 739.726.000,00          | 424.958.463,00          | 57,45         |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>238.431.300,00</b>   | <b>226.200.000,00</b>   | <b>94,87</b>  |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | 238.431.300,00          | 226.200.000,00          | 94,87         |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>2.299.287.948,00</b> | <b>1.928.688.988,00</b> | <b>83,88</b>  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 260.336.000,00          | 118.694.587             | 45,59         |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 2.038.951.948,00        | 1.809.994.401           | 88,77         |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>1.038.320.100,00</b> | <b>671.763.914,00</b>   | <b>99,11</b>  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 799.142.100,00          | 512.988.914             | 64,19         |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 121.878.000,00          | 41.625.000              | 34,15         |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | 117.300.000,00          | 117.150.000             | 99,87         |



|          |                                          |  |                                                                             |                         |                       |              |
|----------|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|          |                                          |  | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                       | <b>1.163.726.870,00</b> | <b>846.954.550,00</b> | <b>72,78</b> |
|          |                                          |  | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>              | <b>316.778.470,00</b>   | <b>255.292.350,00</b> | <b>80,59</b> |
|          |                                          |  | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana kabupaten/Kota        | 44.940.550,00           | 40.836.550            | 90,87        |
|          |                                          |  | Penyusunan Rencana Kontinjensi                                              | 12.709.800,00           | 438.100               | 3,45         |
|          |                                          |  | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                        | 45.638.628,00           | 2.719.700             | 5,96         |
|          |                                          |  | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                    | 213.489.492,00          | 211.298.000           | 98,97        |
|          |                                          |  | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                   | <b>492.298.500,00</b>   | <b>307.300.500,00</b> | <b>63,07</b> |
|          |                                          |  | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                                 | 209.386.500,00          | 200.342.500           | 95,68        |
|          |                                          |  | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | 79.350.000,00           | 53.308.000            | 67,18        |
|          |                                          |  | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 203.562.000,00          | 53.650.000            | 26,36        |
|          |                                          |  | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                         | <b>354.649.900,00</b>   | <b>284.361.700,00</b> | <b>85,19</b> |
|          |                                          |  | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                   | 111.353.900,00          | 107.950.700           | 96,94        |
|          |                                          |  | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                    | 81.630.000,00           | 81.630.000            | 100,00       |
|          |                                          |  | Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                          | 161.666.000,00          | 94.781.000            | 58,63        |
| <b>6</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b> |  |                                                                             | <b>16.886.305.413</b>   | <b>13.180.256.186</b> | <b>78,05</b> |
|          | Dinas Sosial                             |  |                                                                             | <b>16.886.305.413</b>   | <b>13.180.256.186</b> | <b>78,05</b> |
|          |                                          |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>          | <b>7.091.376.695</b>    | <b>6.721.571.327</b>  | <b>94,79</b> |
|          |                                          |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>     | <b>361.496.600</b>      | <b>320.631.820</b>    | <b>85,38</b> |
|          |                                          |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                             | 299.021.600             | 285.065.020           | 95,33        |
|          |                                          |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                  | 39.529.500              | 14.523.900            | 36,74        |
|          |                                          |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                        | 4.712.300               | 4.689.800             | 99,52        |
|          |                                          |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                          | 2.205.600               | 2.058.600             | 93,34        |



|  |  |  |                                                                                                                    |                      |                      |              |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                                                       | 2.070.100            | 2.064.500            | 99,73        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 13.957.500           | 12.230.000           | 87,62        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>4.140.380.605</b> | <b>3.976.757.133</b> | <b>98,01</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 4.128.148.105        | 3.964.527.133        | 96,04        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                        | 12.232.500           | 12.230.000           | 99,98        |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>19.784.000</b>    | -                    | -            |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan                                                         | 19.784.000           | -                    | -            |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>907.938.260</b>   | <b>886.345.153</b>   | <b>95,92</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 13.698.600           | 12.004.000           | 87,63        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 446.138.160          | 434.707.400          | 97,44        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 58.350.000           | 58.350.000           | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 50.674.000           | 50.674.000           | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                           | 10.800.000           | 10.404.000           | 96,33        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 308.840.000          | 302.295.753          | 97,88        |
|  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                              | 19.437.500           | 17.910.000           | 92,14        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>90.015.000</b>    | <b>89.490.000</b>    | <b>99,42</b> |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 90.015.000           | 89.490.000           | 99,42        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>1.116.845.672</b> | <b>1.026.394.861</b> | <b>92,37</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 156.084.540          | 145.194.852          | 93,02        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 960.761.132          | 881.200.009          | 91,72        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>454.916.558</b>   | <b>421.952.360</b>   | <b>92,75</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 112.982.800          | 109.141.400          | 96,60        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan     | 290.150.358          | 266.173.960          | 91,74        |





|  |  |  |                                                                                                                                                           |                      |                      |              |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                  | 51.783.400           | 46.637.000           | 90,06        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>                                                                                                                        | <b>3.763.327.100</b> | <b>3.408.697.378</b> | <b>91,42</b> |
|  |  |  | <b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                             | <b>3.763.327.100</b> | <b>3.408.697.378</b> | <b>91,42</b> |
|  |  |  | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | 633.817.500          | 616.868.992          | 97,33        |
|  |  |  | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             | 277.452.600          | 264.654.202          | 95,39        |
|  |  |  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | 1.129.508.500        | 861.008.795          | 76,23        |
|  |  |  | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                                | 1.722.548.500        | 1.666.165.389        | 96,73        |
|  |  |  | <b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>                                                                                                                        | <b>964.879.236</b>   | <b>873.243.696</b>   | <b>90,50</b> |
|  |  |  | <b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b> | <b>964.879.236</b>   | <b>873.243.696</b>   | <b>90,50</b> |
|  |  |  | Penyediaan Permakanan                                                                                                                                     | 25.000.000           | 24.997.250           | 99,99        |
|  |  |  | Penyediaan Sandang                                                                                                                                        | 25.000.000           | 25.000.000           | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Alat Bantu                                                                                                                                     | 370.662.836          | 339.446.426          | 91,58        |
|  |  |  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial                                                                                                  | 190.646.200          | 166.362.440          | 87,26        |
|  |  |  | Pemberian Layanan Kedaruratan                                                                                                                             | 353.570.200          | 317.437.580          | 89,78        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>                                                                                                            | <b>4.045.845.226</b> | <b>1.217.526.460</b> | <b>67,67</b> |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                        | <b>4.045.845.226</b> | <b>1.217.526.460</b> | <b>67,67</b> |
|  |  |  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                               | 90.961.900           | <b>74.339.700</b>    | 81,73        |
|  |  |  | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                                                                                          | 3.748.086.358        | 944.502.660          | 25,20        |
|  |  |  | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                                                                                        | 206.796.968          | 198.684.100          | 96,08        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>                                                                                                                         | <b>695.455.556</b>   | <b>663.283.022</b>   | <b>95,37</b> |
|  |  |  | <b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>                                                                                  | <b>695.455.556</b>   | <b>663.283.022</b>   | <b>95,37</b> |
|  |  |  | Pelayanan Dukungan Psikososial                                                                                                                            | 111.639.700          | 92.213.060           | 82,60        |



|           |                                                                                |  |                                                                                                            |                         |                         |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|           |                                                                                |  | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                      | 583.815.856             | 571.069.962             | 97,82        |
|           |                                                                                |  | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                                               | 583.815.856             | 571.069.962             | 97,82        |
|           |                                                                                |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>                                                            | <b>325.421.600</b>      | <b>295.934.303</b>      | <b>90,94</b> |
|           |                                                                                |  | <b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>                                           | <b>325.421.600</b>      | <b>295.934.303</b>      | <b>90,94</b> |
|           |                                                                                |  | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                                                  | 325.421.600             | 295.934.303             | 90,94        |
| <b>II</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                                                                                            |                         |                         |              |
| <b>1</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>                                 |  |                                                                                                            |                         |                         |              |
|           | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja                                           |  |                                                                                                            |                         |                         |              |
|           |                                                                                |  | <b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>                                              | <b>2.785.558.000,00</b> | <b>2.688.340.105,00</b> | <b>96,51</b> |
|           |                                                                                |  | <b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>                                                   | <b>2.704.284.000,00</b> | <b>2.621.720.630,00</b> | <b>96,95</b> |
|           |                                                                                |  | Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | 2.150.313.100,00        | 2.077.136.530,00        | 96,60        |
|           |                                                                                |  | Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota                                                            | 553.970.900,00          | 544.584.100,00          | 98,31        |
|           |                                                                                |  | <b>Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil</b>                                                      | <b>81.274.000,00</b>    | <b>66.619.475,00</b>    | <b>81,97</b> |
|           |                                                                                |  | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Kepada Perusahaan Kecil                                               | 81.274.000,00           | 66.619.475,00           | 81,97        |
|           |                                                                                |  | <b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>                                                                     | <b>566.699.350,00</b>   | <b>397.439.150,00</b>   | <b>70,13</b> |
|           |                                                                                |  | <b>Pelayanan Antar Kerja Di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      | <b>41.383.350,00</b>    | <b>31.023.350,00</b>    | <b>74,97</b> |
|           |                                                                                |  | Perluasan Kesempatan Kerja                                                                                 | 41.383.350,00           | 31.023.350,00           | 74,97        |
|           |                                                                                |  | <b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>                                                                   | <b>369.427.000,00</b>   | <b>270.924.800,00</b>   | <b>73,34</b> |
|           |                                                                                |  | Pemeliharaan Dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online                                         | 27.823.400,00           | 16.883.400,00           | 60,68        |
|           |                                                                                |  | <b>Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</b>                                               | <b>155.889.000,00</b>   | <b>95.491.000,00</b>    | <b>61,26</b> |
|           |                                                                                |  | Job Fair/Bursa Kerja                                                                                       | 185.714.600,00          | 158.550.400,00          | 85,37        |
| <b>2.</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |  |                                                                                                            | <b>6.099.399.000</b>    | <b>5.826.310.407</b>    | <b>95,52</b> |
|           | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA                                     |  |                                                                                                            | 6.099.399.000           | 5.826.310.407           | 95,52        |
|           |                                                                                |  | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>                                           | <b>4.234.891.500</b>    | <b>3.995.977.183,00</b> | <b>94,36</b> |
|           |                                                                                |  | <b>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>           | <b>44.798.100</b>       | <b>43.006.050,00</b>    | <b>96,00</b> |
|           |                                                                                |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG                                          | 44.798.100              | 43.006.050,00           | 96,00        |



|  |  |  |                                                                                                                                                 |                      |                         |               |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
|  |  |  | <b>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               | <b>484.805.500</b>   | <b>477.782.834,00</b>   | <b>98,55</b>  |
|  |  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi                                    | 484.805.500          | 477.782.834,00          | 98,55         |
|  |  |  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                     | <b>3.705.287.900</b> | <b>3.475.188.299,00</b> | <b>93,79</b>  |
|  |  |  | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 3.385.588.000        | 3.157.646.099,00        | 93,27         |
|  |  |  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | 319.699.900          | 317.542.200,00          | 99,33         |
|  |  |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>                                                                                                           | <b>446.017.200</b>   | <b>443.970.650,00</b>   | <b>99,54</b>  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                 | <b>357.617.200</b>   | <b>355.570.650,00</b>   | <b>99,43</b>  |
|  |  |  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | 56.017.200           | 53.970.650,00           | 96,35         |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layaa Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten (DAK Non Fisik)  | 301.600.000          | 301.600.000,00          | 100,00        |
|  |  |  | <b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>88.400.000</b>    | <b>88.400.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik) | 88.400.000           | 88.400.000,00           | 100,00        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>                                                                                                    | <b>190.000.000</b>   | <b>187.865.640,00</b>   | <b>98,88</b>  |
|  |  |  | <b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                        | <b>120.000.000</b>   | <b>118.170.000,00</b>   | <b>98,48</b>  |
|  |  |  | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  | 120.000.000          | 118.170.000,00          | 98,48         |



|  |  |  |                                                                                                                                                                      |                    |                       |              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 70.000.000         | 69.695.640,00         | 99,57        |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               | 70.000.000         | 69.695.640,00         | 99,57        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>                                                                                                               | <b>153.292.700</b> | <b>143.259.120,00</b> | <b>93,45</b> |
|  |  |  | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                          | 153.292.700        | 143.259.120,00        | 93,45        |
|  |  |  | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                         | 153.292.700        | 143.259.120,00        | 93,45        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>                                                                                                                              | <b>462.750.200</b> | <b>456.612.460,00</b> | <b>98,67</b> |
|  |  |  | Kelembagaan PHA, pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 37.896.000         | 37.694.000,00         | 99,47        |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                 | 37.896.000         | 37.694.000,00         | 99,47        |
|  |  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | 424.854.200        | 418.918.460,00        | 98,60        |
|  |  |  | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         | 189.987.100        | 188.006.500,00        | 98,96        |
|  |  |  | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota        | 128.345.700        | 126.999.060,00        | 98,95        |
|  |  |  | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                        | 106.521.400        | 103.912.900,00        | 97,55        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>                                                                                                                              | <b>612.447.400</b> | <b>598.625.354,00</b> | <b>97,74</b> |
|  |  |  | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                          | 130.000.000        | 129.078.000,00        | 99,29        |
|  |  |  | Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA (DAK Non Fisik)                                               | 130.000.000        | 129.078.000,00        | 99,29        |
|  |  |  | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                      | 482.447.400        | 469.547.354,00        | 97,33        |



|   |                                          |                                                                              |                                                                                                                   |                         |                         |              |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|   |                                          |                                                                              | Pengembangan KIE ( Komunikasi, Informasi dan Edukasi )<br>Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 482.447.400             | 469.547.354,00          | 97,33        |
| 3 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b> |                                                                              |                                                                                                                   |                         |                         |              |
|   | Dinas Ketahanan Pangan                   |                                                                              |                                                                                                                   |                         |                         |              |
|   |                                          | <b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>                         | <b>URUSAN DAERAH</b>                                                                                              | <b>6.396.385.821,00</b> | <b>5.827.967.820,00</b> | <b>91,11</b> |
|   |                                          | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      |                                                                                                                   | <b>81.372.800,00</b>    | <b>78.736.800,00</b>    | <b>96,76</b> |
|   |                                          |                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 76.696.400,00           | 74.065.400,00           | 96,57        |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             | 4.676.400,00            | 4.671.400,00            | 99,89        |
|   |                                          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |                                                                                                                   | <b>4.125.721.357,00</b> | <b>3.878.954.934,00</b> | <b>94,02</b> |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 | 4.114.538.957,00        | 3.867.782.534,00        | 94,00        |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                       | 11.182.400,00           | 11.172.400,00           | 99,91        |
|   |                                          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                                                                                                                   | <b>1.150.830.800,00</b> | <b>995.672.156,00</b>   | <b>86,52</b> |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                  | 7.379.500,00            | 7.379.500,00            | 100,00       |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                      | 677.353.300,00          | 636.229.300,00          | 93,93        |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                  | 33.520.000,00           | 29.179.000,00           | 87,05        |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                           | 19.147.000,00           | 18.868.250,00           | 98,54        |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                                                          | 19.764.000,00           | 19.764.000,00           | 100,00       |
|   |                                          |                                                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                              | 393.667.000,00          | 284.252.106,00          | 72,21        |
|   |                                          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                                                   | <b>334.315.464,00</b>   | <b>327.610.803,00</b>   | <b>97,99</b> |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                           | 20.988.000,00           | 18.236.963,00           | 86,89        |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                             | 313.327.464,00          | 309.373.840,00          | 98,74        |
|   |                                          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                                                   | <b>704.145.400,00</b>   | <b>546.993.127,00</b>   | <b>77,68</b> |



|  |  |  |                                                                                                                                                                   |                         |                         |              |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                              | 109.090.800,00          | 64.625.657,00           | 59,24        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | 111.584.600,00          | 64.095.627,00           | 57,44        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                          | 39.470.000,00           | 39.470.000,00           | 100,00       |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                      | 444.000.000,00          | 443.427.500,00          | 99,87        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>                                                                            | <b>424.319.350,00</b>   | <b>408.413.820,00</b>   | <b>96,25</b> |
|  |  |  | <b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>424.319.350,00</b>   | <b>408.413.820,00</b>   | <b>96,25</b> |
|  |  |  | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                                     | 424.319.350,00          | 408.413.820,00          | 96,25        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>                                                                                          | <b>1.978.051.100,00</b> | <b>1.107.871.215,00</b> | <b>56,01</b> |
|  |  |  | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | <b>501.700.600,00</b>   | <b>160.512.500,00</b>   | <b>31,99</b> |
|  |  |  | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota                                                                            | 165.298.000,00          | 160.512.500,00          | 97,10        |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                             | 336.402.600,00          | 319.370.980,00          | 94,94        |
|  |  |  | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 1.023.760.600,00        | 947.358.715,00          | 92,54        |
|  |  |  | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                               | 1.023.760.600,00        | 947.358.715,00          | 92,54        |
|  |  |  | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                                  | 452.589.900,00          | 441.325.356,00          | 97,51        |
|  |  |  | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                              | 315.589.800,00          | 310.828.956,00          | 98,49        |
|  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                          | 137.000.100,00          | 130.496.400,00          | 95,25        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                                                        | <b>119.972.300,00</b>   | <b>117.573.480,00</b>   |              |
|  |  |  | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>                                                                                                  | <b>119.972.300,00</b>   | <b>117.573.480,00</b>   |              |



|          |                                                    |  |                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|----------|----------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
|          |                                                    |  | Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                  | 119.972.300,00        | 117.573.480,00        |               |
|          |                                                    |  | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>                                                                                                  | <b>132.540.400,00</b> | <b>132.535.900,00</b> | <b>100,00</b> |
|          |                                                    |  | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                  | <b>132.540.400,00</b> | <b>132.535.900,00</b> | <b>100,00</b> |
|          |                                                    |  | Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                                             | 132.540.400,00        | 132.535.900,00        | 100,00        |
| <b>4</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>       |  |                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|          | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                |  |                                                                                                                                            |                       |                       |               |
|          |                                                    |  | <b>PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>                                                                    | <b>327.938.500</b>    | <b>0</b>              | <b>-</b>      |
|          |                                                    |  | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | 327.938.500           | 0                     | -             |
|          |                                                    |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 327.938.500           | 0                     | -             |
|          |                                                    |  | <b>PENGLOLAAN TANAH KOSONG</b>                                                                                                             | <b>168.372.000</b>    | <b>19.350.000</b>     | <b>11,49</b>  |
|          |                                                    |  | <b>Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>                                                                                          | <b>168.372.000</b>    | <b>19.350.000</b>     | <b>11,49</b>  |
|          |                                                    |  | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong                                                                                                     | 168.372.000           | 19.350.000            | 11,49         |
|          |                                                    |  | <b>PENGLOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>                                                                                                       | <b>75.120.350</b>     | <b>0</b>              | <b>-</b>      |
|          |                                                    |  | <b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>                                                                                                       | <b>75.120.350</b>     | <b>0</b>              | <b>-</b>      |
|          |                                                    |  | Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara                                                                                                      | 75.120.350            | 24.950.750            | 33,21         |
| <b>5</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b> |  |                                                                                                                                            | <b>29.062.029.921</b> | <b>28.119.995.904</b> | <b>96,76</b>  |
|          | Dinas Lingkungan Hidup                             |  |                                                                                                                                            | 29.062.029.921        | 28.119.995.904        | 96,76         |
|          |                                                    |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>                                                                        | <b>19.812.530.571</b> | <b>19.082.272.368</b> | <b>96,31</b>  |
|          |                                                    |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>175.400.000</b>    | <b>167.000.000</b>    | <b>95,21</b>  |
|          |                                                    |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                            | 75.000.000            | 74.780.000            | 99,71         |
|          |                                                    |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                 | 5.000.000             | 5.000.000             | 100,00        |
|          |                                                    |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                                       | 5.000.000             | 5.000.000             | 100,00        |



|  |  |  |                                                                                       |                       |                       |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 10.000.000            | 10.000.000            | 100,00       |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | 10.000.000            | 10.000.000            | 100,00       |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 20.000.000            | 12.500.000            | 62,50        |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 50.000.000            | 49.720.000            | 99,44        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>6.022.976.435</b>  | <b>5.718.324.926</b>  | <b>94,94</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.013.229.035         | 5.712.357.526         | 95,00        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 9.747.400             | 5.967.400             | 61,22        |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>41.758.000</b>     | <b>34.088.537</b>     | <b>81,63</b> |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Impelementasi Peraturan Perundang-Undangan                           | 41.758.000            | 34.088.537            | 81,63        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>1.186.289.600</b>  | <b>1.160.345.802</b>  | <b>97,81</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 19.715.500            | 19.713.500            | 99,99        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 339.218.600           | 338.458.300           | 99,78        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 30.128.500            | 30.128.500            | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 109.520.000           | 104.966.000           | 95,84        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan                                                | 118.672.200           | 102.852.200           | 86,67        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 4.960.800             | 3.664.600             | 73,87        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 564.076.000           | 560.562.702           | 99,38        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>200.000.000</b>    | <b>199.974.000</b>    | <b>99,99</b> |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                       | 200.000.000           | 199.974.000           | 99,99        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>11.638.114.286</b> | <b>11.305.181.521</b> | <b>97,14</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 226.499.500           | 156.832.985           | 69,24        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perelatan Kantor                                        | 35.906.000            | 35.906.000            | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 11.375.708.786        | 11.112.442.536        | 97,69        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>          | <b>547.992.250</b>    | <b>497.357.582</b>    | <b>90,76</b> |





|  |  |  |                                                                                                                                                                               |                      |                       |              |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                            | 324.992.250          | 274.482.582           | 84,46        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                                  | 223.000.000          | 222.875.000           | 99,94        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                                                   | <b>304.687.500</b>   | <b>303.548.300</b>    | <b>99,63</b> |
|  |  |  | <b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>                                                                                           | <b>304.687.500</b>   | <b>303.548.300</b>    | <b>99,63</b> |
|  |  |  | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | 304.687.500          | 303.548.300           | 99,63        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                                    | <b>2.239.915.550</b> | <b>2.188.735.836</b>  | <b>97,72</b> |
|  |  |  | <b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                                                               | <b>946.634.350</b>   | <b>918.114.636</b>    | <b>96,99</b> |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                                      | 395.088.400          | 377.496.400           | 95,55        |
|  |  |  | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                                                                                                      | 551.545.950          | 540.618.236           | 98,02        |
|  |  |  | <b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>                                                                                           | <b>1.293.281.200</b> | <b>1.270.621.200</b>  | <b>98,25</b> |
|  |  |  | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                                                                                 | 195.150.000          | 195.080.000           | 99,96        |
|  |  |  | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup                                                                                                                    | 1.098.131.200        | 1.075.541.200         | 97,94        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                                                                                     | <b>2.657.188.900</b> | <b>2.653.328.700</b>  | <b>99,85</b> |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                       | <b>2.657.188.900</b> | <b>2.653.328.700</b>  | <b>99,85</b> |
|  |  |  | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                                                                                         | 2.657.188.900        | 2.653.328.700         | 99,85        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                                                | <b>157.194.900</b>   | <b>157.058.600,00</b> | <b>99,91</b> |
|  |  |  | <b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                         | <b>157.194.900</b>   | <b>157.058.600,00</b> | <b>99,91</b> |
|  |  |  | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di | 157.194.900          | 157.058.600           | 99,91        |



|          |                                      |                            |                                                                                                                                                 |                          |                          |               |
|----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|          |                                      |                            | bidangPerlindungan dan<br>PengelolaanLingkungan Hidup                                                                                           |                          |                          |               |
|          |                                      |                            | <b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>                            | <b>499.388.000</b>       | <b>499.305.000</b>       | <b>99,98</b>  |
|          |                                      |                            | Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH                                      | 499.388.000              | 499.305.000              | 99,98         |
|          |                                      |                            | Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH  | 499.388.000              | 499.305.000              | 99,98         |
|          |                                      |                            | <b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>                                                                                    | <b>52.001.400</b>        | <b>52.001.400</b>        | <b>100,00</b> |
|          |                                      |                            | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 52.001.400               | 52.001.400               | 100,00        |
|          |                                      |                            | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup    | 52.001.400               | 52.001.400               | 100,00        |
|          |                                      |                            | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                                                            | <b>71.267.300</b>        | <b>71.187.300</b>        | <b>99,89</b>  |
|          |                                      |                            | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                                 | 71.267.300               | 71.187.300               | 99,89         |
|          |                                      |                            | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota                                                                                   | 71.267.300               | 71.187.300               | 99,89         |
|          |                                      |                            | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>                                                                                                          | <b>3.267.855.800</b>     | <b>3.112.558.400</b>     | <b>95,25</b>  |
|          |                                      |                            | Pengelolaan Sampah                                                                                                                              | 3.267.855.800            | 3.112.558.400            | 95,25         |
|          |                                      |                            | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota                                                          | 1.012.447.800            | 962.473.800              | 95,06         |
|          |                                      |                            | Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 2.255.408.000            | 2.150.084.600            | 95,33         |
| <b>6</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>           | <b>BIDANG ADMINISTRASI</b> | <b>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                                        | <b>13.453.932.066,00</b> | <b>12.794.219.614,00</b> | <b>95,10</b>  |
|          | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |                            |                                                                                                                                                 | 13.453.932.066,00        | 12.794.219.614,00        | 95,10         |
|          |                                      |                            | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                     | <b>13.349.702.066,00</b> | <b>12.691.039.614,00</b> | <b>95,07</b>  |
|          |                                      |                            | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                | 148.335.100,00           | 126.676.333,00           | 85,40         |
|          |                                      |                            | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                 | 124.413.100,00           | 102.974.333,00           | 82,77         |



|  |  |  |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd                                                                          | 1.956.000,00            | 1.954.000,00            | 99,90        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd                                                                | 6.670.000,00            | 6.652.000,00            | 99,73        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd                                                                                  | 1.956.000,00            | 1.792.000,00            | 91,62        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd                                                                       | 6.670.000,00            | 6.652.000,00            | 99,73        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                               | 6.670.000,00            | 6.652.000,00            | 99,73        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>3.394.565.058,00</b> | <b>3.154.531.429,00</b> | <b>92,93</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 3.386.447.058,00        | 3.146.413.429,00        | 92,91        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                         | 8.118.000,00            | 8.118.000,00            | 100,00       |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>37.722.000,00</b>    | <b>35.515.028,00</b>    | <b>94,15</b> |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 37.722.000,00           | 35.515.028,00           | 94,15        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>6.223.542.600,00</b> | <b>5.993.755.599,00</b> | <b>96,31</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 14.436.700,00           | 14.416.500,00           | 99,86        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 4.999.380.500,00        | 4.848.823.900,00        | 96,99        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 29.952.000,00           | 6.410.000,00            | 21,40        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 764.681.400,00          | 761.785.600,00          | 99,62        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 415.092.000,00          | 362.319.599,00          | 87,29        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1.675.422.308,00</b> | <b>1.649.032.508,00</b> | <b>98,42</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 7.500.000,00            | 4.094.500,00            | 54,59        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 193.557.000,00          | 180.127.700,00          | 93,06        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.474.365.308,00        | 1.464.810.308,00        | 99,35        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>1.870.115.000,00</b> | <b>1.731.528.717,00</b> | <b>92,59</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 307.640.000,00          | 201.549.928,00          | 65,51        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan     | 212.975.000,00          | 185.816.589,00          | 87,25        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 108.500.000,00          | 104.403.700,00          | 96,22        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                        | 1.241.000.000,00        | 1.239.758.500,00        | 99,90        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>                                                                                 | <b>75.000.000,00</b>    | <b>74.850.000,00</b>    | <b>99,80</b> |
|  |  |  | <b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>                                                                               | <b>75.000.000,00</b>    | <b>74.850.000,00</b>    | <b>99,80</b> |
|  |  |  | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                                                          | 75.000.000,00           | 74.850.000,00           | 99,80        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>                                                                                     | <b>29.230.000,00</b>    | <b>28.330.000,00</b>    | <b>96,92</b> |
|  |  |  | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>                                                                                   | <b>7.500.000,00</b>     | <b>7.200.000,00</b>     | <b>96,00</b> |
|  |  |  | Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                                                        | 7.500.000,00            | 7.200.000,00            | 96,00        |
|  |  |  | <b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>                                                                               | <b>21.730.000,00</b>    | <b>21.130.000,00</b>    | <b>97,24</b> |
|  |  |  | Penyusunan Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain                             | 21.730.000,00           | 21.130.000,00           | 97,24        |



|   |                                                             |                                                                       |                                                                                       |                   |                   |        |
|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 7 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                       |                                                                                       | 11.842.859.917,00 | 11.275.289.407,00 | 95,21  |
|   | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                      |                                                                       |                                                                                       | 11.842.859.917,00 | 11.275.289.407,00 | 95,21  |
|   |                                                             | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH           |                                                                                       | 6.170.873.417,00  | 5.773.937.668,00  | 93,57  |
|   |                                                             | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      |                                                                                       | 237.327.500,00    | 207.102.244,00    | 87,26  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 127.628.100,00    | 112.287.119,00    | 87,98  |
|   |                                                             |                                                                       | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | 21.405.300,00     | 17.658.750,00     | 82,50  |
|   |                                                             |                                                                       | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 88.294.100,00     | 77.156.375,00     | 87,39  |
|   |                                                             | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                |                                                                                       | 3.499.462.975,00  | 3.357.249.346,00  | 95,94  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                     | 3.495.430.975,00  | 3.353.217.346,00  | 95,93  |
|   |                                                             |                                                                       | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                           | 4.032.000,00      | 4.032.000,00      | 100,00 |
|   |                                                             | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                                                                                       | 83.411.500,00     | 81.120.559,00     | 97,25  |
|   |                                                             |                                                                       | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 44.122.500,00     | 44.090.500,00     | 99,93  |
|   |                                                             |                                                                       | Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 17.487.000,00     | 17.060.000,00     | 97,56  |
|   |                                                             |                                                                       | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 21.802.000,00     | 19.970.059,00     | 91,60  |
|   |                                                             | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                                                                                       | 1.223.456.100,00  | 1.071.092.950,00  | 87,55  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 31.824.800,00     | 31.824.800,00     | 100,00 |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                          | 428.320.900,00    | 405.541.900,00    | 94,68  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 103.934.300,00    | 103.579.100,00    | 99,66  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 96.912.000,00     | 96.800.000,00     | 99,88  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                               | 66.720.100,00     | 63.490.800,00     | 95,16  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 27.468.000,00     | 27.468.000,00     | 100,00 |
|   |                                                             |                                                                       | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                  | 426.376.000,00    | 300.648.350,00    | 70,51  |
|   |                                                             |                                                                       | Penatausahaan Arsip Dinamis Pada Skpd                                                 | 10.340.000,00     | 10.244.000,00     | 99,07  |
|   |                                                             |                                                                       | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Skpd                | 31.560.000,00     | 31.496.000,00     | 99,80  |
|   |                                                             | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |                                                                                       | 70.039.000,00     | 65.010.000,00     | 92,82  |
|   |                                                             |                                                                       | Pengadaan Mebel                                                                       | 70.039.000,00     | 65.010.000,00     | 92,82  |
|   |                                                             | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                       | 592.370.342,00    | 566.871.721,00    | 95,70  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                        | 4.399.000,00      | 4.390.000,00      | 99,80  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                               | 83.558.400,00     | 82.137.376,00     | 98,30  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                     | 22.126.000,00     | 22.100.000,00     | 99,88  |
|   |                                                             |                                                                       | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 482.286.942,00    | 458.244.345,00    | 95,01  |
|   |                                                             | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                       | 464.806.000,00    | 425.490.848,00    | 91,54  |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |                         |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                                                                     | 106.674.000,00          | 74.861.282,00           | 70,18        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                                                                                                                         | 53.652.000,00           | 46.961.700,00           | 87,53        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                                                                                                                                                                | 25.480.000,00           | 25.480.000,00           | 100,00       |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                                            | 199.000.000,00          | 198.287.866,00          | 99,64        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                                                                                                                      | 80.000.000,00           | 79.900.000,00           | 99,88        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>328.629.100,00</b>   | <b>319.441.292,50</b>   | <b>97,20</b> |
|  |  |  | <b>Penyelenggaraan Penataan Desa</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>328.629.100,00</b>   | <b>319.441.292,50</b>   | <b>97,20</b> |
|  |  |  | Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, Dan Perubahan Status Desa                                                                                                                                                                                       |                         |                         |              |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>85.883.700,00</b>    | <b>55.842.996,00</b>    | <b>65,02</b> |
|  |  |  | <b>Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>85.883.700,00</b>    | <b>55.842.996,00</b>    | <b>65,02</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan                                                                                                                                                                                                                | 85.883.700,00           | 55.842.996,00           | 65,02        |
|  |  |  | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4.612.338.500,00</b> | <b>4.523.287.921,50</b> | <b>98,07</b> |
|  |  |  | <b>Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4.612.338.500,00</b> | <b>4.523.287.921,50</b> | <b>98,07</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa                                                                                                                                                                                               | 118.812.800,00          | 118.313.800,00          | 99,58        |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa                                                                                                                                                                                                      | 50.193.800,00           | 48.058.973,00           | 95,75        |
|  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa                                                                                                                                                                                                                    | 3.873.115.000,00        | 3.804.333.317,00        | 98,22        |
|  |  |  | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa                                                                                                                                                                                                | 207.330.100,00          | 206.449.300,00          | 99,58        |
|  |  |  | Pembinaan Dan Pemberdayaan Bum Desa Dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa                                                                                                                                                                                   | 155.604.000,00          | 147.485.534,00          | 94,78        |
|  |  |  | Fasilitasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa                                                                                                                                                                                                | 35.501.000,00           | 35.372.000,00           | 99,64        |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa                                                                                                                                                                                                                       | 29.805.500,00           | 28.745.000,00           | 96,44        |
|  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa                                                                                                                                                                                                                        | 95.458.500,00           | 90.889.500,00           | 95,21        |
|  |  |  | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa Dan Kelurahan                                                                                                                                                                                    | 46.517.800,00           | 43.640.497,50           | 93,81        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>                                                                                                                                                              | <b>645.135.200,00</b>   | <b>602.779.529,00</b>   | <b>93,43</b> |
|  |  |  | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>645.135.200,00</b>   | <b>602.779.529,00</b>   | <b>93,43</b> |
|  |  |  | Identifikasi Dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat                                                                                                                                                                                                    | 15.548.800,00           | 11.373.000,00           | 73,14        |
|  |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat                                            | 339.437.600,00          | 325.000.200,00          | 95,75        |



|   |                                                                                |  |  |                                                                                                                                                         |                       |                         |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|   |                                                                                |  |  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan (Rt, Rw, Pkk, Posyandu, Lpm, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat | 104.062.600,00        | 88.443.500,00           | 84,99        |
|   |                                                                                |  |  | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa                                            | 130.064.900,00        | 123.002.682,00          | 94,57        |
|   |                                                                                |  |  | Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                                                                                       | 56.021.300,00         | 54.960.147,00           | 98,11        |
| 8 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |  |  |                                                                                                                                                         | <b>19.148.905.760</b> | <b>18.067.653.134</b>   | <b>94,35</b> |
|   | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA                                     |  |  |                                                                                                                                                         | 19.148.905.760        | 18.067.653.134          | 94,35        |
|   |                                                                                |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                                                      | <b>9.186.205.660</b>  | <b>8.612.528.720,00</b> | <b>93,76</b> |
|   |                                                                                |  |  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | 232.445.100           | 225.113.190,00          | 97,17        |
|   |                                                                                |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                         | 84.037.200            | 81.401.900,00           | 96,86        |
|   |                                                                                |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                              | 84.883.900            | 82.320.440,00           | 98,00        |
|   |                                                                                |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 63.524.000            | 61.390.850,00           | 96,64        |
|   |                                                                                |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                  | 5.661.409.332         | 5.225.331.486,00        | 92,30        |
|   |                                                                                |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       | 5.661.409.332         | 5.225.331.486,00        | 92,30        |
|   |                                                                                |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                               | 12.000.000            | 12.000.000,00           | 100,00       |
|   |                                                                                |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan                                                                                              | 12.000.000            | 12.000.000,00           | 100,00       |
|   |                                                                                |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                      | 1.555.616.700         | 1.538.831.860,00        | 98,92        |
|   |                                                                                |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                        | 2.416.000             | 2.416.000,00            | 100,00       |
|   |                                                                                |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                            | 20.784.700            | 20.712.600,00           | 99,65        |
|   |                                                                                |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                        | 75.184.000            | 75.184.000,00           | 100,00       |
|   |                                                                                |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                 | 20.705.000            | 20.686.000,00           | 99,91        |
|   |                                                                                |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                                                                | 1.197.000.000         | 1.197.000.000,00        | 100,00       |
|   |                                                                                |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                    | 239.527.000           | 222.833.260,00          | 93,03        |
|   |                                                                                |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                                                        | 374.407.100           | 365.870.100,00          | 97,72        |



|  |  |  |                                                                                                                                 |                      |                         |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                                 | 37.440.000           | 35.960.000,00           | 96,05        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                              | 336.967.100          | 329.910.100,00          | 97,91        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                     | <b>1.198.093.128</b> | <b>1.099.960.629,00</b> | <b>91,81</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                         | 108.666.000          | 103.748.501,00          | 95,47        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | 1.089.427.128        | 996.212.128,00          | 91,44        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                    | <b>152.234.300</b>   | <b>145.421.455,00</b>   | <b>95,52</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              | 49.115.800           | 47.731.800,00           | 97,18        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 | 80.000.000           | 74.661.155,00           | 93,33        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                        | 23.118.500           | 23.028.500,00           | 99,61        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>                                                                                            | <b>85.712.200</b>    | <b>82.168.700,00</b>    | <b>95,87</b> |
|  |  |  | <b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                   | <b>85.712.200</b>    | <b>82.168.700,00</b>    | <b>95,87</b> |
|  |  |  | Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                                                                                     | 85.712.200           | 82.168.700,00           | 95,87        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>                                                                                | <b>5.147.791.600</b> | <b>4.919.398.684,00</b> | <b>95,56</b> |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal.</b> | <b>1.546.246.000</b> | <b>1.523.131.185,00</b> | <b>98,51</b> |
|  |  |  | Advokasi program bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja                                          | 47.518.900           | 45.939.560,00           | 96,68        |
|  |  |  | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang                          | 137.201.300          | 124.939.419,00          | 91,06        |
|  |  |  | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana ( <b>DAK Non Fisik</b> )                                  | 1.353.600.000        | 1.344.380.431,00        | 99,32        |
|  |  |  | Pengendalian Program KKBPK                                                                                                      | 7.925.800            | 7.871.775,00            | 99,32        |
|  |  |  | <b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>                                                          | <b>1.261.775.400</b> | <b>1.257.042.500,00</b> | <b>99,62</b> |
|  |  |  | Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB ( <b>DAK Fisik</b> )                                                           | 261.775.400          | 258.317.500,00          | 98,68        |



|  |  |  |                                                                                                                                                                              |                      |                         |              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP). (DAK Non Fisik)                                                                                                       | 1.000.000.000        | 998.725.000,00          | 99,87        |
|  |  |  | <b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                          | <b>1.844.630.900</b> | <b>1.644.628.123,00</b> | <b>89,16</b> |
|  |  |  | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (DAK Non Fisik)            | 202.800.000          | 177.104.281,00          | 87,33        |
|  |  |  | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                    | 92.011.600           | 84.088.600,00           | 91,39        |
|  |  |  | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                                     | 180.813.800          | 178.225.625,00          | 98,57        |
|  |  |  | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                                                                          | 38.557.200           | 36.959.500,00           | 95,86        |
|  |  |  | Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (DAK Non Fisik)                                                                                                                   | 1.299.529.000        | 1.139.516.000,00        | 87,69        |
|  |  |  | Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                                    | 30.919.300           | 28.734.117,00           | 92,93        |
|  |  |  | <b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>           | <b>495.139.300</b>   | <b>494.596.876,00</b>   | <b>99,89</b> |
|  |  |  | Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                           | 31.889.300           | 31.346.876,00           | 98,30        |
|  |  |  | Pembinaan Terpadu Kampung KB (DAK Non Fisik)                                                                                                                                 | 463.250.000          | 463.250.000,00          | 100,00       |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>                                                                                                          | <b>4.729.196.300</b> | <b>4.453.557.030,00</b> | <b>94,17</b> |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                               | <b>279.801.400</b>   | <b>276.435.900,00</b>   | <b>98,80</b> |
|  |  |  | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                        | 71.117.800           | 69.807.800,00           | 98,16        |
|  |  |  | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 208.683.600          | 206.628.100,00          | 99,02        |





|          |                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|----------|-----------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|          |                                               |  | <b>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                                            | <b>4.449.394.900</b> | <b>4.177.121.130</b> | <b>93,88</b> |
|          |                                               |  | Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) <b>(DAK Non Fisik)</b> | 3.900.900.000        | 3.646.159.500,00     | 93,47        |
|          |                                               |  | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                                                                                                               | 548.494.900          | 530.961.630,00       | 96,80        |
| <b>9</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|          | <b>Dinas Perhubungan</b>                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|          |                                               |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                    | 13.307.395.816       | 13.043.455.535       | 98,02        |
|          |                                               |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>226.753.000</b>   | <b>218.495.499</b>   | <b>96,36</b> |
|          |                                               |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                     | 94.664.000           | 88.966.499           | 93,98        |
|          |                                               |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                                                                                                                                                                          | 81.090.000           | 79.580.000           | 98,14        |
|          |                                               |  | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                                                                                                                                                                               | 50.999.000           | 49.949.000           | 97,94        |
|          |                                               |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6.385.604.962</b> | <b>6.201.141.003</b> | <b>97,11</b> |
|          |                                               |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                                                                                                                                   | 6.350.014.962        | 6.165.643.003        | 97,10        |
|          |                                               |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                                                                                                                         | 35.590.000           | 35.498.000           | 99,74        |
|          |                                               |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>246.623.500</b>   | <b>236.676.936</b>   | <b>95,97</b> |
|          |                                               |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                                                                                                                              | 121.523.500          | 116.117.100          | 95,55        |
|          |                                               |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                                                                                                                          | 125.100.000          | 120.559.836          | 96,37        |
|          |                                               |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2.345.962.600</b> | <b>2.316.165.052</b> | <b>98,73</b> |
|          |                                               |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                                                                                                                                                                                                                    | 8.441.200            | 8.400.000            | 99,51        |
|          |                                               |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor                                                                                                                                                                                                                                        | 449.172.800          | 445.676.000          | 99,22        |
|          |                                               |  | Penyediaan bahan logistik kantor                                                                                                                                                                                                                                                    | 89.540.000           | 89.375.000           | 99,82        |



|  |  |  |                                                                                                                                    |                       |                       |              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan                                                                                          | 246.184.600           | 245.503.200           | 99,72        |
|  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                                                                           | 726.027.000           | 723.300.000           | 99,62        |
|  |  |  | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                                                                               | 826.597.000           | 803.910.852           | 97,26        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                        | <b>3.141.578.104</b>  | <b>3.125.537.688</b>  | <b>99,49</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            | 523.821.360           | 520.876.421           | 99,44        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | 2.617.756.744         | 2.604.661.267         | 99,50        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                       | <b>960.873.650</b>    | <b>945.439.357</b>    | <b>98,39</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                 | 109.309.350           | 107.220.475           | 98,09        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | 336.892.500           | 330.229.300           | 98,02        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                       | 460.971.800           | 456.469.582           | 99,02        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | 53.700.000            | 51.520.000            | 95,94        |
|  |  |  | <b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>                                                               | <b>26.640.173.780</b> | <b>23.016.966.398</b> | <b>86,40</b> |
|  |  |  | <b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>                                                                       | <b>24.209.555.945</b> | <b>20.761.695.941</b> | <b>85,76</b> |
|  |  |  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                                                                              | 6.634.819.550         | 3.374.403.003         | 50,86        |
|  |  |  | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                                                                                   | 17.574.736.395        | 17.387.292.938        | 98,93        |
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>                                                            | <b>57.860.000</b>     | <b>57.820.000</b>     | <b>99,93</b> |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 57.860.000            | 57.820.000            | 99,93        |
|  |  |  | <b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>                                                                                        | <b>415.194.600</b>    | <b>378.324.300</b>    | <b>91,12</b> |
|  |  |  | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                               | 235.199.600           | 206.001.800           | 87,59        |
|  |  |  | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                                    | 96.360.000            | 95.850.000            | 99,47        |



|    |                                                              |  |                                                                                                                           |                         |                         |              |
|----|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|    |                                                              |  | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                    | 83.635.000              | 76.472.500              | 91,44        |
|    |                                                              |  | <b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>                                 | <b>1.131.710.825</b>    | <b>1.099.187.600</b>    | <b>97,13</b> |
|    |                                                              |  | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                                           | 761.611.225             | 731.978.000             | 96,11        |
|    |                                                              |  | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota                                                                       | 370.099.600             | 367.209.600             | 99,22        |
|    |                                                              |  | <b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas(Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>                                | <b>77.401.000</b>       | <b>68.950.490</b>       | <b>89,08</b> |
|    |                                                              |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin                                                                     | 68.455.000              | 66.850.490              | 97,66        |
|    |                                                              |  | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin                                                                              | 8.946.000               | 2.100.000               | 23,47        |
|    |                                                              |  | <b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>                                                                       | <b>30.474.800</b>       | <b>30.384.800</b>       | <b>99,70</b> |
|    |                                                              |  | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal                                                                       | 30.474.800              | 30.384.800              | 99,70        |
|    |                                                              |  | <b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>717.976.609,99</b>   | <b>620.603.267</b>      | <b>86,44</b> |
|    |                                                              |  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota        | 717.976.609,99          | 620.603.267             | 86,44        |
|    |                                                              |  | <b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>                                                                                      | <b>1.746.050.000</b>    | <b>1.250.805.219</b>    | <b>71,64</b> |
|    |                                                              |  | <b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>                           | <b>1.746.050.000</b>    | <b>1.250.805.219</b>    | <b>71,64</b> |
|    |                                                              |  | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau                                                                 | 1.746.050.000           | 1.250.805.219           | 71,64        |
| 10 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b> |  |                                                                                                                           | <b>21.874.384.764</b>   | <b>21.153.256.143</b>   | <b>96,70</b> |
|    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                 |  |                                                                                                                           | 21.874.384.764          | 21.153.256.143          | 96,70        |
|    |                                                              |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                        | <b>8.185.570.920,00</b> | <b>7.578.452.219,00</b> | <b>92,58</b> |
|    |                                                              |  | <b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                    | <b>98.535.950</b>       | <b>84.455.250,00</b>    | <b>85,71</b> |
|    |                                                              |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | 32.683.500              | 31.959.500,00           | 97,78        |
|    |                                                              |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                | 6.630.700               | 4.775.250,00            | 72,02        |
|    |                                                              |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                                                        | 5.459.500               | 3.566.250,00            | 65,32        |



|  |  |  |                                                                                                                    |                         |                         |              |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                              | 53.762.250              | 44.154.250,00           | 82,13        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>4.460.272.116,00</b> | <b>4.027.567.168,00</b> | <b>90,30</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                  | 4.453.887.116           | 4.021.182.168,00        | 90,28        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD                                                        | 6.385.000               | 6.385.000,00            | 100,00       |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>160.863.400,00</b>   | <b>158.899.009,00</b>   | <b>98,78</b> |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                             | 98.247.400              | 97.866.480,00           | 99,61        |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                         | 62.616.000              | 61.032.529,00           | 97,47        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>2.824.233.954</b>    | <b>2.715.305.624,00</b> | <b>96,14</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | 28.157.000              | 27.822.000,00           | 98,81        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | 312.895.254             | 303.647.900,00          | 97,04        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 85.200.000              | 84.961.250,00           | 99,72        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 103.118.200             | 102.534.295,00          | 99,43        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 955.446.000             | 952.572.473,00          | 99,70        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 194.652.000             | 161.338.074,00          | 82,89        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 1.144.765.500           | 1.082.429.632,00        | 94,55        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>641.665.500,00</b>   | <b>592.225.168,00</b>   | <b>92,29</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 199.003.000             | 154.716.868,00          | 77,75        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 205.802.500             | 200.790.500,00          | 97,56        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 27.860.000              | 27.860.000,00           | 100,00       |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 209.000.000             | 208.857.800,00          | 99,93        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>                                                         | <b>12.027.611.000</b>   | <b>11.941.889.531</b>   | <b>99,29</b> |



|           |                                                                       |  |                                                                                                                                       |                         |                         |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|           |                                                                       |  | <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publikm Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>12.027.611.000</b>   | <b>11.941.889.531</b>   | <b>99,29</b> |
|           |                                                                       |  | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                                            | 120.926.000             | 120.803.600,00          | 99,90        |
|           |                                                                       |  | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                                   | 11.095.150.000          | 11.040.486.011,11       | 99,51        |
|           |                                                                       |  | Pelayanan Informasi Publik                                                                                                            | 225.260.000             | 205.702.420,00          | 91,32        |
|           |                                                                       |  | Manajemen Komunikasi Krisis                                                                                                           | 25.000.000              | 24.960.000,00           | 99,84        |
|           |                                                                       |  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas                                                                    | 10.650.000              | 3.000.000,00            | 28,17        |
|           |                                                                       |  | Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                | 550.625.000             | 546.937.500,00          | 99,33        |
|           |                                                                       |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>                                                                                       | <b>1.661.202.844</b>    | <b>1.632.914.393</b>    | <b>98,30</b> |
|           |                                                                       |  | <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>1.426.202.844</b>    | <b>1.407.436.893</b>    | <b>98,68</b> |
|           |                                                                       |  | Penatalaksanaan dan Pengawasan nama domain dan sub domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                    | 13.290.000              | 12.374.990,00           | 93,12        |
|           |                                                                       |  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah                                                                               | 1.412.912.844           | 1.395.061.903,00        | 98,74        |
|           |                                                                       |  | <b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                           | <b>235.000.000</b>      | <b>225.477.500</b>      | <b>95,95</b> |
|           |                                                                       |  | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah                                                                                            | 59.640.000              | 55.190.000,00           | 92,54        |
|           |                                                                       |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik                                                                             | 13.120.000              | 13.075.000,00           | 99,66        |
|           |                                                                       |  | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik                                                              | 162.240.000             | 157.212.500,00          | 96,90        |
| <b>11</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b> |  |                                                                                                                                       |                         |                         |              |
|           | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK                                   |  |                                                                                                                                       |                         |                         |              |
|           |                                                                       |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>                                                                  | <b>8.208.828.074,00</b> | <b>7.796.761.240,00</b> | <b>94,98</b> |
|           |                                                                       |  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                       | 331.133.500             | 310.674.000             | 93,82        |



|  |  |  |                                                                                                            |                      |                      |              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                            | 278.177.850          | 262.828.750          | 94,48        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                 | 37.651.150           | 32.843.225           | 87,23        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                      | 15.304.500           | 15.002.025           | 98,02        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>5.493.745.338</b> | <b>5.293.171.744</b> | <b>96,35</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                          | 5.443.179.738        | 5.242.606.544        | 96,32        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                | 50.565.600           | 50.565.200           | 100,00       |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                  | <b>914.296.184</b>   | <b>776.739.596</b>   | <b>84,95</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor                                         | 9.634.200            | 9.580.800            | 99,45        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | 233.279.384          | 225.841.175          | 96,81        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                           | 66.510.000           | 66.510.000           | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                    | 116.309.600          | 73.406.200           | 63,11        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                   | 13.848.000           | 13.848.000           | 100,00       |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                       | 474.715.000          | 387.553.421          | 81,64        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                    | <b>89.560.128</b>    | <b>88.022.200</b>    | <b>98,28</b> |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                                            | 89.560.128           | 88.022.200           | 98,28        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                  | <b>985.142.424</b>   | <b>954.414.593</b>   | <b>96,88</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik                                                     | 162.457.080          | 156.557.161          | 96,37        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                      | 822.685.344          | 797.857.432          | 96,98        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                               | <b>394.950.500</b>   | <b>373.739.107</b>   | <b>94,63</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan | 251.950.000          | 240.027.027          | 95,27        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | 102.500.000          | 96.860.580           | 94,50        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya               | 40.500.500           | 36.851.500           | 90,99        |



|           |                                                   |  |                                                                                                                   |                          |                          |              |
|-----------|---------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|           |                                                   |  | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>                                                                | <b>160.311.500</b>       | <b>159.431.500</b>       | <b>99,45</b> |
|           |                                                   |  | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota | 160.311.500              | 159.431.500              | 99,45        |
|           |                                                   |  | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota          | 160.311.500              | 159.431.500              | 99,45        |
|           |                                                   |  | <b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>                                                               | <b>72.578.300</b>        | <b>69.731.300</b>        | <b>96,08</b> |
|           |                                                   |  | Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP / USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota        | 72.578.300               | 69.731.300               | 96,08        |
|           |                                                   |  | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota                                      | 35.087.300               | 33.040.300               | 94,17        |
|           |                                                   |  | Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan                | 37.491.000               | 36.691.000               | 100,00       |
| <b>12</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b> |  |                                                                                                                   | <b>17.099.567.191,00</b> | <b>15.571.729.888,00</b> | <b>91,07</b> |
|           | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu       |  |                                                                                                                   | 17.099.567.191,00        | 15.571.729.888,00        | 91,07        |
|           |                                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                | <b>14.833.235.391,00</b> | <b>13.665.692.224,00</b> | <b>92,13</b> |
|           |                                                   |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                  | 37.227.100,00            | 35.721.000,00            | 95,95        |
|           |                                                   |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                   | 20.036.800,00            | 19.057.000,00            | 95,11        |
|           |                                                   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                             | 17.190.300,00            | 16.664.000,00            | 96,94        |
|           |                                                   |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                     | <b>6.203.670.207,00</b>  | <b>5.597.369.870,00</b>  | <b>90,23</b> |
|           |                                                   |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                 | 6.131.609.107,00         | 5.526.259.870,00         | 90,13        |
|           |                                                   |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                       | 72.061.100,00            | 71.110.000,00            | 98,68        |
|           |                                                   |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                  | <b>434.881.350,00</b>    | <b>414.497.810,00</b>    | <b>95,31</b> |
|           |                                                   |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                            | 74.542.050,00            | 74.492.100,00            | 99,93        |
|           |                                                   |  | Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan                                                                        | 62.727.300,00            | 52.727.300,00            | 84,06        |
|           |                                                   |  | Bimbingan Teknisi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                       | 297.612.000,00           | 287.278.410,00           | 96,53        |
|           |                                                   |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>1.822.535.030,00</b>  | <b>1.435.734.021,00</b>  | <b>78,78</b> |



|  |  |  |                                                                                                                      |                         |                         |              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                     | 6.215.600,00            | 5.870.000,00            | 94,44        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                         | 376.516.000,00          | 333.392.500,00          | 88,55        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                     | 184.314.930,00          | 147.879.431,00          | 80,23        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan                                                                                | 203.376.300,00          | 174.610.000,00          | 85,86        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan                                                             | 13.001.000,00           | 13.001.000,00           | 100,00       |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                 | 1.039.111.200,00        | 760.981.090,00          | 73,23        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                              | <b>2.746.707.460,00</b> | <b>2.735.250.300,00</b> | <b>99,58</b> |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                      | 224.064.600,00          | 222.300.000,00          | 99,21        |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                | 1.671.019.860,00        | 1.663.200.000,00        | 99,53        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                   | 200.000.000,00          | 199.689.000,00          | 99,84        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                         | 651.623.000,00          | 650.061.300,00          | 99,76        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                            | <b>2.253.232.344,00</b> | <b>2.177.167.149,00</b> | <b>96,62</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                              | 351.212.660,00          | 279.806.821,00          | 79,67        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                | 1.902.019.684,00        | 1.897.360.328,00        | 99,76        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                           | <b>1.334.981.900,00</b> | <b>1.269.952.074,00</b> | <b>95,13</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 330.120.000,00          | 282.021.559,00          | 85,43        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | 57.970.000,00           | 43.450.000,00           | 74,95        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                         | 450.851.200,00          | 450.087.765,00          | 99,83        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                         | 496.040.700,00          | 494.392.750,00          | 99,67        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                    | <b>335.996.600,00</b>   | <b>265.761.090,00</b>   | <b>79,10</b> |
|  |  |  | <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>167.802.500,00</b>   | <b>128.739.022,00</b>   | <b>76,72</b> |
|  |  |  | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan                                       | 167.802.500,00          | 128.739.022,00          | 76,72        |





|           |                                                            |  |                                                                                                                                                                   |                          |                          |              |
|-----------|------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|           |                                                            |  | Penanaman Modal                                                                                                                                                   |                          |                          |              |
|           |                                                            |  | <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>                                                                                                            | <b>168.194.100,00</b>    | <b>137.022.068,00</b>    | <b>81,47</b> |
|           |                                                            |  | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota                                                                                                          | 168.194.100,00           | 137.022.068,00           | 81,47        |
|           |                                                            |  | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                            | <b>41.820.600,00</b>     | <b>35.428.000,00</b>     | <b>84,71</b> |
|           |                                                            |  | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                      | <b>41.820.600,00</b>     | <b>35.428.000,00</b>     | <b>84,71</b> |
|           |                                                            |  | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                | 41.820.600,00            | 35.428.000,00            | 84,71        |
|           |                                                            |  | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                          | <b>775.980.100,00</b>    | <b>640.248.290,00</b>    | <b>82,51</b> |
|           |                                                            |  | <b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                     | <b>775.980.100,00</b>    | <b>640.248.290,00</b>    | <b>82,51</b> |
|           |                                                            |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah                                                                                         | 318.719.300,00           | 280.658.950,00           | 88,06        |
|           |                                                            |  | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko                                                                                  | 123.837.700,00           | 113.785.076,00           | 91,88        |
|           |                                                            |  | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                                                                        | 333.423.100,00           | 245.804.264,00           | 73,72        |
|           |                                                            |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                           | <b>614.215.000,00</b>    | <b>483.190.800,00</b>    | <b>78,67</b> |
|           |                                                            |  | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                     | <b>614.215.000,00</b>    | <b>483.190.800,00</b>    | <b>78,67</b> |
|           |                                                            |  | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                                          | 92.132.000,00            | 38.840.000,00            | 42,16        |
|           |                                                            |  | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                                                                                                              | 337.820.000,00           | 337.524.800,00           | 99,91        |
|           |                                                            |  | Pengawasan Penanaman Modal                                                                                                                                        | 184.263.000,00           | 106.826.000,00           | 57,97        |
|           |                                                            |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                              | <b>498.319.500,00</b>    | <b>481.409.484,00</b>    | <b>96,61</b> |
|           |                                                            |  | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                            | <b>498.319.500,00</b>    | <b>481.409.484,00</b>    | <b>96,61</b> |
|           |                                                            |  | Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 498.319.500,00           | 481.409.484,00           | 96,61        |
| <b>13</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA</b> |  |                                                                                                                                                                   | <b>11.761.034.112,00</b> | <b>11.388.010.266,00</b> | <b>96,83</b> |



|    |                                              |  |                                                                                                                                                                 |                   |                   |        |
|----|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|    | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga        |  |                                                                                                                                                                 | 11.761.034.112,00 | 11.388.010.266,00 | 96,83  |
|    |                                              |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                                                                                                            | 600.000.000,00    | 645.994.250,00    | 107,67 |
|    |                                              |  | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | 600.000.000,00    | 645.994.250,00    | 107,67 |
|    |                                              |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula                                                                 | 600.000.000,00    | 645.994.250,00    | 107,67 |
|    |                                              |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                                                                                          | 10.826.034.112,00 | 10.410.388.516,00 | 96,16  |
|    |                                              |  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                            | 6.554.096.862,00  | 6.174.829.166,00  | 94,21  |
|    |                                              |  | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                                                                | 6.554.096.862,00  | 6.174.829.166,00  | 94,21  |
|    |                                              |  | Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                             | 520.550.000,00    | 506.686.300,00    | 97,34  |
|    |                                              |  | Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                             | 520.550.000,00    | 506.686.300,00    | 97,34  |
|    |                                              |  | Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi                                                                                            | 28.655.500,00     | 28.655.500,00     | 100,00 |
|    |                                              |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga                                                                                     | 28.655.500,00     | 3.120.000,00      | 10,89  |
|    |                                              |  | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                                                                                                    | 3.722.731.750,00  | 3.700.217.550,00  | 99,40  |
|    |                                              |  | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi                                                                                      | 2.767.516.900,00  | 1.962.844.600,00  | 70,92  |
|    |                                              |  | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi                                                                                | 248.314.850,00    | 180.142.150,00    | 72,55  |
|    |                                              |  | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan                                                                                                                      | 335.000.000,00    | 331.627.500,00    | 98,99  |
|    |                                              |  | Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                             | 335.000.000,00    | 331.627.500,00    | 98,99  |
|    |                                              |  | Penyelenggaraan kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah                                                                                                             | 335.000.000,00    | 214.856.000,00    | 64,14  |
| 14 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK         |  |                                                                                                                                                                 | 58.740.000        | 53.895.000,00     | 91,75  |
|    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |  |                                                                                                                                                                 | 58.740.000        | 53.895.000,00     | 91,75  |
|    |                                              |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                                                                                                                      | 58.740.000        | 53.895.000,00     | 91,75  |



|    |                                              |  |                                                                                                                                                      |                  |                  |       |
|----|----------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|
|    |                                              |  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | 58.740.000       | 53.895.000,00    | 91,75 |
|    |                                              |  | Membangun Metadata Statistik Sektoral                                                                                                                | 58.740.000       | 53.895.000,00    | 91,75 |
| 15 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN        |  |                                                                                                                                                      | 23.604.800       | 19.814.800       | 83,94 |
|    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |  |                                                                                                                                                      | 23.604.800       | 19.814.800       | 83,94 |
|    |                                              |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI                                                                                        | 23.604.800       | 19.814.800       | 83,94 |
|    |                                              |  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 23.604.800       | 19.814.800       | 83,94 |
|    |                                              |  | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                       | 10.050.000       | 9.860.000,00     | 98,11 |
|    |                                              |  | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan non Elektronik                                             | 13.554.800       | 9.954.800,00     | 73,44 |
| 16 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN        |  |                                                                                                                                                      |                  |                  |       |
|    | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan              |  |                                                                                                                                                      |                  |                  |       |
|    |                                              |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN                                                                                                                      | 280.088.100,00   | 166.764.000,00   | 59,54 |
|    |                                              |  | Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                               | 58.087.700,00    | 49.378.600,00    | 85,01 |
|    |                                              |  | Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Berprestasi Atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi Dan Kontribusinya Dalam Pemajuan Kebudayaan | 58.087.700,00    | 49.378.600,00    | 85,01 |
|    |                                              |  | Pembinaan Lembaga Adat Yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                                  | 222.000.400,00   | 117.385.400,00   | 52,88 |
|    |                                              |  | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat                                                                                               | 222.000.400,00   | 117.385.400,00   | 52,88 |
|    |                                              |  | PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                                                                                                            | 1.068.894.800,00 | 1.017.214.700,00 | 95,17 |
|    |                                              |  | Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota                                                                             | 1.068.894.800,00 | 1.017.214.700,00 | 95,17 |
|    |                                              |  | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional                                                                                       | 1.068.894.800,00 | 1.017.214.700,00 | 95,17 |
|    |                                              |  | PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                                                                                                     | 100.000.000,00   | 68.892.400,00    | 68,89 |
|    |                                              |  | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                                                                                                      | 100.000.000,00   | 68.892.400,00    | 68,89 |



|    |                                         |  |                                                                                       |                   |                   |        |
|----|-----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
|    |                                         |  | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                                                 | 100.000.000,00    | 68.892.400,00     | 68,89  |
| 17 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN |  |                                                                                       |                   |                   |        |
|    | Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan        |  |                                                                                       |                   |                   |        |
|    |                                         |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA                          | 11.456.454.401,00 | 10.759.096.867,00 | 93,91  |
|    |                                         |  | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 41.722.400,00     | 41.722.400,00     | 100,00 |
|    |                                         |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 17.823.400,00     | 17.823.400,00     | 100,00 |
|    |                                         |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | 5.497.200,00      | 5.497.200,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 5.565.400,00      | 5.565.400,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | 5.518.000,00      | 5.518.000,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                         | 5.709.200,00      | 5.709.200,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.609.200,00      | 1.609.200,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 4.873.504.825,00  | 4.660.140.910,00  | 95,62  |
|    |                                         |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                     | 4.868.613.625,00  | 4.655.249.710,00  | 95,62  |
|    |                                         |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                           | 4.891.200,00      | 4.891.200,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                                | 9.389.800,00      | 9.389.800,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd                     | 9.389.800,00      | 9.389.800,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 620.345.700,00    | 598.944.593,00    | 96,55  |
|    |                                         |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                          | 392.220.300,00    | 371.448.300,00    | 94,70  |
|    |                                         |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 24.408.000,00     | 24.342.000,00     | 99,73  |
|    |                                         |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                               | 21.231.400,00     | 21.160.250,00     | 99,66  |
|    |                                         |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 6.996.000,00      | 6.996.000,00      | 100,00 |
|    |                                         |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                  | 175.490.000,00    | 174.998.043,00    | 99,72  |



|           |                                             |  |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|-----------|---------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|           |                                             |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>4.560.000.000,00</b> | <b>4.112.647.641,00</b> | <b>90,19</b> |
|           |                                             |  | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                       | 4.560.000.000,00        | 4.112.647.641,00        | 90,19        |
|           |                                             |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>1.161.433.176,00</b> | <b>1.157.974.043,00</b> | <b>99,70</b> |
|           |                                             |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 242.808.000,00          | 240.713.385,00          | 99,14        |
|           |                                             |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 918.625.176,00          | 917.260.658,00          | 99,85        |
|           |                                             |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>190.058.500,00</b>   | <b>178.277.480,00</b>   | <b>93,80</b> |
|           |                                             |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 177.138.500,00          | 165.592.480,00          | 93,48        |
|           |                                             |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 12.920.000,00           | 12.685.000,00           | 98,18        |
|           |                                             |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>                                                                               | <b>1.126.697.400,00</b> | <b>1.084.195.966,00</b> | <b>96,23</b> |
|           |                                             |  | <b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                       | <b>417.593.100,00</b>   | <b>406.197.864,00</b>   | <b>97,27</b> |
|           |                                             |  | Pengembangan Dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik                                                       | 165.936.400,00          | 156.659.252,00          | 94,41        |
|           |                                             |  | Pengembangan Bahan Pustaka                                                                                          | 106.238.500,00          | 106.038.500,00          | 99,81        |
|           |                                             |  | Pengelolaan Dan Pengembangan Bahan Pustaka                                                                          | 145.418.200,00          | 143.500.112,00          | 98,68        |
|           |                                             |  | <b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      | <b>709.104.300,00</b>   | <b>677.998.102,00</b>   | <b>95,61</b> |
|           |                                             |  | Sosialisasi Budaya Baca Dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat            | 199.742.100,00          | 188.996.600,00          | 94,62        |
|           |                                             |  | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca                                                                  | 224.766.700,00          | 205.984.002,00          | 91,64        |
|           |                                             |  | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial                                                                       | 183.594.300,00          | 183.594.300,00          | 100,00       |
|           |                                             |  | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 101.001.200,00          | 99.423.200,00           | 98,44        |
|           |                                             |  | <b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>                                                         | <b>94.466.700,00</b>    | <b>89.166.228,00</b>    | <b>94,39</b> |
|           |                                             |  | <b>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                          | <b>94.466.700,00</b>    | <b>89.166.228,00</b>    | <b>94,39</b> |
|           |                                             |  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, Dan Pendaftaran Naskah Kuno           | 94.466.700,00           | 89.166.228,00           | 94,39        |
| <b>18</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b> |  |                                                                                                                     |                         |                         |              |



|            |                                                          |  |  |                                                                                                                                                |                          |                          |              |
|------------|----------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|            | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                         |  |  |                                                                                                                                                |                          |                          |              |
|            |                                                          |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>                                                                                                               | <b>210.519.350,00</b>    | <b>203.917.190,00</b>    | <b>96,86</b> |
|            |                                                          |  |  | <b>Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                         | <b>60.077.050,00</b>     | <b>54.732.090,00</b>     | <b>91,10</b> |
|            |                                                          |  |  | Pemeliharaan Dan Penyusutan Arsip Dinamis                                                                                                      | 60.077.050,00            | 54.732.090,00            | 91,10        |
|            |                                                          |  |  | <b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                          | <b>150.442.300,00</b>    | <b>149.185.100,00</b>    | <b>99,16</b> |
|            |                                                          |  |  | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dan Akses Arsip Statis                                                                                       | 150.442.300,00           | 149.185.100,00           | 99,16        |
|            |                                                          |  |  | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>                                                                                             | <b>192.603.400,00</b>    | <b>187.875.520,00</b>    | <b>97,55</b> |
|            |                                                          |  |  | <b>Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (SEPULUH) Tahun</b>                        | <b>52.013.200,00</b>     | <b>51.755.040,00</b>     | <b>99,50</b> |
|            |                                                          |  |  | Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun                                                                           | 52.013.200,00            | 51.755.040,00            | 99,50        |
|            |                                                          |  |  | <b>Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana Yang Berskala Kabupaten/Kota</b>                                                         | <b>50.034.200,00</b>     | <b>49.886.040,00</b>     | <b>99,70</b> |
|            |                                                          |  |  | Pemulihan Dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana                                                                                                 | 50.034.200,00            | 49.886.040,00            | 99,70        |
|            |                                                          |  |  | <b>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung Dan/Atau Dibubarkan, Dan Pemekaran Daerah Kecamatan Dan Desa/Kelurahan</b> | <b>40.216.600,00</b>     | <b>36.584.600,00</b>     | <b>90,97</b> |
|            |                                                          |  |  | Pendataan, Penyusunan Daftar Dan Penilaian Serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota              | 40.216.600,00            | 36.584.600,00            | 90,97        |
|            |                                                          |  |  | <b>Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang</b>                                                                            | <b>50.339.400,00</b>     | <b>49.649.840,00</b>     | <b>98,63</b> |
|            |                                                          |  |  | Penetapan Dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)                                                                                          | 50.339.400,00            | 49.649.840,00            | 98,63        |
| <b>III</b> | <b>URUSAN PILIHAN</b>                                    |  |  |                                                                                                                                                |                          |                          |              |
| <b>1</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> |  |  |                                                                                                                                                | <b>24.566.574.891,00</b> | <b>22.958.424.650,00</b> | <b>93,45</b> |
|            | Dinas Perikanan                                          |  |  |                                                                                                                                                | <b>24.566.574.891,00</b> | <b>22.958.424.650,00</b> | <b>93,45</b> |
|            |                                                          |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                                             | <b>11.206.464.991,00</b> | <b>10.151.201.420,00</b> | <b>90,58</b> |
|            |                                                          |  |  | <b>Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                         | <b>400.964.800,00</b>    | <b>367.793.900,00</b>    | <b>91,73</b> |
|            |                                                          |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                | 377.884.800,00           | 347.733.900,00           | 92,02        |



|  |  |  |                                                                                                                 |                         |                         |              |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                           | 23.080.000,00           | 20.060.000,00           | 86,92        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                   | <b>5.659.296.141,00</b> | <b>5.086.617.957,00</b> | <b>89,88</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                               | 5.654.296.141,00        | 5.081.617.957,00        | 89,87        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                     | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 100          |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                | <b>59.265.000,00</b>    | <b>59.000.000,00</b>    | <b>99,55</b> |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                          | 59.265.000,00           | 59.000.000,00           | 99,55        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.238.613.900,00</b> | <b>1.004.923.020,00</b> | <b>81,13</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                | 13.168.500,00           | 12.503.500,00           | 94,95        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 385.726.400,00          | 379.006.300,00          | 98,26        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                               | 12.014.000,00           | 12.014.000,00           | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 15.080.000,00           | 4.930.000,00            | 32,69        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                                                         | 25.735.000,00           | 19.135.000,00           | 74,35        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 15.000.000,00           | 9.360.000,00            | 62,40        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Dan Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                        | 771.890.000,00          | 567.974.220,00          | 73,58        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>105.000.000,00</b>   | <b>103.382.400,00</b>   | <b>98,46</b> |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                                             | 25.000.000,00           | 23.495.000,00           | 93,98        |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 80.000.000,00           | 79.887.400,00           | 99,86        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | <b>1.900.057.138,00</b> | <b>1.794.583.064,00</b> | <b>94,45</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air Dan Listrik                                                          | 212.379.230,00          | 202.687.476,00          | 95,44        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 1.687.677.908,00        | 1.591.895.588,00        | 94,32        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                      | <b>1.843.268.012,00</b> | <b>1.734.901.079,00</b> | <b>94,12</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | 231.268.012,00          | 137.366.379,00          | 59,40        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                        | 12.000.000,00           | 4.800.000,00            | 40,00        |



|  |  |  |                                                                                                                                                         |                         |                         |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                     | 1.600.000.000,00        | 1.592.734.700,00        | 99,55        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>                                                                                                            | <b>4.352.217.800,00</b> | <b>4.241.016.680,00</b> | <b>97,44</b> |
|  |  |  | Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 4.280.573.000,00        | 4.189.541.880,00        | 97,87        |
|  |  |  | Penyediaan Data Dan Informasi Sumberdaya Ikan                                                                                                           | 50.438.200,00           | 45.228.200,00           | 89,67        |
|  |  |  | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap                                                                                                            | 4.230.134.800,00        | 4.144.313.680,00        | 97,97        |
|  |  |  | <b>Pemberdayaan Nelayan Ikan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                      | <b>71.644.800,00</b>    | <b>51.474.800,00</b>    | <b>71,85</b> |
|  |  |  | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil                                                                           | 71.644.800,00           | 51.474.800,00           | 71,85        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>                                                                                                           | <b>8.041.632.600,00</b> | <b>7.779.665.336,00</b> | <b>96,74</b> |
|  |  |  | <b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>                                                                                                             | <b>4.781.712.120,00</b> | <b>4.662.024.647,00</b> | <b>97,50</b> |
|  |  |  | Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil                                                                                                           | 4.518.189.520,00        | 4.416.471.780,00        | 97,75        |
|  |  |  | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan Dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil                                                                  | 94.564.600,00           | 88.643.000,00           | 93,74        |
|  |  |  | Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi Dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan                        | 168.958.000,00          | 156.909.867,00          | 92,87        |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Pembudidaya Ikan</b>                                                                                                                     | <b>3.259.920.480,00</b> | <b>3.117.640.689,00</b> | <b>95,64</b> |
|  |  |  | Penyediaan Data Dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                   | 49.999.780,00           | 48.052.280,00           | 96,10        |
|  |  |  | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                            | 2.689.873.200,00        | 2.570.091.909,00        | 95,55        |
|  |  |  | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                    | 400.047.500,00          | 381.586.500,00          | 95,39        |
|  |  |  | Pengelolaan Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Budidaya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                                                 | 120.000.000,00          | 117.910.000,00          | 98,26        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>                                                                                            | <b>481.240.000,00</b>   | <b>423.632.100,00</b>   | <b>88,03</b> |
|  |  |  | <b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam</b>                     | <b>481.240.000,00</b>   | <b>423.632.100,00</b>   | <b>88,03</b> |





|          |                                              |  |                                                                                                                                               |                         |                         |              |
|----------|----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|          |                                              |  | <b>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                         |                         |                         |              |
|          |                                              |  | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota | 481.240.000,00          | 423.632.100,00          | 88,03        |
|          |                                              |  | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>                                                                                       | <b>485.019.500,00</b>   | <b>362.909.114,00</b>   | <b>74,82</b> |
|          |                                              |  | <b>Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil</b>                                              | <b>25.002.400,00</b>    | <b>21.936.400,00</b>    | <b>87,74</b> |
|          |                                              |  | Penyediaan Data Dan Informasi Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                             | 25.002.400,00           | 21.936.400,00           | 87,74        |
|          |                                              |  | <b>Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil</b>                                  | <b>31.798.800,00</b>    | <b>31.732.100,00</b>    | <b>99,79</b> |
|          |                                              |  | Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil                        | 31.798.800,00           | 31.732.100,00           | 99,79        |
|          |                                              |  | <b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                     | <b>428.218.300,00</b>   | <b>309.240.614,00</b>   | <b>72,22</b> |
|          |                                              |  | Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                        | 144.956.900,00          | 129.774.900,00          | 89,53        |
|          |                                              |  | Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro Dan Kecil Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                    | 283.261.400,00          | 179.465.714,00          | 63,36        |
| <b>2</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b> |  |                                                                                                                                               |                         |                         |              |
|          | <b>Dinas Pariwisata dan Kebudayaan</b>       |  |                                                                                                                                               |                         |                         |              |
|          |                                              |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                                            | <b>6.931.328.484,00</b> | <b>6.509.063.334,00</b> | <b>93,91</b> |
|          |                                              |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>157.889.900,00</b>   | <b>154.270.301,00</b>   | <b>97,71</b> |
|          |                                              |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                               | 133.817.900,00          | 131.492.801,00          | 98,26        |
|          |                                              |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                                                         | 24.072.000,00           | 22.777.500,00           | 94,62        |
|          |                                              |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                 | <b>4.151.019.720,00</b> | <b>3.942.655.636,00</b> | <b>94,98</b> |
|          |                                              |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                                             | 4.146.019.720,00        | 3.937.655.636,00        | 94,97        |



|  |  |  |                                                                                                                               |                         |                         |               |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                                   | 5.000.000,00            | 5.000.000,00            | 100,00        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                     | <b>1.059.656.350,00</b> | <b>1.011.560.463,00</b> | <b>95,46</b>  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                              | 5.934.100,00            | 5.934.100,00            | 100,00        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                                  | 336.274.850,00          | 333.973.300,00          | 99,32         |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                              | 135.164.000,00          | 132.980.300,00          | 98,38         |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                       | 127.516.600,00          | 126.458.001,00          | 99,17         |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                      | 56.025.000,00           | 55.944.000,00           | 99,86         |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                          | 398.741.800,00          | 356.270.762,00          | 89,35         |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                       | <b>336.068.800,00</b>   | <b>330.172.256,00</b>   | <b>98,25</b>  |
|  |  |  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                            | 336.068.800,00          | 330.172.256,00          | 98,25         |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                   | <b>949.408.162,00</b>   | <b>864.063.678,00</b>   | <b>91,01</b>  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                       | 91.613.645,00           | 43.473.565,00           | 47,45         |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                         | 857.794.517,00          | 820.590.113,00          | 95,66         |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                  | <b>277.285.552,00</b>   | <b>206.341.000,00</b>   | <b>74,41</b>  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan           | 118.457.526,00          | 100.036.000,00          | 84,45         |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan               | 138.128.026,00          | 85.605.000,00           | 61,98         |
|  |  |  | PEMELIHARAAN PERALATAN DAN Mesin Lainnya                                                                                      | 20.700.000,00           | 20.700.000,00           | 100,00        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DAYATARIK DESTINASI PARIWISATA</b>                                                                     | <b>3.481.429.800,00</b> | <b>3.288.490.654,00</b> | <b>94,46</b>  |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>                                                                | <b>3.283.767.800,00</b> | <b>3.090.831.654,00</b> | <b>94,12</b>  |
|  |  |  | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 3.283.767.800,00        | 3.090.831.654,00        | 94,12         |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata</b>                                                                                       | <b>197.662.000,00</b>   | <b>197.659.000,00</b>   | <b>100,00</b> |



|          |                                                          |  |                                                                                                                         |                         |                         |               |
|----------|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|          |                                                          |  | <b>Kabupaten/Kota</b>                                                                                                   |                         |                         |               |
|          |                                                          |  | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                                                        | 197.662.000,00          | 197.659.000,00          | 100,00        |
|          |                                                          |  | <b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>                                                                                     | <b>.561.862.400,00</b>  | <b>1.543.149.109,00</b> | <b>98,80</b>  |
|          |                                                          |  | <b>Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b> | <b>1.561.862.400,00</b> | <b>1.543.149.109,00</b> | <b>98,80</b>  |
|          |                                                          |  | Penyediaan Data Dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam Dan Luar Negeri                          | 43.250.000,00           | 43.250.000,00           | 100,00        |
|          |                                                          |  | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Dan Media Lainnya Baik Dalam Dan Luar Negeri                         | 1.518.612.400,00        | 1.499.899.109,00        | 98,77         |
|          |                                                          |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>                                                  | <b>1.473.092.300,00</b> | <b>1.466.318.601,00</b> | <b>99,54</b>  |
|          |                                                          |  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar                      | 923.092.950,00          | 917.035.452,00          | 99,34         |
|          |                                                          |  | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                                                  | 718.093.300,00          | 712.773.901,00          | 99,26         |
|          |                                                          |  | Pengembangan Kapasitas Sdm Pariwisata Berbasis Skkni                                                                    | 204.999.650,00          | 204.261.551,00          | 99,64         |
|          |                                                          |  | Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif                                                                           | 549.999.350,00          | 549.283.149,00          | 99,87         |
|          |                                                          |  | Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dan Pendampingan Ekonomi Kreatif                                                           | 549.999.350,00          | 549.283.149,00          | 99,87         |
| <b>3</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>              |  |                                                                                                                         |                         |                         |               |
|          | <b>Dinas Pertanian Tanaman Pangan &amp; Hortikultura</b> |  |                                                                                                                         |                         |                         |               |
|          |                                                          |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                      | <b>6.396.385.821,00</b> | <b>5.827.967.820,00</b> | <b>93,668</b> |
|          |                                                          |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                 | <b>81.372.800,00</b>    | <b>78.736.800,00</b>    | <b>100</b>    |
|          |                                                          |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                         | 76.696.400,00           | 74.065.400,00           | 100           |
|          |                                                          |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                   | 4.676.400,00            | 4.671.400,00            | 100           |
|          |                                                          |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                  | 4.125.721.357,00        | 3.878.954.934,00        | 100           |
|          |                                                          |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                       | 4.114.538.957,00        | 3.867.782.534,00        | 100           |
|          |                                                          |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                             | 11.182.400,00           | 11.172.400,00           | 100           |
|          |                                                          |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                               | <b>1.150.830.800,00</b> | <b>995.672.156,00</b>   | <b>97,75</b>  |
|          |                                                          |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                        | 7.379.500,00            | 7.379.500,00            | 100           |



|  |  |  |                                                                                                                                                                   |                         |                         |              |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                                      | 677.353.300,00          | 636.229.300,00          | 94,74        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                                                  | 33.520.000,00           | 29.179.000,00           | 91,76        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                                           | 19.147.000,00           | 18.868.250,00           | 100          |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan                                                                                                          | 19.764.000,00           | 19.764.000,00           | 100          |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                                              | 393.667.000,00          | 284.252.106,00          | 100          |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                       | <b>334.315.464,00</b>   | <b>327.610.803,00</b>   | <b>100</b>   |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                                                           | 20.988.000,00           | 18.236.963,00           | 100          |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                             | 313.327.464,00          | 309.373.840,00          | 100          |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                      | <b>704.145.400,00</b>   | <b>546.993.127,00</b>   | <b>70,59</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                              | 109.090.800,00          | 64.625.657,00           | 73,57        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                  | 111.584.600,00          | 64.095.627,00           | 82,36        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                                                          | 39.470.000,00           | 39.470.000,00           | 100          |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                                                      | 444.000.000,00          | 443.427.500,00          | 100          |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>                                                                            | <b>424.319.350,00</b>   | <b>408.413.820,00</b>   | <b>100</b>   |
|  |  |  | <b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                  | <b>424.319.350,00</b>   | <b>408.413.820,00</b>   | <b>100</b>   |
|  |  |  | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya                                                                                                     | 424.319.350,00          | 408.413.820,00          | 100          |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>                                                                                          | <b>1.978.051.100,00</b> | <b>1.107.871.215,00</b> | <b>97,66</b> |
|  |  |  | <b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b> | <b>501.700.600,00</b>   | <b>160.512.500,00</b>   | <b>98,58</b> |
|  |  |  | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota                                                                            | 165.298.000,00          | 160.512.500,00          | 98,58        |
|  |  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis                                                                             | 336.402.600,00          | 319.370.980,00          | 97,09        |
|  |  |  | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                                                                                       | 1.023.760.600,00        | 947.358.715,00          | 94,4         |
|  |  |  | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                               | 1.023.760.600,00        | 947.358.715,00          | 94,4         |
|  |  |  | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                                                                  | 452.589.900,00          | 441.325.356,00          | 100          |
|  |  |  | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                                                                                              | 315.589.800,00          | 310.828.956,00          | 100          |
|  |  |  | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                                                                         | 137.000.100,00          | 130.496.400,00          | 100          |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>                                                                                                                        | <b>119.972.300,00</b>   | <b>117.573.480,00</b>   | <b>100</b>   |
|  |  |  | <b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>                                                                                                  | <b>119.972.300,00</b>   | <b>117.573.480,00</b>   | <b>100</b>   |
|  |  |  | Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                                                                         | 119.972.300,00          | 117.573.480,00          | 100          |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>                                                                                                                         | <b>132.540.400,00</b>   | <b>132.535.900,00</b>   | <b>100</b>   |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                                         | <b>132.540.400,00</b>   | <b>132.535.900,00</b>   | <b>100</b>   |



|  |                                                  |  |                                                                                                                           |                          |                          |              |
|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |                                                  |  | Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                            | 132.540.400,00           | 132.535.900,00           | 100          |
|  | Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan |  |                                                                                                                           |                          |                          |              |
|  |                                                  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                        | <b>12.097.760.110,00</b> | <b>10.069.971.034,00</b> | <b>83,24</b> |
|  |                                                  |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                   | <b>230.217.560,00</b>    | <b>199.715.662,00</b>    | <b>86,75</b> |
|  |                                                  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                           | 217.716.740,00           | 189.568.162,00           | 87,07        |
|  |                                                  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                                     | 12.500.820,00            | 10.147.500,00            | 81,17        |
|  |                                                  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                             | <b>9.472.999.586,00</b>  | <b>7.832.017.508,00</b>  | <b>82,68</b> |
|  |                                                  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                         | 9.470.021.678,00         | 7.829.334.708,00         | 82,67        |
|  |                                                  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                               | 2.977.908,00             | 2.682.800,00             | 90,09        |
|  |                                                  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                 | <b>930.928.580,00</b>    | <b>811.499.991,00</b>    | <b>87,17</b> |
|  |                                                  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                          | 17.089.560,00            | 16.004.780,00            | 93,65        |
|  |                                                  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                              | 179.776.955,00           | 145.070.206,00           | 80,69        |
|  |                                                  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                          | 99.900.000,00            | 82.240.500,00            | 82,32        |
|  |                                                  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                   | 69.847.065,00            | 60.570.912,00            | 86,72        |
|  |                                                  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                  | 190.536.000,00           | 186.648.000,00           | 97,96        |
|  |                                                  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                      | 373.779.000,00           | 320.965.593,00           | 85,87        |
|  |                                                  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                               | <b>1.125.288.484,00</b>  | <b>1.072.355.361,00</b>  | <b>95,30</b> |
|  |                                                  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                   | 136.651.680,00           | 118.883.563,00           | 87,00        |
|  |                                                  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 988.636.804,00           | 953.471.798,00           | 96,44        |
|  |                                                  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                              | <b>338.325.900,00</b>    | <b>154.382.512,00</b>    | <b>45,63</b> |
|  |                                                  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan           | 309.243.900,00           | 127.686.412,00           | 41,29        |
|  |                                                  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                                  | 29.082.000,00            | 26.696.100,00            | 91,80        |
|  |                                                  |  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>                                                               | <b>2.028.654.139,00</b>  | <b>1.894.422.534,00</b>  | <b>93,38</b> |
|  |                                                  |  | <b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>               | <b>1.135.894.840,00</b>  | <b>1.068.768.640,00</b>  | <b>94,09</b> |
|  |                                                  |  | Peningkatan Kualitas Sdg Hewan/Tanaman                                                                                    | 406.756.400,00           | 373.216.740,00           | 91,75        |
|  |                                                  |  | Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman                                                                                             | 729.138.440,00           | 695.551.900,00           | 95,39        |
|  |                                                  |  | <b>Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>86.985.300,00</b>     | <b>79.299.000,00</b>     | <b>91,16</b> |
|  |                                                  |  | Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak                                                  | 86.985.300,00            | 79.299.000,00            | 91,16        |
|  |                                                  |  | <b>Pengawasan Obat Hewan Di Tingkat Pengecer</b>                                                                          | <b>42.628.499,00</b>     | <b>39.745.994,00</b>     | <b>93,24</b> |



|  |  |  |                                                                                                                                      |                         |                         |              |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Pemeriksaan Mutu, Khasiat Dan Keamanan Peredaran Obat Hewan                                                                          | 42.628.499,00           | 39.745.994,00           | 93,24        |
|  |  |  | <b>Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>659.491.300,00</b>   | <b>613.094.600,00</b>   | <b>92,96</b> |
|  |  |  | Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak                                                                                              | 659.491.300,00          | 613.094.600,00          |              |
|  |  |  | <b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>               | <b>103.654.200,00</b>   | <b>93.514.300,00</b>    | <b>90,22</b> |
|  |  |  | Pengadaan Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain                                                                | 103.654.200,00          | 93.514.300,00           | 90,22        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>                                                                       | <b>278.377.896,00</b>   | <b>268.647.396,00</b>   | <b>96,50</b> |
|  |  |  | <b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>                                                                                              | <b>278.377.896,00</b>   | <b>268.647.396,00</b>   | <b>96,50</b> |
|  |  |  | Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian                                                             | 278.377.896,00          | 268.647.396,00          | 96,50        |
|  |  |  | <b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>                                                                                               | <b>3.806.834.070,00</b> | <b>3.751.050.671,03</b> | <b>98,53</b> |
|  |  |  | Pembangunan, Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani                                                                          | 3.806.834.070,00        | 3.751.050.671,03        | 98,53        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>                                                       | <b>400.886.161,00</b>   | <b>206.846.000,00</b>   | <b>51,60</b> |
|  |  |  | <b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>           | <b>400.886.161,00</b>   | <b>206.846.000,00</b>   | <b>51,60</b> |
|  |  |  | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Dan Zoonosis Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                               | 400.886.161,00          | 206.846.000,00          | 51,60        |
|  |  |  | <b>Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>                                                    | <b>79.312.773,00</b>    | <b>77.974.000,00</b>    | <b>98,31</b> |
|  |  |  | Pengawasan Peredaran Hewan Dan Produk Hewan                                                                                          | 79.312.773,00           | 77.974.000,00           | 98,31        |
|  |  |  | <b>Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</b>                                                               | <b>133.942.356,00</b>   | <b>128.810.500,00</b>   | <b>96,17</b> |
|  |  |  | Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Unit Usaha                                                                              | 133.942.356,00          | 128.810.500,00          | 96,17        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                                                                     | <b>186.846.484,00</b>   | <b>172.259.900,00</b>   | <b>92,19</b> |
|  |  |  | <b>Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>                                                              | <b>186.846.484,00</b>   | <b>172.259.900,00</b>   | <b>92,19</b> |
|  |  |  | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (Opt) Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan                                        | 101.274.657,00          | 92.801.000,00           | 91,63        |
|  |  |  | Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, Dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan                              | 85.571.827,00           | 79.458.900,00           | 92,86        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>                                                                                             | <b>1.309.853.225,00</b> | <b>336.873.560,00</b>   | <b>25,72</b> |
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                            | <b>1.309.853.225,00</b> | <b>336.873.560,00</b>   | <b>25,72</b> |
|  |  |  | Pembinaan Dan Pengawasan Penerapan Standar Dan Izin Usaha Pertanian                                                                  | 1.309.853.225,00        | 336.873.560,00          | 25,72        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>                                                                                                  | <b>4.260.743.095,00</b> | <b>2.963.566.600,00</b> | <b>69,56</b> |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>                                                                                              | <b>4.260.743.095,00</b> | <b>2.963.566.600,00</b> | <b>69,56</b> |
|  |  |  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Di Kecamatan Dan Desa                                                         | 620.243.729,00          | 613.064.400,00          | 98,84        |
|  |  |  | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani Di Kecamatan Dan Desa                                                                      | 3.640.499.366,00        | 2.350.502.200,00        | 64,57        |



|   |                                        |  |                                                                                                                                                                                                 |               |               |        |
|---|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 4 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN |  |                                                                                                                                                                                                 |               |               |        |
|   | Dinas Perdagangan,<br>Koperasi dan UMK |  |                                                                                                                                                                                                 |               |               |        |
|   |                                        |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA<br>MENENANG, USAHA KECIL DAN USAHA<br>MIKRO (UMKM)                                                                                                                   | 1.697.739.075 | 1.622.173.187 | 95,549 |
|   |                                        |  | Pemberdayaan UMK yang Dilakukan<br>Melalui Pendataan, Kemitraan,<br>Kemudahan Perizinan, Penguatan<br>Kelembagaan dan Koordinasi dengan<br>Para Pemangku Kepentingan                            | 1.697.739.075 | 1.622.173.187 | 95,55  |
|   |                                        |  | Pemberdayaan Melalui Kemitraan<br>Usaha Mikro                                                                                                                                                   | 705.245.425   | 671.673.857   | 95,24  |
|   |                                        |  | Fasilitasi Kemudahan Perizinan<br>Usaha Mikro                                                                                                                                                   | 289.862.300   | 268.511.900   | 92,63  |
|   |                                        |  | Pemberdayaan Kelembagaan<br>Potensi dan Pengembangan Usaha<br>Mikro                                                                                                                             | 277.499.400   | 261.377.480   | 94,19  |
|   |                                        |  | Peningkatan Pemahaman dan<br>Pengetahuan UMKM serta Kapasitas<br>dan Kompetensi SDM UMKM dan<br>Kewirausahaan melalui Pendidikan<br>dan Pelatihan (DAK Non Fisik)                               | 425.131.950   | 420.609.950   | 98,94  |
|   |                                        |  | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                                                                                                                                                                       | 279.791.300   | 270.938.000   | 96,84  |
|   |                                        |  | Pengembangan Usaha Mikro dengan<br>Orientasi Peningkatan Skala Usaha<br>Menjadi Usaha Kecil                                                                                                     | 279.791.300   | 270.938.000   | 96,84  |
|   |                                        |  | Pengembangan Usaha Mikro                                                                                                                                                                        | 279.791.300   | 270.938.000   | 96,84  |
|   |                                        |  | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN<br>PERUSAHAAN                                                                                                                                                 | 147.722.400   | 146.624.197   | 99,26  |
|   |                                        |  | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar<br>Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin<br>Usaha Toko Swalayan                                                                                                 | 83.731.300    | 83.192.947    | 99,36  |
|   |                                        |  | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen<br>Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,<br>Pusat Perbelanjaan, dan Toko<br>Swalayan Melalui Sistem Pelayanan<br>Perizinan Berusaha<br>Terintegrasi Secara Elektronik | 83.731.300    | 83.192.947    | 99,36  |
|   |                                        |  | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                                                                                                                                                                  | 7.336.800     | 7.336.800     | 100,00 |
|   |                                        |  | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar<br>Gudang                                                                                                                                                    | 7.336.800     | 7.336.800     | 100,00 |
|   |                                        |  | Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan<br>Bahan Berbahaya dan Pengawasan<br>Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan<br>Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah<br>Kabupaten / Kota                          | 56.654.300    | 56.094.450    | 99,01  |
|   |                                        |  | Pemeriksaan Penyimpanan Bahan<br>Berbahaya                                                                                                                                                      | 56.654.300    | 56.094.450    | 99,01  |
|   |                                        |  | PROGRAM PENINGKATAN SARANA<br>DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                                                                                                            | 349.963.282   | 348.773.082   | 99,66  |



|  |  |  |                                                                                                                                       |                    |                    |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|  |  |  | <b>Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>                                    | <b>349.963.282</b> | <b>348.773.082</b> | <b>99,66</b> |
|  |  |  | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                    | 20.087.600         | 20.017.400         | 99,65        |
|  |  |  | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                                                                  | 329.875.682        | 328.755.682        | 99,66        |
|  |  |  | <b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>                                                            | <b>555.152.800</b> | <b>511.895.375</b> | <b>92,21</b> |
|  |  |  | <b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>                             | <b>100.320.500</b> | <b>100.247.750</b> | <b>99,93</b> |
|  |  |  | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  | 100.320.500        | 100.247.750        | 99,93        |
|  |  |  | <b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupten / Kota</b>                         | <b>434.788.400</b> | <b>392.044.525</b> | <b>90,17</b> |
|  |  |  | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 87.577.500         | 85.998.825         | 98,20        |
|  |  |  | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota                                     | 347.210.900        | 306.045.700        | 88,14        |
|  |  |  | <b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>                                                   | <b>20.043.900</b>  | <b>19.603.100</b>  | <b>97,80</b> |
|  |  |  | Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi                                                                   | 20.043.900         | 19.603.100         | 97,80        |
|  |  |  | <b>PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>                                                                                 | <b>217.550.650</b> | <b>210.542.670</b> | <b>96,78</b> |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan</b>                                                            | <b>217.550.650</b> | <b>210.542.670</b> | <b>96,78</b> |
|  |  |  | Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang                                                                                   | 152.703.800        | 145.880.900        | 95,53        |
|  |  |  | Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal                                                                                               | 64.846.850         | 64.661.770         | 99,71        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>                                                                           | <b>68.919.200</b>  | <b>58.269.200</b>  | <b>84,55</b> |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri</b>                                                  | <b>68.919.200</b>  | <b>58.269.200</b>  | <b>84,55</b> |
|  |  |  | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten / Kota                                                        | 68.919.200         | 58.269.200         | 84,55        |





|   |                                          |                                                                              |                                                                                       |                         |                         |              |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 5 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN |                                                                              |                                                                                       |                         |                         |              |
|   | Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja     |                                                                              |                                                                                       |                         |                         |              |
|   |                                          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           |                                                                                       | <b>8.826.033.526,00</b> | <b>8.106.581.484,00</b> | <b>91,85</b> |
|   |                                          | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>      |                                                                                       | <b>181.017.400,00</b>   | <b>170.164.610,00</b>   | <b>94,00</b> |
|   |                                          |                                                                              | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 149.095.500,00          | 138.280.710,00          | 92,75        |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd                                            | 2.729.400,00            | 2.729.400,00            | -            |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd                                  | 2.924.300,00            | 2.924.300,00            | 100,00       |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd                                                    | 2.868.300,00            | 2.868.300,00            | -            |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd                                         | 4.897.900,00            | 4.897.900,00            | -            |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | 2.983.700,00            | 2.983.700,00            | -            |
|   |                                          |                                                                              | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     | 15.518.300,00           | 15.480.300,00           | 99,76        |
|   |                                          | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |                                                                                       | <b>4.740.791.072,00</b> | <b>4.247.152.287,00</b> | <b>89,59</b> |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn                                         | 4.260.150.776,00        | 3.766.511.991,00        | -            |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn                                         | 476.455.496,00          | 476.455.496,00          | 100,00       |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                           | 2.002.200,00            | 2.002.200,00            | 100,00       |
|   |                                          |                                                                              | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd       | 2.182.600,00            | 2.182.600,00            | 100,00       |
|   |                                          | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                             |                                                                                       | <b>9.664.000,00</b>     | <b>4.377.110,00</b>     | <b>45,29</b> |
|   |                                          |                                                                              | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 9.664.000,00            | 4.377.110,00            | 45,29        |
|   |                                          | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                                                                                       | <b>676.661.300,00</b>   | <b>653.355.552,00</b>   | <b>96,56</b> |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 176.940.400,00          | 175.610.030,00          | 99,25        |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                          | 36.384.300,00           | 36.088.500,00           | 99,19        |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 66.412.000,00           | 65.832.000,00           | 99,13        |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 92.709.600,00           | 92.104.000,00           | 99,35        |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 5.250.000,00            | 5.250.000,00            | 100,00       |
|   |                                          |                                                                              | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                  | 298.965.000,00          | 278.471.022,00          | 93,15        |
|   |                                          | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                                                                                       | <b>1.492.901.700,00</b> | <b>1.487.939.154,00</b> | <b>99,67</b> |
|   |                                          |                                                                              | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya          | 1.492.901.700,00        | 1.487.939.154,00        | 99,67        |
|   |                                          | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |                                                                                       | <b>1.471.286.554,00</b> | <b>1.333.025.143,00</b> | <b>90,60</b> |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                               | 230.311.650,00          | 172.156.443,00          | -            |
|   |                                          |                                                                              | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                 | 1.240.974.904,00        | 1.160.868.700,00        | -            |
|   |                                          | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                       | <b>253.711.500,00</b>   | <b>210.567.628,00</b>   | <b>82,99</b> |



|  |  |  |                                                                                                                                                                                           |                         |                         |              |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                                                           | 213.211.500,00          | 170.067.628,00          | -            |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                                              | 40.500.000,00           | 40.500.000,00           | 100,00       |
|  |  |  | <b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>                                                                                                                                                        | <b>2.295.542.800,00</b> | <b>2.177.139.892,00</b> | <b>94,84</b> |
|  |  |  | <b>Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>297.583.700,00</b>   | <b>292.140.542,00</b>   | <b>98,17</b> |
|  |  |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan                                                                                                                                           | 97.573.800,00           | 92.668.242,00           | -            |
|  |  |  | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama Bagi Perusahaan                                                                                                                                         | 73.202.100,00           | 73.090.600,00           | -            |
|  |  |  | Penyelenggaraan Pendataan Dan Informasi Sarana Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan                                                                       | 126.807.800,00          | 126.381.700,00          | -            |
|  |  |  | <b>Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                        | <b>1.997.959.100,00</b> | <b>1.884.999.350,00</b> | <b>-</b>     |
|  |  |  | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                            | 47.338.000,00           | 45.768.000,00           | 96,68        |
|  |  |  | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan Di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | 49.858.500,00           | 48.441.300,00           | 97,16        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Verifikasi Dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi Dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afiliasi                              | 51.807.400,00           | 51.801.950,00           | 99,99        |
|  |  |  | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                | 22.064.300,00           | 22.024.400,00           | -            |
|  |  |  | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                                                                                                  | 1.826.890.900,00        | 1.716.963.700,00        | 93,98        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                                                                                                                                       | <b>855.256.750,00</b>   | <b>814.446.012,00</b>   | <b>95,23</b> |
|  |  |  | <b>Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>                                                                                                                | <b>855.256.750,00</b>   | <b>814.446.012,00</b>   | <b>95,23</b> |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri                                                                                                       | 270.720.100,00          | 270.398.100,00          | 99,88        |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat                                                                                                | 584.536.650,00          | 544.047.912,00          | 93,07        |
|  |  |  | Program Pengendalian Izin Usaha Industri                                                                                                                                                  | <b>76.286.000,00</b>    | <b>59.312.500,00</b>    | <b>77,75</b> |
|  |  |  | <b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (Ipu), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>76.286.000,00</b>    | <b>59.312.500,00</b>    | <b>77,75</b> |
|  |  |  | Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | 76.286.000,00           | 59.312.500,00           | 77,75        |
|  |  |  | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                                                                                                                                    | <b>127.644.400,00</b>   | <b>106.245.007,00</b>   | <b>83,24</b> |
|  |  |  | <b>Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk Iui, Ipu, Iuki Dan Iпки Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                                                     | <b>127.644.400,00</b>   | <b>106.245.007,00</b>   | <b>83,24</b> |



|          |                                                |  |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
|----------|------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|          |                                                |  |  | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas) | 55.482.400,00         | 46.847.400,00         | 84,44        |
|          |                                                |  |  | Diseminasi, Publikasi Data Informasi Dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui Siinas                                                                                         | 72.162.000,00         | 59.397.607,00         | 82,31        |
|          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b> |  |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
|          |                                                |  |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| <b>B</b> | <b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>    |  |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| <b>1</b> | <b>PERENCANAAN</b>                             |  |  |                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
|          | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah           |  |  |                                                                                                                                                                                 | <b>24.898.299.837</b> | <b>24.189.358.385</b> | <b>97,15</b> |
|          |                                                |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                                                                              | <b>16.077.711.337</b> | <b>15.560.171.601</b> | <b>96,78</b> |
|          |                                                |  |  | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                | <b>203.050.400</b>    | <b>202.946.321</b>    | <b>99,95</b> |
|          |                                                |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                 | 106.657.700           | 106.635.921           | 99,98        |
|          |                                                |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD                                                                                                                                    | 7.555.250             | 7.555.250             | 100,00       |
|          |                                                |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD                                                                                                                          | 7.244.400             | 7.244.400             | 100,00       |
|          |                                                |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD                                                                                                                                            | 8.999.450             | 8.999.450             | 100,00       |
|          |                                                |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD                                                                                                                                  | 9.166.600             | 9.161.300             | 99,94        |
|          |                                                |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                                           | 48.360.500            | 48.287.500            | 99,85        |
|          |                                                |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                                               | 15.066.500            | 15.062.500            | 99,97        |
|          |                                                |  |  | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                                          | <b>7.710.559.437</b>  | <b>7.470.784.382</b>  | <b>96,89</b> |
|          |                                                |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                               | 7.663.110.987         | 7.423.425.932         | 96,87        |
|          |                                                |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                                                                                     | 47.448.450            | 47.358.450            | 99,81        |
|          |                                                |  |  | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                                                       | <b>416.535.800</b>    | <b>399.975.604</b>    | <b>96,02</b> |
|          |                                                |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                                                                                          | 385.193.800           | 370.147.000           | 96,09        |
|          |                                                |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                                                                                   | -                     | -                     | -            |
|          |                                                |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                                      | 31.342.000            | 29.828.604            | 95,17        |



|  |  |  |                                                                                                                 |                      |                      |              |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                              | <b>4.229.012.380</b> | <b>4.194.791.266</b> | <b>99,19</b> |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                    | 2.830.752.380        | 2.803.317.400        | 99,03        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                | 331.750.000          | 331.740.000          | 100,00       |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                        | 66.940.000           | 60.390.000           | 90,22        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                            | 999.570.000          | 999.343.866          | 99,98        |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                              | <b>660.000.000</b>   | <b>585.742.000</b>   | <b>88,75</b> |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                             | 660.000.000          | 585.742.000          | 88,75        |
|  |  |  | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                            | <b>1.004.059.120</b> | <b>892.859.881</b>   | <b>88,93</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 32.298.000           | 28.488.902           | 88,21        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 971.761.120          | 864.370.979          | 88,95        |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                           | <b>1.854.494.200</b> | <b>1.813.072.147</b> | <b>97,77</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 311.814.200          | 282.195.323          | 90,50        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | 345.680.000          | 345.625.000          | 99,98        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 1.197.000.000        | 1.185.251.824        | 99,02        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                         | <b>3.905.128.150</b> | <b>3.877.920.659</b> | <b>99,30</b> |
|  |  |  | <b>Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>                                                            | <b>2.372.267.650</b> | <b>2.356.915.309</b> | <b>99,35</b> |
|  |  |  | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                                     | 690.933.700          | 690.267.687          | 99,90        |
|  |  |  | Pelaksanaan Konsultasi Publik                                                                                   | 154.041.600          | 153.782.400          | 99,83        |
|  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah                                           | 38.659.200           | 38.659.200           | 100,00       |
|  |  |  | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                                                                           | 411.205.600          | 404.819.400          | 98,45        |
|  |  |  | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan                                                                 | 129.998.500          | 124.868.500          | 96,05        |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                       | 947.429.050          | 944.518.122          | 99,69        |



|  |  |  |                                                                                                                            |                      |                      |              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | <b>Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                      | <b>780.743.600</b>   | <b>776.494.764</b>   | <b>99,46</b> |
|  |  |  | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                                                 | 780.743.600          | 776.494.764          | 99,46        |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pengendalian Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>                                  | <b>752.116.900</b>   | <b>744.510.586</b>   | <b>98,99</b> |
|  |  |  | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                                   | 424.284.150          | 416.829.612          | 98,24        |
|  |  |  | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                                         | 327.832.750          | 327.680.974          | 99,95        |
|  |  |  | <b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>                                                  | <b>2.895.236.250</b> | <b>2.774.622.551</b> | <b>95,83</b> |
|  |  |  | <b>Kegiatan Koodinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>                                          | <b>957.583.450</b>   | <b>913.468.983</b>   | <b>95,39</b> |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)                   | 207.631.500          | 197.941.387          | 95,33        |
|  |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan                                  | 43.691.000           | 39.411.000           | 90,20        |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan        | 24.684.500           | 19.581.700           | 79,33        |
|  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan                       | 126.682.400          | 122.994.334          | 97,09        |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)            | 73.115.200           | 72.218.675           | 98,77        |
|  |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia                           | 125.091.900          | 118.692.389          | 94,88        |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 65.502.150           | 59.491.550           | 90,82        |
|  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia                | 291.184.800          | 283.137.948          | 97,24        |



|  |  |  |                                                                                                                      |                      |                      |              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  |  |  | <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>                                | <b>891.922.850</b>   | <b>835.640.402</b>   | <b>93,69</b> |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)             | 65.469.910           | 64.628.516           | 98,71        |
|  |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                            | 141.892.220          | 127.097.900          | 89,57        |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | 82.480.300           | 80.263.600           | 97,31        |
|  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian                 | 200.588.420          | 189.501.700          | 94,47        |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)                      | 76.931.400           | 70.866.247           | 92,12        |
|  |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA                                     | 107.761.400          | 91.375.000           | 84,79        |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA           | 142.636.300          | 140.692.752          | 98,64        |
|  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA                          | 74.162.900           | 71.214.687           | 96,02        |
|  |  |  | <b>Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan</b>                                          | <b>1.045.729.950</b> | <b>1.025.513.166</b> | <b>98,07</b> |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)            | 175.078.450          | 174.695.492          | 99,78        |
|  |  |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                           | 23.202.500           | 22.467.500           | 96,83        |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | 55.178.700           | 51.806.700           | 93,89        |
|  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur                | 263.140.200          | 262.700.324          | 99,83        |
|  |  |  | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)              | 131.212.550          | 121.359.157          | 92,49        |



|          |                 |  |                                                                                                                    |                          |                         |              |
|----------|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|          |                 |  | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan                           | 65.035.100               | 64.987.100              | 99,93        |
|          |                 |  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan | 76.580.300               | 75.357.600              | 98,40        |
|          |                 |  | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan                | 256.302.150              | 252.139.293             | 98,38        |
|          |                 |  | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>                                                                  | <b>2.020.224.100</b>     | <b>1.976.643.574</b>    | <b>97,84</b> |
|          |                 |  | <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>           | <b>907.012.800</b>       | <b>898.332.286</b>      | <b>99,04</b> |
|          |                 |  | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi           | 189.486.000              | 182.824.400             | 96,48        |
|          |                 |  | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan                                         | 717.526.800              | 715.507.886             | 99,72        |
|          |                 |  | <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>                                         | <b>368.143.200</b>       | <b>356.256.603</b>      | <b>96,77</b> |
|          |                 |  | Penelitian dan Pengembangan Pariwisata                                                                             | 200.476.800              | 190.829.703             | 95,19        |
|          |                 |  | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                         | 167.666.400              | 165.426.900             | 98,66        |
|          |                 |  | <b>Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>                                         | <b>179.516.750</b>       | <b>175.537.175</b>      | <b>97,78</b> |
|          |                 |  | Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                                                     | 179.516.750              | 175.537.175             | 97,78        |
|          |                 |  | <b>Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>                                                                 | <b>565.551.350</b>       | <b>546.517.510</b>      | <b>96,63</b> |
|          |                 |  | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan                                                                 | 565.551.350              | 546.517.510             | 96,63        |
| <b>2</b> | <b>KEUANGAN</b> |  |                                                                                                                    |                          |                         |              |
|          | <b>BPKAD</b>    |  |                                                                                                                    |                          |                         |              |
|          |                 |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>                                                        | <b>11.041.836.012,00</b> | <b>9.883.737.511,00</b> | <b>89,51</b> |
|          |                 |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                            | <b>174.006.371,00</b>    | <b>169.762.000,00</b>   | <b>97,56</b> |
|          |                 |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                    | 134.608.900,00           | 133.167.900,00          | 98,93        |
|          |                 |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                              | 39.397.471,00            | 36.594.100,00           | 92,88        |
|          |                 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                      | <b>7.112.737.862,00</b>  | <b>6.496.295.686,00</b> | <b>91,33</b> |



|  |  |  |                                                                                                                                 |                           |                           |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                               | 7.102.886.022,00          | 6.487.851.186,00          | 91,34        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                                     | 9.851.840,00              | 8.444.500,00              | 85,71        |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                                | <b>39.196.850,00</b>      | <b>21.965.050,00</b>      | <b>56,04</b> |
|  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                        | 39.196.850,00             | 21.965.050,00             | 56,04        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                       | <b>1.785.667.208,00</b>   | <b>1.452.100.130,00</b>   | <b>81,32</b> |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                                    | 498.246.408,00            | 489.083.408,00            | 98,16        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                                | 199.980.000,00            | 198.653.000,00            | 99,34        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                         | 185.079.800,00            | 178.828.400,00            | 96,62        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                        | 17.490.000,00             | 10.260.400,00             | 58,66        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                            | 884.871.000,00            | 575.274.922,00            | 65,01        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                       | <b>273.300.000,00</b>     | <b>268.275.002,00</b>     | <b>98,16</b> |
|  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                                   | 273.300.000,00            | 268.275.002,00            | 98,16        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                     | <b>1.192.971.071,00</b>   | <b>1.094.035.316,00</b>   | <b>91,71</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                         | 287.452.875,00            | 250.018.136,00            | 86,98        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                               | 164.282.000,00            | 161.628.000,00            | 98,38        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | 741.236.196,00            | 682.389.180,00            | 92,06        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                    | <b>431.036.500,00</b>     | <b>351.262.577,00</b>     | <b>81,49</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan             | 286.636.500,00            | 228.436.216,00            | 79,7         |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                                    | 144.400.000,00            | 122.826.361,00            | 85,06        |
|  |  |  | <b>Penataan Organisasi</b>                                                                                                      | <b>32.920.150,00</b>      | <b>30.041.750,00</b>      | <b>91,26</b> |
|  |  |  | Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana                                                | 32.920.150,00             | 30.041.750,00             | 91,26        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                      | <b>431.833.615.722,00</b> | <b>429.111.348.818,00</b> | <b>99,37</b> |
|  |  |  | <b>Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                        | <b>1.324.167.300,00</b>   | <b>991.905.150,00</b>     | <b>74,91</b> |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Kua Dan Ppas                                                                                          | 103.709.900,00            | 83.366.900,00             | 80,38        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Kua Dan Perubahan Ppas                                                                      | 77.724.900,00             | 69.107.900,00             | 88,91        |
|  |  |  | Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Rka-Skpd                                                                                  | 25.818.700,00             | 9.826.800,00              | 38,06        |
|  |  |  | Koordinasi, Penyusunan Dan Verifikasi Perubahan Rka-Skpd                                                                        | 10.176.800,00             | 0                         | 0            |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD                     | 352.990.700,00            | 192.332.400,00            | 54,49        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD | 369.947.300,00            | 357.040.600,00            | 96,51        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Regulasi Serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                              | 112.527.000,00            | 97.784.040,00             | 86,9         |
|  |  |  | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah                                                                                  | 271.272.000,00            | 182.446.510,00            | 67,26        |
|  |  |  | <b>Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                         | <b>721.715.500,00</b>     | <b>604.782.370,00</b>     | <b>83,8</b>  |





|  |                |  |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |              |
|--|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
|  |                |  | Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                       | 77.726.000,00             | 71.745.000,00             | 92,31        |
|  |                |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan Dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (Pfk)                                 | 128.296.400,00            | 113.849.900,00            | 88,74        |
|  |                |  | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | 515.693.100,00            | 419.187.470,00            | 81,29        |
|  |                |  | <b>Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                   | <b>946.107.900,00</b>     | <b>658.334.393,00</b>     | <b>69,58</b> |
|  |                |  | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Bulanan, Triwulanan Dan Semesteran                                                                                                                        | 124.775.800,00            | 96.309.900,00             | 77,19        |
|  |                |  | Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/Kota Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Kabupaten/Kota | 821.332.100,00            | 562.024.493,00            | 68,43        |
|  |                |  | <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                              | <b>428.841.625.022,00</b> | <b>426.856.326.905,00</b> | <b>99,54</b> |
|  |                |  | Analisis Perencanaan Dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                        | 409.091.858.099,00        | 408.909.452.499,00        | 99,96        |
|  |                |  | Pengelolaan Dana Darurat Dan Mendesak                                                                                                                                                                                       | 1.486.084.358,00          | 122.578.409,00            | 8,25         |
|  |                |  | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                  | 18.263.682.565,00         | 17.824.295.997,00         | 97,59        |
|  |                |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                                                                                                                                                                              | <b>1.702.859.650,00</b>   | <b>1.441.550.600,00</b>   | <b>84,65</b> |
|  |                |  | <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                                                                                                                                      | <b>1.702.859.650,00</b>   | <b>1.441.550.600,00</b>   | <b>84,65</b> |
|  |                |  | Penyusunan Standar Harga                                                                                                                                                                                                    | 388.598.000,00            | 378.398.000,00            | 97,38        |
|  |                |  | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                              | 471.984.800,00            | 376.917.490,00            | 79,86        |
|  |                |  | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                               | 105.895.200,00            | 99.072.200,00             | 93,56        |
|  |                |  | Pengawasan Dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                 | 85.743.050,00             | 35.271.850,00             | 41,14        |
|  |                |  | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah                                                                                                                     | 273.729.400,00            | 220.243.000,00            | 80,46        |
|  |                |  | Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                            | 249.999.700,00            | 207.318.544,00            | 82,93        |
|  |                |  | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                         | 126.909.500,00            | 124.329.516,00            | 97,97        |
|  | <b>BAPENDA</b> |  |                                                                                                                                                                                                                             |                           |                           |              |
|  |                |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                                                                                                                          | <b>19.949.705.180,00</b>  | <b>17.402.232.083,00</b>  | <b>87,23</b> |
|  |                |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                                                     | <b>77.652.800,00</b>      | <b>77.195.800,00</b>      | <b>99,41</b> |
|  |                |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                             | 23.204.700,00             | 23.170.700,00             | 99,85        |
|  |                |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd                                                                                                                                                                                  | 11.510.300,00             | 11.448.300,00             | 99,46        |
|  |                |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd                                                                                                                                                                        | 7.719.900,00              | 7.719.900,00              | 100          |
|  |                |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd                                                                                                                                                                                          | 10.922.700,00             | 10.860.700,00             | 99,43        |
|  |                |  | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd                                                                                                                                                                               | 7.548.000,00              | 7.486.000,00              | 99,18        |
|  |                |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                                                                                                                                       | 7.535.400,00              | 7.463.400,00              |              |



|  |  |  |                                                                                                                           |                          |                          |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                         | 9.211.800,00             | 9.046.800,00             | 98,21        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                             | <b>13.604.278.782,00</b> | <b>11.376.951.722,00</b> | <b>83,63</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                         | 13.568.907.382,00        | 11.342.010.422,00        | 83,59        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                               | 11.941.300,00            | 11.941.300,00            | 100          |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd                                           | 23.430.100,00            | 23.000.000,00            | 100          |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                          | <b>228.920.000,00</b>    | <b>202.894.493,00</b>    | <b>88,63</b> |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                                                    | 38.000.000,00            | 37.601.000,00            | 98,95        |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                | 190.920.000,00           | 165.293.493,00           | 86,58        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                 | <b>2.849.772.800,00</b>  | <b>2.773.028.315,00</b>  | <b>97,31</b> |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                              | 737.165.200,00           | 726.714.500,00           |              |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                          | 225.000.000,00           | 221.560.480,00           |              |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                                                                   | 628.737.600,00           | 620.275.620,00           | 98,65        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                  | 44.217.000,00            | 44.217.000,00            | 100          |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                      | 1.214.653.000,00         | 1.160.260.715,00         | 95,52        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                   | <b>1.243.720.000,00</b>  | <b>1.160.141.200,00</b>  | <b>93,28</b> |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                                                       | 778.440.000,00           | 696.700.000,00           | 89,5         |
|  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                             | 465.280.000,00           | 463.441.200,00           |              |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                               | <b>1.416.428.398,00</b>  | <b>1.293.081.672,00</b>  | <b>91,29</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                   | 384.397.630,00           | 356.959.123,00           | 92,86        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                         | 136.780.000,00           | 136.780.000,00           | 100          |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                     | 895.250.768,00           | 799.342.549,00           | 89,29        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                              | <b>528.932.400,00</b>    | <b>518.938.881,00</b>    | <b>98,11</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan       | 379.082.400,00           | 369.219.381,00           | 97,4         |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                        | 149.850.000,00           | 149.719.500,00           | 99,91        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                                                                              | <b>5.577.780.601,00</b>  | <b>4.141.008.063,00</b>  | <b>74,24</b> |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>                                                                             | <b>5.577.780.601,00</b>  | <b>4.141.008.063,00</b>  | <b>74,24</b> |
|  |  |  | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah                                                                                      | 47.119.500,00            | 26.119.500,00            | 55,43        |
|  |  |  | Analisa Dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah                                            | 523.745.100,00           | 305.138.281,00           | 58,26        |
|  |  |  | Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                                                                      | 223.540.300,00           | 120.275.700,00           | 53,8         |
|  |  |  | Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah                                                                  | 478.369.000,00           | 361.996.000,00           | 75,67        |
|  |  |  | Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah                                                                              | 125.353.900,00           | 66.381.500,00            | 52,96        |
|  |  |  | Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                                                           | 101.146.000,00           | 67.169.800,00            | 66,41        |
|  |  |  | Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbbp2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphbt) | 1.589.610.988,00         | 1.011.285.272,00         | 63,62        |



|   |                                                       |  |                                                                                       |                  |                  |        |
|---|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|   |                                                       |  | Penetapan Wajib Pajak Daerah                                                          | 586.771.400,00   | 567.096.500,00   |        |
|   |                                                       |  | Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah                                                 | 215.585.100,00   | 213.068.050,00   | 98,83  |
|   |                                                       |  | Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah                                 | 52.074.600,00    | 33.774.600,00    | 64,86  |
|   |                                                       |  | Penagihan Pajak Daerah                                                                | 895.378.913,00   | 740.775.260,00   | 82,73  |
|   |                                                       |  | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                                   | 145.476.300,00   | 108.516.300,00   | 74,59  |
|   |                                                       |  | Pengendalian, Pemeriksaan Dan Pengawasan Pajak Daerah                                 | 136.894.500,00   | 89.824.500,00    | 65,62  |
|   |                                                       |  | Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah                | 333.650.400,00   | 326.150.400,00   | 97,75  |
|   |                                                       |  | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                                           | 123.064.600,00   | 103.436.400,00   | 84,05  |
| 3 | KEPEGAWAIAN                                           |  |                                                                                       |                  |                  |        |
|   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia |  |                                                                                       |                  |                  |        |
|   |                                                       |  | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                                                   | 8.552.347.161,00 | 7.972.382.927,00 | 93,22  |
|   |                                                       |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 165.477.400,00   | 123.970.974,00   | 74,92  |
|   |                                                       |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 158.750.700,00   | 118.373.974,00   | 74,57  |
|   |                                                       |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.726.700,00     | 5.597.000,00     | 83,21  |
|   |                                                       |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | 6.056.217.913,00 | 5.881.155.955,00 | 97,11  |
|   |                                                       |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 6.052.508.713,00 | 5.877.928.855,00 | 97,12  |
|   |                                                       |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 3.709.200,00     | 3.227.100,00     | 87,00  |
|   |                                                       |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | 356.339.300,00   | 324.597.000,00   | 91,09  |
|   |                                                       |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 109.847.700,00   | 109.843.000,00   | 100,00 |
|   |                                                       |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas                            | 121.874.500,00   | 115.615.000,00   | 94,86  |
|   |                                                       |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan                           | 124.617.100,00   | 99.139.000,00    | 79,55  |
|   |                                                       |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | 1.110.795.300,00 | 862.506.467,00   | 77,65  |
|   |                                                       |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 20.536.000,00    | 20.536.000,00    | 100,00 |
|   |                                                       |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 477.506.000,00   | 452.680.000,00   | 94,80  |
|   |                                                       |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 15.075.800,00    | 10.825.800,00    | 71,81  |



|  |  |  |                                                                                                                    |                         |                         |              |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                   | 47.000.000,00           | 35.124.000,00           | 74,73        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                            | 46.749.000,00           | 43.751.750,00           | 93,59        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                                           | 4.647.500,00            | 3.449.300,00            | 74,22        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                               | 499.281.000,00          | 296.139.617,00          | 59,31        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                            | <b>309.600.000,00</b>   | <b>294.194.000,00</b>   | <b>95,02</b> |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                    | 154.600.000,00          | 140.200.000,00          | 90,69        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  | 155.000.000,00          | 153.994.000,00          | 99,35        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>380.593.848,00</b>   | <b>331.365.074,00</b>   | <b>87,07</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | 127.853.000,00          | 113.313.258,00          | 88,63        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | 252.740.848,00          | 218.051.816,00          | 86,27        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>173.323.400,00</b>   | <b>154.593.457,00</b>   | <b>89,19</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.996.000,00           | 52.492.057,00           | 79,54        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 11.513.000,00           | 11.513.000,00           | 100,00       |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 40.814.400,00           | 36.044.400,00           | 88,31        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor                                                       | 55.000.000,00           | 54.544.000,00           | 99,17        |
|  |  |  | <b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>                                                                                  | <b>2.856.952.200,00</b> | <b>1.978.847.684,00</b> | <b>69,26</b> |
|  |  |  | <b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>                                                      | <b>802.890.500,00</b>   | <b>677.412.212,00</b>   | <b>84,37</b> |
|  |  |  | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                                                   | 481.756.400             | 394.102.883,00          | 81,81        |
|  |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                                                  | 104.548.500             | 91.112.874,00           | 87,15        |
|  |  |  | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                                                                     | 49.863.900              | 49.435.000,00           | 99,14        |
|  |  |  | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                           | 49.244.700              | 48.432.500,00           | 98,35        |
|  |  |  | Pengelolaan Data Kepegawaian                                                                                       | 54.320.000              | 45.964.600,00           | 84,62        |
|  |  |  | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                                                          | 63.157.000              | 48.364.355,00           | 76,58        |
|  |  |  | <b>Mutasi dan Promosi ASN</b>                                                                                      | <b>987.141.600,00</b>   | <b>504.621.483,00</b>   | <b>51,12</b> |



|          |                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
|          |                                                                          |  | Pengelolaan Mutasi ASN                                                                                                                                                                                | 123.188.400,00          | 77.020.173,00         | 62,52        |
|          |                                                                          |  | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                                                                                                                                                      | 136.742.600,00          | 97.416.990,00         | 71,24        |
|          |                                                                          |  | Pengelolaan Promosi ASN                                                                                                                                                                               | 727.210.600,00          | 330.184.320,00        | 45,40        |
|          |                                                                          |  | <b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>                                                                                                                                                                    | <b>657.718.400,00</b>   | <b>467.558.070,00</b> | <b>71,09</b> |
|          |                                                                          |  | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                                                                                                                                   | 97.153.100,00           | 73.731.000,00         | 75,89        |
|          |                                                                          |  | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                                                                                                                                                   | 560.565.300,00          | 393.827.070,00        | 70,26        |
|          |                                                                          |  | <b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>                                                                                                                                                        | <b>409.201.700,00</b>   | <b>329.255.919,00</b> | <b>80,46</b> |
|          |                                                                          |  | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                   | 74.998.600,00           | 61.960.030,00         | 82,61        |
|          |                                                                          |  | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                                                                                                                                                | 148.914.000,00          | 130.611.273,00        | 87,71        |
|          |                                                                          |  | Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai                                                                                                                                                        | 69.409.300,00           | 58.686.616,00         | 84,55        |
|          |                                                                          |  | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                                                                                                                                     | 49.979.500,00           | 36.265.000,00         | 72,56        |
|          |                                                                          |  | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                                                                                                                                                              | 65.900.300,00           | 41.733.000,00         | 63,33        |
|          |                                                                          |  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>                                                                                                                                                       | <b>1.329.149.300,00</b> | <b>925.251.909,00</b> | <b>69,61</b> |
|          |                                                                          |  | <b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>                                                                                                                                                                 | <b>651.643.300,00</b>   | <b>360.504.269,00</b> | <b>55,32</b> |
|          |                                                                          |  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 651.643.300,00          | 360.504.269,00        | 55,32        |
|          |                                                                          |  | <b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>                                                                                                                    | <b>677.506.000,00</b>   | <b>564.747.640,00</b> | <b>83,36</b> |
|          |                                                                          |  | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan                                                               | 677.506.000,00          | 564.747.640,00        | 83,36        |
| <b>C</b> | <b>URUSAN FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b> |  |                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |              |
| <b>1</b> | <b>URUSAN FUNGSI PENGAWASAN</b>                                          |  |                                                                                                                                                                                                       |                         |                       |              |
|          | Inspektorat                                                              |  |                                                                                                                                                                                                       | 28.885.425.628,00       | 21.934.073.206,00     | 75,93        |
|          |                                                                          |  | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN EMERINTAHAN</b>                                                                                                                                                             |                         |                       |              |
|          |                                                                          |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                                                                                                               | <b>58.340.000,00</b>    | <b>7.250.000,00</b>   | <b>12,43</b> |
|          |                                                                          |  | Koordinasi Dan Penyusunan                                                                                                                                                                             | 14.060.000,00           | 4.050.000,00          | 28,81        |



|  |  |  |                                                                                       |                          |                          |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |  | Dokumen Rka-Skpd                                                                      |                          |                          |              |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | 44.280.000,00            | 3.200.000,00             | 7,23         |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>13.980.551.224,00</b> | <b>13.584.203.867,00</b> | <b>97,17</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                     | 13.975.891.224,00        | 13.581.949.867,00        | 97,18        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd       | 4.660.000,00             | 2.254.000,00             | 48,37        |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>2.995.124.000,00</b>  | <b>1.599.549.950,00</b>  | <b>53,41</b> |
|  |  |  | Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi                         | 2.904.924.000,00         | 1.589.849.950,00         | 54,73        |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 90.200.000,00            | 9.700.000,00             | 10,75        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>1.707.882.900,00</b>  | <b>1.423.944.065,00</b>  | <b>83,37</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 52.301.200,00            | 52.130.000,00            | 99,67        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                          | 221.114.100,00           | 210.919.693,00           | 95,39        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 169.425.000,00           | 167.312.500,00           | 98,75        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                               | 133.713.600,00           | 133.683.646,00           | 99,98        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 31.200.000,00            | 30.970.000,00            | 99,26        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD                                  | 1.100.129.000,00         | 828.928.226,00           | 75,35        |
|  |  |  | <b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>               | <b>2.596.865.400,00</b>  | <b>1.659.513.000,00</b>  | <b>63,9</b>  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                   | 596.022.000,00           | 568.578.000,00           | 95,4         |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                 | 1.441.000.400,00         | 545.130.000,00           | 37,83        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                    | 559.843.000,00           | 545.805.000,00           | 97,49        |
|  |  |  | <b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                           | <b>640.571.604,00</b>    | <b>582.593.658,00</b>    | <b>90,95</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                               | 188.236.440,00           | 160.898.388,00           | 85,48        |
|  |  |  | <b>PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR</b>                                          | <b>452.335.164,00</b>    | <b>421.695.270,00</b>    | <b>93,23</b> |
|  |  |  | <b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>          | <b>897.593.500,00</b>    | <b>892.100.616,00</b>    | <b>99,39</b> |



|  |                                   |  |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |                                   |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 88.650.000,00           | 87.754.810,00           | 98,99        |
|  |                                   |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan     | 370.232.000,00          | 366.399.806,00          | 98,96        |
|  |                                   |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 86.734.000,00           | 86.490.000,00           | 99,72        |
|  |                                   |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                  | 351.977.500,00          | 351.456.000,00          | 99,85        |
|  |                                   |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                                                                           |                         |                         |              |
|  |                                   |  | <b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>                                                                          | <b>4.003.941.000,00</b> | <b>1.311.937.000,00</b> | <b>32,77</b> |
|  |                                   |  | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                                                                                | 358.200.000,00          | 97.950.000,00           | 27,35        |
|  |                                   |  | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                               | 1.411.920.000,00        | 315.933.000,00          | 22,38        |
|  |                                   |  | Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP             | 244.357.000,00          | 152.233.000,00          | 62,3         |
|  |                                   |  | <b>PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU</b>                                                            | <b>621.440.000,00</b>   | <b>210.164.050,00</b>   | <b>33,82</b> |
|  |                                   |  | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah                                                                      | 97.040.000,00           | 0                       | 0            |
|  |                                   |  | Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu                                                                                   | 524.400.000,00          | 210.164.050,00          | 40,08        |
|  |                                   |  | <b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                      |                         |                         |              |
|  |                                   |  | <b>PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN</b>                                    | <b>11.100.000,00</b>    | <b>0</b>                | <b>0</b>     |
|  |                                   |  | Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan                                                                     | 11.100.000,00           | 0                       | 0            |
|  |                                   |  | <b>PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>                                                                                   | <b>1.372.016.000,00</b> | <b>662.817.000,00</b>   | <b>48,31</b> |
|  |                                   |  | Pendampingan Dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | 393.013.000,00          | 50.578.500,00           | 12,87        |
|  |                                   |  | Pendampingan, Asistensi Dan Verifikasi Penegakan Integritas                                                         | 362.610.000,00          | 223.331.000,00          | 61,59        |
|  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |  |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|  |                                   |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                  | <b>7.493.192.165,00</b> | <b>7.302.496.200,00</b> | <b>97,46</b> |
|  |                                   |  | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                                             | <b>334.948.100,00</b>   | <b>333.085.300,00</b>   | <b>99,44</b> |
|  |                                   |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 150.605.700,00          | 149.164.700,00          | 99,04        |



|  |  |  |                                                                                                                                                            |                         |                         |              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd                                                                                                                 | 9.860.900,00            | 9.860.500,00            | 100          |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd                                                                                                       | 9.860.900,00            | 9.860.500,00            | 100          |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd                                                                                                                         | 9.860.900,00            | 9.860.500,00            | 100          |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd                                                                                                              | 9.860.900,00            | 9.860.500,00            | 100          |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd                                                                      | 11.180.900,00           | 11.180.500,00           | 100          |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                          | 133.717.900,00          | 133.298.100,00          | 99,69        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                                                              | <b>3.293.220.897,00</b> | <b>3.232.002.187,00</b> | <b>98,14</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                                                          | 3.285.831.797,00        | 3.224.778.087,00        | 98,14        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                                                                | 7.389.100,00            | 7.224.100,00            | 97,77        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                                                  | <b>1.120.458.650,00</b> | <b>1.114.374.047,00</b> | <b>99,46</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                           | 13.641.000,00           | 13.604.100,00           | 99,73        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                                                               | 237.877.050,00          | 232.296.550,00          | 97,65        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                                                               | 237.877.050,00          | 232.296.550,00          | 97,65        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                                                                                                    | 124.968.600,00          | 124.930.600,00          | 99,97        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                                                                   | 4.095.000,00            | 4.083.800,00            | 99,73        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                                                       | 710.277.000,00          | 710.173.997,00          | 99,99        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                                                    | <b>1.677.009.050,00</b> | <b>1.646.311.214,00</b> | <b>98,17</b> |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                                                                                        | 494.840.000,00          | 481.740.000,00          | 97,35        |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                                                                      | 520.397.100,00          | 503.604.400,00          | 96,77        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                               | 661.771.950,00          | 660.966.814,00          | 99,88        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                                                | <b>751.880.468,00</b>   | <b>671.814.106,00</b>   | <b>89,35</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                                                    | 161.184.000,00          | 137.287.706,00          | 85,17        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                                                          | 24.822.500,00           | 24.822.500,00           | 100          |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                                                      | 565.873.968,00          | 509.703.900,00          | 90,07        |
|  |  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                                      | <b>315.675.000,00</b>   | <b>304.909.346,00</b>   | <b>96,59</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                            | 144.375.000,00          | 133.716.051,00          | 92,62        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                                                                   | 21.300.000,00           | 21.300.000,00           | 100          |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                                         | 150.000.000,00          | 149.893.295,00          | 99,93        |
|  |  |  | <b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Arakter Kebangsaan</b>                                                                                         | <b>2.967.681.300,00</b> | <b>2773329245</b>       | <b>93,45</b> |
|  |  |  | <b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>                                             | <b>2.967.681.300,00</b> | <b>2.773.329.245,00</b> | <b>93,45</b> |
|  |  |  | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan | 383.101.700,00          | 283.342.100,00          | 73,96        |





|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |                          |              |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |  | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                                            | 449.807.000,00           | 393.791.400,00           | 87,55        |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan                                                                                                     | 250.000.000,00           | 248.554.145,00           | 99,42        |
|  |  |  | Pembentukan Paskibraka                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.884.772.600,00         | 1.847.641.600,00         | 98,03        |
|  |  |  | <b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>                                                                                                                                          | <b>56.209.678.063,00</b> | <b>56.055.845.756,00</b> | <b>99,73</b> |
|  |  |  | <b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</b> | <b>56.209.678.063,00</b> | <b>56.055.845.756,00</b> | <b>99,73</b> |
|  |  |  | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah            | 51.783.198.600,00        | 51.783.198.600,00        | 100          |
|  |  |  | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah                          | 834.632.700,00           | 805.566.128,00           | 96,52        |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah  | 3.591.846.763,00         | 3.467.081.028,00         | 96,53        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>909.618.400,00</b>    | <b>895.652.400,00</b>    | <b>98,46</b> |
|  |  |  | <b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>                                                                                                                                                              | <b>909.618.400,00</b>    | <b>895.652.400,00</b>    | <b>98,46</b> |
|  |  |  | Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah                                                                                                                              | 166.416.400,00           | 163.391.200,00           | 98,18        |
|  |  |  | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah                                                                                                                                | 600.000.000,00           | 600.000.000,00           | 100          |
|  |  |  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah                                                                                                        | 143.202.000,00           | 132.261.200,00           | 92,36        |



|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |              |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|
|           |                                | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2.583.238.100,00</b>   | <b>2.412.682.771,00</b>  | <b>93,4</b>  |
|           |                                | <b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>                                                                                                                                                                          | <b>2.583.238.100,00</b>   | <b>2.412.682.771,00</b>  | <b>93,4</b>  |
|           |                                | Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah                                                                                    | 1.978.659.450,00          | 1.839.464.321,00         | 92,97        |
|           |                                | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah                                                                                       | 222.760.350,00            | 197.632.550,00           | 88,72        |
|           |                                | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah                                                                                      | 381.818.300,00            | 375.585.900,00           | 98,37        |
|           |                                | <b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>                                                                                                                                                                 | <b>2.731.302.950,00</b>   | <b>2.385.621.722,00</b>  | <b>87,34</b> |
|           |                                | <b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial</b>                                                                                                                                                                   | <b>2.731.302.950,00</b>   | <b>2.385.621.722,00</b>  | <b>87,34</b> |
|           |                                | Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah                          | 856.089.700,00            | 682.303.886,00           | 79,7         |
|           |                                | Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah                         | 288.287.900,00            | 288.156.900,00           | 99,95        |
|           |                                | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah | 719.343.400,00            | 604.386.560,00           | 84,02        |
|           |                                | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                       | 867.581.950,00            | 810.774.376,00           | 93,45        |
| <b>II</b> | <b>URUSAN FUNGSI PENDUKUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |              |
|           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |              |
| <b>a</b>  | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |              |
|           | Sekretariat Daerah             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                          |              |
|           |                                | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>104.384.068.369,00</b> | <b>92.674.913.701,68</b> | <b>88,78</b> |
|           |                                | <b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1.740.391.700,00</b>   | <b>1.578.909.819,00</b>  | <b>90,72</b> |
|           |                                | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                                                                                                                   | 983.454.500,00            | 924.770.450,00           | 94,03        |
|           |                                | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd                                                                                                                                                                                                                                        | 153.814.800,00            | 139.554.800,00           | 90,73        |



|  |  |  |                                                                                       |                          |                          |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-Skpd                                  | 117.254.700,00           | 113.460.100,00           | 96,76        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Dpa-Skpd                                                    | 89.317.000,00            | 79.978.100,00            | 89,54        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd                                         | 110.376.100,00           | 96.772.068,00            | 87,67        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd | 286.174.600,00           | 224.374.301,00           | 78,40        |
|  |  |  | <b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>                                         | <b>25.022.679.192,00</b> | <b>23.442.344.400,00</b> | <b>93,68</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                     | 24.636.842.892,00        | 23.189.034.200,00        | 94,12        |
|  |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd                      | 99.096.800,00            | 64.098.600,00            | 64,68        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Skpd                                             | 120.041.900,00           | 62.160.700,00            | 51,78        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                           | 106.747.000,00           | 92.608.300,00            | 86,75        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd       | 59.950.600,00            | 34.442.600,00            | 57,45        |
|  |  |  | <b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>                         | <b>3.544.682.200,00</b>  | <b>2.742.767.430,00</b>  | <b>77,38</b> |
|  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Skpd                             | 124.987.100,00           | 58.589.400,00            | 46,88        |
|  |  |  | Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada Skpd                     | 92.264.300,00            | 57.625.500,00            | 62,46        |
|  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Skpd                                           | 3.327.430.800,00         | 2.626.552.530,00         | 78,94        |
|  |  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>1.794.609.900,00</b>  | <b>1.736.278.400,00</b>  | <b>96,75</b> |
|  |  |  | Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai                                     | 49.045.100,00            | 47.841.900,00            | 97,55        |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                | 1.202.598.600,00         | 1.199.369.800,00         | 99,73        |
|  |  |  | Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 17.711.900,00            | 16.784.500,00            | 94,76        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 65.276.800,00            | 64.504.000,00            | 98,82        |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | 459.977.500,00           | 407.778.200,00           | 88,65        |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>15.350.982.050,00</b> | <b>11.254.085.917,00</b> | <b>73,31</b> |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 605.159.800,00           | 553.003.000,00           | 91,38        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                          | 948.970.250,00           | 932.026.850,00           | 98,21        |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 673.911.700,00           | 666.066.300,00           | 98,84        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | 7.686.416.300,00         | 4.858.972.800,00         | 63,22        |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                               | 630.276.800,00           | 611.276.880,00           | 96,99        |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                              | 95.247.400,00            | 77.475.000,00            | 81,34        |
|  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                             | 584.060.900,00           | 583.219.400,00           | 99,86        |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                  | 4.126.938.900,00         | 2.972.045.687,00         | 72,02        |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>10.794.868.750,00</b> | <b>10.630.498.132,68</b> | <b>98,48</b> |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan                     | 3.524.263.400,00         | 3.474.563.400,00         | 98,59        |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan                                   | 2.200.745.400,00         | 2.137.163.400,00         | 97,11        |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                       | 1.603.220.250,00         | 1.589.057.650,00         | 99,12        |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                 | 962.523.500,00           | 955.272.500,00           | 99,25        |



|  |  |  |                                                                                                                     |                          |                          |              |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                  | 695.342.050,00           | 687.811.000,00           | 98,92        |
|  |  |  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                        | 1.808.774.150,00         | 1.786.630.182,68         | 98,78        |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>16.093.304.951,00</b> | <b>14.966.477.731,00</b> | <b>93,00</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 369.579.500,00           | 364.894.000,00           | 98,73        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 3.404.889.095,00         | 3.252.831.066,00         | 95,53        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 3.768.800.000,00         | 3.748.067.052,00         | 99,45        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 8.550.036.356,00         | 7.600.685.613,00         | 88,90        |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>17.144.194.190,00</b> | <b>15.608.766.540,00</b> | <b>91,04</b> |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1.656.844.400,00         | 1.489.558.944,00         | 89,90        |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan     | 2.418.240.140,00         | 2.131.233.581,00         | 88,13        |
|  |  |  | Pemeliharaan Mebel                                                                                                  | 413.631.100,00           | 340.605.800,00           | 82,35        |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 2.038.080.000,00         | 1.954.097.200,00         | 95,88        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                        | 4.914.567.150,00         | 4.754.292.773,85         | 96,74        |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                  | 5.702.831.400,00         | 4.938.978.241,15         | 86,61        |
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah</b>                                  | <b>1.281.163.636,00</b>  | <b>1.039.641.066,00</b>  | <b>81,15</b> |
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                                                 | 179.456.136,00           | -                        | 0,00         |
|  |  |  | Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                              | 444.862.800,00           | 444.520.000,00           | 99,92        |
|  |  |  | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                                                  | 56.844.700,00            | 55.121.066,00            | 96,97        |
|  |  |  | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah                                         | 600.000.000,00           | 540.000.000,00           | 90,00        |
|  |  |  | <b>Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>                                                                | <b>2.182.720.800,00</b>  | <b>2.140.208.550,00</b>  | <b>98,05</b> |
|  |  |  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                                                     | 1.563.339.000,00         | 1.521.928.250,00         | 97,35        |
|  |  |  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                                                               | 77.000,00                | -                        | 0,00         |
|  |  |  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                                                                | 619.304.800,00           | 618.280.300,00           | 99,83        |
|  |  |  | <b>Penataan Organisasi</b>                                                                                          | <b>1.512.652.800,00</b>  | <b>900.627.016,00</b>    | <b>59,54</b> |
|  |  |  | Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan                                                                        | 521.998.800,00           | 349.563.485,00           | 66,97        |
|  |  |  | Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana                                                                        | 271.370.200,00           | 112.746.741,00           | 41,55        |
|  |  |  | Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi                                                                         | 210.619.300,00           | 109.649.540,00           | 52,06        |
|  |  |  | Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana                                    | 354.517.200,00           | 210.978.432,00           | 59,51        |
|  |  |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                                                         | 154.147.300,00           | 117.688.818,00           | 76,35        |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan</b>                                                                 | <b>7.921.818.200,00</b>  | <b>6.634.308.700,00</b>  | <b>83,75</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Keprotokolan                                                                                             | 5.653.789.900,00         | 4.456.473.600,00         | 78,82        |
|  |  |  | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                                                                      | 1.008.526.900,00         | 967.638.200,00           | 95,95        |



|  |  |  |                                                                                                                                                      |                          |                          |              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|  |  |  | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                                                                                                      | 1.259.501.400,00         | 1.210.196.900,00         | 96,09        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>                                                                                                 | <b>21.384.959.000,00</b> | <b>19.394.008.544,00</b> | <b>90,69</b> |
|  |  |  | <b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>                                                                                                                | <b>2.775.936.300,00</b>  | <b>2.201.292.850,00</b>  | <b>79,30</b> |
|  |  |  | Penataan Administrasi Pemerintahan                                                                                                                   | 396.965.900,00           | 253.798.515,00           | 63,93        |
|  |  |  | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                                                                                                 | 1.252.604.800,00         | 1.020.204.195,00         | 81,45        |
|  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                                                                                                | 1.126.365.600,00         | 927.290.140,00           | 82,33        |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>                                                                                                    | <b>16.434.576.150,00</b> | <b>15.332.358.053,00</b> | <b>93,29</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                                                                                                         | 10.649.008.300,00        | 10.111.754.560,00        | 94,95        |
|  |  |  | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                                                    | 3.724.394.550,00         | 3.542.840.797,00         | 95,13        |
|  |  |  | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                                                                | 1.833.607.150,00         | 1.504.628.196,00         | 82,06        |
|  |  |  | Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | 227.566.150,00           | 173.134.500,00           | 76,08        |
|  |  |  | <b>Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</b>                                                                                                               | <b>791.472.000,00</b>    | <b>662.331.694,00</b>    | <b>83,68</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                                                                                                            | 208.010.000,00           | 178.007.135,00           | 85,58        |
|  |  |  | Fasilitasi Bantuan Hukum                                                                                                                             | 328.356.900,00           | 274.082.792,00           | 83,47        |
|  |  |  | Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum                                                                                        | 255.105.100,00           | 210.241.767,00           | 82,41        |
|  |  |  | <b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>                                                                                                                  | <b>1.382.974.550,00</b>  | <b>1.198.025.947,00</b>  | <b>86,63</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                                                                                                   | 1.000.338.650,00         | 954.659.593,00           | 95,43        |
|  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                                                                                                                    | 144.261.200,00           | 20.194.809,00            | 14,00        |
|  |  |  | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama                                                                                                                      | 238.374.700,00           | 223.171.545,00           | 93,62        |
|  |  |  | <b>Program Perekonomian Dan Pembangunan</b>                                                                                                          | <b>4.332.150.350,00</b>  | <b>4.044.489.439,00</b>  | <b>93,36</b> |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>                                                                                                            | <b>960.002.150,00</b>    | <b>949.959.418,00</b>    | <b>98,95</b> |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumda Dan Blud                                                               | 422.039.200,00           | 419.019.724,00           | 99,28        |
|  |  |  | Pengendalian Dan Distribusi Perekonomian                                                                                                             | 358.779.550,00           | 355.434.113,00           | 99,07        |
|  |  |  | Perencanaan Dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                                                                                                       | 179.183.400,00           | 175.505.581,00           | 97,95        |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>                                                                                                          | <b>813.055.350,00</b>    | <b>750.446.063,00</b>    | <b>92,30</b> |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                                                                                                            | 437.176.200,00           | 393.192.199,00           | 89,94        |
|  |  |  | <b>Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa</b>                                                                                                         | <b>1.713.976.200,00</b>  | <b>1.554.613.274,00</b>  | <b>90,70</b> |
|  |  |  | Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa                                                                                                                | 708.179.500,00           | 617.934.233,00           | 87,26        |
|  |  |  | <b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>                                                                                                         | <b>845.116.650,00</b>    | <b>789.470.684,00</b>    | <b>93,42</b> |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Dan Perikanan                                                        | 525.539.550,00           | 491.430.993,00           | 93,51        |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan Dan Lingkungan Hidup                                                                    | 154.217.600,00           | 148.106.739,00           | 96,04        |
|  |  |  | Koordinasi, Sinkronisasi Dan Evaluasi Kebijakan Energi Dan Air                                                                                       | 165.359.500,00           | 149.932.952,00           | 90,67        |



|          |                                                   |                                                                                       |  |                           |                          |              |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------|
|          |                                                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>                                                 |  | <b>212.770.400,00</b>     | <b>152.556.513,00</b>    | <b>71,70</b> |
|          |                                                   | <b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>                                             |  | <b>212.770.400,00</b>     | <b>152.556.513,00</b>    | <b>71,70</b> |
|          |                                                   | Penjagaan Dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah                                         |  | 212.770.400,00            | 152.556.513,00           | 71,70        |
|          |                                                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                    |  | <b>104.384.068.369,00</b> | <b>92.674.913.701,68</b> | <b>88,78</b> |
|          |                                                   | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  | <b>1.740.391.700,00</b>   | <b>1.578.909.819,00</b>  | <b>90,72</b> |
|          |                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  | 983.454.500,00            | 924.770.450,00           | 94,03        |
|          |                                                   | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |  | 153.814.800,00            | 139.554.800,00           | 90,73        |
|          |                                                   | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  | 117.254.700,00            | 113.460.100,00           | 96,76        |
| <b>b</b> | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>                           |                                                                                       |  |                           |                          |              |
|          | <b>Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</b> |                                                                                       |  |                           |                          |              |
|          |                                                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                    |  |                           |                          |              |
|          |                                                   | <b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               |  | <b>87.396.000,00</b>      | <b>31.937.000,00</b>     |              |
|          |                                                   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  | 11.400.000,00             | 0,00                     | 0,00         |
|          |                                                   | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |  | 15.240.000,00             | 5.979.000,00             |              |
|          |                                                   | Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  | 15.240.000,00             | 5.958.000,00             | 39,09        |
|          |                                                   | Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |  | 15.240.000,00             | 6.462.000,00             | 42,40        |
|          |                                                   | Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd                                         |  | 15.240.000,00             | 3.297.000,00             | 21,63        |
|          |                                                   | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd |  | 15.036.000,00             | 10.241.000,00            | 68,11        |
|          |                                                   | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         |  | <b>6.294.067.788,00</b>   | <b>6.072.042.058,00</b>  | <b>96,47</b> |
|          |                                                   | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                     |  | 6.271.050.788,00          | 6.056.759.058,00         |              |
|          |                                                   | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                           |  | 23.017.000,00             | 15.283.000,00            | 66,40        |
|          |                                                   | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      |  | <b>1.721.073.800,00</b>   | <b>1.247.067.501,00</b>  | <b>72,46</b> |
|          |                                                   | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |  | 451.820.000,00            | 443.317.000,00           | 98,12        |
|          |                                                   | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            |  | 1.269.253.800,00          | 803.750.501,00           | 63,32        |
|          |                                                   | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             |  | <b>9.105.995.218,00</b>   | <b>8.813.629.300,00</b>  | <b>96,79</b> |



|  |  |  |                                                                                                                     |                          |                          |       |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 31.420.000,00            | 23.565.000,00            | 75,00 |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 8.085.307.950,00         | 7.946.346.700,00         |       |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 8.362.068,00             | 3.680.000,00             | 44,01 |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 56.656.500,00            | 22.787.000,00            | 40,22 |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 924.248.700,00           | 817.250.600,00           | 88,42 |
|  |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 1.510.850.000,00         | 1.410.202.000,00         | 93,34 |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan                                                   | 1.175.000.000,00         | 1.175.000.000,00         |       |
|  |  |  | <b>Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya</b>                                                                        | <b>105.000.000,00</b>    | <b>104.000.000,00</b>    | 99,05 |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>2.819.253.864,00</b>  | <b>2.652.689.642,00</b>  | 94,09 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                      | 12.870.000,00            | 12.800.000,00            | 99,46 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 688.068.000,00           | 539.178.808,00           | 78,36 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 198.000.000,00           | 197.662.994,00           | 99,83 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 1.920.315.864,00         | 1.903.047.840,00         | 99,10 |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>3.114.124.000,00</b>  | <b>2.502.758.948,00</b>  | 80,37 |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 446.230.000,00           | 200.683.350,00           |       |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan     | 921.360.000,00           | 578.733.198,00           | 62,81 |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                        | 1.407.894.000,00         | 1.391.771.100,00         | 98,85 |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                  | 156.370.000,00           | 151.106.300,00           |       |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                        | 182.270.000,00           | 180.465.000,00           |       |
|  |  |  | <b>Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd</b>                                                                      | <b>35.274.540.622,00</b> | <b>33.911.848.265,00</b> | 96,14 |
|  |  |  | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                                                                          | 33.718.802.122,00        | 32.411.443.265,00        | 96,12 |
|  |  |  | Penyediaan Pakaian Dinas Dan Atribut DPRD                                                                           | 1.524.238.500,00         | 1.500.405.000,00         | 98,44 |



|  |  |  |                                                                |                          |                          |       |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------|
|  |  |  | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                              | 31.500.000,00            | 0,00                     |       |
|  |  |  | <b>Layanan Administrasi DPRD</b>                               | <b>1.730.489.500,00</b>  | <b>1.417.387.682,00</b>  |       |
|  |  |  | Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD                | 1.412.286.000,00         | 1.163.176.700,00         | 82,36 |
|  |  |  | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                         | 318.203.500,00           | 254.210.982,00           | 79,89 |
|  |  |  | <b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>      |                          |                          |       |
|  |  |  | <b>Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD</b>         | <b>4.484.748.608,00</b>  | <b>2.173.560.196,00</b>  | 48,47 |
|  |  |  | Penyusunan Dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 1.175.532.162,00         | 557.097.060,00           | 47,39 |
|  |  |  | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          | 3.178.661.343,00         | 1.562.012.536,00         | 49,14 |
|  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    | 130.555.103,00           | 54.450.600,00            | 41,71 |
|  |  |  | <b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>                           | <b>1.961.163.300,00</b>  | <b>1.519.542.039,00</b>  | 77,48 |
|  |  |  | Pembahasan Kua Dan Ppas                                        | 337.440.600,00           | 282.983.890,00           | 83,86 |
|  |  |  | Pembahasan Perubahan Kua Dan Perubahan PPAS                    | 435.193.800,00           | 399.311.600,00           | 91,75 |
|  |  |  | Pembahasan Apbd                                                | 432.480.500,00           | 276.367.000,00           | 63,90 |
|  |  |  | Pembahasan Apbd Perubahan                                      | 432.585.800,00           | 288.342.900,00           | 66,66 |
|  |  |  | Pembahasan Pertanggungjawaban Apbd                             | 323.462.600,00           | 272.536.649,00           | 84,26 |
|  |  |  | <b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>                 | <b>17.880.295.077,00</b> | <b>12.786.181.976,00</b> | 71,51 |
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Dan Hukum   | 4.169.906.200,00         | 2.988.465.068,00         |       |
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur            | 4.759.217.714,00         | 3.674.370.875,00         | 77,21 |
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat     | 4.218.577.763,00         | 2.977.483.129,00         | 70,58 |
|  |  |  | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian             | 4.367.817.400,00         | 2.815.026.904,00         | 64,45 |
|  |  |  | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 364.776.000,00           | 330.836.000,00           | 90,70 |
|  |  |  | <b>Peningkatan Kapasitas Dprd</b>                              | <b>11.845.441.900,00</b> | <b>10.611.799.442,00</b> |       |
|  |  |  | Pendalaman Tugas Dprd                                          | 2.796.051.500,00         | 1.875.782.502,00         |       |
|  |  |  | Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli                         | 437.370.000,00           | 365.370.000,00           | 83,54 |
|  |  |  | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                  | 385.872.000,00           | 352.936.000,00           | 91,46 |
|  |  |  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                            | 2.253.120.000,00         | 2.246.955.000,00         | 99,73 |





|          |                          |  |                                                                         |                          |                          |               |
|----------|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|          |                          |  | Publikasi Dan Dokumentasi Dprd                                          | 5.973.028.400,00         | 5.770.755.940,00         | 96,61         |
|          |                          |  | <b>Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>                  | <b>3.752.677.400,00</b>  | <b>3.204.969.100,00</b>  | <b>85,40</b>  |
|          |                          |  | Kunjungan Kerja Dalam Daerah                                            | 56.020.000,00            | 0,00                     | 0,00          |
|          |                          |  | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                     | 11.980.000,00            | 0,00                     | 0,00          |
|          |                          |  | Pelaksanaan Reses                                                       | 3.684.677.400,00         | 3.204.969.100,00         | 86,98         |
|          |                          |  | <b>Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>                        | <b>229.592.000,00</b>    | <b>34.938.400,00</b>     |               |
|          |                          |  | Penyusunan Kode Etik DPRD                                               | 117.513.500,00           | 14.188.800,00            |               |
|          |                          |  | Pengawasan Kode Etik DPRD                                               | 112.078.500,00           | 20.749.600,00            |               |
|          |                          |  | <b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>                                            | <b>36.259.804.200,00</b> | <b>25.631.023.445,00</b> |               |
|          |                          |  | Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                        | 28.227.047.800,00        | 20.556.854.322,00        |               |
|          |                          |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                           | 1.195.732.200,00         | 880.796.700,00           | 73,66         |
|          |                          |  | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                          | 6.837.024.200,00         | 4.193.372.423,00         | 61,33         |
| <b>c</b> | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b> |  |                                                                         |                          |                          |               |
| <b>1</b> | <b>Kampar Kiri</b>       |  |                                                                         |                          |                          |               |
|          |                          |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>      |                          |                          |               |
|          |                          |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>2.323.405.127,00</b>  | <b>1.998.779.167,00</b>  | <b>86,03</b>  |
|          |                          |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                       | 2.323.405.127,00         | 1.998.779.167,00         | 86,03         |
|          |                          |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                               | <b>456.137.600,00</b>    | <b>453.400.680,00</b>    | <b>99,40</b>  |
|          |                          |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor        | 3.873.000,00             | 3.873.000,00             | 100,00        |
|          |                          |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                            | 83.893.000,00            | 83.892.400,00            | 100,00        |
|          |                          |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | 200.687.600,00           | 200.586.500,00           | 99,95         |
|          |                          |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 | 18.135.000,00            | 18.135.000,00            | 100,00        |
|          |                          |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                    | 149.549.000,00           | 146.913.780,00           | 98,24         |
|          |                          |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>4.200.000,00</b>      | <b>4.200.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
|          |                          |  | Pengadaan Mebel                                                         | 4.200.000,00             | 4.200.000,00             | 100,00        |
|          |                          |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>             | <b>282.964.916,00</b>    | <b>280.840.866,00</b>    | <b>99,25</b>  |
|          |                          |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                 | 33.798.000,00            | 33.798.000,00            | 100,00        |
|          |                          |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                   | 249.166.916,00           | 247.042.866,00           | 99,15         |



|   |                     |  |                                                                                                                              |                         |                         |               |
|---|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|   |                     |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>58.440.632,00</b>    | <b>58.440.632,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |                     |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas Atau<br>Kendaraan Dinas Jabatan | 52.600.632,00           | 52.600.632,00           | 100,00        |
|   |                     |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin<br>Lainnya                                                                                  | 5.840.000,00            | 5.840.000,00            | 100,00        |
|   |                     |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN<br/>PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                         |                         |                         |               |
|   |                     |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang<br/>Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                     | <b>161.820.900,00</b>   | <b>36.620.900,00</b>    | <b>22,63</b>  |
|   |                     |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan<br>Yang Terkait Dengan Kewenangan<br>Lain Yang Dilimpahkan                                   | 161.820.900,00          | 36.620.900,00           | 22,63         |
| 2 | Kampar Kiri<br>Hulu |  |                                                                                                                              |                         |                         |               |
|   |                     |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>                                                   |                         |                         |               |
|   |                     |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat<br/>Daerah</b>                                                                            | <b>1.855.800.654,00</b> | <b>1.799.746.321,00</b> | <b>96,98</b>  |
|   |                     |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                            | 1.855.800.654,00        | 1.799.746.321,00        | 96,98         |
|   |                     |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                                    | <b>524.579.300,00</b>   | <b>514.757.886,00</b>   | <b>98,13</b>  |
|   |                     |  | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan<br>Kantor                                                       | 4.230.000,00            | 4.230.000,00            | 100,00        |
|   |                     |  | Penyediaan Peralatan Dan<br>Perlengkapan Kantor                                                                              | 177.299.000,00          | 177.299.000,00          | 100,00        |
|   |                     |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                             | 149.886.300,00          | 149.886.300,00          | 100,00        |
|   |                     |  | Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                                                                   | 31.484.000,00           | 31.484.000,00           | 100,00        |
|   |                     |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi<br>Dan Konsultasi Skpd                                                                      | 161.680.000,00          | 151.858.586,00          | 93,93         |
|   |                     |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                  | <b>81.500.000,00</b>    | <b>81.500.000,00</b>    |               |
|   |                     |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan<br>Dinas Atau Kendaraan Dinas<br>Jabatan                                                      | 20.000.000,00           | 20.000.000,00           |               |
|   |                     |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</b>                                                              | <b>135.555.402,00</b>   | <b>134.034.640,00</b>   | <b>98,88</b>  |
|   |                     |  | Penyediaan Jasa Komunikasi,<br>Sumber Daya Air Dan Listrik                                                                   | 7.800.110,00            | 6.671.848,00            | 85,54         |
|   |                     |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum<br>Kantor                                                                                     | 127.755.292,00          | 127.362.792,00          | 99,69         |
|   |                     |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                             | <b>70.005.500,00</b>    | <b>69.560.802,00</b>    | <b>99,36</b>  |
|   |                     |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan,<br>Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak<br>Kendaraan Perorangan Dinas Atau                            | 59.166.800,00           | 58.722.102,00           | 99,25         |



|   |                   |                                                                    |                                                                                      |                  |                  |        |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|   |                   |                                                                    | Kendaraan Dinas Jabatan                                                              |                  |                  |        |
|   |                   |                                                                    | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                             | 10.838.700,00    | 10.838.700,00    | 100,00 |
|   |                   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |                                                                                      |                  |                  |        |
|   |                   |                                                                    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat                        | 151.467.400,00   | 51.467.400,00    | 33,98  |
|   |                   |                                                                    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | 151.467.400,00   | 51.467.400,00    | 33,98  |
| 3 | Kampar Kiri Hilir |                                                                    |                                                                                      |                  |                  |        |
|   |                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b> |                                                                                      |                  |                  |        |
|   |                   |                                                                    | <b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>                                        | 1.769.558.728,00 | 1.511.127.097,00 | 85,40  |
|   |                   |                                                                    | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                    | 1.769.558.728,00 | 1.511.127.097,00 | 85,40  |
|   |                   |                                                                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                            | 413.009.750,00   | 317.831.150,00   | 76,95  |
|   |                   |                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                     | 6.745.200,00     | 6.744.900,00     | 100,00 |
|   |                   |                                                                    | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                         | 33.554.600,00    | 32.997.700,00    | 98,34  |
|   |                   |                                                                    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                     | 147.609.150,00   | 116.870.150,00   | 79,18  |
|   |                   |                                                                    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                              | 22.221.400,00    | 19.969.500,00    | 89,87  |
|   |                   |                                                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                 | 122.248.000,00   | 80.105.900,00    | 65,53  |
|   |                   |                                                                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>              | 80.631.400,00    | 61.143.000,00    |        |
|   |                   |                                                                    | Pengadaan Mebel                                                                      | 51.643.000,00    | 37.143.000,00    |        |
|   |                   |                                                                    | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                | 28.988.400,00    | 24.000.000,00    |        |
|   |                   |                                                                    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 | 326.796.305,00   | 317.574.784,00   | 97,18  |
|   |                   |                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                              | 40.371.305,00    | 39.149.784,00    | 96,97  |
|   |                   |                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                | 286.425.000,00   | 278.425.000,00   | 97,21  |
|   |                   |                                                                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>         | 6.731.500,00     | 5.828.000,00     | 86,58  |
|   |                   |                                                                    | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                             | 6.731.500,00     | 5.828.000,00     | 86,58  |
|   |                   | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |                                                                                      |                  |                  |        |
|   |                   |                                                                    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang                                                 | 109.301.750,00   | 9.302.200,00     | 8,51   |



|   |                |  |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|---|----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|   |                |  | <b>Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                                                     |                         |                         |              |
|   |                |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 109.301.750,00          | 9.302.200,00            | 8,51         |
|   |                |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           |                         |                         |              |
|   |                |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                              | <b>596.500.300,00</b>   | <b>569.520.850,00</b>   | <b>95,48</b> |
|   |                |  | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan                                                                          | 488.000.200,00          | 486.020.850,00          | 99,59        |
|   |                |  | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan                                                                                | 108.500.100,00          | 83.500.000,00           | 76,96        |
| 4 | Gunung Sahilan |  |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|   |                |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                  |                         |                         |              |
|   |                |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.435.583.567,00</b> | <b>1.180.765.302,00</b> | <b>82,25</b> |
|   |                |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.435.583.567,00        | 1.180.765.302,00        | 82,25        |
|   |                |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>359.665.500,00</b>   | <b>305.445.700,00</b>   | <b>84,92</b> |
|   |                |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 5.342.600,00            | 3.967.300,00            | 74,26        |
|   |                |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 70.796.700,00           | 63.231.900,00           | 89,31        |
|   |                |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 183.386.600,00          | 163.994.400,00          | 89,43        |
|   |                |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 23.552.600,00           | 13.101.100,00           | 55,62        |
|   |                |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 76.587.000,00           | 61.151.000,00           | 79,85        |
|   |                |  | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                  | 12.000.000,00           | 12.000.000,00           | 99,97        |
|   |                |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>162.932.920,00</b>   | <b>156.070.950,00</b>   | <b>95,79</b> |
|   |                |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 21.598.920,00           | 19.837.950,00           | 91,85        |
|   |                |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 141.334.000,00          | 136.233.000,00          | 96,39        |
|   |                |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>70.922.000,00</b>    | <b>63.989.300,00</b>    | <b>90,22</b> |
|   |                |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 43.892.000,00           | 38.379.300,00           | 87,44        |
|   |                |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 10.030.000,00           | 8.610.000,00            | 85,84        |
|   |                |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                        | 17.000.000,00           | 17.000.000,00           | 100,00       |



|   |                    |                                                                    |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|   |                    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|   |                    |                                                                    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>106.631.200,00</b>   | <b>5.400.000,00</b>     |              |
|   |                    |                                                                    | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 106.631.200,00          | 5.400.000,00            |              |
| 5 | Kampar Kiri Tengah |                                                                    |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|   |                    | <b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA URUSAN DAERAH</b> |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|   |                    |                                                                    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2.143.894.480,00</b> | <b>2.071.888.522,00</b> | <b>96,64</b> |
|   |                    |                                                                    | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 2.143.894.480,00        | 2.071.888.522,00        | 96,64        |
|   |                    |                                                                    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>518.183.425,00</b>   | <b>488.149.500,00</b>   |              |
|   |                    |                                                                    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 8.650.800,00            | 8.650.000,00            |              |
|   |                    |                                                                    | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 112.753.325,00          | 110.839.500,00          | 98,30        |
|   |                    |                                                                    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 186.113.000,00          | 185.768.000,00          | 99,81        |
|   |                    |                                                                    | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 32.426.300,00           | 30.242.000,00           |              |
|   |                    |                                                                    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 178.240.000,00          | 152.650.000,00          | 85,64        |
|   |                    |                                                                    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>52.276.000,00</b>    | <b>42.550.000,00</b>    | <b>81,39</b> |
|   |                    |                                                                    | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 36.726.000,00           | 27.200.000,00           | 74,06        |
|   |                    |                                                                    | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                                  | 15.550.000,00           | 15.350.000,00           | 98,71        |
|   |                    |                                                                    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>116.785.400,00</b>   | <b>106.343.644,00</b>   | <b>91,06</b> |
|   |                    |                                                                    | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 24.140.400,00           | 18.658.644,00           | 77,29        |
|   |                    |                                                                    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 92.645.000,00           | 87.685.000,00           | 94,65        |
|   |                    |                                                                    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>48.465.788,00</b>    | <b>38.681.800,00</b>    | <b>79,81</b> |
|   |                    |                                                                    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.465.788,00           | 38.681.800,00           |              |
|   |                    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|   |                    |                                                                    | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>108.780.000,00</b>   | <b>8.780.000,00</b>     | <b>8,07</b>  |



|   |                  |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|---|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|   |                  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 108.780.000,00          | 8.780.000,00            | 0,00          |
|   |                  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           |                         |                         |               |
|   |                  |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                            | <b>16.678.650,00</b>    | <b>13.314.000,00</b>    | <b>79,83</b>  |
|   |                  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa                                                    | 16.678.650,00           | 13.314.000,00           | 79,83         |
| 6 | XIII Koto Kampar |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|   |                  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA</b>                                                         |                         |                         |               |
|   |                  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.684.554.238,00</b> | <b>1.458.602.556,00</b> | <b>86,59</b>  |
|   |                  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.684.554.238,00        | 1.458.602.556,00        | 86,59         |
|   |                  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>477.325.450,00</b>   | <b>446.088.170,00</b>   | <b>93,46</b>  |
|   |                  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 14.013.000,00           | 14.013.000,00           | 100,00        |
|   |                  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 193.967.700,00          | 187.265.400,00          | 96,54         |
|   |                  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 197.813.550,00          | 178.385.300,00          | 90,18         |
|   |                  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 6.218.200,00            | 6.218.200,00            | 100,00        |
|   |                  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 65.313.000,00           | 60.206.270,00           | 92,18         |
|   |                  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>53.500.000,00</b>    | <b>53.500.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |                  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 53.500.000,00           | 53.500.000,00           | 100,00        |
|   |                  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>289.221.200,00</b>   | <b>286.368.638,00</b>   | <b>99,01</b>  |
|   |                  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 15.391.200,00           | 12.538.638,00           | 81,47         |
|   |                  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 273.830.000,00          | 273.830.000,00          | 100,00        |
|   |                  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>64.272.600,00</b>    | <b>60.018.600,00</b>    | <b>93,38</b>  |
|   |                  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.072.000,00           | 42.818.000,00           | 90,96         |
|   |                  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 17.200.600,00           | 17.200.600,00           | 100,00        |
|   |                  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|   |                  |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang</b>                                                                         | <b>133.784.000,00</b>   | <b>9.379.000,00</b>     | <b>7,01</b>   |



|   |                  |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|---|------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|   |                  |  | <b>Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                                                     |                         |                         |               |
|   |                  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 133.784.000,00          | 9.379.000,00            | 7,01          |
|   |                  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           |                         |                         |               |
|   |                  |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                              | <b>516.483.746,00</b>   | <b>516.483.746,00</b>   | <b>100,00</b> |
|   |                  |  | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan                                                                          | 321.283.746,00          | 321.283.746,00          | 100,00        |
|   |                  |  | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan                                                                                | 195.200.000,00          | 195.200.000,00          | 100,00        |
| 7 | Koto Kampar Hulu |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|   |                  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                  |                         |                         |               |
|   |                  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.410.555.763,00</b> | <b>1.293.945.158,00</b> | <b>91,73</b>  |
|   |                  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.410.555.763,00        | 1.293.945.158,00        | 91,73         |
|   |                  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>376.313.700,00</b>   | <b>372.040.100,00</b>   | <b>98,86</b>  |
|   |                  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 3.927.000,00            | 3.927.000,00            | 100,00        |
|   |                  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 143.405.200,00          | 142.908.000,00          | 99,65         |
|   |                  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 146.039.500,00          | 146.037.100,00          | 100,00        |
|   |                  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 18.566.000,00           | 18.566.000,00           | 100,00        |
|   |                  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 64.376.000,00           | 60.602.000,00           | 94,14         |
|   |                  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>224.647.000,00</b>   | <b>223.772.000,00</b>   | <b>99,61</b>  |
|   |                  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 24.042.000,00           | 24.042.000,00           | 100,00        |
|   |                  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 200.605.000,00          | 199.730.000,00          | 99,56         |
|   |                  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>53.092.200,00</b>    | <b>53.092.200,00</b>    | <b>100,00</b> |
|   |                  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.984.200,00           | 42.984.200,00           | 100,00        |
|   |                  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 10.108.000,00           | 10.108.000,00           | 100,00        |
|   |                  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|   |                  |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>106.328.000,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |



|   |      |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|---|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|   |      |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 106.328.000,00          | 0,00                    | 0,00          |
|   |      |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           | <b>1.476.400,00</b>     | <b>1.476.400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   |      |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                            | <b>1.476.400,00</b>     | <b>1.476.400,00</b>     | <b>100,00</b> |
|   |      |  | fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa                                                    | 1.476.400,00            | 1.476.400,00            | 100,00        |
| 8 | Kuok |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|   |      |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                         |               |
|   |      |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.665.853.031,00</b> | <b>1.508.906.633,00</b> | <b>90,58</b>  |
|   |      |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.665.853.031,00        | 1.508.906.633,00        | 90,58         |
|   |      |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>670.063.600,00</b>   | <b>655.157.350,00</b>   | <b>97,78</b>  |
|   |      |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 106.374.500,00          | 106.350.700,00          | 99,98         |
|   |      |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 421.714.000,00          | 421.714.000,00          | 100,00        |
|   |      |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 26.561.100,00           | 26.561.100,00           | 100,00        |
|   |      |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 115.414.000,00          | 100.531.550,00          | 87,11         |
|   |      |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>182.578.250,00</b>   | <b>178.355.350,00</b>   | <b>97,69</b>  |
|   |      |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 23.613.250,00           | 23.090.350,00           | 97,79         |
|   |      |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 158.965.000,00          | 155.265.000,00          | 97,67         |
|   |      |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>57.772.300,00</b>    | <b>57.135.200,00</b>    | <b>98,90</b>  |
|   |      |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.663.300,00           | 49.029.700,00           | 98,72         |
|   |      |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 8.109.000,00            | 8.105.500,00            | 99,96         |
|   |      |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|   |      |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>103.880.000,00</b>   | <b>3.880.000,00</b>     | <b>3,74</b>   |
|   |      |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 103.880.000,00          | 3.880.000,00            | 3,74          |
|   |      |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           |                         |                         |               |
|   |      |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan</b>                                              | <b>2.652.000,00</b>     | <b>2.652.000,00</b>     | <b>100,00</b> |





|    |        |  |                                                                                                                     |                         |                       |               |
|----|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
|    |        |  | <b>Pemerintahan Desa</b>                                                                                            |                         |                       |               |
|    |        |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa                                                    | 2.652.000,00            | 2.652.000,00          | 100,00        |
| 9  | Salo   |  |                                                                                                                     |                         |                       |               |
|    |        |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                       |               |
|    |        |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.159.460.116,00</b> | <b>902.941.611,00</b> | <b>77,88</b>  |
|    |        |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.159.460.116,00        | 902.941.611,00        | 77,88         |
|    |        |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>376.638.100,00</b>   | <b>342.545.200,00</b> | <b>90,95</b>  |
|    |        |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 2.680.000,00            | 2.680.000,00          | 100,00        |
|    |        |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 131.266.100,00          | 131.245.500,00        | 99,98         |
|    |        |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 132.799.000,00          | 113.096.000,00        | 85,16         |
|    |        |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 13.729.000,00           | 13.729.000,00         | 100,00        |
|    |        |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 96.164.000,00           | 81.794.700,00         | 85,06         |
|    |        |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>11.920.000,00</b>    | <b>11.920.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|    |        |  | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 11.920.000,00           | 11.920.000,00         | 100,00        |
|    |        |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>179.651.324,00</b>   | <b>174.267.050,00</b> | <b>97,00</b>  |
|    |        |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 10.556.600,00           | 10.126.030,00         | 95,92         |
|    |        |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 169.094.724,00          | 164.141.020,00        |               |
|    |        |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>39.089.363,00</b>    | <b>34.513.363,00</b>  |               |
|    |        |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 31.723.863,00           | 27.147.863,00         |               |
|    |        |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 7.365.500,00            | 7.365.500,00          |               |
|    |        |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                       |               |
|    |        |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>100.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |               |
|    |        |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 100.000.000,00          | 0,00                  |               |
| 10 | Tapung |  |                                                                                                                     |                         |                       |               |
|    |        |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                       |               |



|  |  |                                                                                                                     |                         |                         |              |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
|  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.825.004.307,00</b> | <b>1.811.181.124,00</b> | <b>99,24</b> |
|  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.825.004.307,00        | 1.811.181.124,00        | 99,24        |
|  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                                                    | <b>28.224.000,00</b>    | <b>26.939.500,00</b>    | <b>95,45</b> |
|  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                          | 28.224.000,00           | 26.939.500,00           | 95,45        |
|  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>386.109.300,00</b>   | <b>350.666.306,00</b>   | <b>90,82</b> |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 5.510.100,00            | 5.510.100,00            | 100,00       |
|  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 94.393.100,00           | 91.355.601,00           | 96,78        |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 158.307.900,00          | 156.441.900,00          | 98,82        |
|  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 24.071.200,00           | 22.639.000,00           | 94,05        |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 3.888.000,00            | 3.888.000,00            | 100,00       |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 99.939.000,00           | 70.831.705,00           | 70,87        |
|  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>80.598.400,00</b>    | <b>80.448.700,00</b>    | <b>99,81</b> |
|  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 10.240.000,00           | 10.217.700,00           | 99,78        |
|  |  | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                               | 70.358.400,00           | 70.231.000,00           | 99,82        |
|  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>249.424.000,00</b>   | <b>242.808.206,00</b>   | <b>97,35</b> |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 24.024.000,00           | 17.408.206,00           | 72,46        |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 225.400.000,00          | 225.400.000,00          | 100,00       |
|  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>197.145.000,00</b>   | <b>193.119.425,00</b>   | <b>97,96</b> |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.260.000,00           | 46.399.675,00           | 92,32        |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 16.885.000,00           | 16.885.000,00           | 100,00       |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya                                  | 130.000.000,00          | 129.834.750,00          | 99,87        |
|  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |              |
|  |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>165.182.800,00</b>   | <b>65.182.800,00</b>    | <b>100</b>   |
|  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 165.182.800,00          | 65.182.800,00           | 100          |



|    |              |  |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|----|--------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 11 | Tapung Hulu  |  |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|    |              |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                         |               |
|    |              |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.540.967.332,00</b> | <b>1.275.508.062,00</b> | <b>82,77</b>  |
|    |              |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.540.967.332,00        | 1.275.508.062,00        | 82,77         |
|    |              |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>648.081.100,00</b>   | <b>641.265.200,00</b>   | <b>98,95</b>  |
|    |              |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 20.371.200,00           | 20.371.200,00           | 100,00        |
|    |              |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 165.012.900,00          | 164.972.200,00          | 99,98         |
|    |              |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 272.369.400,00          | 272.369.400,00          | 100,00        |
|    |              |  |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                                                             | 59.799.600,00           | 59.799.600,00           | 100,00        |
|    |              |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 130.528.000,00          | 123.752.800,00          | 94,81         |
|    |              |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>104.233.780,00</b>   | <b>101.396.500,00</b>   | <b>97,28</b>  |
|    |              |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 18.633.780,00           | 18.436.500,00           | 98,94         |
|    |              |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 85.600.000,00           | 82.960.000,00           | 96,92         |
|    |              |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>68.425.800,00</b>    | <b>68.425.800,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    |              |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 55.635.800,00           | 55.635.800,00           | 100,00        |
|    |              |  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 12.790.000,00           | 12.790.000,00           | 100           |
|    |              |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|    |              |  |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>108.224.000,00</b>   | <b>8.224.000,00</b>     | <b>7,60</b>   |
|    |              |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 108.224.000,00          | 8.224.000,00            | 7,60          |
| 12 | Tapung Hilir |  |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|    |              |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                         |               |
|    |              |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2.043.495.041,00</b> | <b>1.772.715.821,00</b> | <b>86,75</b>  |
|    |              |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 2.043.495.041,00        | 1.772.715.821,00        | 86,75         |
|    |              |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>739.707.500,00</b>   | <b>708.531.400,00</b>   | <b>95,79</b>  |
|    |              |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 4.664.000,00            | 4.664.000,00            | 100,00        |



|    |                 |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|----|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|    |                 |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 182.438.700,00          | 180.164.600,00          | 98,75         |
|    |                 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 375.288.000,00          | 375.288.000,00          | 100,00        |
|    |                 |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                                                             | 25.947.800,00           | 25.947.800,00           | 100,00        |
|    |                 |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 2.268.000,00            | 2.268.000,00            | 100,00        |
|    |                 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 149.101.000,00          | 120.199.000,00          | 80,62         |
|    |                 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>202.399.900,00</b>   | <b>196.354.900,00</b>   | <b>97,01</b>  |
|    |                 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 16.344.900,00           | 16.344.900,00           | 100,00        |
|    |                 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 186.055.000,00          | 180.010.000,00          | 96,75         |
|    |                 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>55.830.400,00</b>    | <b>51.671.200,00</b>    | <b>92,55</b>  |
|    |                 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.257.400,00           | 42.098.200,00           | 91,01         |
|    |                 |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 9.573.000,00            | 9.573.000,00            | 100           |
|    |                 |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|    |                 |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>104.080.000,00</b>   | <b>4.080.000,00</b>     | <b>3,92</b>   |
|    |                 |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 104.080.000,00          | 4.080.000,00            | 3,92          |
|    |                 |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           |                         |                         |               |
|    |                 |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                            | <b>3.900.000,00</b>     | <b>3.900.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
|    |                 |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa                                                    | 3.900.000,00            | 3.900.000,00            | 100           |
| 13 | Bangkinang Kota |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|    |                 |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                         |               |
|    |                 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2.704.390.490,00</b> | <b>2.261.072.100,00</b> | <b>83,61</b>  |
|    |                 |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 2.703.226.790,00        | 2.259.908.400,00        | 83,60         |
|    |                 |  | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd                                                         | 1.163.700,00            | 1.163.700,00            | 100,00        |
|    |                 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>586.392.500,00</b>   | <b>566.707.496,00</b>   | <b>96,64</b>  |



|           |                   |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|-----------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|           |                   |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 14.900.800,00           | 14.900.800,00           | 100,00        |
|           |                   |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 121.018.200,00          | 121.018.000,00          | 100,00        |
|           |                   |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 230.439.100,00          | 230.439.100,00          | 100,00        |
|           |                   |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 36.372.400,00           | 36.372.400,00           | 100,00        |
|           |                   |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 48.696.000,00           | 48.402.000,00           | 99,40         |
|           |                   |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 134.966.000,00          | 115.575.196,00          | 85,63         |
|           |                   |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>49.168.600,00</b>    | <b>49.168.600,00</b>    | <b>100,00</b> |
|           |                   |  | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 13.300.000,00           | 13.300.000,00           | 100,00        |
|           |                   |  | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                               | 35.868.600,00           | 35.868.600,00           | 100,00        |
|           |                   |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>291.625.284,00</b>   | <b>275.683.989,00</b>   | <b>94,53</b>  |
|           |                   |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 75.042.000,00           | 64.478.205,00           | 85,92         |
|           |                   |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 216.583.284,00          | 211.205.784,00          | 97,52         |
|           |                   |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>125.689.800,00</b>   | <b>123.451.060,00</b>   | <b>98,22</b>  |
|           |                   |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42.787.800,00           | 40.560.900,00           | 94,80         |
|           |                   |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 45.902.000,00           | 45.890.160,00           | 99,97         |
|           |                   |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                        | 37.000.000,00           | 37.000.000,00           | 100,00        |
|           |                   |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|           |                   |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>276.553.300,00</b>   | <b>176.553.300,00</b>   | <b>63,84</b>  |
|           |                   |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 276.553.300,00          | 176.553.300,00          | 63,84         |
|           |                   |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           |                         |                         |               |
|           |                   |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                              | <b>1.612.696.600,00</b> | <b>1.531.696.600,00</b> | <b>94,98</b>  |
|           |                   |  | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan                                                                          | 923.047.000,00          | 895.047.000,00          | 96,97         |
|           |                   |  | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan                                                                                | 689.649.600,00          | 636.649.600,00          | 92,31         |
| <b>14</b> | <b>Bangkinang</b> |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |



|    |        |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|    |        | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                  |                         |                         |               |
|    |        | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2.571.325.125,00</b> | <b>2.242.814.778,00</b> | <b>87,22</b>  |
|    |        | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 2.571.325.125,00        | 2.242.814.778,00        | 87,22         |
|    |        | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>484.302.600,00</b>   | <b>446.772.300,00</b>   | <b>92,25</b>  |
|    |        | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 75.923.400,00           | 75.913.000,00           | 99,99         |
|    |        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 254.172.600,00          | 233.363.600,00          | 91,81         |
|    |        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 36.226.600,00           | 34.171.700,00           | 94,33         |
|    |        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 117.980.000,00          | 103.324.000,00          | 87,58         |
|    |        | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>115.148.000,00</b>   | <b>114.308.000,00</b>   | <b>99,27</b>  |
|    |        | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                               | 115.148.000,00          | 114.308.000,00          | 99,27         |
|    |        | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>288.544.688,00</b>   | <b>278.439.870,00</b>   | <b>96,50</b>  |
|    |        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 18.664.688,00           | 10.634.870,00           | 56,98         |
|    |        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 269.880.000,00          | 267.805.000,00          | 99,23         |
|    |        | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>33.198.600,00</b>    | <b>33.198.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    |        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.198.600,00           | 33.198.000,00           | 100,00        |
|    |        | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|    |        | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>154.978.000,00</b>   | <b>4.978.000,00</b>     | <b>3,21</b>   |
|    |        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 154.978.000,00          | 4.978.000,00            | 3,21          |
|    |        | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           |                         |                         |               |
|    |        | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                              | <b>1.123.510.396,00</b> | <b>1.123.510.396,00</b> | <b>100,00</b> |
|    |        | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan                                                                          | 891.610.396,00          | 891.610.396,00          | 100,00        |
|    |        | Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan                                                                                | 231.900.000,00          | 231.900.000,00          | 100,00        |
| 15 | Kampar |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|    |        | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH</b>                                                  |                         |                         |               |



|  |  |  |                                                                                                                     |                         |                         |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|  |  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>3.171.256.505,00</b> | <b>2.921.112.363,00</b> |  |
|  |  |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 3.171.256.505,00        | 2.921.112.363,00        |  |
|  |  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>760.385.700,00</b>   | <b>756.506.311,00</b>   |  |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 156.976.300,00          | 156.840.100,00          |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 309.824.800,00          | 309.154.300,00          |  |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 64.235.600,00           | 64.235.600,00           |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 9.000.000,00            | 9.000.000,00            |  |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 220.349.000,00          | 217.276.311,00          |  |
|  |  |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>19.200.000,00</b>    | <b>18.800.000,00</b>    |  |
|  |  |  | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 19.200.000,00           | 18.800.000,00           |  |
|  |  |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>233.112.200,00</b>   | <b>233.112.200,00</b>   |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 20.882.200,00           | 20.882.200,00           |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 212.230.000,00          | 212.230.000,00          |  |
|  |  |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>92.690.600,00</b>    | <b>92.690.600,00</b>    |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 64.270.600,00           | 64.270.600,00           |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 28.420.000,00           | 28.420.000,00           |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |  |
|  |  |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>100.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>             |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 100.000.000,00          | 0,00                    |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                                           |                         |                         |  |
|  |  |  | <b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>                                                                              | <b>613.629.611,00</b>   | <b>588.629.611,00</b>   |  |
|  |  |  | Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan                                                                          | 613.629.611,00          | 588.629.611,00          |  |
|  |  |  | <b>Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan</b>                                                                         | <b>194.750.000,00</b>   | <b>169.750.000,00</b>   |  |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           |                         |                         |  |
|  |  |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                            | <b>19.754.000,00</b>    | <b>19.754.000,00</b>    |  |



|    |             |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|----|-------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|    |             |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa                                                    | 19.754.000,00           | 19.754.000,00           |               |
| 16 | Kampa       |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|    |             |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                         |               |
|    |             |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.261.874.500,00</b> | <b>1.111.875.830,00</b> | <b>88,11</b>  |
|    |             |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.261.874.500,00        | 1.111.875.830,00        | 88,11         |
|    |             |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>582.935.000,00</b>   | <b>582.935.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|    |             |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 2.330.000,00            | 2.330.000,00            | 100,00        |
|    |             |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 146.985.200,00          | 146.985.200,00          | 100,00        |
|    |             |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 318.136.000,00          | 318.136.000,00          | 100           |
|    |             |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                                                             | 17.997.800,00           | 17.997.800,00           | 100,00        |
|    |             |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 97.486.000,00           | 97.486.000,00           | 100,00        |
|    |             |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>187.566.396,00</b>   | <b>187.281.096,00</b>   | <b>100,00</b> |
|    |             |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 24.521.100,00           | 24.235.800,00           | 98,84         |
|    |             |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 163.045.296,00          | 163.045.296,00          | 100,00        |
|    |             |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>71.169.100,00</b>    | <b>71.169.100,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    |             |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.545.600,00           | 57.545.600,00           | 100,00        |
|    |             |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 13.623.500,00           | 13.623.500,00           | 0,00          |
|    |             |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|    |             |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>110.950.000,00</b>   | <b>10.950.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    |             |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 110.950.000,00          | 10.950.000,00           | 100,00        |
| 17 | Rumbio Jaya |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|    |             |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                         |               |
|    |             |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>1.338.636.067,00</b> | <b>1.244.283.773,00</b> | <b>92,95</b>  |
|    |             |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.338.636.067,00        | 1.244.283.773,00        | 92,95         |
|    |             |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>546.866.500,00</b>   | <b>544.485.500,00</b>   | <b>99,56</b>  |





|    |              |  |                                                                                                                     |                       |                       |        |
|----|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
|    |              |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 159.372.300,00        | 157.536.300,00        | 98,85  |
|    |              |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 185.176.200,00        | 184.771.200,00        | 99,78  |
|    |              |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 77.872.000,00         | 77.872.000,00         | 100,00 |
|    |              |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 124.446.000,00        | 124.306.000,00        | 99,89  |
|    |              |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>143.033.500,00</b> | <b>140.760.191,00</b> | 98,41  |
|    |              |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 31.648.500,00         | 30.495.191,00         | 96,36  |
|    |              |  | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                   | 15.660.000,00         | 15.660.000,00         | 100,00 |
|    |              |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 95.725.000,00         | 94.605.000,00         | 98,83  |
|    |              |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>39.618.000,00</b>  | <b>39.618.000,00</b>  | 100,00 |
|    |              |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 34.508.000,00         | 34.508.000,00         | 100,00 |
|    |              |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 5.110.000,00          | 5.110.000,00          | 100,00 |
|    |              |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                       |                       |        |
|    |              |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>116.600.000,00</b> | <b>16.600.000,00</b>  | 14,24  |
|    |              |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 116.600.000,00        | 16.600.000,00         | 14,24  |
|    |              |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                                                           |                       |                       |        |
|    |              |  | <b>Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>                            | <b>3.770.500,00</b>   | <b>3.745.600,00</b>   | 99,34  |
|    |              |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pdayagunaan Aset Desa                                                      | 3.770.500,00          | 3.745.600,00          | 99,34  |
| 18 | Kampar Utara |  |                                                                                                                     |                       |                       |        |
|    |              |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                       |                       |        |
|    |              |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>972.960.742,00</b> | <b>743.405.351,00</b> | 76,41  |
|    |              |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 972.960.742,00        | 743.405.351,00        | 76,41  |
|    |              |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>538.894.050,00</b> | <b>526.486.298,00</b> | 97,70  |
|    |              |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 98.955.400,00         | 98.955.400,00         | 100,00 |
|    |              |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 238.451.050,00        | 234.705.050,00        | 98,43  |
|    |              |  | Penyediaan Barang Cetak dan                                                                                         | 29.527.600,00         | 29.527.600,00         | 100,00 |



|    |         |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|----|---------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|    |         |  | Penggandaan                                                                                                         |                         |                         |               |
|    |         |  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan                                                            | 6.804.000,00            | 6.804.000,00            | 100,00        |
|    |         |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 165.156.000,00          | 156.494.248,00          | 94,76         |
|    |         |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>197.385.500,00</b>   | <b>191.849.402,00</b>   | <b>97,20</b>  |
|    |         |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 19.781.500,00           | 18.761.402,00           | 94,84         |
|    |         |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 177.604.000,00          | 173.088.000,00          | 97,46         |
|    |         |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>106.185.200,00</b>   | <b>106.185.200,00</b>   | <b>100,00</b> |
|    |         |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.325.200,00           | 49.325.200,00           | 100,00        |
|    |         |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 26.080.000,00           | 26.080.000,00           | 100,00        |
|    |         |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                        | 30.780.000,00           | 30.780.000,00           | 100,00        |
|    |         |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|    |         |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>117.228.150,00</b>   | <b>17.228.150,00</b>    | 100,00        |
|    |         |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 117.228.150,00          | 17.228.150,00           | 100           |
| 19 | Tambang |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|    |         |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                         |               |
|    |         |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2.644.834.213,00</b> | <b>2.526.597.636,00</b> | <b>95,53</b>  |
|    |         |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 2.644.834.213,00        | 2.526.597.636,00        | 95,53         |
|    |         |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>561.186.700,00</b>   | <b>561.156.400,00</b>   | <b>99,99</b>  |
|    |         |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 9.450.300,00            | 9.450.000,00            | 100,00        |
|    |         |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 113.487.400,00          | 113.487.400,00          | 100,00        |
|    |         |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 306.399.000,00          | 306.399.000,00          | 100,00        |
|    |         |  | Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan                                                                             | 26.728.000,00           | 26.728.000,00           | 100,00        |
|    |         |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD                                                                | 105.122.000,00          | 105.092.000,00          | 99,97         |
|    |         |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | <b>49.142.500,00</b>    | <b>49.142.500,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    |         |  | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 49.142.500,00           | 49.142.500,00           | 100,00        |



|    |           |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|----|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
|    |           |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>189.685.000,00</b>   | <b>187.049.600,00</b>   | <b>98,61</b>  |
|    |           |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 33.945.000,00           | 33.919.600,00           | 99,93         |
|    |           |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 155.740.000,00          | 153.130.000,00          | 98,32         |
|    |           |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>45.017.000,00</b>    | <b>45.015.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|    |           |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 27.215.000,00           | 27.215.000,00           | 100,00        |
|    |           |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 17.802.000,00           | 17.800.000,00           | 99,99         |
|    |           |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                         |                         |               |
|    |           |  | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat</b>                                                | <b>109.000.000,00</b>   | <b>9.000.000,00</b>     | <b>8,26</b>   |
|    |           |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 109.000.000,00          | 9.000.000,00            | 8,26          |
| 20 | Siak Hulu |  |                                                                                                                     |                         |                         |               |
|    |           |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                         |                         |               |
|    |           |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | <b>2.769.764.010,00</b> | <b>2.719.884.410,00</b> | <b>98,20</b>  |
|    |           |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 2.769.764.010,00        | 2.719.884.410,00        | 98,20         |
|    |           |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | <b>655.910.400,00</b>   | <b>379.905.000,00</b>   | <b>57,92</b>  |
|    |           |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 11.019.400,00           | 10.670.000,00           | 96,83         |
|    |           |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 79.572.200,00           | 79.572.200,00           | 100,00        |
|    |           |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 305.533.000,00          | 167.116.000,00          | 54,70         |
|    |           |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 36.830.800,00           | 36.830.800,00           | 100,00        |
|    |           |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 222.955.000,00          | 85.716.000,00           | 38,45         |
|    |           |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>142.896.660,00</b>   | <b>139.605.352,00</b>   | <b>97,70</b>  |
|    |           |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 26.256.660,00           | 22.965.352,00           | 87,46         |
|    |           |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 116.640.000,00          | 116.640.000,00          | 100,00        |
|    |           |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>73.938.800,00</b>    | <b>56.360.000,00</b>    | <b>76,23</b>  |
|    |           |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau                         | 45.758.800,00           | 39.670.000,00           | 86,69         |



|    |                 |  |                                                                                                                     |                  |                  |        |
|----|-----------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|
|    |                 |  | Kendaraan Dinas Jabatan                                                                                             |                  |                  |        |
|    |                 |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 28.180.000,00    | 16.690.000,00    | 59,23  |
|    |                 |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                                                    |                  |                  |        |
|    |                 |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat                                                       | 109.600.000,00   | 9.600.000,00     | 8,76   |
|    |                 |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan                                | 109.600.000,00   | 9.600.000,00     | 8,76   |
| 21 | Perhentian Raja |  |                                                                                                                     | 2.500.935.575,00 | 2.454.925.681,00 | 98,16  |
|    |                 |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                                                  |                  |                  |        |
|    |                 |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                                       | 1.766.097.907,00 | 1.754.051.802,00 | 99,32  |
|    |                 |  | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn                                                                                   | 1.766.097.907,00 | 1.754.051.802,00 | 99,32  |
|    |                 |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                                           | 473.002.132,00   | 449.192.458,00   | 94,97  |
|    |                 |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 5.774.000,00     | 5.774.000,00     | 100,00 |
|    |                 |  | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 39.887.832,00    | 39.887.788,00    | 100,00 |
|    |                 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | 318.285.000,00   | 318.285.000,00   | 100,00 |
|    |                 |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 14.746.300,00    | 14.618.300,00    | 99,13  |
|    |                 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd                                                                | 94.309.000,00    | 70.627.370,00    | 74,89  |
|    |                 |  | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                             | 48.000.000,00    | 48.000.000,00    | 100    |
|    |                 |  | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 23.000.000,00    | 23.000.000,00    | 100    |
|    |                 |  | Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                               | 25.000.000,00    | 25.000.000,00    | 100,00 |
|    |                 |  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | 155.222.136,00   | 145.068.391,00   | 93,46  |
|    |                 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik                                                             | 19.926.000,00    | 13.282.255,00    | 66,66  |
|    |                 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 135.296.136,00   | 131.786.136,00   | 97,41  |
|    |                 |  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | 58.613.400,00    | 58.613.030,00    | 100,00 |
|    |                 |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 41.645.400,00    | 41.645.030,00    | 100,00 |
|    |                 |  | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya                                                                            | 2.776.000,00     | 2.776.000,00     | 100,00 |
|    |                 |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung                                                                                    | 14.192.000,00    | 14.192.000,00    | 100,00 |

|  |  |  |                                                                                      |                       |                     |             |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|  |  |  | Kantor Dan Bangunan Lainnya                                                          |                       |                     |             |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>                     | <b>104.385.000,00</b> | <b>4.385.000,00</b> | <b>4,20</b> |
|  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat                        | 104.385.000,00        | 4.385.000,00        | 4,20        |
|  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan | 104.385.000,00        | 4.385.000,00        | 4,20        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>                            | <b>4.560.000,00</b>   | <b>4.560.000,00</b> | <b>100</b>  |
|  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa    | 4.560.000,00          | 4.560.000,00        | 100         |
|  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa                     | 4.560.000,00          | 4.560.000,00        | 100         |

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

#### a. Latar Belakang

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Arah penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu upaya Pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal atau disingkat SPM yang

bertujuan memberikan hak pelayanan wajib bagi masyarakat. Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pasal 11 ayat 3 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar; dan pasal 18 bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, meliputi 6 urusan wajib yaitu 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penerapan SPM berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Masing-masing pemerintah daerah tentunya memiliki kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, karakteristik daerah maupun potensi lainnya yang berbeda-beda, sehingga tiap daerah memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan

penerapan SPM. Bahwa hakikat penerapan SPM adalah memberikan jaminan kepada warga negara untuk terpenuhi hak dasarnya supaya dapat menjalani kehidupan yang bermartabat dan sejahtera menuju masyarakat yang mandiri, maka pemenuhan SPM dan capaiannya menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak, tidak hanya pemerintah daerah.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat, pihak swasta, lembaga atau masyarakat dalam pelaksanaan penerapan SPM demi terwujudnya hakikat dari penerapan SPM.

#### **b. Dasar Hukum**

Adapun Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kampar Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan; Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 41

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);



12. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

Penyelenggaraan Pemerintahan daerah khususnya pada urusan wajib pelayanan dasar memiliki standar pelayanan minimal per bidang urusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bidang urusan yang memiliki SPM yaitu :

- 1) Urusan pendidikan
- 2) Urusan kesehatan
- 3) Urusan Pekerjaan umum
- 4) Urusan perumahan rakyat
- 5) Urusan sosial
- 6) Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri 100 tahun 2018, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Daerah wajib menyampaikan laporan penerapan SPM kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir/Tahun 2021;
- 2) Pengisian format penyusunan laporan SPM daerah Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2018, sedangkan laporan SPM daerah tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM dilakukan berdasarkan 4 tahapan. Tahapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari :

**1) Pengumpulan data;**

Pengumpulan data mencakup jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya. Kemudian data yang juga perlu dikumpulkan pada tahapan pertama ini adalah terkait dengan jumlah barang dan atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan dan pendataan harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian target 100% dari target dan indikator penerima layanan setiap tahunnya. Hasil pendataan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

**2) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;**

Perangkat Daerah menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan atau jasa dan sarana dan atau prasarana berdasarkan jumlah warga negara penerima dan mutu pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis SPM. Data

ketersediaan diperoleh dari pihak BUMN/BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat dan atau pemerintah daerah. Hasil penghitungan digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.

### **3) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar**

Pemerintah daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan penghitungan kebutuhan yang dimuat dalam dokumen RPJMD dan RKPD.

Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan kebutuhan ke dalam rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan rencana kerja (renja) perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan pencapaian rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat dalam dokumen renja perangkat daerah dilakukan pada saat perumusan meliputi: hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar; tujuan dan sasaran perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar; dan renja dan pendanaan perangkat daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan.

### **4) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar**

Perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar, perangkat daerah menetapkan target pencapaian program dan kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan dan atau melakukan kerjasama daerah. Dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara, pemerintah daerah dapat: membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu; Penyediaan barang dan atau jasa yang dibutuhkan diterapkan sesuai dengan standar teknis SPM. Kemudian selanjutnya, kerjasama daerah dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1678); dan Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengalokasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat indikatif pada perangkat daerah yang melaksanakan SPM Tahun 2024. Untuk penganggaran SPM tersebut, dialokasi anggaran sebagaimana yang disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 1. 29**  
**Rekap Program dan Pendanaan Standart Pelayanan Minimum dalam RKPD**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No. | SPM/Urusan dan Program                                                      |  |   |                           | Pagu Anggaran (Rp) | Perangkat Daerah         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1.  | SPM Pendidikan                                                              |  |   |                           |                    | Disdikpora               |
|     | Program Pengelolaan Pendidikan                                              |  |   |                           | 99.716.620.867     |                          |
|     |                                                                             |  | 1 | Pendidikan anak usia dini | 7.734.196.000      |                          |
|     |                                                                             |  | 2 | Pendidikan dasar          | 58.702.463.002     |                          |
|     |                                                                             |  | 3 | Pendidikan menengah       | 31.360.361.865     |                          |
|     |                                                                             |  | 4 | Pendidikan kesetaraan     | 1.919.600.000      |                          |
| 2.  | SPM Kesehatan:                                                              |  |   |                           |                    | Dinas Kesehatan dan RSUD |
|     | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |  |   |                           | 102.863.788.684,00 |                          |



|    |                                                               |                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|    |                                                               |                                                                  | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat DaerahKabupaten/Kota                  |                                                                                                                                                                                               |                   |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 1                                                                                                    | Pelayanan kesehatan ibu hamil                                                                                                                                                                 | 76.355.060.984,00 |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 2                                                                                                    | Pelayanan kesehatan ibu bersalin                                                                                                                                                              | 430.527.650,00    |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 3                                                                                                    | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir                                                                                                                                                           |                   |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 4                                                                                                    | Pelayanan kesehatan balita                                                                                                                                                                    | 202.374.300,00    |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 5                                                                                                    | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar                                                                                                                                                | 236.536.300,00    |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 6                                                                                                    | Pelayanan kesehatan pada usia produktif                                                                                                                                                       | 24.316.300,00     |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 7                                                                                                    | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                                                                                                                                                          | 208.837.200,00    |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 8                                                                                                    | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi                                                                                                                                                      | 19.999.000,00     |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 9                                                                                                    | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus                                                                                                                                                | 0                 |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 10                                                                                                   | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat                                                                                                                                          | 0                 |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 11                                                                                                   | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif | 0                 |                                                                   |
| 3. | SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:                        |                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                   | Dinas PUPR                                                        |
|    | 1                                                             | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | -                 |                                                                   |
|    | 2                                                             | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | 1.400.000.000     |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 1                                                                                                    | Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;                                                                                                                                              | 6.497.032.535,00  |                                                                   |
|    |                                                               |                                                                  | 2                                                                                                    | Penyediaan Pelayanan pengolahan air limbah domestik                                                                                                                                           | 6.517.740.979,00  |                                                                   |
| 4. | SPM Perumahan Rakyat:                                         |                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                   | Dinas Peru Permukimanmahan Dan Kawasan                            |
|    |                                                               | Program Pengembangan Perumahan                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | 915.313.900,00    |                                                                   |
|    |                                                               | 1                                                                | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana                                |                                                                                                                                                                                               |                   | -                                                                 |
|    |                                                               | 2                                                                | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah |                                                                                                                                                                                               |                   | -                                                                 |
| 5. | SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: |                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               |                   | Satuan Polisi Pamong Praja dan BadanPenanggulangan Bencana Daerah |
|    | 1                                                             | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum             |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | 3.588.448.900,00  |                                                                   |



|    |                    |                                                                                        |                           |                     |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|    | 2                  | <b>Program Penanggulangan Bencana</b>                                                  | <b>1.162.787.870,00</b>   |                     |
|    | 1                  | Pelayanan informasi rawan bencana                                                      | -                         |                     |
|    | 2                  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                                | -                         |                     |
|    | 3                  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                     | 303.978.870,00            |                     |
| 6. | <b>SPM Sosial:</b> |                                                                                        | 504.158.500,00            | <b>Dinas Sosial</b> |
|    | 1                  | <b>Program Rehabilitasi Sosial</b>                                                     | -                         |                     |
|    | 1                  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti               |                           |                     |
|    | 2                  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                                 | <b>1.013.747.221,00</b>   |                     |
|    | 3                  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti                          |                           |                     |
|    | 4                  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti |                           |                     |
|    | 2                  | <b>Program Penanganan Bencana</b>                                                      | 1.007.791.221,00          |                     |
|    | 1                  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                      | 111.639.700,00            |                     |
|    | <b>Jumlah</b>      |                                                                                        | <b>457.160.504.450,00</b> |                     |

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kampar Tahun 2024**

| No | Indikator Kinerja Makro             | Capaian Kinerja Tahun 2023 | Capaian Kinerja Tahun 2024 | Perubahan (%) |
|----|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1  | 2                                   | 3                          | 4                          | 5             |
| 1  | Indeks Pembangunan Manusia          | 75,59                      | 76,29                      | 0,93          |
| 2  | Angka Kemiskinan                    | 7,04                       | 6,92                       | -1,70         |
| 3  | Angka Pengangguran                  | 3,38                       | 3,67                       | 8,58          |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi                 | 4,22                       | 2,72                       | -35,55        |
| 5  | Pendapatan Per kapita               | 121.394.541,38             | 130.105.056,95             | 7,18          |
| 6  | Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) | 0,302                      | 0,254                      | -15,89        |

##### 2.1.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat, yang dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); pengetahuan (knowledge); dan standar hidup layak (decent standard of living).

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Angka IPM dapat dikelompokkan menjadi empat kategori antara lain:

- (1) rendah ( $IPM < 60$ ),
- (2) sedang ( $60 \leq IPM < 70$ ),
- (3) tinggi ( $70 \leq IPM < 80$ ) dan
- (4) sangat tinggi ( $IPM \geq 80$ ).

Pada Tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kampar termasuk dalam kategori IPM tinggi (IPM di atas 70), yaitu sebesar 76,29. Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Kampar naik 0,7 point dibanding tahun sebelumnya, dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Riau, 2020–2024**

| Kabupaten/Kota    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023         | 2024         |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1                 | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
| Kuantan Singingi  | 72,12        | 72,40        | 72,78        | 73,35        | 74,00        |
| Indragiri Hulu    | 70,98        | 71,25        | 71,69        | 72,28        | 72,75        |
| Indragiri Hilir   | 68,43        | 68,49        | 69,12        | 69,64        | 70,07        |
| Pelalawan         | 72,77        | 73,28        | 74,15        | 74,69        | 75,25        |
| Siak              | 74,72        | 75,03        | 75,53        | 75,97        | 76,52        |
| <b>Kampar</b>     | <b>74,23</b> | <b>74,41</b> | <b>75,21</b> | <b>75,59</b> | <b>76,29</b> |
| Rokan Hulu        | 70,95        | 71,19        | 71,70        | 72,28        | 73,07        |
| Bengkalis         | 74,49        | 74,60        | 75,38        | 75,96        | 76,37        |
| Rokan Hilir       | 70,42        | 70,61        | 71,35        | 71,98        | 72,46        |
| Kepulauan Meranti | 67,39        | 67,59        | 68,31        | 68,96        | 69,64        |
| Pekanbaru         | 82,67        | 82,93        | 83,38        | 83,67        | 84,26        |
| Dumai             | 75,34        | 75,67        | 76,20        | 76,45        | 77,03        |
| <b>Riau</b>       | <b>73,67</b> | <b>73,89</b> | <b>74,45</b> | <b>74,95</b> | <b>75,67</b> |

Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

Peringkat IPM tertinggi tahun 2024 masih ditempati oleh Kota Pekanbaru dengan nilai IPM sebesar 84,26. Angka tersebut naik sebanyak 0,59 poin dari tahun sebelumnya. Untuk peringkat IPM terendah tahun 2024 ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai IPM sebesar 69,64 poin.



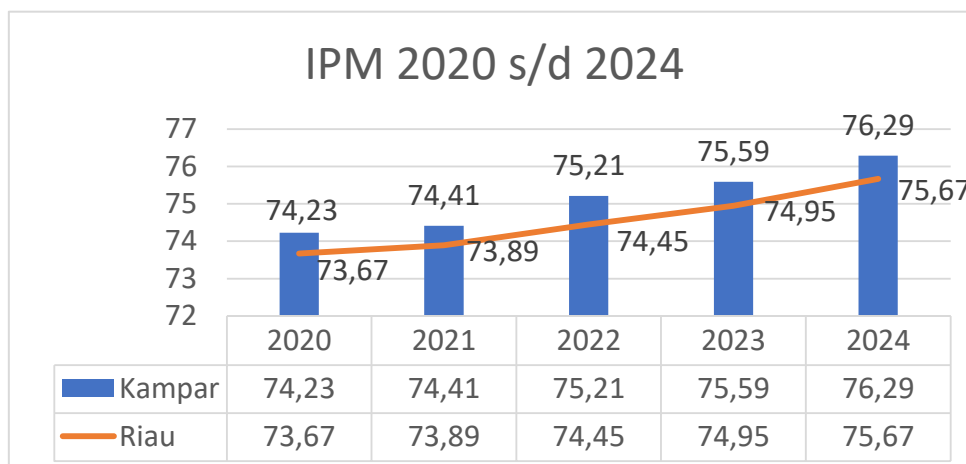
Untuk Kabupaten Kampar, IPM tahun 2024 masih menempati peringkat lima se-Riau dengan nilai IPM sebesar 76,29 poin. Kampar berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Bengkalis.

Pada tahun 2024, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, terdapat satu kota yang memiliki IPM dengan **kategori “sangat tinggi”** yaitu Kota Pekanbaru. Selain Kabupaten Kampar, terdapat delapan kabupaten/kota yang memiliki **kategori “tinggi”** yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Sementara dua kabupaten yang nilai IPM-nya masih berada pada **kategori “sedang”** yaitu Indragiri Hilir dan Kabupaten Meranti.



**Grafik 2.1**

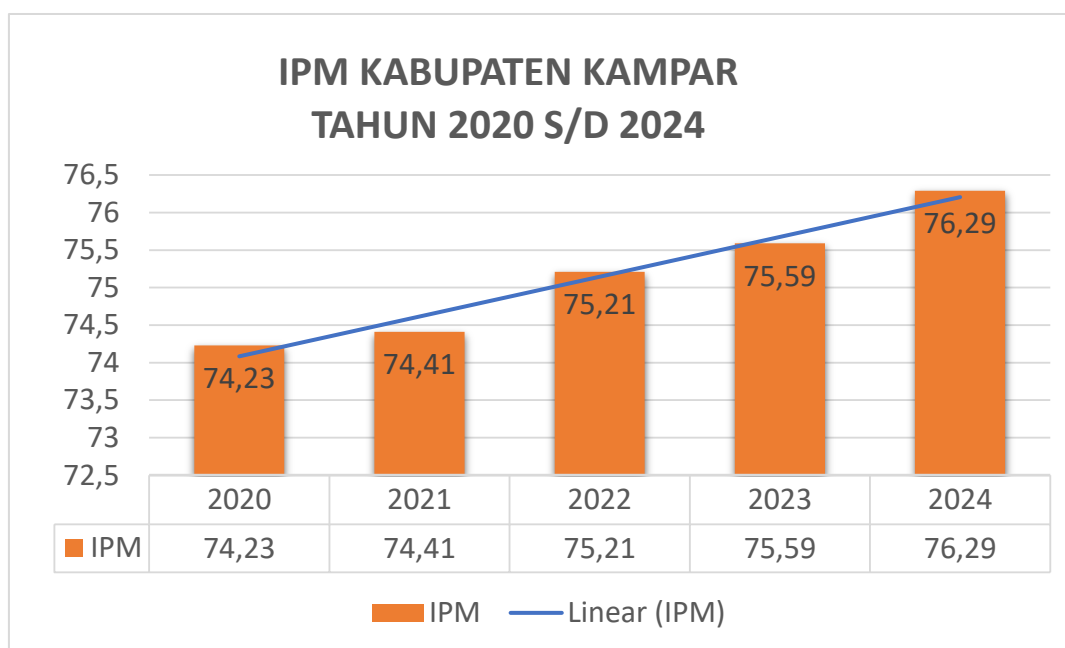
**IPM Kabupaten Kampar dan Provinsi Riau Tahun 2020 s/d 2024**



Sumber Data : BPS Kampar (Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025)

**Grafik 2. 2**

**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Kampar**



Sumber data : BPS Kabupaten Kampar/ Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

### 2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi,

yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Upaya pemberantasan kemiskinan suatu wilayah secara umum dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan penduduk. Tingkat kemiskinan suatu wilayah mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin.

Sedangkan Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

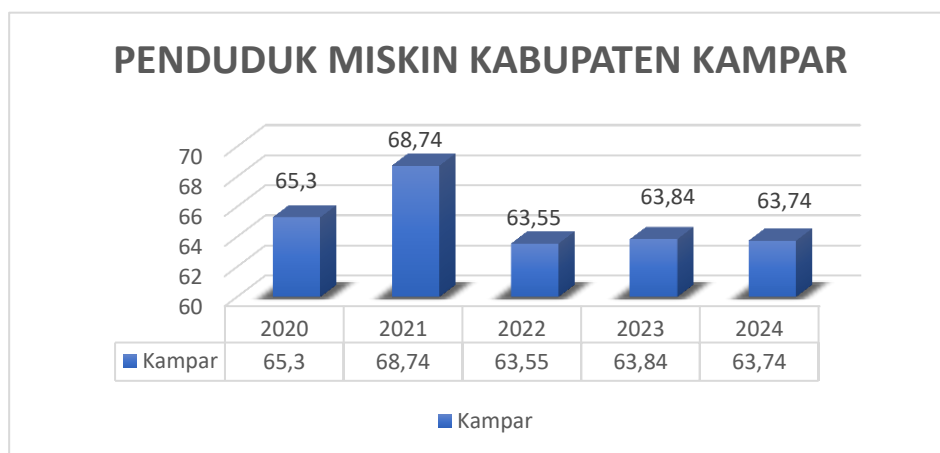
Pada tahun 2024 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Kabupaten Kampar berada pada 8,02 persen dengan jumlah penduduk miskin 63,74 ribu jiwa dengan data sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribu)**  
**Tahun 2024**

| No | Kabupaten/Kota    | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Kuantan Singingi  | 29,34         | 28,90         | 26,61         | 26,10         | 25,56         |
| 2  | Indragiri Hulu    | 26,66         | 27,35         | 27,46         | 27,40         | 27,53         |
| 3  | Indragiri Hilir   | 44,29         | 44,61         | 43,22         | 40,86         | 41,05         |
| 4  | Pelalawan         | 45,88         | 49,30         | 47,84         | 45,30         | 49,2          |
| 5  | Siak              | 25,38         | 25,77         | 25,71         | 26,99         | 26,72         |
| 6  | Kampar            | 65,30         | 68,74         | 63,55         | 63,84         | 63,74         |
| 7  | Rokan Hulu        | 73,35         | 74,73         | 73,81         | 74,38         | 75,89         |
| 8  | Bengkalis         | 36,96         | 37,66         | 36,03         | 36,10         | 36,56         |
| 9  | Rokan Hilir       | 48,85         | 51,97         | 49,59         | 53,04         | 53,49         |
| 10 | Kepulauan Meranti | 47,10         | 48,50         | 45,25         | 43,82         | 44,34         |
| 11 | Pekanbaru         | 30,40         | 32,73         | 35,96         | 37,67         | 38,17         |
| 12 | Dumai             | 9,88          | 10,57         | 10,00         | 10,15         | 10,02         |
|    | <b>RIAU</b>       | <b>483,39</b> | <b>500,81</b> | <b>485,03</b> | <b>485,66</b> | <b>492,25</b> |

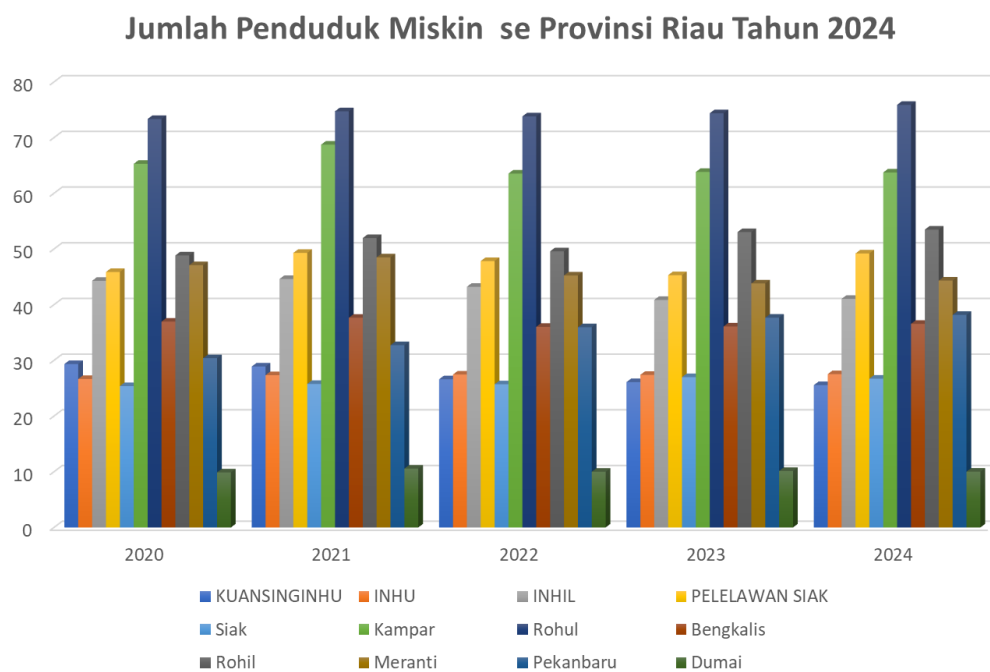
Sumber : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

**Grafik 2.3**  
**Jumlah Penduduk Miskin**  
**Kabupaten Kampar Tahun 2020 s/d 2024**



Sumber data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

**Grafik 2.4**  
**Jumlah Penduduk Miskin se Kabupaten Provinsi Riau, 2024**



Sumber data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

**Tabel 2.4**  
**Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2016–2024**

| Tahun | Garis Kemiskinan<br>(rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin<br>(ribu) | Persentase Penduduk |
|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| (1)   | (2)                                       | (3)                              | (4)                 |
| 2016  | 398.138                                   | 66,33                            | 8,02                |
| 2017  | 419.306                                   | 69,32                            | 8,18                |
| 2018  | 434.601                                   | 66,81                            | 7,71                |
| 2019  | 460.991                                   | 65,30                            | 7,38                |
| 2020  | 477.603                                   | 68,74                            | 7,82                |
| 2021  | 502.670                                   | 63,55                            | 7,12                |
| 2022  | 547.696                                   | 63,84                            | 7,04                |
| 2023  | 590.444                                   | 63,74                            | 6,92                |
| 2024  | 398.138                                   | 66,33                            | 8,02                |

Sumber Data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

**Tabel 2.5**  
**Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan**  
**di Kabupaten Kampar**

| Tahun | Indeks Kedalaman<br>Kemiskinan | Indeks Keparahan<br>Kemiskinan |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| (1)   | (2)                            | (3)                            |
| 2016  | 1,24                           | 0,29                           |
| 2017  | 1,01                           | 0,20                           |
| 2018  | 1,10                           | 0,21                           |
| 2019  | 0,93                           | 0,18                           |
| 2020  | 0,77                           | 0,13                           |
| 2021  | 0,99                           | 0,21                           |
| 2022  | 1,10                           | 0,29                           |
| 2023  | 0,72                           | 0,14                           |
| 2024  | 0,91                           | 0,19                           |

Sumber Data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

### 2.1.3 Angka Pengangguran

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari rendahnya tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran maka akan menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat dan stabilnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Selain itu, tingkat pengangguran yang rendah menyebabkan rata-rata pendapatan masyarakat akan tinggi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang sangat informatif yang dapat menggambarkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya angka TPT mencerminkan tingkat kegagalan penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja.

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih, Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Pengangguran Terbuka (Open Unemployment) adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TPT} = \frac{\text{PENCARI KERJA}}{\text{ANGKATAN KERJA}} \times 100\%$$

**Tabel 2.6**  
**Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Kabupaten Kampar**

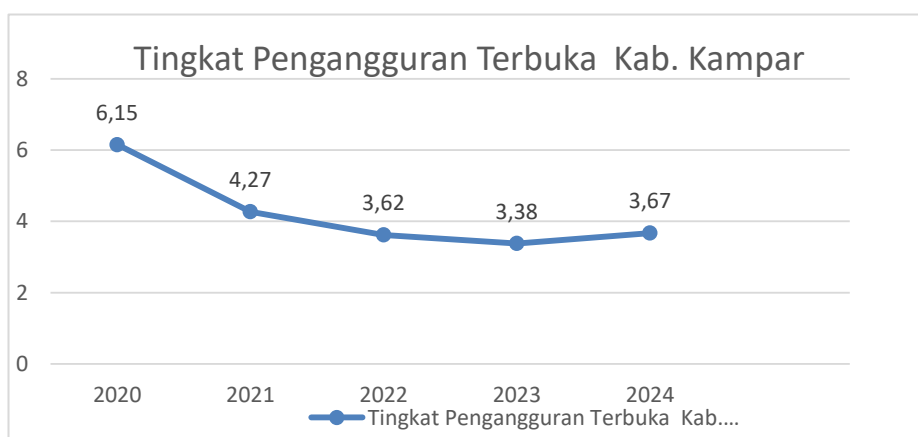
| Pendidikan Tertinggi | Angkatan Kerja |              |                       | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja |
|----------------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------|
|                      | Bekerja        | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja |                                            |
| 1                    | 2              | 3            | 4                     | 5                                          |
| 0                    | 106.444        | 0            | 106.444               | 100                                        |
| 1                    | 74.823         | 0            | 74.823                | 100                                        |
| 2                    | 162.014        | 13.263       | 175.277               | 92.43                                      |
| 3                    | 56.140         | 1.957        | 58.097                | 96.63                                      |
| Jumlah               | 399.421        | 15.220       | 414.641               | 96,33                                      |

Sumber data : BPS Kampar 2025

Maka TPT Kabupaten Kampar Tahun 2024 :

$$\text{TPT} = \frac{15.220}{414.641} \times 100 = 3,67$$

**Grafik 2.4**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kampar**  
**tahun 2020 – 2024**



Sumber data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

PDRB juga dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari hasil perhitungan PDRB Kabupaten Kampar dapat diketahui besarnya laju pertumbuhan dan struktur ekonomi Kabupaten Kampar. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kampar (persen) dari 4,22 persen pada tahun 2023 menjadi 2,72 persen pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.7**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas**  
**Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di**  
**Kabupaten Kampar (persen), 2020–2024**

| Kabupaten/Kota<br>Regency/Municipality | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| (1)                                    | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  |
| Kuantan Singingi                       | 1,01  | 3,75 | 4,75 | 2,87 | 3,12 |
| Indragiri Hulu                         | -0,12 | 4,26 | 4,63 | 4,39 | 3,74 |
| Indragiri Hilir                        | 0,43  | 4,46 | 5,25 | 3,17 | 3,10 |
| Pelalawan                              | 2,25  | 4,07 | 4,39 | 4,69 | 4,36 |

|                   |              |             |             |             |             |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Siak              | -0,1         | 2,31        | 3,78        | 4,35        | 4,37        |
| Kampar            | -0,9         | 3,45        | 4,83        | 4,22        | 2,72        |
| Rokan Hulu        | 1,52         | 4,98        | 5,02        | 4,12        | 2,71        |
| Bengkalis         | -3,3         | 0,51        | 2,22        | 2,77        | 0,93        |
| Rokan Hilir       | -0,99        | 1,63        | 2,64        | 2,83        | 1,69        |
| Kepulauan Meranti | 0,43         | 2,56        | 3,17        | 4,81        | 3,33        |
| Pekanbaru         | -4,41        | 5,24        | 6,78        | 6,06        | 4,61        |
| Dumai             | -1,04        | 5,98        | 6,36        | 6,05        | 5,02        |
| <b>Riau</b>       | <b>-1,13</b> | <b>3,36</b> | <b>4,55</b> | <b>4,21</b> | <b>3,52</b> |

Sumber Data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025

### 2.1.5 Pendapatan Perkapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat bergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk.

PDRB per kapita dapat dilihat dari dua sisi, yaitu PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya produktivitas perorangan yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga dari komoditi yang diproduksi. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan angka tersebut dihitung berdasarkan harga berlaku yang di dalamnya terkandung unsur kenaikan harga barang dan jasa (inflasi). Kemampuan daya beli



masyarakat yang sebenarnya terlihat dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK).

**Tabel 2.8**  
**Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2020-2024 (Rp. miliar)**

| PDRB | 2020      | 2021      | 2022       | 2023*      | 2024*      |
|------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| ADHB | 73 001,80 | 86 455,98 | 103.549,57 | 106.951,99 | 116.424,25 |
| ADHK | 51 419,30 | 52 419,86 | 55.765,14  | 58.116,51  | 59. 695,10 |

Sumber Data : Kabupaten Kampar Dalam Angka 2025/BPS 2025

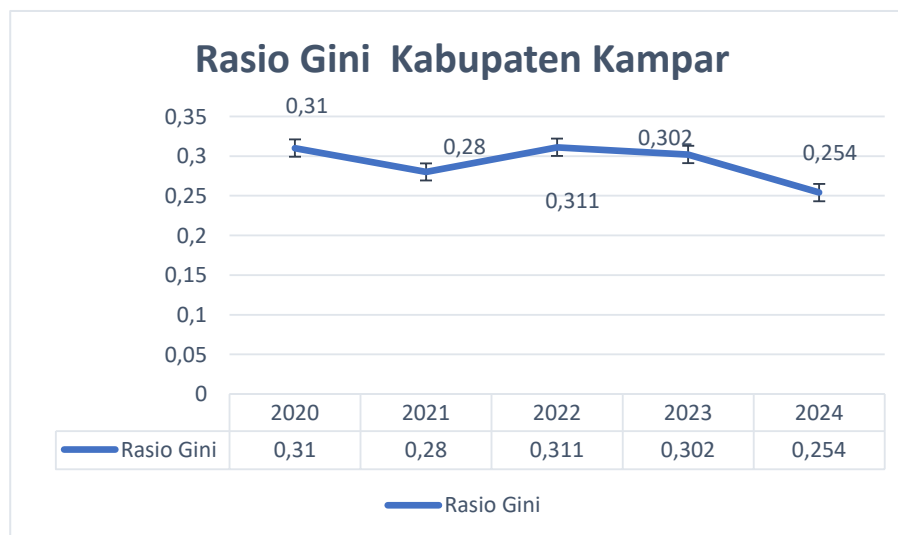
### 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini (gini ratio) yang merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Indeks gini daerah ditandai dengan nilai 0-1. Dengan distribusi nilai sebagai berikut:

| NILAI KOEFISIEIN | DISTRIBUSI PENDAPATAN               |
|------------------|-------------------------------------|
| < 0,4            | Tingkat Ketimpangan Rendah          |
| 0,4 – 0,5        | Tingkat Ketimpangan Moderat/ Sedang |
| > 0,5            | Tingkat Ketimpangan Tinggi          |

**Grafik 2.5**

**Indek Gini Rasio Kabupaten Kampar Tahun 2020 -2024**



Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar didapati adanya penurunan nilai koefisien gini dari tahun sebelumnya. Gambaran tersebut menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Kampar berada pada kriteria/kategori ketimpangan “rendah”.

## **2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan**

### **2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

Untuk melihat gambaran yang lebih jelas terhadap capaian kinerja Indikator atau parameter Kunci keluaran (Output) pada Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat dilihat pada data yang terdapat pada table berikut ini :



### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.9

#### INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

##### A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME |                                                                                        | RUMUS                                                                                 | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA                      | KET |
|----|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----|
| 1  | 3                   |                                 | 3                                                                                      | 4                                                                                     | 5               | 6                                | 7   |
| 1  | PENDIDIKAN          | 1.a.1                           | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Jumlah anak usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat atau yang sedang belajar di satuan PAUD | 47,11           | Dinas Pendidikan dan Disdukcapil |     |
|    |                     |                                 |                                                                                        | $\frac{16.592}{35.220} \times 100\%$                                                  |                 |                                  |     |
|    |                     | 1.a.2                           | Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun dalam Pendidikan Dasar              | Jumlah Anak Usia 7 - 12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Dasar   | 95,75           | Dinas Pendidikan dan Disdukcapil |     |
|    |                     |                                 |                                                                                        | $\frac{103828}{108.431} \times 100\%$                                                 |                 |                                  |     |



|   |           |       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                      |  |
|---|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--|
|   |           | 1.a.3 | Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun dalam Pendidikan Menengah Pertama                                                 | <div> Jumlah Anak Usia 13 - 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah Pertama <div> 47.031 x 100% </div> </div> <div> Jumlah anak usia 13 - 15 Tahun pada Kabupaten yang bersangkutan <div> 54.309 </div> </div>                                                                                                 | 86,60     | Dinas Pendidikan dan Disdukcapil                     |  |
|   |           | 1.a.4 | Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pendidikan kesetaraan | <div> Jumlah Anak Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan <div> 1356 x 100% </div> </div> <div> Jumlah anak usia 7 - 18 Tahun belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Kabupaten yang bersangkutan <div> 1432 </div> </div> | 94,69     | Dinas Pendidikan dan Disdukcapil                     |  |
| 2 | KESEHATAN | 1.b.1 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten                                                                                   | <div> Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di Kabupaten Kampar <div> 499 x 100% </div> </div> <div> Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar <div> 898.973 </div> </div>                                                                                                                                                                      | 0,5550778 | Dinas Kesehatan, RSUD & Dinas Kependudukan dan Capil |  |
|   |           | 1.b.2 | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi                                                                       | <div> Jumlah Rumah Sakit Rujukan Kabupaten Kampar yang terakreditasi <div> 8 X 100% </div> </div> <div> Jumlah Rumah di Kabupaten Kampar <div> 8 </div> </div>                                                                                                                                                                           | 100       | Dinkes & RSUD                                        |  |



|       |                                                                                           |                                                                                                                                                            |   |      |        |                                                      |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|------------------------------------------------------|--|
| 1.b.3 | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                            | Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan<br>16.814<br>Jumlah ibu hamil di Kabupaten Kampar tahun 2020<br>17.792                                  | X | 100% | 94,503 | Dinkes & RSUD                                        |  |
| 1.b.4 | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                  | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan<br>14.570<br>Jumlah ibu bersalin di Kabupaten<br>16.984                                          | X | 100% | 85,786 | Dinkes & RSUD                                        |  |
| 1.b.5 | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                | Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>14.194<br>Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten<br>14.194                        | X | 100% | 100    | Dinkes & RSUD                                        |  |
| 1.b.6 | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar                                         | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>45.196<br>Jumlah balita di Kabupaten<br>50.659                                          | X | 100% | 89,216 | Dinkes & RSUD                                        |  |
| 1.b.7 | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar<br>67.665<br>Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten<br>135.865 | X | 100% | 49,80  | Dinas Kesehatan, RSUD & Dinas Kependudukan dan Capil |  |



|  |  |        |                                                                                             |                                                                                                             |        |                                                      |  |
|--|--|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--|
|  |  | 1.b.8  | Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar             | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar<br>327.270<br>X<br>100%    | 57,743 | Dinas Kesehatan, RSUD & Dinas Kependudukan dan Capil |  |
|  |  |        | Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten                                                  | 566.764                                                                                                     |        |                                                      |  |
|  |  | 1.b.9  | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar<br>75.640<br>X<br>100% | 115,8  | Dinas Kesehatan, RSUD & Dinas Kependudukan dan Capil |  |
|  |  |        | Jumlah orang warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten                                | 65.316                                                                                                      |        |                                                      |  |
|  |  | 1.b.10 | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar         | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>82.809<br>X<br>100%      | 45,096 | Dinkes & RSUD                                        |  |
|  |  |        | Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten                                                    | 183.625                                                                                                     |        |                                                      |  |
|  |  | 1.b.11 | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                 | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>6.778<br>X<br>100%               | 100    | Dinkes & RSUD                                        |  |
|  |  |        | Jumlah penderita DM di Kabupaten                                                            | 6.778                                                                                                       |        |                                                      |  |
|  |  | 1.b.12 | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar              | Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>1.148<br>X<br>100%             | 92,50  | Dinkes & RSUD                                        |  |
|  |  |        | Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten                                                          | 1.241                                                                                                       |        |                                                      |  |



|   |                |        |                                                                                                     |                                                                                                                                                    |   |      |        |               |                                                                                                                                                     |
|---|----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | 1.b.13 | Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar                               | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar<br>13.502                                                                 | X | 100% | 93,953 | Dinkes & RSUD |                                                                                                                                                     |
|   |                |        |                                                                                                     | Jumlah penderita TBC di Kabupaten<br>14.371                                                                                                        |   |      |        |               |                                                                                                                                                     |
|   |                | 1.b.14 | Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar<br>11.937                                     | X | 100% | 54,467 | Dinkes & RSUD |                                                                                                                                                     |
|   |                |        |                                                                                                     | Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten<br>21.916                                                                                   |   |      |        |               |                                                                                                                                                     |
| 3 | PEKERJAAN UMUM | 1.c.1  | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir  | Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten (ha)<br>0 | X | 100% | 0      | Dinas PUPR    | Wilayah sungai di Kabupaten Kampar sudah menjadi kewenangan pusat berdasarkan Permen PUPR No 4/PRT/M/2015 ttg Kriteria dan penetapan wilayah sungai |
|   |                |        |                                                                                                     | Luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten Tahun 2021 (ha)<br>1                                              |   |      |        |               |                                                                                                                                                     |



|  |  |       |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |      |        |            |  |
|--|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|------------|--|
|  |  | 1.c.2 | Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten                      | Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten (m)<br>0<br>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Kabupaten (m)<br>1 | X | 100% |        | Dinas PUPR |  |
|  |  | 1.c.3 | Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi                                                                                                  | Luas Irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha)<br>805<br>Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten<br>1.166                                                  | X | 100% | 69,039 | Dinas PUPR |  |
|  |  | 1.c.4 | Persentase kapasitas yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten | Jumlah komulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten<br>133.989<br>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten<br>262.963                                        | X | 100% | 50,95  | Dinas PUPR |  |





|  |  |         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |      |        |            |  |
|--|--|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|------------|--|
|  |  | 1.c.5   | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | <p>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</p> <p style="text-align: right;">131.755</p> <p style="text-align: right;">Jumlah rumah di Kabupaten 262.963</p> | X | 100% | 50,1   | Dinas PUPR |  |
|  |  | 1.c.6   | Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten                                                         | <p>Jumlah Pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</p> <p style="text-align: right;">293</p> <p style="text-align: right;">Jumlah IMB yang berlaku 293</p>                                                                                                                                                           | X | 100% | 100    | Dinas PUPR |  |
|  |  | 1.c.7   | Tingkat Kemantapan Jalan                                                              | <p>Panjang jalan kewenangan Kabupaten yang mantap</p> <p style="text-align: right;">1.313,375</p> <p style="text-align: right;">Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten 2.734,4</p>                                                                                                                            | X | 100% | 48,03  | Dinas PUPR |  |
|  |  | 1.c.8.1 | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi            | <p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</p> <p style="text-align: right;">536</p> <p style="text-align: right;">Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupate 1.522</p>              | X | 100% | 35,216 | Dinas PUPR |  |



|   |                  |         |                                                                                |                                                                                                                                                                     |     |              |                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                  | 1.c.8.2 | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi | Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi<br>10<br>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya<br>10<br>X 100%  | 100 | Dinas PUPR   |                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | PERUMAHAN RAKYAT | 1.d.1   | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni        | Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n<br>0<br>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n<br>1<br>X 100% | 0   | Dinas Perkim | belum dilakukan dikarenakan belum atau tidak adanya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini dan data jumlah Rumah yg akan ditangani ada tetapi belum memiliki SK KDH |



|  |  |       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |      |   |              |                                                                                                                                                   |
|--|--|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 1.d.2 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | <p>Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni</p> <p>0</p> <p>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan</p> <p>1</p> | x | 100  | 0 | Dinas Perkim | Belum dilakukan pendataan dikarenakan belum adanya Peraturan Bupati tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud                                         |
|  |  | 1.d.3 | Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani                                                                                             | <p>Luas kawasan dibawah 10 Ha yang ditangani</p> <p>0</p> <p>Luas kawasan kumuh 10 Ha</p> <p>28,35</p>                                                                                                                                                                                                                                | x | 100% | 0 | Dinas Perkim | Kabupaten Kampar pada Tahun 2024 tidak ada melakukan kegiatan penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh dibawah 10 Ha dikarenakan Keterbatasan Anggaran. |



|      |                                                           |       |                                                                |                                                                |                                              |                                                         |      |      |              |     |
|------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|--------------|-----|
|      |                                                           | 1.d.4 | Persentase penurunan jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) | Jumlah unit rumah tidak layak huni                             |                                              | x                                                       | 100% | 3,91 | Dinas Perkim |     |
|      |                                                           |       |                                                                | 8926                                                           |                                              |                                                         |      |      |              |     |
|      |                                                           |       |                                                                | Jumlah total unit rumah kabupaten                              | 228482                                       |                                                         |      |      |              |     |
|      |                                                           | 1.d.5 | Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU                 | Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU |                                              | x                                                       | 100% | 1,17 | Dinas Perkim |     |
| 2678 |                                                           |       |                                                                |                                                                |                                              |                                                         |      |      |              |     |
|      |                                                           |       |                                                                | Jumlah unit rumah Kabupaten                                    | 228482                                       |                                                         |      |      |              |     |
| 5    | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.e.1 | Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan          | Jumlah pengaduan yang ditangani                                |                                              | x                                                       | 100% | 100  | Satpol PP    |     |
|      |                                                           |       |                                                                | 55                                                             |                                              |                                                         |      |      |              |     |
|      |                                                           |       |                                                                | Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk                        | 55                                           |                                                         |      |      |              |     |
|      |                                                           |       |                                                                | 1.e.2                                                          | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan |      | x    | 100%         | 100 |
| 8    |                                                           |       |                                                                |                                                                |                                              |                                                         |      |      |              |     |
|      |                                                           |       |                                                                | Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi            | 8                                            |                                                         |      |      |              |     |



|       |                                                                                           |                                                                                           |                 |       |      |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|--|
| 1.e.3 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | $\times 100\%$  | 100   | BPBD |  |
|       |                                                                                           | 100                                                                                       | 100             |       |      |  |
| 1.e.4 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | $\times 100$    | 64,96 | BPBD |  |
|       |                                                                                           | 544195                                                                                    | 837722          |       |      |  |
| 1.e.5 | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | $\times 100 \%$ | 100   | BPBD |  |
|       |                                                                                           | 14009                                                                                     | 14009           |       |      |  |



|  |  |       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |        |  |
|--|--|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--|
|  |  | 1.e.6 | pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan/Perangkat Daerah |            |        |  |
|  |  |       |                                                      | $\frac{85}{117} \times 100\%$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72,6       | DAMKAR |  |
|  |  | 1.e.7 | Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran   | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12,4 MENIT | DAMKAR |  |



|   |        |       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |  |
|---|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--|
| 6 | SOSIAL | 1.f.1 | Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM) | $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis}} \times 100\%$ $\frac{1154}{27152}$                    | 4,25 | Dinas Sosial |  |
|   |        | 1.f.2 | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                             | $\frac{\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran}}{\text{Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{406}{406}$ | 100  | Dinas Sosial |  |



## B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN | INDIKATOR KINERJA KUNCI<br>OUTCOME |                                                                            | RUMUS                                                                                                                                                                   | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA                         | KET |
|----|---------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----|
| 7  | TENAGA KERJA        | 2.a.2                              | Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja | $\frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah Kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota}} \times 100\%$ | 100             | Dinas Pertanian                     |     |
|    |                     | 2.a.2                              | Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi                           | $\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$                                            | 0               | Disnas PERINDUSTRIAN & TENAGA KERJA |     |
|    |                     | 2.a.3                              | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja                                         | $\frac{\text{PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$                                                                 | 1.439,75        | Dinas PERINDUSTRIAN & TENAGA KERJA  |     |





|       |                                                                                                                                                            |                                                                |     |        |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.a.4 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) | Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak | 57  | x 100% | 34,969 | Dinas PERINDUSTRIAN & TENAGA KERJA | Kepatuhan yang Rendah dari Perusahaan: Beberapa perusahaan tidak sepenuhnya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan atau hanya melakukan "pemeriksaan formalitas" untuk mendapatkan persetujuan dari Dinas Tenaga Kerja tanpa benar-benar menerapkannya di lapangan |
|       |                                                                                                                                                            | Jumlah Perusahaan                                              | 163 |        |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.a.5 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam kabupaten/kota                                | Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan                | 692 | x 100% | 100    | Dinas PERINDUSTRIAN & TENAGA KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                            | Jumlah pencari yang terdaftar                                  | 692 |        |        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |



|    |                                             |       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |       |                                                       |  |
|----|---------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--|
| 8  | PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANA | 2.g.1 | Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD                                                                         | Jumlah ARG pada belanja langsung APBD<br>$\frac{27.822.41}{2.356} \times 100\%$                                                                             | 1,050 | Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB               |  |
|    |                                             |       |                                                                                                                                               | Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD<br>$\frac{2.648.306}{.816.712,77} \times 100\%$                                                            |       | BPKAD                                                 |  |
|    |                                             | 2.g.2 | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi<br>$\frac{95}{95} \times 100\%$ | 100   | Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB & DISDUK CAPI |  |
|    |                                             |       |                                                                                                                                               | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)                                                                                                            |       |                                                       |  |
|    |                                             | 2.g.3 | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)                                                            | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan<br>$\frac{18}{439801} \times 100\%$                                                                               | 4,09  | Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB & DISDUK CAPI |  |
|    |                                             |       |                                                                                                                                               | Jumlah penduduk perempuan                                                                                                                                   |       |                                                       |  |
| 9  | PANGAN                                      | 2.h.1 | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)                                                          | Jumlah cadangan pangan<br>$\frac{70}{75} \times 100\%$                                                                                                      | 93,3  | Dinas Ketahanan Pangan                                |  |
|    |                                             |       |                                                                                                                                               | Jumlah kebutuhan pangan                                                                                                                                     |       |                                                       |  |
| 10 | PERTANAHAN                                  | 2.i.1 | Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan | Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi<br>$\frac{299,727}{299,727} \times 100\%$                                                                          | 100   | PTSP                                                  |  |
|    |                                             |       |                                                                                                                                               | Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi                                                                                                               |       |                                                       |  |



|  |  |       |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                   |
|--|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 2.i.2 | Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum                                                                      | <div> Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum <math>\frac{0}{1}</math> </div> <div> Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum <math>\frac{1}{1}</math> </div> <div> <math>\times 100\%</math> </div>                              | 0   | PUPR |                                                                                                                                                   |
|  |  | 2.i.3 | Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal                                                                      | <div> Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi <math>\frac{299,727}{299,727}</math> </div> <div> Luas izin lokasi yang diterbitkan <math>\frac{299,727}{299,727}</math> </div> <div> <math>\times 100\%</math> </div> | 100 | PTSP |                                                                                                                                                   |
|  |  | 2.i.4 | Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | <div> Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 Ha <math>\frac{0}{1}</math> </div> <div> Jumlah penerima tanah obyek landreform <math>\frac{1}{1}</math> </div> <div> <math>\times 100\%</math> </div>     | 0   | PUPR | Belum bisa dilaksanakan karena masih menggunakan peraturan lama sehingga beberapa ketentuan sudah tidak relevan dg kondisi dan ketentuan saat ini |
|  |  | 2.i.5 | Tersedianya tanah untuk masyarakat                                                                                               | <div> Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah <math>\frac{299,727}{299,727}</math> </div> <div> Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan <math>\frac{299,727}{299,727}</math> </div> <div> <math>\times 100\%</math> </div>           | 100 | PTSP |                                                                                                                                                   |



|    |                                                |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |  |
|----|------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--|
|    |                                                | 2.i.6   | Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi                                                                                  | <div> Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani 21<br/> jumlah pengaduan sengketa tanah garapan 24 </div> <div> X 100% </div>                                                                                                      | 87,5   | KESBANGPOL   |  |
| 11 | LINGKUNGAN HIDUP                               | 2.j.1   | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota                                                                                            | Mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten = (IKA 30%) + (IKD30%) + (ITH40%)                                                                                                                                                 | 68.24  | DLH          |  |
|    |                                                | 2.j.2   | Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota                                                                                              | <div> Total Volume Sampah yang dapat ditangani 41.341<br/> Total Volume timbunan sampah kabupaten 128.007.98 </div> <div> X 100% </div>                                                                                               | 32,295 | DLH          |  |
|    |                                                | 2.j.3   | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | <div> Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah Kabupaten 37<br/> Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan 40 </div> <div> x 100% </div> | 92,5   | DLH          |  |
| 12 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1.1 | Perekaman KTP Elektronik                                                                                                                          | <div> Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP 612.325<br/> Jumlah penduduk 17 tahun ke atas 614.021 </div> <div> X 100% </div>                                                                                     | 99,72  | DISDUK CAPIL |  |
|    |                                                |         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |        |              |  |



|    |                                  |         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                          |       |              |                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                  | 2.k.1.2 | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                 | <div> Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA <div> 108.495 </div> </div> <div> Jumlah anak usia 0-17 tahun <div> 273628 </div> </div> <div> X </div> <div> 100% </div>                                                 | 39,65 | DISDUK CAPIL |                                                                                                                                                |
|    |                                  | 2.k.1.3 | Kepemilikan akta kelahiran                                                             | <div> Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir <div> 275906 </div> </div> <div> Jumlah anak usia 0-18 tahun <div> 278544 </div> </div> <div> X </div> <div> 100% </div>                                                                | 99,05 | DISDUK CAPIL |                                                                                                                                                |
|    |                                  | 2.k.1.4 | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | <div> Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama <div> 1 </div> </div> <div> Jumlah OPD <div> 53 </div> </div> <div> X </div> <div> 100% </div>                                                              | 1,886 | DISDUK CAPIL | Adanya peraturan baru yang harus dipenuhi oleh OPD yakni ISO 2701 menyebabkan tidak terpenuhinya syarat OPD untuk melakukan kerjasama dimaksud |
| 13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.l.1   | Persentase Pengentasan Desa Tertinggal                                                 | <div> Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun <div> 0 </div> </div> <div> Jumlah desa tertinggal (per awal tahun - n) <div> 1 </div> </div> <div> X </div> <div> 100% </div> | 0     | Dinas PMD    | Pada tahun 2024 di Kabupaten Kampar tidak terdapat lagi Desa Tertinggal Berdasarkan BA Penetapan Status Desa tgl 23 Juni 2023.                 |



|    |                                              |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |        |                                         |  |
|----|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--|
|    |                                              | 2.l.2 | Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri                                          | <p>Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun <math>\frac{34}{34} \times 100\%</math></p> <p>Jumlah desa berkembang (per awal tahun - n) 34</p> | 100    | Dinas PMD                               |  |
| 14 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.m.1 | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                         | Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)                                                                                                                                                                 | 2,21   | Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB |  |
|    |                                              | 2.m.2 | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | <p>Jumlah peserta KB Aktif Modern <math>\frac{90342}{149533} \times 100\%</math></p> <p>Jumlah Pasangan Usia Subur 149533</p>                                                                                         | 60,416 | Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB |  |
|    |                                              |       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |        |                                         |  |
|    |                                              | 2.m.3 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                       | <p>Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani <math>\frac{14132}{149533} \times 100\%</math></p> <p>Jumlah Pasangan Usia Subur 149533</p>                                                                    | 9,45   | Dinas PPPA Pengendalian Penduduk dan KB |  |
| 15 | PERHUBUNGAN                                  | 2.n.1 | Rasio konektivitas Kabupaten                                                        | Mengukur rasio konektivitas Kabupaten                                                                                                                                                                                 | 94     | Dinas Perhubungan                       |  |
|    |                                              | 2.n.2 | V/C Ratio di Jalan Provinsi                                                         | Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten                                                                                                                                                                                | 0,54   | Dinas Perhubungan                       |  |



|    |                                    |       |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |         |   |      |        |                                     |  |
|----|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|--------|-------------------------------------|--|
| 16 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA         | 2.o.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                    | Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo                                                                 | 6       | X | 100% | 11,32  | Dinas Kominfo                       |  |
|    |                                    |       |                                                                                                                                                                         | Jumlah OPD                                                                                                                                         | 53      |   |      |        |                                     |  |
|    |                                    | 2.o.2 | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                                           | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi                                                                          | 14      | X | 100% | 73,68  | Dinas Kominfo                       |  |
|    |                                    |       |                                                                                                                                                                         | Jumlah Layanan Publik                                                                                                                              | 19      |   |      |        |                                     |  |
|    |                                    | 2.o.3 | Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Daerah Kabupaten | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten | 613.114 | X | 100% | 100    | Dinas Kominfo & Dinas PMD Dukcapil  |  |
|    |                                    |       |                                                                                                                                                                         | Jumlah penduduk                                                                                                                                    | 613.114 |   |      |        |                                     |  |
| 17 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.p.1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas                                                                                                                                  | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset                                                                  | 34      | X | 100% | 36,956 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM |  |
|    |                                    |       |                                                                                                                                                                         | Jumlah seluruh koperasi                                                                                                                            | 92      |   |      |        |                                     |  |
|    |                                    | 2.p.2 | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha                                                                                                                         | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha                                                                                                          | 217     | X | 100% | 1,5428 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM |  |
|    |                                    |       |                                                                                                                                                                         | Jumlah usaha mikro keseluruhan                                                                                                                     | 14065   |   |      |        |                                     |  |



|    |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | PENANAMAN MODAL         | 2.q   | Persentase peningkatan investasi di kabupaten                                                                              | (Jumlah investasi tahun n - 7.149.427.<br>jumlah investasi tahun n - 1) di 943.578-<br>kabupaten 10.853.507<br>X 100%<br>220.000                                                                           | -34,127 | Dinas PMPTSP                     |                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                         |       |                                                                                                                            | Jumlah investasi tahun n - 1 di 10.853.507<br>kabupaten 220.000                                                                                                                                            |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
| 19 | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.r.1 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                                                  | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten 5.068<br>X 100%<br>Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) dikabupaten 222.524                                                                         | 2,27    | Dinas Pendidikan & Disduk capill |                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                         |       |                                                                                                                            | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten 27056<br>X 100%<br>jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten 222.524 |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                         | 2.r.2 | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten 27056<br>X 100%<br>jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten 222.524 | 12,158  | Dinas Pendidikan & Disduk capill |                                                                                                                                                                                                                            |
|    |                         | 2.r.3 | Peningkatan prestasi olahraga                                                                                              | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional                                                                                                                                     | 0       | Dinas Pendidikan                 |                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | STATISTIK               | 2.s.1 | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah 30<br>X 100%<br>Jumlah OPD 53                                                                                     | 56,6    | Dinas Kominfo                    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral masih berfokus pada 32 OPD Instansi yang tertuang dalam portal satu data Kampar, yang mana tahap kelanjutan seluruh OPD yakni 21 Kecamatan akan berkelanjutan dalam proses selanjutnya. |
|    |                         |       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |         |                                  |                                                                                                                                                                                                                            |





|    |              |       |                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | 2.s.2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam daerah melakukan evaluasi pembangunan daerah<br>$\frac{32}{53} \times 100\%$                                                     | 60,37 | Dinas Kominfo                    | Penyelenggaraan Statistik Sektoral data statistik dalam daerah melakukan evaluasi 32 OPD Instansi yang tertuang dalam portal satu data Kampar, yang mana tahap kelanjutan seluruhn OPD yakni 21 Kecamatan akan berkelanjutan dalam proses selanjutnya. |
| 21 | PERSANDIAN   | 2.t   | Tingkat keamanan informasi pemerintah                                                      | $\frac{\text{Jumlah nilai per area keamanan informasi } 547}{\text{Jumlah area penilaian } 645} \times 100\%$                                                                     | 84,80 | Dinas Kominfo                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22 | KEBUDAYAAN   | 2.u   | Terlestarikannya Cagar Budaya                                                              | $\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan } 1}{\text{Jumlah cagar budaya yang ditetapkan } 1} \times 100\%$                                                              | 100   | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 23 | PERPUSTAKAAN | 2.v.1 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                                 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat                                                                     | 77,13 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    |              | 2.v.2 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                                                     | Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) | 78,30 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 24 | KEARSIPAN    | 2.w.1 | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja,                            | Mengukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-                       | 100   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |                                                                                                                                                                                                                                                        |



|  |  |       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |     |                                  |  |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--|
|  |  |       | alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan                                                                        | Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan                                                                                                                                                                   |     |                                  |  |
|  |  | 2.w.2 | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahanpertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara,pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 100 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |  |



### C. Urusan Pilihan

| N O | URUSAN PEMERINTAHAN           | INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME |                                                                                                                                    | RUMUS                                                                           |                 |        | CAPAIAN KINERJA | SUMBER DATA                  | KET                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                             | 3                               |                                                                                                                                    | 4                                                                               |                 |        | 5               | 6                            | 7                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 25  | <b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b> | 3.a                             | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP) | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota           | 68.582          |        | 109,757         | Dinas Kelautan dan Perikanan | pada tahun 2024 sesuai dengan Renstra OPD, untuk target produksi ikan diturunkan dari target sebelumnya, karena ada pertimbangan beberapa hal, sehingga nilai produksi ikan nilainya lebih tinggi dari target yang ditetapkan (renstra OPD terlampir) |
|     |                               |                                 |                                                                                                                                    | Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan                | 62.485          |        |                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26  | <b>PARIWISATA</b>             | 3.b.1                           | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                                                 | Jumlah wisatawan mancanegara tahun n - jumlah wisatawan mancanegara tahun n - 1 | 399-153         | X 100% | 160,78          | Dinas Pariwisata             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                               |                                 |                                                                                                                                    | Jumlah wisatawan mancanegara tahun n - 1                                        | 153             |        |                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                               | 3.b.2                           | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi                                                      | Jumlah wisatawan nusantara tahun n - jumlah wisatawan nusantara tahun n - 1     | 2869651-1977000 | X 100% | 45,15           | Dinas Pariwisata             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                               |                                 |                                                                                                                                    | Jumlah wisatawan nusantara tahun n - 1                                          | 1977000         |        |                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                               | 3.b.3                           | Tingkat hunian akomodasi                                                                                                           | Jumlah kamar yang terjual                                                       | 114697          | X 100% | 77,019          | Dinas Pariwisata             |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                               |                                 |                                                                                                                                    | Jumlah kamar yang tersedia                                                      | 148920          |        |                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                       |



|    |           |       |                                                                       |                                                                                                                                  |   |      |        |                                                |                                              |
|----|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    |           | 3.b.4 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku              | Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata<br>54,07                                                                           |   |      |        |                                                |                                              |
|    |           |       |                                                                       | Jumlah total PDRB<br>59695,1                                                                                                     | X | 100% | 0.09   | Dinas Pariwisata                               |                                              |
|    |           | 3.b.5 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD                             | Jumlah Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PAD<br>902.716.000                                                                  |   |      |        |                                                |                                              |
|    |           |       |                                                                       | Jumlah total PAD<br>437.822.575.404                                                                                              | X | 100% | 0,206  | Dinas Pariwisata                               |                                              |
| 27 | PERTANIAN | 3.c.1 | Produktivitas pertanian per hektar per tahun                          | Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun<br>44.882                                                                  | X | 100% | 767,73 | Dinas Pertanian                                |                                              |
|    |           |       |                                                                       | Luas panen<br>5.846                                                                                                              |   |      |        |                                                |                                              |
|    |           | 3.c.2 | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular | Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya<br>1.592-1.994 | X | 100% | -20,16 | Dinas Perkebunan,P eternakan & Kesehatan Hewan |                                              |
|    |           |       |                                                                       | Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya<br>1.994                                                           |   |      |        |                                                |                                              |
| 28 | KEHUTANAN | 3.d   |                                                                       |                                                                                                                                  |   |      | 100    |                                                | Bukan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar |



|    |                                |       |                                                                                                                                      |                                                                           |           |   |      |       |                                     |                                                                                      |
|----|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---|------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.e   | Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota                                                          | Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yg memiliki ijin                 | 0         | X | 100% | 100   | BAGIAN SDA                          | Di Kabupaten Kampar tidak terdapat Perusahaan yang menggunakan Tenaga Panas Bumi     |
|    |                                |       |                                                                                                                                      | Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi                                  | 1         |   |      |       |                                     |                                                                                      |
| 30 | PERDAGANGAN                    | 3.f.1 | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yg telah memiliki izin sesuai ketentuan               | 83        | X | 100% | 100   | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM | Sumber data : Dinas Pertanian Tanaman dan Holtikultura (karna yg menangani IKK ini ) |
|    |                                |       |                                                                                                                                      | jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten                                  | 83        |   |      |       |                                     |                                                                                      |
|    |                                | 3.f.2 | Persentase kinerja realisasi pupuk berlaku                                                                                           | Realisasi                                                                 | 1.177.325 | X | 100% | 68,09 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM |                                                                                      |
|    |                                |       |                                                                                                                                      | RDKK                                                                      | 1.728.981 |   |      |       |                                     |                                                                                      |
|    |                                | 3.f.3 | Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                  | jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan            | 1463      | X | 100% | 32,33 | Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM |                                                                                      |
|    |                                |       |                                                                                                                                      | jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten | 4525      |   |      |       |                                     |                                                                                      |



|                                                                          |               |                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |           |      |      |       |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|---------------------------------------|--|
| 31                                                                       | PERINDUSTRIAN | 3.g.1                                                                   | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota                                                                                                  | Jumlah industri kecil tahun n -                                                               |           |      |      | -1,80 | Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja |  |
|                                                                          |               |                                                                         |                                                                                                                                                                   | Jumlah industri kecil tahun n-1                                                               | 3700-3768 | X    | 100% |       |                                       |  |
|                                                                          |               | Jumlah industri kecil tahun n-1 3768                                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |           |      |      |       |                                       |  |
|                                                                          |               | 3.g.2                                                                   | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK                         | Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan                  |           |      |      | 40    | Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerj  |  |
|                                                                          |               |                                                                         |                                                                                                                                                                   | 2                                                                                             | X         | 100% |      |       |                                       |  |
|                                                                          |               | indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 5 |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |           |      |      |       |                                       |  |
|                                                                          |               | 3.g.3                                                                   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait      | Jumlah izin Usaha Industri (IUI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan  |           |      |      | 0     | Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja |  |
|                                                                          |               |                                                                         |                                                                                                                                                                   | 0                                                                                             | X         | 100% |      |       |                                       |  |
|                                                                          |               | Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |           | 1    |      |       |                                       |  |
|                                                                          |               | 3.g.4                                                                   | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin Usaha Industri (IPUI) yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan |           |      |      | 0     | Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja |  |
| 0                                                                        | X             |                                                                         |                                                                                                                                                                   | 100%                                                                                          |           |      |      |       |                                       |  |
| Jumlah Izin Usaha Industri (IPUI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait |               |                                                                         |                                                                                                                                                                   | 1                                                                                             |           |      |      |       |                                       |  |



|    |              |       |                                                                                                                                                                        |                                                                         |     |   |      |     |                                       |                               |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|-----|---------------------------------------|-------------------------------|
|    |              | 3.g.5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan | 0   | x | 100% | 0   | Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja |                               |
|    |              |       |                                                                                                                                                                        | Jumlah izin yang dikeluarkan oleh instansi terkait                      |     |   |      |     |                                       |                               |
| 32 | TRANSMIGRASI | 3.g.6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini                                                                                                              | Keterkinian informasi industri                                          | 100 |   |      | 100 | Dinas Perindustrian, dan Tenaga Kerja | BUKAN KEWENANGAN PEMDA KAMPAR |
|    |              |       |                                                                                                                                                                        | Kelengkapan informasi industri                                          |     |   |      |     |                                       |                               |
|    |              | 3.h   |                                                                                                                                                                        |                                                                         |     |   |      |     |                                       |                               |



## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

### D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

| N<br>O | URUSAN<br>PEMERINTAHAN              | INDIKATOR KINERJA KUNCI<br>OUTCOME |                                                                    | RUMUS                                                                                                                                          | CAPAIAN<br>KINERJA | SUMBER DATA          | KET |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----|
| 1      | <b>PERENCANAAN<br/>DAN KEUANGAN</b> | 4.a.1                              | Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan            | $\frac{\text{Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ $\frac{18675240904}{3075187609061.8}$ | 0,607              | BPKAD                |     |
|        |                                     | 4.a.2                              | Rasio PAD                                                          | $\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan pada APBD}} \times 100\%$ $\frac{437837601600}{3009604498990}$                               | 14,55              | BPKAD, Bapenda & BPS |     |
|        |                                     | 4.a.3                              | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)             | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | LEVEL 3            | Inspektorat          |     |
|        |                                     | 4.a.4                              | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP  | LEVEL 3            | Inspektorat          |     |





|   |           |       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |       |                                  |  |
|---|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|
|   |           | 4.a.5 | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)                                            | <p>Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures</p> $\frac{17824295997}{3075187609061,77} \times 100\%$ <p>jumlah belanja APBD</p>                                                                        | 0,58  | BPKAD                            |  |
|   |           | 4.a.6 | Opini Laporan Keuangan                                                                                              | Opini Laporan Keuangan                                                                                                                                                                                                  | 8 WTP | BPKAD                            |  |
| 2 | PENGADAAN | 4.b.1 | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama | <p>Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n</p> $\frac{0}{1.761} \times 100\%$ <p>Jumlah kontrak keseluruhan tahun n</p> | 0     | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |  |
|   |           | 4.b.2 | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif                                                 | <p>Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif</p> $\frac{4.760}{4.760} \times 100\%$ <p>Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif</p>                                                       | 100   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa |  |



|  |  |       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                          |  |
|--|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--|
|  |  | 4.b.3 | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan                                                                                                  | Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan $\frac{651.057.023.377,00}{2.648.331.282.156,8} \times 100\%$<br>Total belanja Operasional dan Modal                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.458,36 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa & BPKAD |  |
|  |  | 4.b.4 | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) -<br>Jumlah<br>Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n -1)<br>$\frac{609.315.575.775,00-424.474.570.761,00}{424.474.570.761,00} \times 100\%$<br>Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk UMK dan Koperasi Tahun (n-1) | 43,545   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa & BPKAD |  |
|  |  | 4.c.1 | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                                                 | Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas $\frac{1428}{1915} \times 100\%$<br>Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan)                                                                                                                                                                                                 | 74,57    | BKPSDM                                   |  |



|  |                         |       |                                                                                                      |                                                                                                                                               |                      |        |       |        |  |
|--|-------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------|--------|--|
|  |                         | 4.c.2 | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                          | Seluruh jumlah PNS Fungsional (seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan)                                     | 594                  | X 100% | 28,94 | BKPSDM |  |
|  |                         |       |                                                                                                      | Seluruh jumlah PNS (seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan)                                                | 2052                 |        |       |        |  |
|  |                         | 4.c.3 | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Seluruh jumlah PNS Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan) | 580                  | X 100% | 97,6  | BKPSDM |  |
|  |                         |       |                                                                                                      | Seluruh jumlah PNS Fungsional (seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan)                                     | 594                  |        |       |        |  |
|  | 4<br>MANAJEMEN KEUANGAN | 4.d.1 | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                        | Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi - 1                                                                                          | 3.075.187.609.061,77 | X 100% | 2,22  | BPKAD  |  |
|  |                         |       |                                                                                                      | Total belanja APBD dikurangi satu                                                                                                             | 3.145.234.142.913,00 |        |       |        |  |
|  |                         | 4.d.2 | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD                         | Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi - 1                                                                                              | 437.837.601.600      | X 100% | 85,45 | BPKAD  |  |
|  |                         |       |                                                                                                      | Dibagi total PAD dalam APBD - 1                                                                                                               | 3.009.604.498.990    |        |       |        |  |



|   |                                     |       |                                                                                         |                                                                       |                   |        |               |  |
|---|-------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|--|
|   |                                     | 4.d.3 | Assets management                                                                       | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)                          | Ada               | 4      | BPKAD         |  |
|   |                                     |       | 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap?                                 | Ada                                                                   |                   |        |               |  |
|   |                                     |       | 3.Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan?                                        | Ada                                                                   |                   |        |               |  |
|   |                                     |       | 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak);                     | Ada                                                                   |                   |        |               |  |
|   |                                     | 4.d.4 | Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya | Nilai realisasi SiLPA                                                 | 71.240.161.217,33 | 2,52   | BPKAD         |  |
|   |                                     |       |                                                                                         | Total belanja anggaran Tahun sebelumnya                               | 2.826.856.579.502 |        |               |  |
| 5 | TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK | 4.e.1 | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan                             | Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda  | 205.702.420       | 91,317 | Dinas Kominfo |  |
|   |                                     |       |                                                                                         |                                                                       | x 100%            |        |               |  |
|   |                                     | 4.e.2 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)   | Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda | 225.260.000       | 50     | Dinas Kominfo |  |
|   |                                     |       |                                                                                         |                                                                       |                   |        |               |  |
|   |                                     | 4.e.2 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)   | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda                   | 6                 | 50     | Dinas Kominfo |  |
|   |                                     |       |                                                                                         |                                                                       | x 100%            |        |               |  |
|   |                                     | 4.e.2 | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)   | Total jumlah dokumen yang telah dirinci                               | 12                | 50     | Dinas Kominfo |  |
|   |                                     |       |                                                                                         |                                                                       |                   |        |               |  |

## 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Kampar selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kampar melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) tersebut menyajikan penilaian tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kampar melaksanakan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2024 sesuai dengan target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

### 2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

### **2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran didapatkan melalui perbandingan antara Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada tahun berjalan.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPD.

Nilai yang diperoleh dari pencapaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 2.10**  
**Skala Pengukuran Ordinal Pencapaian Kinerja**

| NO | % CAPAIAN KINERJA | PERINGKAT | INTERPRETASI |
|----|-------------------|-----------|--------------|
| 1  | $\geq 85$         | AA        | Memuaskan    |
| 2  | $\geq 75 - 85$    | A         | Baik Sekali  |
| 3  | $\geq 65 - 75$    | B         | Baik         |
| 4  | $\geq 50 - 65$    | CC        | Cukup Baik   |
| 5  | $\geq 30 - 50$    | C         | Agak Kurang  |
| 6  | $\geq 0 - 30$     | D         | Kurang       |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*).

#### Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

### **2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan tahun Sebelumnya dan dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah**

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kampar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. 16 (enam belas) sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2024, memiliki indikator sasaran sebanyak 21 (dua puluh satu), terdiri dari 2 (dua) indikator untuk misi I, 4 (empat) indikator untuk misi II, 6 (enam) indikator untuk misi III, 6 (enam) indikator untuk misi IV dan 3 (tiga) indikator untuk misi V.

**Tabel 2.11**  
**Pencapaian Target Misi**

| No            | Misi         | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian             |              |                          |              |                                                                   |              |                         |              |                   | Kategori Capaian |
|---------------|--------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------|
|               |              |                          | Capaian indikator $\geq 100\%$ |              | Capaian Indikator < 100% |              | Capaian Indikator < 100% Tetapi Lebih Tinggi Dibanding Tahun Lalu |              | Tidak Dapat Diukur (NA) |              | Rata-rata Capaian |                  |
|               |              |                          | Jumlah                         | %            | Jumlah                   | %            | Jumlah                                                            | %            | Jumlah                  | %            | %                 |                  |
| 1.            | Misi Pertama | 2                        | 2                              | 100          | 0                        | 0            | 0                                                                 | 0            | 0                       | 0            | 100               | Memuaskan        |
| 2.            | Misi Kedua   | 4                        | 3                              | 75           | 0                        | 0            | 1                                                                 | 25           | 0                       | 0            | 98,23             | Memuaskan        |
| 3.            | Misi Ketiga  | 6                        | 3                              | 50           | 0                        | 0            | 2                                                                 | 33,33        | 1                       | 16,66        | 95,03             | Memuaskan        |
| 4.            | Misi Keempat | 6                        | 3                              | 50           | 2                        | 33,33        | 0                                                                 | 0            | 1                       | 16,67        | 72,04             | Baik             |
| 5.            | Misi Kelima  | 3                        | 1                              | 33,33        | 1                        | 33,33        | 0                                                                 | 0            | 1                       | 33,33        | 97,05             | Memuaskan        |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>21</b>                | <b>12</b>                      | <b>57,13</b> | <b>3</b>                 | <b>14,29</b> | <b>3</b>                                                          | <b>14,29</b> | <b>3</b>                | <b>14,29</b> | <b>92,47</b>      | <b>Memuaskan</b> |

Selanjutnya analisis pengukuran terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran untuk masing-masing indikator pada tahun 2024 yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kampar



berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

**Misi Pertama :** Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar yang Menjamin Sistem Bermasyarakat dan Bernegara untuk Menghadapi Tantangan Global.

Pada misi pertama terdapat 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Tingkat capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran tersebut mencapai atau melebihi target yang ditetapkan (100%).

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi pertama adalah:

**Sasaran 1** Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis.

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.12**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 1**

| Indikator Kinerja                                              | Target 2023                  | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/<br>Tidak | Target Akhir RPD |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------------|
|                                                                |                              |             |            |           |                    |                  |
| Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan | 100                          | 100         | 100        | 100       | V                  | 100              |
|                                                                | Rata-rata capaian Tahun 2024 |             |            | 100       | Memuaskan          |                  |

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A= Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 1 (satu) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 100%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

#### **Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan**

Indikator persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tahun 2024 terealisasi 100% dari target 100% dengan nilai capaian 100% dengan kategori Memuaskan (AA).

Nilai budaya adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan (*believe*), dan simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Nilai budaya merupakan konsep yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya memainkan peran sentral dalam membentuk identitas, norma dan perilaku individu serta kelompok dalam suatu masyarakat.

Agama adalah salah satu elemen fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya. Hubungan antara agama dan budaya menciptakan interaksi yang saling mempengaruhi, dimana agama dapat membentuk dan memodifikasi budaya, sementara budaya juga dapat mempengaruhi bagaimana agama dipraktikkan dalam masyarakat.

Meskipun agama dan budaya sering kali dapat berinteraksi secara harmonis, ada juga tantangan yang muncul. Beberapa praktik budaya yang tidak sejalan dengan ajaran agama bisa menimbulkan ketegangan. Kurang banyaknya orang yang terjangkau dalam sosialisasi penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis menjadi hambatan/kendala dalam mencapai sasaran indikator ini. Solusi yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala/permasalahan ini adalah dengan memperbanyak target sosialisasi. Indikator persentase nilai budaya agamis yang

dikembangkan dan diamankan tahun 2024 dilaksanakan dengan anggaran Rp. 131.818.300,- dengan realisasi sebesar 95,27% atau terealisasi sebesar Rp. 125.585.900,-.

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 2</b> | <b>Terciptanya toleransi antar multikultur.</b> |
|------------------|-------------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.13**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 1 Sasaran 2**

| Indikator Kinerja | Target 2023                  | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/ | Target Akhir RPD |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------------|
|                   |                              |             |            |           | Tidak     |                  |
| Indeks toleransi  | B                            | B           | B          | 100       | V         | B                |
|                   | Rata-rata capaian Tahun 2024 |             |            | 100       | Memuaskan |                  |

Keterangan:

V = tercapai

X = tidak tercapai

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi sudah melebihi realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 100%.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

### Indeks Toleransi

Indikator kinerja Indeks Toleransi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk tahun 2024 masuk kategori B dengan target B juga. Indikator kinerja ini terealisasi 100% dari target atau dengan nilai capaian 100% dengan kategori Memuaskan (AA). Capaian indikator ini melalui program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan beragama.

Toleransi merupakan prinsip utama dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan mempraktekan prinsip-prinsip toleransi kepada sesama, kehidupan bermasyarakat akan terasa lebih terjamin damai dan aman dengan minimnya potensi konflik yang dipicu oleh perbedaan dikalangan masyarakat. Toleransi menjadi penting mengingat bahwa Indonesia merupakan negara multikultural dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Nilai-nilai toleransi sangat dibutuhkan sebagai landasan sosial dan jaminan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Isu intoleransi berkembang seiring dengan berjalannya proses demokratisasi di Indonesia.

Masyarakat Kabupaten Kampar mayoritas bersuku Melayu dan beragama Islam, walaupun kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kabupaten Kampar cukup harmonis tetapi tetap saja sering terjadi fanatisme aliran agama tertentu yang dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat. Rentannya konflik antar umat beragama di masyarakat diakibatkan oleh fanatisme ke agamaan dan kurangnya pengetahuan serta sikap toleransi antar umat beragama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) disusun berdasarkan indikator penilaian seperti Toleransi, Kerjasama, dan Kesenjangan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- dari pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000, atau terealisasi sebesar 100%.

|                     |                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi Kedua :</b> | <b>Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat</b> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pada misi kedua terdapat 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (75%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (25%) masih dibawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kedua adalah:

|                  |                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 1</b> | <b>Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan</b> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 1**

| Indikator Kinerja | Target 2023                  | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/ | Target Akhir RPD |
|-------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------------|
|                   |                              |             |            |           | Tidak     |                  |
| SAKIP             | Nilai BB                     | Nilai BB    | B          | 90        | ^         | Nilai BB         |
| Opini BPK         | WTP                          | WTP         | WTP        | 100       | V         | WTP              |
|                   | Rata-rata capaian Tahun 2024 |             |            | 95        | Memuaskan |                  |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 95%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

### **SAKIP**

Indikator kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2024 belum terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kabupaten Kampar memperoleh predikat B dengan nilai 63,08. Hal tersebut menunjukan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu Implementasi SAKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Meskipun indikator kinerja ini belum terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, namun mengalami kenaikan pada nilai hasil evaluasi.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

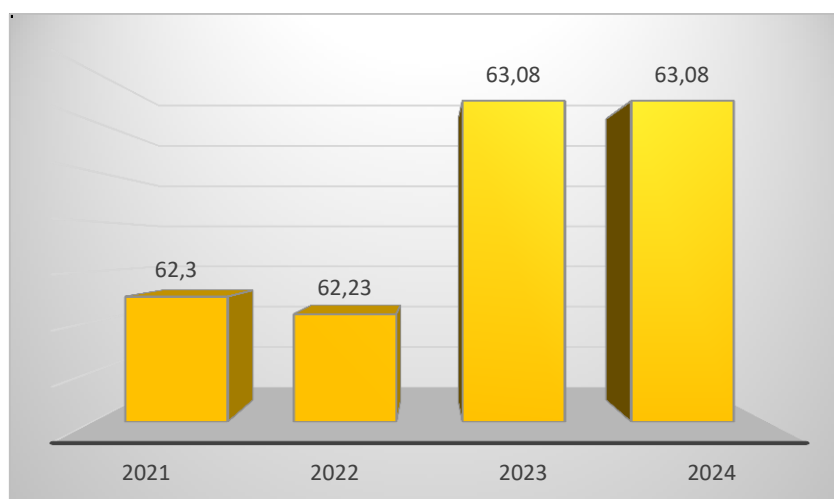
| No | Komponen yang Dinilai                   | Bobot      | Nilai        |              |
|----|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|    |                                         |            | 2023         | 2024         |
| 1. | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 23,09        | 23,27        |
| 2. | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 17,56        | 17,64        |
| 3. | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 9,61         | 9,80         |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 12,29        | 12,37        |
|    | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>62,55</b> | <b>63,08</b> |
|    | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |            | <b>B</b>     | <b>B</b>     |

Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui Tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Penyajian Laporan Kinerja perlu ditingkatkan kualitas dengan analisis yang mendalam dan komprehensif serta memberikan informasi yang memadai tentang strategi perbaikan kinerja kedepan.

Capaian nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kampar dari tahun 2021 hingga 2024 secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

**Grafik 2. 6**

**Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024**



## Opini BPK

Indikator kinerja Opini BPK terealisasi dengan capaian 100%. Sama dengan tahun sebelumnya, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Capaian opini tersebut diperoleh melalui meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah setiap tahun Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan data, Pemerintah Kabupaten Kampar sejak tahun 2017 menunjukkan prestasi yang baik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan Pemerintah Daerah dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan Pemerintah Daerah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan Keputusan. Pencapaian pelaksanaan indikator kinerja ini didukung oleh program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Sasaran 2</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b> |
|------------------|-----------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.15**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 2 Sasaran 2**

| Indikator Kinerja                | Target 2023                  | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian     | Tercapai/        | Target Akhir RPJMD |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------------|------------------|--------------------|
|                                  |                              |             |            |               | Tidak            |                    |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87,44                        | 88,10       | 90,68      | 102,93        | V                | 89,45              |
| Indeks SPBE                      | C                            | C           | B          | 100           | V                |                    |
|                                  | Rata-rata capaian Tahun 2024 |             |            | <b>101,46</b> | <b>Memuaskan</b> |                    |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 101,46%.

Penjelasan untuk indikator kinerja diatas adalah sebagai berikut:

### **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Kampar Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan selama satu periode mulai Januari hingga November 2024, sebanyak 43 OPD telah menyampaikan laporannya. Namun terdapat 10 OPD yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.

Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kampar Tahun 2024 terealisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 88,10 poin dengan realisasi 90,68 poin atau tercapai sebanyak 102,93%. Pada perencanaan lima tahunan, capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Kampar tahun 2024 sudah melebihi target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar yaitu sebesar 90,68 poin dari target RPD sebesar 89,45 point.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai Upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga November 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

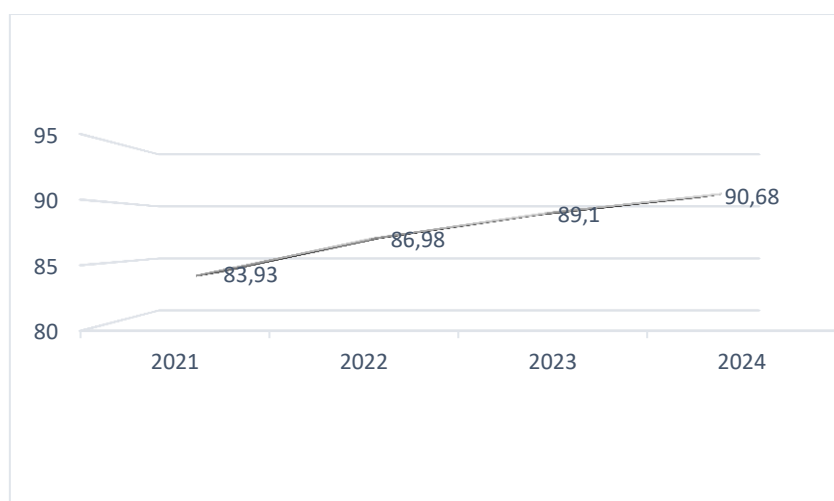


1. Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM rata-rata yaitu 90,68. Nilai IKM di lingkup Kabupaten Kampar menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024.
2. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 43 OPD telah menyampaikan laporannya. Namun terdapat 10 OPD yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.
3. dari seluruh OPD yang telah melaporkan hasil SKM, telah terdapat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan. Inovasi pelayanan publik dalam bentuk terobosan-terobosan pelayanan diperlukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar kepuasan masyarakat meningkat.

Jika melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik, trend tingkat kepuasan penerima layanan di lingkup Pemerintah Kampar dapat dilihat melalui grafik berikut:

**Grafik 2.7**

**Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024**



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2021 hingga 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar.

## Indeks SPBE

Realisasi Indikator kinerja indeks SPBE tahun 2024 memperoleh predikat B dengan nilai 2,96. Bila dibandingkan dengan target, capaian indikator kinerja ini melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu predikat C. Capaian tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan *e-government* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi Pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdampak pada integrasi sistem. implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata Kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar memiliki beberapa kekuatan utama dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebijakan manajemen data yang diatur melalui Keputusan Bupati Kampar No. 555-650/XI/2022 telah mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, referensi, basis data, kualitas data, hingga interoperabilitas data. Tim Koordinasi SPBE juga menjadi keunggulan, karena telah terbentuk, melaksanakan tugasnya, dan berkoordinasi dengan seluruh perangkat daerah. Selain itu, layanan pusat data tersedia dan sudah dimanfaatkan oleh perangkat daerah, meskipun SOP penggunaannya belum disahkan. Dalam aspek layanan administrasi dan layanan publik berbasis elektronik, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar menunjukkan kekuatan melalui penerapan berbagai aplikasi seperti SIPD, SPSE, SIASN, SATU DATA, SIMPAD, dan aplikasi layanan

perizinan terpadu berbasis *cloud*. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan layanan berbasis elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar masih menghadapi beberapa kelemahan dalam penerapan SPBE meskipun telah menunjukkan berbagai pencapaian. Dokumen Arsitektur SPBE yang dimiliki hanya mencakup sebagian domain, sementara domain keamanan SPBE belum terintegrasi, dan Peta Rencana SPBE yang telah disahkan belum tersedia. Dalam hal inovasi proses bisnis, belum ditemukan bukti adanya perbaikan proses bisnis yang signifikan. Sistem Penghubung Layanan juga baru diterapkan di sebagian unit kerja, menunjukkan keterbatasan dalam cakupan implementasi. Selain itu, manajemen risiko, keamanan informasi, data, SDM SPBE, aset TIK, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE masih belum sepenuhnya diterapkan. Audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE juga belum dilaksanakan. Dengan kelemahan-kelemahan ini, terdapat ruang besar untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan manajemen SPBE agar tercapai integrasi layanan yang lebih baik di seluruh perangkat daerah.

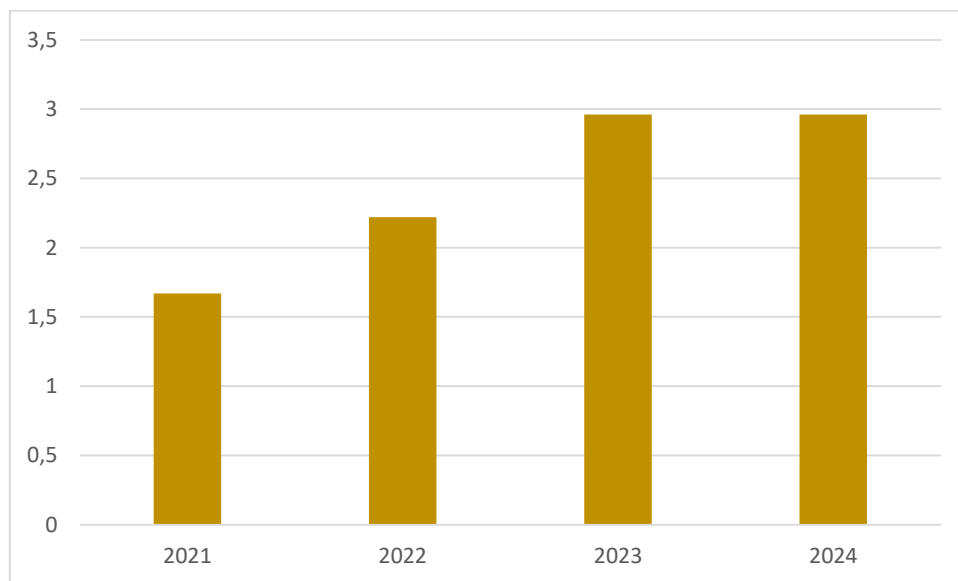
Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar patut diapresiasi atas pencapaian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama melalui kebijakan manajemen data yang diatur dalam Keputusan Bupati Kampar No. 555-650/XI/2022, yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data induk, referensi, hingga interoperabilitas data. Keberadaan Tim Koordinasi SPBE yang aktif dan layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah menunjukkan langkah positif dalam mendukung integrasi dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Selain itu, penerapan berbagai aplikasi seperti SIPD, SPSE, SIASN, SATU DATA, SIMPAD, dan layanan perizinan berbasis *cloud* mencerminkan komitmen terhadap digitalisasi layanan publik dan administrasi pemerintahan. Namun, untuk lebih meningkatkan penerapan SPBE, disarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar segera melengkapi Peta Rencana SPBE yang terintegrasi dan disahkan, serta memastikan domain keamanan SPBE tercakup dalam dokumen Arsitektur

SPBE. Selain itu, perlu dilakukan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE secara rutin untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan sistem. Implementasi manajemen risiko, manajemen aset TIK,

Capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar 4 (empat) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

**Grafik 2.8**

**Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2021-2024**



**Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan**

Pada misi ketiga terdapat 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 (enam) indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (50%) mencapai atau melebihi target.
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran (33,33%) masih dibawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,67%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A)

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi ketiga adalah:

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 1</b> | <b>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</b> |
|------------------|--------------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.16**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 1**

| Indikator Kinerja            | Target 2023 | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai / | Target Akhir RPD |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------------|
|                              |             |             |            |           | Tidak      |                  |
| Angka harapan hidup (tahun)  | 71,04%      | 71,19%      | 89,19      | 125,28    | V          | 71,49            |
| Rata-Rata Capaian Tahun 2024 |             |             |            |           | 125,28%    | Memuaskan        |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 1 (satu) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 125,28%.

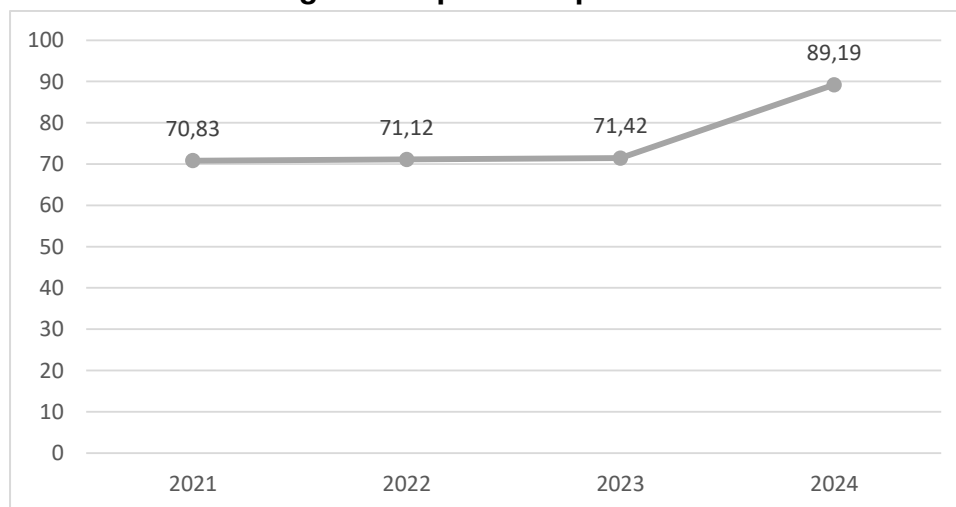
Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

#### **Angka Harapan Hidup**

Indikator kinerja angka harapan hidup untuk tahun 2024 terealisasi 89,19% dari target 71,19% dengan nilai capaian 125,28% dengan kategori Memuaskan (AA). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian indikator kinerja ini mengalami kenaikan. Capaian angka harapan hidup dari tahun 2021-2024 berturut-turut

yaitu 70,83%, 71,12%, 71,42%, dan 89,19. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

**Grafik 2.9**  
**Angka Harapan Hidup**



Dalam mencapai sasaran angka harapan hidup mendapat hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Pemerataan sumber daya dan pendistribusian tenaga kesehatan yang belum merata.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
3. Keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan, terutama Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Kec. Kampar Kiri Hulu, serta buruknya sarana jalan menuju fasilitas kesehatan.
4. Kerjasama dan koordinasi lintas program dan lintas sektor yang masih belum maksimal.

Dari hambatan/kendala yang ada diupayakan solusi untuk mengatasinya antara lain:

1. Pendistribusian tenaga kesehatan secara merata sekaligus peningkatan kompetensi SDM Kesehatan
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil
3. Melakukan kampanye kesehatan berbasis teknologi informasi serta edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang pentingnya kesehatan dengan melibatkan kelompok masyarakat, komunitas dan peran keluarga

4. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan, meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan. Pemerintah maupun perekonomian masyarakat dan sebagainya.

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 2</b> | <b>Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.17**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 2**

| Indikator Kinerja              | Target 2023                  | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/<br>Tidak | Target Akhir RPD |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------------|
|                                |                              |             |            |           |                    |                  |
| Rata-rata lama sekolah (tahun) | 9,53                         | 9,63        | 9,58       | 99,48     | ^                  | 9,82             |
| Harapan lama sekolah (tahun)   | 14,02%                       | 14,14       | 13,61      | 96,25     | ^                  | 14,40            |
|                                | Rata-Rata Capaian Tahun 2024 |             |            |           | 97,86%             | Memuaskan        |

n:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas dapat dilihat capaian sasaran 2 (dua) dengan kategori Memuaskan (AA) dengan rata-rata capaian 97,86%.

Penjelasan untuk indicator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

### Angka rata-rata lama sekolah

Diperoleh data bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kampar tahun 2024 adalah 9,58 Tahun, artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar bersekolah selama 9,58 tahun atau setara tamat kelas 9 SMP. Rumus Angka Rata-rata lama sekolah adalah:

$$ARLS = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas sedang sekolah atau sudah berijazah}}{\text{Jumlah penduduk x lama pendidikan yang dihabiskan}}$$

Angka rata-rata lama sekolah adalah kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, angka rata-rata lama sekolah belum mencapai target yang telah ditetapkan, dari target sebesar 9,63 tahun terealisasi sebesar 9,48 tahun dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,48%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi capaian kinerja indikator angka rata-rata lama sekolah ini mengalami peningkatan.

### Harapan lama sekolah

Realisasi harapan lama sekolah di Kabupaten Kampar pada tahun 2024 adalah 13,61% dari target sebesar 14,14% atau dengan capaian 97,00%. Ini berarti anak-anak Indonesia yang berusia 7 tahun memiliki harapan menempuh [pendidikan](#) hingga Diploma I.

Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi Harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.



Tujuan Harapan Lama Sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan system pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai setiap anak.

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>Sasaran 3</b> | <b>Berkurangnya tingkat kriminalitas</b> |
|------------------|------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.18**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 3**

| Indikator Kinerja                   | Target 2023 | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/ | Target Akhir RPJMD |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                     |             |             |            |           | Tidak     |                    |
| Persentase pengurangan kriminalitas | -0,30%      | 0,25        | 0,38       | 152       | V         | 3,09               |
| Rata-Rata Capaian Tahun 2024        |             |             |            |           | 152       | Memuaskan          |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran berkurangnya tingkat kriminalitas berdasarkan data penyelesaian konflik mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

### **Persentase Pengurangan Kriminalitas**

Indikator Persentase pengurangan kriminalitas terealisasi sebesar 38%. Tercapinya target ini karena adanya upaya untuk membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Tim Terpadu

Penanganan Konflik Sosial meminta kepada pemimpin dari masing-masing pihak untuk tidak memperburuk situasi konflik dan saling berkomunikasi untuk mencegah konflik besar yang terjadi. Dari 24 konflik yang ada, termediasi sebanyak 9 konflik. Hambatan yang dialami adalah sulitnya membuat kesepakatan antar kelompok yang berkonflik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kriminalitas antara lain: pendidikan, ekonomi, dan agama. Hambatan dalam penanganan tingkat kriminalitas ini adalah tidak terdeteksinya ancaman kriminalitas.

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| <b>Sasaran 4</b> | <b>Meningkatnya pengamalan agama</b> |
|------------------|--------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.19**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 4**

| Indikator Kinerja                            | Target 2023 | Target 2024                  | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/ | Target Akhir RPJMD |
|----------------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                              |             |                              |            |           | Tidak     |                    |
| Persentase indeks melek AlQuran (Kitab Suci) | 68,45%      | 69,81                        | N/A        | N/A       | N/A       | 72,53              |
|                                              |             | Rata-Rata Capaian Tahun 2024 |            |           | N/A       |                    |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

N/A = Tidak tersedia data

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran meningkatnya pengamalan agama tidak didapat data realisasinya.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

### Persentase Indeks Melek Al-quran

Indikator Persentase indeks melek Al-quran Tahun 2024 tidak didapat data realisasi capaiannya.

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 5</b> | <b>Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.20**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 3 Sasaran 5**

| Indikator Kinerja                                 | Target 2023 | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/ | Target Akhir RPJMD |
|---------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------------|
|                                                   |             |             |            |           | Tidak     |                    |
| Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana agama | 100%        | 100%        | 100%       | 100       | V         | 100                |
| Rata-Rata Capaian Tahun 2024                      |             |             |            |           | 100       | Memuaskan          |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat diketahui realisasi dari sasaran meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama mencapai target yang telah ditetapkan.

Penjelasan untuk indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

### Persentase Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Agama

Indikator Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana agama Tahun 2024 terealisasi sebesar 100%. Tercapainya target ini karena adanya upaya untuk selalu memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana rumah ibadah.

**Misi Keempat :**

Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, argo industri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat dan Pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional

Pada misi keempat terdapat 4 sasaran dengan 6 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 6 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran (50%) mencapai atau melebihi target;
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak mencapai target;
3. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran (16,67%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A).

Pengukuran kinerja pencapaian sasaran terhadap misi keempat pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 1</b> | <b>Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah.</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.21**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 1**

| Indikator Kinerja                    | Target 2023 | Target 2023 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/ Tidak | Target Akhir RPJMD |
|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 1. Kontribusi PDRB sektor pertanian  | 34.27       | 34,39       | 32,34      | 94%       | V               |                    |
| 2. Kontribusi PDRB sektor industri   | 34.13%      | 32,37       | 30,83      | 95%       | V               |                    |
| 3. Kontribusi PDRB sektor Pariwisata | NA          | 0.96        | 0.09       | 9,4%      | X               |                    |
| Rata-Rata Capaian Tahun 2024         |             |             |            |           | 66,13%          | Baik               |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatnya peryumbuhan sektor unggulan daerah, ada yang tercapai dan masih ada yang belum terelisasi karna tidak ada data nilai capaian 66,13% dengan kategori Baik (B). Secara umum dari realisasi ke tiga indikator kinerja selama tahun 2024 menunjukkan bahwa ke dua indikator kinerja mencapai target.

### **Kontribusi PDRB sektor Pertanian**

Indikator kinerja Kontribusi PDRB sektor Pertanian Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2024 terealisasi sebesar 32,34% dari target sebesar 34,39% atau dengan capaian 94%. Capaian indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan 5%.

Peranan sektor pertanian bukan saja terhadap ketahanan pangan, tetapi juga memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemberantasan kemiskinan, sumber pendapatan, serta perekonomian Regional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil pendapatan disektor pertanian dapat di ukur dari nilai PDRB yang dihasilkan sektor tersebut.

Penurunan PDRB sektor pertanian terus terjadi akibat penurunan output dari berbagai lapangan usaha. Salah satu lapangan usaha yang mengalami penurunan berarti adalah sektor pertanian. Sektor pertanian, pada tahun 2004-2025, memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kabupaten Kampar.

Terjadinya penurunan PDRB sektor pertanian diakibatkan Tingkat alih fungsi lahan pertanian semakin tinggi Laju penggunaan lahan akan semakin meningkat seiring dengan pembangunan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya permintaan akan lahan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Proses alih fungsi lahan secara langsung dan tidak langsung ditentukan oleh dua faktor, yaitu sistem kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dan pemerintah dan sistem non kelembagaan yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat.

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi Terjadinya penurunan PDRB sektor pertanian Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Potensi Lahan sawah Berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian mencegah ahli fungsi lahan dengan menerapkan kebijakan ketat serta mendorong pertanian vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan.

### **Kontribusi PDRB Sektor Industri**

Indikator Kontribusi PDRB Sektor Industri tahun 2024 terealisasi sebanyak 30.83 dari target 32,37 atau dengan capaian 95%. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa indikator tersebut dicapai melalui pelaksanaan 3 (Tiga) kegiatan yaitu: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Adapun hambatan yang terjadi Kontribusi PDRB Sektor Industri tahun 2024:

1. Akurasi data tentang pelaku IKM Keterbatasan Infrastruktur
2. Ketergantungan Bahan baku Impor
3. Peraturan Regulasi yang Kompleks
4. rendahnya pertumbuhan industri berbasis sumber daya lokal
5. Belum optimalnya pembangunan perwilayahan industri

Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi Kontribusi PDRB Sektor Industri pemerintah berupa dalam pengembangan industri sesuai arah kebijakan RPIK 2020-2040 dan akan dilakukan pembinaan pelaku industri dalam hal produksi maupun pemasaran pengembangan sumber daya lokal dengan pelatihan- pelatihan untuk kebutuhan industri, berupa penigkatkan kualitas yang terampil, relevan sesuai dengan segmen pasar dan dunia Industri.

Menyederhanakan aturan dan regulasi untuk lebih memudahkan pelaku IKM.

### **Kontribusi PDRB sektor Pariwisata**

Indikator Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata tahun 2024 terealisasi sebanyak 9,4% dari target 0.96%. Dari data diatas, dapat dilihat bahwa indikator tersebut tidak mencapai target.

Tidak tercapai nya Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata karena Kurang Kesadaran Masyarakat terhadap Taat Pajak. Kesadaran pajak dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan ketaatan warga negara terhadap kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Meskipun kesadaran ini penting dalam pembangunan daerah, sering kali terjadi rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak atau tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pengelolaan pajak oleh pemerintah. Kesadaran pajak sangat penting karena pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah.

Oleh karena itu, Solusi untuk mengatasi tantangan dalam meningkatkan kesadaran pajak dan menemukan solusi yang efektif akan diadakan sosialisasi berkelanjutan mengenai ketaatan pajak. Edukasi dan sosialisasi perpajakan, transparansi penggunaan dana pajak, memberikan insentif bagi wajib pajak yang patuh, mengatasi hambatan dalam pembayaran pajak, dan penegakan hukum yang tegas adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| <b>Sasaran 2</b> | <b>Meningkatnya investasi daerah.</b> |
|------------------|---------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.22**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 2**

| Indikator Kinerja        | Target 2023                  | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/Tidak | Target Akhir RPJMD |
|--------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1. Pertumbuhan investasi | 2,87                         | 3.83        | 5,06       | 132%      | V              |                    |
|                          | Rata-Rata Capaian Tahun 2024 |             |            |           | 132%           | Memuaskan          |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, rata-rata capaian sasaran Meningkatkan Investasi Daerah dengan nilai capaian 132% dengan kategori Memuaskan (AA). Secara umum dari realisasi indikator kinerja selama tahun 2024 menunjukkan bahwa indikator kinerja mencapai target yang memuaskan.

Indikator kinerja pertumbuhan investasi Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2024 terealisasi sebesar 5,06% dari target sebesar 3,83% atau dengan capaian 132%. Capaian indikator kinerja ini bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan, dimana realisasi tahun 2024 sebesar Rp.7.140.000.000.000 sedangkan 2023 hanya sebesar Rp. 10.853.507.220.000.

Berdasarkan hasil resmi DPM-PTSP Pemerintah Provinsi Riau grafik realisasi investasi di Kabupaten Kampar meningkat. Realisasi Investasi Kabupaten Kampar dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2024 menduduki peringkat VI dan masih optimis untuk tahun 2025 dan seterusnya realisasi investasi akan tumbuh dan meningkat di Kabupaten Kampar. Meningkatkan Pengawasan Penanaman Modal dan Bimbingan Teknis ke pelaku usaha terkait Regulasi Penanaman Modal dan Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).



Kendala yang terjadi Pertumbuhan Investasi Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha Terkait Regulasi Penanaman Modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), dan tidak patuhnya pelaku usaha terhadap Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| <b>Sasaran 3</b> | <b>Menurunnya TPT</b> |
|------------------|-----------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.23**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 3**

| Indikator Kinerja                                               | Target 2023                  | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/Tidak | Target Akhir RPJMD |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1. Persentase penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah | 3.99%                        | - 1,69%     | 0,29%      | 18%       | X              |                    |
|                                                                 | Rata-Rata Capaian Tahun 2024 |             |            |           | 18%            | Kurang             |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat capaian sasaran Menurunnya TPT dengan kategori Kurang dengan rata-rata capaian 18%. Realisasi capaian sasaran menurunnya TPT tahun 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Persentase penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah tersebut tidak tercapai karna Pembangunan ekonomi yang memerlukan perhatian khusus dari

pemerintah dan masyarakat. Kondisi ini terjadi Ketika seseorang yang siap dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Fenomena pengangguran terbuka berdampak langsung pada angka statistik tenaga kerja, yang menunjukkan kesehatan ekonomi suatu daerah.

Menurunkan tingkat pengangguran masih menjadi tantangan berat adapun berbagai faktor yang saling terkait, antara lain:

1. sulitnya mendapat informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan.
2. Pelatihan Kerja belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan tenaga kerja untuk menjadi terampil dan/atau kompeten.
3. Penyerapan tenaga kerja disektor formal maupun Informal masih relatif terbatas.
4. Kasus Hubungan Industrial yang terus terjadi serta penyelesaian kasus Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama masih belum optimal.
5. Belum adanya Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) belum dilaksanakan.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya TPT langkah strategis untuk mengatasi TPT dapat dilakukan, Meningkatkan Kompetensi pencari kerja sesuai kebutuhan pasar kerja/lowongan kerja dan Melakukan pembinaan terhadap sistem dan kelembagaan hubungan Industrial. upaya penyediaan jejaring informasi pasar kerja dengan berbagai pihak yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja serta Melaksanakan program jaminan kerja, bertujuan memberi perlindungan finansial, meningkatkan kualitas hidup, persiapan menghadapi tantangan baru, bagi yang terdampak kehilangan pekerjaan serta Komitmen Pemerintah terhadap Program Perlindungan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), berupa Uang tunai, konsling, informasi pasar kerja, dan pelatihan bagi Pekerja atau Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

#### **Sasaran 4 Menurunnya Tingkat Kemiskinan**

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.24**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 4 Sasaran 4**

| Indikator Kinerja                          | Target 2023                  | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/Tidak | Target Akhir RPJMD |
|--------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|----------------|--------------------|
| 1. Persentase penurunan Tingkat Kemiskinan | -3,96                        | -3,42       | N/A        | N/A       | N/A            |                    |
|                                            | Rata-Rata Capaian Tahun 2024 |             |            |           | N/A            | Memuaskan          |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, capaian indikator Persentase penurunan tingkat kemiskinan ini tidak bisa dihitung karena tidak ada data.

**Misi Kelima : Mewujudkan Pembangunan Kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkelanjutan**

Pada misi kelima terdapat 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran yang digunakan. Penjelasan tingkat capaian 3 indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak mencapai target;
2. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) mencapai atau melebihi target;

3. Sebanyak 1 indikator kinerja sasaran (33,33%) tidak dapat dinilai karena tidak tersedia data (N/A)

Evaluasi terhadap masing-masing kinerja sasaran yang berada pada misi kelima adalah:

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 1</b> | <b>Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.25**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 1**

| Indikator Kinerja                       | Target 2023 | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/<br>Tidak | Target Akhir RPD |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------------|
|                                         |             |             |            |           |                    |                  |
| Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang | 80,42       | 85,31       | 73,12      | 85,71     | X                  | 95,10            |
| Rata-rata capaian Tahun 2024            |             |             |            | 85,71     | Memuaskan          |                  |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang mencapai hasil 85,71% dengan kategori memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

#### **Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2024 adalah 85,31% dengan realisasi yang hanya mencapai sebesar 73,12% atau mendapat capaian persentase sebesar 85,71%. Bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi target indikator ini mengalami sedikit penurunan. Adanya beberapa hambatan dalam mencapai sasaran ini adalah pola ruang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak adanya anggaran yang tersedia, permasalahan sertifikat yang belum terbit, batas tanah yang belum jelas dengan tumpang tindih kepemilikan yang tidak memiliki legalitas, adanya Masyarakat yang merasa memiliki hak atas tanah yang menolak pengelolaan oleh pemerintah, tidak memiliki legalitas kepemilikan, dan kurangnya koordinasi antar Lembaga pemerintah daerah, KLHK, dan BPN terhadap data dan pemetaan sehingga sering terjadi tumpang tindih kepemilikan. Beberapa Solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan itu perlu adanya anggaran dana untuk bidang tata ruang dan adanya anggaran untuk Ganti kerugian. Selainnya itu perlua adanya koordinasi antar instansi terutama BPN dan Pemerintah Daerah dalam percepatan legalisasi tanah, adanya pendekatan social untuk menghindari konflik dengan Masyarakat dan mempercepat proses legalisasi melalui regulasi yang lebih fleksibel dan prosedur yang jelas.

Indikator kinerja Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan meliputi empat program, yaitu program penyelenggaraan penataan ruang, program penyelesaian Ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, program pengelolaan tanah kosong dan program pengelolaan izin membuka tanah dengan anggaran total 5.890.903.200 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 21,45%.

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Sasaran 2</b> | <b>Meningkatnya Pelayanan Transportasi</b> |
|------------------|--------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 2. 26**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 2**

| Indikator Kinerja                             | Target 2023 | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/ | Target Akhir RPD |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------------|
|                                               |             |             |            |           | Tidak     |                  |
| Persentase peningkatan pelayanan transportasi | 60,04       | 74,20       | 80,40      | 108,4     | V         | 100              |
| Rata-rata capaian Tahun 2024                  |             |             |            | 108,4     | Memuaskan |                  |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Persentase peningkatan pelayanan transportasi mencapai hasil 108,4% dengan kategori Memuaskan (AA).

Penjelasan indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut:

#### **Persentase peningkatan pelayanan transportasi**

Dari data di atas dapat dilihat bahwa target indikator persentase kesesuaian pemanfaatan ruang tahun 2024 adalah 74,20% dengan realisasi mencapai sebesar 80,40% atau mendapat capaian persentase sebesar 108,4%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi target indikator ini mengalami kenaikan.

Dalam pelaksanaan tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar mengalami beberapa hambatan/ kendala dalam pencapaian target seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keselamatan transportasi dan kurangnya minat penggunaan angkutan umum. Walaupun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berusaha menyediakan sarana dan prasarana pendukung di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor dan memaksimalkan setiap pelayanan yang ada di terminal agar selalu tercapainya target

kinerja. Selain itu akan memperbanyak kegiatan sosialisasi tentang keselamatan transportasi dan angkutan umum dan akan menyediakan sarana dan prasarana angkutan umum.

Dari data realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berjalan dengan baik dengan penyerapan anggaran sebesar 89,49% atau senilai dengan Rp. 37.311.227.152.

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sasaran 3</b> | <b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam</b> |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Dalam pencapaian sasaran ini, Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut :

**Tabel 2.27**  
**Evaluasi Pencapaian Misi 5 Sasaran 3**

| Indikator Kinerja                                            | Target 2023 | Target 2024 | Hasil 2024 | % Capaian | Tercapai/<br>Tidak | Target Akhir RPD |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------------|
|                                                              |             |             |            |           |                    |                  |
| Penurunan emisi GRK terhadap baseline (GgCO <sub>2</sub> -e) | 35.940,55   | 34.102,87   | N/A        | N/A       | N/A                | 100              |
| Rata-rata capaian Tahun 2024                                 |             |             |            | N/A       | N/A                |                  |

Keterangan:

V = Tercapai.

X = Tidak tercapai.

^ = Pencapaian hasil masih di bawah target tetapi telah melebihi realisasi tahun sebelumnya

N/A= Tidak tersedia data.

Berdasarkan data yang ada pada tabel di atas, capaian indikator Penurunan Emisi GRK terhadap baseline (GgCO<sub>2</sub>-e) ini tidak bisa dihitung karena kegiatan ini belum pernah dilaksanakan dan juga belum adanya dana yang tersedia dari tahun sebelumnya.

### 2.3.4 Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan

Target kinerja keuangan secara keseluruhan mencakup unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan. Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2024, dengan uraian sebagai berikut:

#### 1. Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Bupati Kampar Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Target Pendapatan Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 3.174.719.555.451,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 3.008.917.736.831,00 atau mencapai 94,78 persen. Rincian Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.20.

**Tabel 3.28**  
**Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar**  
**Tahun 2024**

| NO        | URAIAN                                                       | TAHUN ANGGARAN 2024         |                             |               | REALISASI 2023              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|           |                                                              | ANGGARAN                    | REALISASI                   | %             |                             |
| <b>I</b>  | <b>PENDAPATAN</b>                                            | <b>2.805.811.127.502,00</b> | <b>3.008.917.736.831,00</b> | <b>94,78</b>  | <b>2.734.805.625.683,08</b> |
| <b>1.</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                | <b>462.827.600.519,00</b>   | <b>437.120.839.441,00</b>   | <b>94,45</b>  | <b>298.626.546.420,08</b>   |
|           | Pendapatan Pajak Daerah                                      | 171.385.188.647,00          | 155.125.662.992             | 90,51         | 153.800.441.758,00          |
|           | Pendapatan Retribusi Daerah                                  | 11.251.637.000,00           | 9.779.786.000,00            | 86,92         | 12.315.324.270,00           |
|           | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 170.307.027.807,00          | 170.157.029.091,00          | 99,91         | 36.299.309.804,00           |
|           | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                    | 109.883.747.065,00          | 102.058.361.358,00          | 92,88         | 96.211.470.588,08           |
| <b>2.</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                   | <b>2.709.653.954.932,00</b> | <b>2.569.554.788.349,00</b> | <b>94,83</b>  | <b>2.434.058.392.989,00</b> |
|           | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                         | 2.475.823.201.000,00        | 2.426.554.852.432,00        | 98,01         | 2.133.499.528.840,00        |
|           | Pendapatan Transfer Antar Daerah                             | 233.830.753.932,00          | 142.999.935.917,00          | 61,16         | 300.558.864.149,00          |
| <b>3.</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                  | <b>2.238.000.000,00</b>     | <b>2.242.109.041,00</b>     | <b>100,18</b> | <b>2.120.686.274,00</b>     |
|           | Pendapatan Hibah                                             | 2.238.000.000,00            | 2.242.109.041               | 100,18        | 2.120.686.274,00            |
|           | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                                     | <b>3.174.719.555.451,00</b> | <b>3.008.917.736.831,00</b> | <b>94,78</b>  | <b>2.734.805.625.683,08</b> |

Sumber Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Untuk Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 dari Anggaran sebesar Rp. **437.120.839.441,00** dari Rp. **462.827.600.519,00** atau mencapai **94,45%**, sementara realisasi yang tertinggi bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari anggaran sebesar Rp. 2.238.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.242.109.041,00 dengan persentase sebesar 100,18% selanjutnya realisasi terendah yaitu dari Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 233.830.753.932,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 142.999.935.917,00 dengan kata lain sebesar 61,16 %.

## 2. Permasalahan dan solusi

Perolehan target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Beberapa permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam rangka upaya pencapaian target pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut :

Secara umum pokok permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu :

- 1) Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada pajak daerah;
- 2) Dana perimbangan yang masih bersifat Given dari Pemerintah Pusat;
- 3) Ekstensifikasi pendapatan daerah masih terkendala oleh kewenangan dan kebijakan Pemerintah Pusat;
- 4) Porsi PAD terhadap total pendapatan masih rendah dan belum optimal;
- 5) Adanya perubahan kewenangan terkait Pajak Asli Daerah;
- 6) Belum optimalnya penegakan peraturan tentang Pajak Asli Daerah;
- 7) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Asli Daerah;
- 8) Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum dapat digali.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas, berikut upaya-upaya pemecahan masalah adalah:

- 1) Mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah;
- 2) Membangun program dan kegiatan peningkatan kapasitas dan pengembangan pengelolaan pendapatan sebagai penunjang bagi pelaksanaan pengelolaan pendapatan yang tepat sasaran;
- 3) Peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
- 4) Peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
- 5) Perlu dilaksanakan mapping potensi retribusi daerah secara komprehensif sesuai kondisi riil yang ada sehingga target yang ditetapkan mengacu data potensi yang ada;
- 6) Perlu dioptimalkan pengelolaan BUMD dengan meningkatkan modal BUMD melalui penyertaan modal dari pemerintah daerah yang besarnya berdasarkan kajian sesuai ketentuan yang ada;
- 7) Dilaksanakan penegakan Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah secara tegas dan konsisten terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Pemeriksaan terhadap wajib pajak, dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, disamping pengenaan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

### **3. Target dan Realisasi Belanja**

Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 3.075.185.723.117,71 atau 92,84 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 3.312.217.677.835,00 dimana terdapat sisa anggaran lebih sebesar Rp. 237.031.954.717,29. Realisasi belanja Tahun 2024 lebih besar bila dibanding dengan realisasi belanja pada tahun 2023. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.29**  
**Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024**

| URAIAN REKENING                                      | TAHUN ANGGARAN 2024         |                             |               | REALISASI 2023              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                      | ANGGARAN                    | REALISASI                   | %             |                             |
| <b>BELANJA DAERAH</b>                                | <b>3.312.217.677.835,00</b> | <b>3.075.185.723.117,71</b> | <b>92,84</b>  | <b>2.619.084.986.875,00</b> |
| <b>BELANJA OPERASI</b>                               | <b>2.380.877.607.216,22</b> | <b>2.217.901.996.355,71</b> | <b>93,15</b>  | <b>1.900.788.191.664,50</b> |
| Belanja Pegawai                                      | 1.222.827.236.111,73        | 1.179.156.395.317,68        | 96,43         | 936.576.698.454,00          |
| Belanja Barang dan Jasa                              | 1.013.545.084.429,49        | 898.449.950.027,00          | 88,64         | 849.561.732.279,45          |
| Belanja Bunga                                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                        |
| Belanja Subsidi                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00          | 122.000.000,00              |
| Belanja Hibah                                        | 128.264.705.317,00          | 126.804.443.761,03          | 98,86         | 102.176.510.903,05          |
| Belanja Bantuan Sosial                               | 16.240.581.358,00           | 13.491.207.250,00           | 83,07         | 12.351.250.028,00           |
| <b>BELANJA MODAL</b>                                 | <b>502.498.445.596,78</b>   | <b>430.427.399.857,00</b>   | <b>85,66</b>  | <b>324.522.994.637,50</b>   |
| Belanja Modal Tanah                                  | 290.000.000,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.117.743.930,00            |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin                    | 115.101.080.292,00          | 100.176.009.636,00          | 87,03         | 54.246.432.888,50           |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan                    | 125.490.683.598,00          | 105.190.158.943,00          | 83,82         | 55.491.835.674,00           |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi            | 248.514.115.306,78          | 212.269.367.655,00          | 85,42         | 200.185.637.334,00          |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                     | 12.295.566.400,00           | 12.241.947.582,00           | 99,56         | 13.242.462.641,00           |
| Belanja Modal Aset Lainnya                           | 807.000.000,00              | 549.916.041,00              | 68,14         | 238.882.170,00              |
| <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                         | <b>1.486.084.358,00</b>     | <b>122.578.409,00</b>       | <b>8,25</b>   | <b>66.645.582,00</b>        |
| Belanja Tidak Terduga                                | 1.486.084.358,00            | 122.578.409,00              | 8,25          | 66.645.582,00               |
| <b>BELANJA TRANSFER</b>                              | <b>427.355.540.664,00</b>   | <b>426.733.748.496,00</b>   | <b>99,85</b>  | <b>393.707.154.991,00</b>   |
| Belanja Bagi Hasil                                   | 18.263.682.565,00           | 17.824.295.997,00           | 97,59         | 16.808.319.340,00           |
| Belanja Bantuan Keuangan                             | 409.091.858.099,00          | 408.909.452.499,00          | 99,96         | 376.898.835.651,00          |
| <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                               | <b>(137.498.122.384,00)</b> | <b>(66.267.986.286,71)</b>  | <b>48,20</b>  | <b>115.720.638.808,08</b>   |
| <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                             | <b>137.498.122.384,00</b>   | <b>137.498.122.384,04</b>   | <b>100,00</b> | <b>21.771.162.790,96</b>    |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                         | <b>137.498.122.384,00</b>   | <b>137.498.122.384,04</b>   | <b>100,00</b> | <b>21.771.162.790,96</b>    |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya     | 137.498.122.384,00          | 137.498.122.384,04          | 100,00        | 21.771.162.790,96           |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan                         | 137.498.122.384,00          | 137.498.122.384,04          | 100,00        | 21.771.162.790,96           |
| Pembiayaan Netto                                     | 137.498.122.384,00          | 137.498.122.384,04          | 100,00        | 21.771.162.790,96           |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan | 0,00                        | 71.230.136.097,33           | 0,00          | 137.491.801.599,04          |
| Koreksi                                              | 0,00                        | 10.025.120,00               | 0,00          | 6.320.785,00                |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran                       | 0,00                        | 71.240.161.217,33           | 0,00          | 137.498.122.384,04          |

## PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah diperlukan untuk menutupi defisit anggaran dan atau untuk menampung surplus anggaran. Terdiri dari

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sepenuhnya masih mengandalkan saldo lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Dari sisi pengeluaran pembiayaan selain untuk mengangsur beban utang yang masih ada, dialokasikan juga untuk menumbuh kembangkan perusahaan daerah melalui penyertaan modal.

Anggaran pembiayaan daerah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 137.498.122.384,00 dengan realisasi sebesar Rp. 137.498.122.384,04 (100,00%), dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran Penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 137.498.122.384,00 dengan realisasi Rp. 137.498.122.384,04 (100,00%), perolehan penerimaan pembiayaan ini didapat dari Pembiayaan Netto.

#### **1. Permasalahan dan Solusi**

Walaupun Realisasi belanja daerah telah mencapai 92,84% akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja pemerintah daerah sepanjang tahun 2024, antara lain:

- 1) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, terutama tentang pengelolaan keuangan dan asset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bimtek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan asset daerah;
- 2) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas bulan). Hal ini disebabkan masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya

aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan kepala pengelola keuangan daerah;

- 3) Realisasi keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran sehingga mengakibatkan penundaan atau pembatalan beberapa kegiatan. Oleh karena itu, di prioritaskan kegiatan dengan skala layanan dan manfaat yang besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- 4) Tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut terutama pada belanja barang dan jasa serta belanja modal disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang proses pengerjaannya terlambat karena Proses administrasi pelelangan, kondisi iklim/cuaca dan kondisi geografis sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian beberapa kegiatan.

## BAB III

## CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

### 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Prinsip-prinsip tugas pembantuan adalah:

- 1) Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan desa dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah pusat atau yang memberikan tugas pembantuan.
- 2) Penyelenggaraan tugas pembantuan dibiayai atas beban pengeluaran pembangunan APBN. Sehingga tugas pembantuan dari

pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

- 3) Pencatatan dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan secara terpisah dari APBD dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 4) Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku.
- 5) Pemerintah daerah memberitahukan adanya tugas pembantuan kepada DPRD dan pemerintah desa memberitahukannya kepada badan perwakilan desa.
- 6) Pemerintah daerah dan desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan tugas pembantuan kepada departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menugaskannya.
- 7) Dalam hal pelaksanaan tugas pembantuan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan APBN. Ketentuan mengenai pemungutan dan penyetoran penerimaan diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi APBN.
- 8) Dalam hal terdapat saldo anggaran pelaksanaan tugas pembantuan, maka saldo tersebut disetor ke kas negara.
- 9) Semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menggambarkan bahwa Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari

pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pada ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, selanjutnya pada ayat (2) Pemerintah provinsi dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi dan ayat (3) Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan APBD I dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD.

### **3.1.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima**

Pada Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar tidak menerima Tugas Pembantuan dari APBD Provinsi Riau maupun dari Pemerintah.



### 3.1.2 Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam percepatan pembangunan hingga ke tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Kampar juga memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa berupa Belanja bantuan Keuangan yang untuk penggunaan sebagai berikut :

#### 1. Dana Desa

##### 1. Dana Desa

Dana Desa pasal 3 PP Nomor: 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) yang bersumber dalam APBN, memanfaatkan bahwa Pemerintah menganggarkan Dana desa secara Nasional dalam APBN setiap Tahun.

##### 2. Tujuan pengalokasian Dana Desa (DD)

Tujuan Pengalokasian Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan, pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan, dengan prioritas Penggunaan untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemulihan ekonomi, berupa perlindungan Sosial dan Penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25%.
- b. Dana Operasional Pemerintah Desa paling banyak 3%.
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%
- d. Program sektor prioritas lainnya.

##### 3. Untuk menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2014 tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024, tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024.

4. Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Desa di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, dimana *Alokasi Dana Desa (ADD)* di Kabupaten Kampar berjumlah **Rp. 173.960.073.100,-** (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah*) dan *Dana Desa (DD)* sebesar **Rp. 234.396.785.000,-** (*Dua Ratus Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) yang telah disalurkan **100%** dialokasikan untuk 242 Desa se Kabupaten Kampar.
5. Perhitungan Dana Desa dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Pagu Alokasi Formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 55% (Lima puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
  - c. 10% (Sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  - d. 10% (Sepuluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dimaksudkan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- a. Peningkatan Kualitas Hidup
- b. Peningkatan kesejahteraan
- c. Penanggulangan kemiskinan
- d. Peningkatan pelayanan publik

## 2. Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 dan keputusan 4 menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, imigrasi, menteri keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas) menerangkan bahwa ADD adalah dana yang diberikan Kepada Desa yang berasal dari Daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota (pasal 72 ayat 4 Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005), dimana berdasarkan Undang- undang Nomor tersebut pasal 72 ayat 4" Desa memperoleh jabatan ADD". ADD yang diberikan ke Desa merupakan hak Desa yang dapat digunakan oleh Desa untuk memperkuat pembangunan, Pemerintahan dan Operasional Pemerintahan Desa.

Tujuan diberikannya ADD ini adalah untuk memperkuat Kemampuan Keuangan Desa, memperkuat otonomi desa dalam membiayai jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Urusan Sosial Kemasyarakatan serta untuk mewujudkan kesejateraan dan demokrasi di Desa Pemerintah Kabupaten Kampar pada Tahun 2024 melalui Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024, tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, telah membagikan anggaran Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Kepada 242 Desa dengan jumlah total berjumlah **Rp. 173.960.073.100,•** (*Seratus Tujuh Pu/uh Tiga Milyar Sembilan Rafus Enam Pu/uh Juta Tujuh Pu/uh Tiga Ribu Seratus Rupiah*) Perhitungan Alokasi Dana Desa per Desa di hitung dengan rumusan 60%

dibagi merata dan 40 % dari Anggaran Dana Desa di hitung dengan bobot sebagai berikut :

- a. 55% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 25% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (lima betas persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 10% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

**Manfaat ADD bagi Desa adalah :**

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Belanja tak terduga.

### 3. Bagian Hasil Retribusi dan Bagian Hasil Pajak

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 23 Maret 2024, Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, DBH Pajak Daerah dengan jumlah **Rp. 16.747.655.800,-** (*Enam Be/as Milyar Tujuh Rafus Empaf Pu/uh Tujuh Jute Enam Rafus Lima Pu/uh Lima Ribu Delapan Rafus Rupiah*), dan sudah disalurkan 100%, sedangkan DBH Retribusi dengan jumlah sebesar **Rp. 1.076.699.866,-** (*Safu milyar Tujuh Pu/uh Enam Jute Enam Rafus Sembilan Pu/uh Sembilan Ribu Delapan Rafus Enam Pu/uh Enam Rupiah*).

### 4. BKK Kabupaten Ambulance

Anggaran BKK Ambulance Pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp.735.000.000,-** (*Tujuh Rafus Tiga Pu/uh Lima Jute Rupiah*) yang telah disalurkan sebesar **100%** ke Desa Ludai Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar tiap tahun telah melaksanakan Sosialisasi Tata Cara Pengadaan Barang/jasa khususnya

pengadaan Mobil Ambulance Desa. Untuk Spesifikasi kendaraan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kampar berkoordinasi dengan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Bagian Administrasi Pembangunan, dan PBJ. Hal ini kita lakukan agar sesuai dengan aturan pengadaan barang yang berlaku yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan Daerah yang jauh dari ibukota Kabupaten dan Ibukota Provinsi diharapkan memanfaatkan Ambulance sesuai dengan fungsinya bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk transportasi layanan kesehatan masyarakat dan untuk memaksimalkan pemanfaatan transportasi ini dengan selalu berkoordinasi dengan tenaga kesehatan dan Puskesmas terdekat.

## 5. BKK Provinsi Riau yang bersumber dari APBD

Anggaran BKK Provinsi Riau Pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.46.526.198.000,- (Empat Pu/uh Enam Milyar Lima Rafus Dua Pu/uh Enam Juta Seratus Sembilan Pu/uh Delapan Ribu Rupiah) yang telah disalurkan sebesar 100% kepada 242 (Dua Ratus Empat Puluh Dua), yang di dibagi berdasarkan Juknis yang disampaikan.

**TABEL 3.1**  
**REALISASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA**

| No                      | SUMBER DANA                   | PAGU                   | JML<br>Desa | REALISASI PENYALURAN   |             | SISA BLM SALUR |           |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-----------|
|                         |                               |                        |             | JUMLAH                 | Persentase  | Jumlah         | Persentas |
| 1                       | 2                             | 3                      | 4           | 5                      | 6           | 7              | 8         |
| 1                       | DANA DESA                     | 234.396.785.000        | 242         | 234.396.785.000        | 100%        | -              | 0%        |
| 2                       | ALOKASI DANA DESA             | 173.960.073.100        | 242         | 173.950.434.868        | 100%        | -              | 0%        |
| 3                       | DBH PAJAK DAERAH              | 16.747.655.800         | 242         | 16.747.655.800         | 100%        | -              | 0%        |
| 4                       | DBH RETRIBUSI DAERAH          | 1.076.699.866          | 242         | 1.076.699.866          | 100%        | -              | 0%        |
| 5                       | BKK KABUPATEN<br>INTERPRETASI | -                      | -           | -                      | -           | -              | 0%        |
| 6                       | BKK KABUPATEN<br>AMBULANCE    | 735.000.000            | 1           | -                      | -           | -              | 0%        |
| 7                       | BKK PROVINSI                  | 46.526.198.000         | 242         | 46.526.198.000         | 100%        | -              | 0%        |
| <b>JUMLAH PAGU 2023</b> |                               | <b>434.572.352.704</b> |             | <b>434.572.352.704</b> | <b>100%</b> | -              | <b>0%</b> |



**TABEL 3.2**  
**DATA PAGU DANA DESA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024**

DATA PAGU DANA DESA

| NO     | KODE KPPN | NAMA KPPN      | KODE PEMDA | NAMA PEMDA  | PAGU DIPA       | PAGU ALOKASI    |
|--------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1      | 008       | KPPN PEKANBARU | 0901       | KAB. KAMPAR | 234.396.785.000 | 234.396.785.000 |
| Jumlah |           |                |            |             | 234.396.785.000 | 234.396.785.000 |

**TABEL 3.3**  
**MONITORING PENYALURAN DANA DESA**  
**TAHUN 2024**

| NO    | KODE PROV | NAMA PROV | JML DESA | JML DESA EARMARK | JML DESA NON EARMARK | JML DESA TAMBAHAN DO | DIPA            | TAHAP I NONEARMARK |                |             | TAHAP II NONEARMARK |                |             | TAHAP I EARMARK |                |             | TAHAP II EARMARK |                |             | TAMBAHAN DANA DESA |               |             | TOTAL PENYALURAN | %     |
|-------|-----------|-----------|----------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|------------------|----------------|-------------|--------------------|---------------|-------------|------------------|-------|
|       |           |           |          |                  |                      |                      |                 | JML DESA           | RUPIAH         | BELUM SALUR | JML DESA            | RUPIAH         | BELUM SALUR | JML DESA        | RUPIAH         | BELUM SALUR | JML DESA         | RUPIAH         | BELUM SALUR | JML DESA           | RUPIAH        | BELUM SALUR |                  |       |
| 1     | 09        | RIAU      | 242      | 242              | 242                  | 50                   | 234.396.785.000 | 242                | 64.384.909.200 | 0           | 242                 | 69.376.167.200 | 0           | 242             | 56.710.339.800 | 0           | 242              | 37.806.893.200 | 0           | 50                 | 5.936.070.000 | 0           | 234.214.379.400  | 99,92 |
| Total |           |           | 242      | 242              | 242                  | 50                   | 234.396.785.000 | 242                | 64.384.909.200 | 0           | 242                 | 69.376.167.200 | 0           | 242             | 56.710.339.800 | 0           | 242              | 37.806.893.200 | 0           | 50                 | 5.936.070.000 | 0           | 234.214.379.400  | 99,92 |

**Tabel 3.4**  
**Daftar Desa Se-Kabupaten Kampar Penerima Ambulance Desa**  
**Tahun Anggaran 2020 s/d 2024**

| NO | DESA             | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ambulance Air | Ket |
|----|------------------|------|------|------|------|------|---------------|-----|
| 1  | 2                | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8             | 9   |
| I  | KOTO KAMPAR HULU |      |      |      |      |      |               |     |
| 1  | TANJUNG          |      |      | √    | √    |      |               |     |
| 2  | TABING           |      |      | √    | √    |      |               |     |
| 3  | PONGKAI          |      |      |      |      |      |               |     |
| 4  | GUNUNG MALELO    |      |      |      |      |      |               |     |
| 5  | SIBIRUANG        | √    |      |      |      |      |               |     |
| 6  | BANDUR PICAK     |      |      |      |      |      |               |     |
| II | XIII KOTO KAMPAR |      |      |      |      |      |               |     |
| 1  | BALUNG           |      |      |      |      |      |               |     |
| 2  | PULAU GADANG     | √    |      |      |      |      |               |     |
| 3  | TANJUNG ALAI     |      |      |      |      |      |               |     |
| 4  | KOTO TUO         |      |      |      |      |      |               |     |
| 5  | MUARA TAKUS      |      |      | √    | √    |      |               |     |
| 6  | GUNUNG BUNGSU    |      |      | √    | √    |      |               |     |
| 7  | KOTO MESJID      |      |      | √    | √    |      |               |     |
| 8  | LUBUK AGUNG      | √    |      |      |      |      |               |     |
| 9  | RANAH SUNGKAI    |      |      |      |      |      |               |     |
| 10 | BINAMANG         |      |      | √    | √    |      |               |     |



| NO                         | DESA              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ambulance<br>Air | Ket |
|----------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|-----|
| 1                          | 2                 | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8                | 9   |
| 11                         | PONGKAI ISTIQAMAH | √    |      |      |      |      |                  |     |
| 12                         | KOTO TUO BARAT    |      |      |      |      |      |                  |     |
| <b>III KUOK</b>            |                   |      |      |      |      |      |                  |     |
| 1                          | KUOK              |      | √    |      |      |      |                  |     |
| 2                          | MERANGIN          |      |      | √    | √    |      |                  |     |
| 3                          | EMPAT BALAI       |      |      |      |      |      |                  |     |
| 4                          | PULAU JAMBU       |      |      | √    | √    |      |                  |     |
| 5                          | SILAM             |      |      |      |      |      |                  |     |
| 6                          | BUKIT MELINTANG   | √    |      |      |      |      |                  |     |
| 7                          | LERENG            |      |      | √    | √    |      |                  |     |
| 8                          | PULAU TERAP       |      |      |      |      |      |                  |     |
| 9                          | BATU LANGKA KECIL | √    |      |      |      |      |                  |     |
| <b>IV SALO</b>             |                   |      |      |      |      |      |                  |     |
| 1                          | SIABU             |      |      |      |      |      |                  |     |
| 2                          | GANTING           | √    |      |      |      |      |                  |     |
| 3                          | SIPUNGGUK         |      |      | √    | √    |      |                  |     |
| 4                          | GANTING DAMAI     |      |      | √    | √    |      |                  |     |
| 5                          | SALO              |      |      |      |      |      |                  |     |
| 6                          | SALO TIMUR        |      |      |      |      |      |                  |     |
| <b>V BANGKINANG KOTA</b>   |                   |      |      |      |      |      |                  |     |
| 1                          | KUMANTAN          | √    |      |      |      |      |                  |     |
| 2                          | RIDAN PERMAI      |      |      |      |      |      |                  |     |
| <b>VI KAMPAR KIRI HULU</b> |                   |      |      |      |      |      |                  |     |
| 1                          | LUDAI             |      |      |      |      | √    |                  |     |



## BAB IV

## PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kampar terhadap urusan wajib terkait pelayanan dasar disajikan berupa target indikator, realisasi dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta analisis pencapaiannya yang dikelompokkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib terkait pelayanan dasar.

### 4.1 BIDANG PENDIDIKAN

#### 4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Kampar yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pada dasarnya SPM bidang Pendidikan meliputi 3 (tiga) layanan, yaitu :

- a. Pendidikan (SD-SMP);
- b. Pendidikan kesetaraan (PAKET.A, PAKET.B, PAKET.C, SKB, PKBM) dan
- c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI).

| No | Bidang               | Indikator Kinerja/Layanan SPM                                                  |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pendidikan Usia Dini | Angka Partisipasi Sekolah;                                                     |
|    |                      | Angka partisipasi murni;                                                       |
|    |                      | Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B; |
|    |                      | Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)        |
|    |                      | Rasio pengawas sekolah untuk PAUD;                                             |
|    |                      | Kecukupan formasi guru ASN;                                                    |
|    |                      | Indeks distribusi guru;                                                        |
|    |                      | Proporsi PTK bersertifikat;                                                    |
|    |                      | Proporsi PTK penggerak.                                                        |



| No | Bidang                | Indikator Kinerja/Layanan SPM |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 2  | Pendidian Dasar       | Angka partisipasi kasar       |
|    |                       | Angka partisipasi sekolah     |
|    |                       | Kemampuan literasi            |
|    |                       | Kemampuan numerasi            |
|    |                       | Perbedaan skor literasi       |
|    |                       | Perbedaan skor numerasi       |
|    |                       | Perbedaan skor numerasi       |
|    |                       | Indeks iklim kebhinekaan      |
|    |                       | Indeks iklim inklusivitas     |
|    |                       | Kecukupan formasi guru ASN    |
|    |                       | Indeks distribusi guru        |
|    |                       | Proporsi PTK bersertifikat    |
|    |                       | Proporsi PTK penggerak        |
|    |                       | Angka partisipasi kasar       |
|    |                       | Angka partisipasi sekolah     |
|    |                       | Kemampuan literasi            |
|    |                       | Kemampuan numerasi            |
|    |                       | Perbedaan skor literasi       |
|    |                       | Perbedaan skor numerasi       |
|    |                       | Indeks iklim keamanan         |
|    |                       | Indeks iklim kebhinekaan      |
|    |                       | Indeks iklim inklusivitas     |
|    |                       | Kecukupan formasi guru ASN    |
|    |                       | Indeks distribusi guru        |
|    |                       | Proporsi PTK bersertifikat    |
|    |                       | Proporsi PTK penggerak        |
| 3  | Pendidikan Kesetaraan |                               |
|    |                       | Angka partisipasi kasar       |
|    |                       | Angka partisipasi sekolah     |
|    |                       | Kemampuan literasi            |
|    |                       | Kemampuan numerasi            |
|    |                       | Perbedaan skor literasi       |
|    |                       | Perbedaan skor numerasi       |
|    |                       | Indeks iklim keamanan         |
|    |                       | Indeks iklim kebhinekaan      |
|    |                       | Indeks iklim inklusivitas     |
|    |                       | Kecukupan formasi guru ASN    |
|    |                       | Indeks distribusi guru        |
|    |                       | Proporsi PTK bersertifikat    |
|    |                       | Proporsi PTK penggerak        |

#### 4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

| NO       | JENIS LAYANAN                                                                    | SATUAN | TARGET |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>1</b> | <b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>                                                 |        |        |
|          | A. Jumlah yang harus dilayani                                                    | Org    | 34.503 |
|          | B. Jumlah Mutu                                                                   |        |        |
|          | 1 Angka Partisipasi Sekolah;                                                     | %      | 100    |
|          | 2 Angka partisipasi murni;                                                       | %      | 100    |
|          | 3 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B; | %      | 63.5   |
|          | 4 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)        | %      | 62.54  |
|          | 5 Rasio pengawas sekolah untuk PAUD;                                             | %      | 100    |
|          | 6 Kecukupan formasi guru ASN;                                                    | %      | 100    |
|          | 7 Indeks distribusi guru;                                                        | %      | 1      |
|          | 8 Proporsi PTK bersertifikat;                                                    | %      | 100    |
|          | 9 Proporsi PTK penggerak.                                                        | %      | 100    |
| <b>2</b> | <b>Pendidikan Dasar</b>                                                          |        |        |
|          | A. Jumlah yang harus dilayani                                                    | Org    | 159803 |
|          | B. Jumlah Mutu                                                                   |        |        |
|          | <b>SD</b>                                                                        |        |        |
|          | 1 Angka partisipasi kasar                                                        | %      | 100    |
|          | 2 Angka partisipasi sekolah                                                      | %      | 100    |
|          | 3 Kemampuan literasi                                                             | Nilai  | 57.22  |
|          | 4 Kemampuan numerasi                                                             | Nilai  | 42.38  |
|          | 5 Perbedaan skor literasi                                                        | Nilai  | 3.99   |
|          | 6 Perbedaan skor numerasi                                                        | Nilai  | 3.99   |
|          | 7 Perbedaan skor numerasi                                                        | Nilai  | 74.05  |
|          | 8 Indeks iklim kebhinekaan                                                       | Nilai  | 72.85  |
|          | 9 Indeks iklim inklusivitas                                                      | Nilai  | 61.52  |
|          | 10 Kecukupan formasi guru ASN                                                    | %      | 100    |
|          | 11 Indeks distribusi guru                                                        | %      | 1      |
|          | 12 Proporsi PTK bersertifikat                                                    | %      | 75     |
|          | 13 Proporsi PTK penggerak                                                        | %      | 35     |

| NO       | JENIS LAYANAN                | SATUAN | TARGET |
|----------|------------------------------|--------|--------|
|          | <b>SMP</b>                   |        |        |
| 1        | Angka partisipasi kasar      | %      | 100    |
| 2        | Angka partisipasi sekolah    | %      | 100    |
| 3        | Kemampuan literasi           | Nilai  | 68.66  |
| 4        | Kemampuan numerasi           | Nilai  | 64.92  |
| 5        | Perbedaan skor literasi      | Nilai  | 10     |
| 6        | Perbedaan skor numerasi      | Nilai  | 3.99   |
| 7        | Indeks iklim keamanan        | Nilai  | 72.62  |
| 8        | Indeks iklim kebhinekaan     | Nilai  | 69.82  |
| 9        | Indeks iklim inklusivitas    | Nilai  | 62.05  |
| 10       | Kecukupan formasi guru ASN   | %      | 100    |
| 11       | Indeks distribusi guru       | %      | 1      |
| 12       | Proporsi PTK bersertifikat   | %      | 85     |
| 13       | Proporsi PTK penggerak       | %      | 35     |
| <b>3</b> | <b>Pendidikan Kesetaraan</b> |        |        |
| A.       | Jumlah yang harus dilayani   | Org    | 2218   |
| B.       | Jumlah Mutu                  |        |        |
| 1        | Angka partisipasi kasar      | %      | 100    |
| 2        | Angka partisipasi sekolah    | %      | 100    |
| 3        | Kemampuan literasi           | Nilai  | 75.35  |
| 4        | Kemampuan numerasi           | Nilai  | 75.35  |
| 5        | Perbedaan skor literasi      | Nilai  | 10     |
| 6        | Perbedaan skor numerasi      | Nilai  | 3.99   |
| 7        | Indeks iklim keamanan        | Nilai  | 71.35  |
| 8        | Indeks iklim kebhinekaan     | Nilai  | 64.12  |
| 9        | Indeks iklim inklusivitas    | Nilai  | 61.19  |
| 10       | Kecukupan formasi guru ASN   | %      | -      |
| 11       | Indeks distribusi guru       | %      | -      |
| 12       | Proporsi PTK bersertifikat   | %      | -      |
| 13       | Proporsi PTK penggerak       | %      | -      |

#### 4.1.3 Realisasi

Pada tahun 2024, capaian terhadap penerapan SPM di Bidang Pendidikan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :



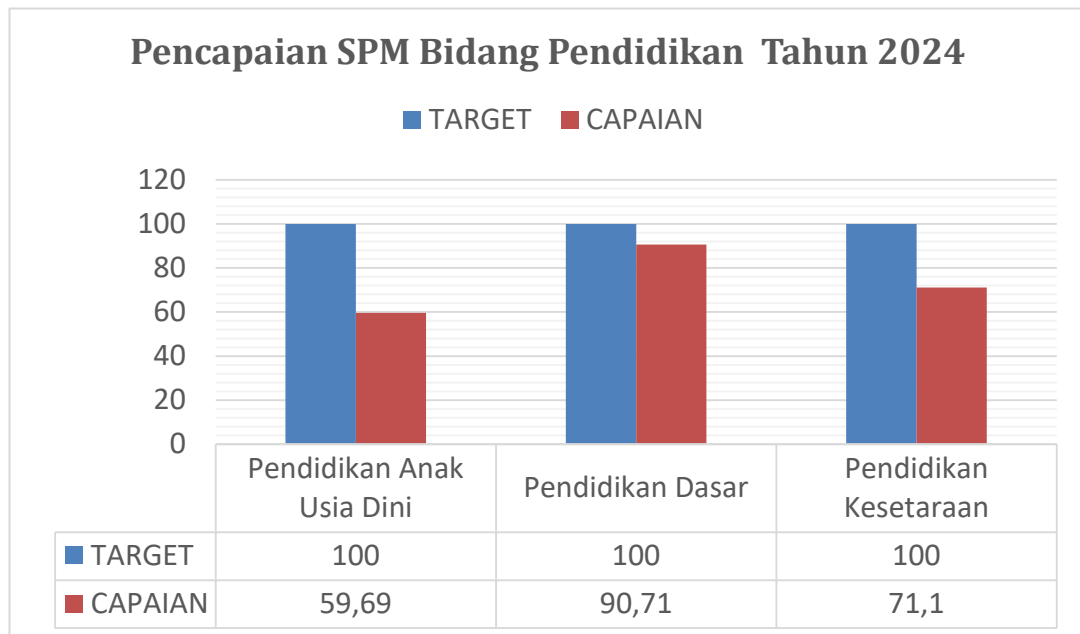
| NO       | JENIS LAYANAN                                                                    | SATUAN | TARGET | TERLAYANI | SISA   | CAPAIAN (%) |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-------------|
| <b>1</b> | <b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>                                                 |        |        |           |        |             |
|          | A. Jumlah yang harus dilayani                                                    | Org    | 34.503 | 20.594    | 13.909 | 59.69       |
|          | B. Jumlah Mutu                                                                   |        |        |           |        |             |
|          | 1 Angka Partisipasi Sekolah;                                                     | %      | 100    | 59.68     | 40.3   | 59.68       |
|          | 2 Angka partisipasi murni;                                                       | %      | 100    | 51.03     | 48.97  | 51.03       |
|          | 3 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B; | %      | 63.5   | 59.59     | 3.91   | 59.59       |
|          | 4 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)        | %      | 62.54  | 17.03     | 45.51  | 17.03       |
|          | 5 Rasio pengawas sekolah untuk PAUD;                                             | %      | 100    | 51        | 49     | 51          |
|          | 6 Kecukupan formasi guru ASN;                                                    | %      | 100    | 17.3      | 82.7   | 17.3        |
|          | 7 Indeks distribusi guru;                                                        | %      | 1      | 0.2       | 0.8    | 0.2         |
|          | 8 Proporsi PTK bersertifikat;                                                    | %      | 100    | 50.6      | 49.4   | 50.6        |
|          | 9 Proporsi PTK penggerak.                                                        | %      | 100    | 1         | 99     | 1           |
| <b>2</b> | <b>Pendidikan Dasar</b>                                                          |        |        |           |        |             |
|          | A. Jumlah yang harus dilayani                                                    | Org    | 159803 | 144954    | 14849  | 90.71       |
|          | B. Jumlah Mutu                                                                   |        |        |           |        |             |
|          | <b>SD</b>                                                                        |        |        |           |        |             |
|          | 1 Angka partisipasi kasar                                                        | %      | 100    | 107.15    | 2.19   | 100         |
|          | 2 Angka partisipasi sekolah                                                      | %      | 100    | 97.87     | 1.35   | 97.81       |
|          | 3 Kemampuan literasi                                                             | Nilai  | 57.22  | 68.89     | 1.79   | 98.03       |
|          | 4 Kemampuan numerasi                                                             | Nilai  | 42.38  | 55.97     | 5.22   | 97.24       |
|          | 5 Perbedaan skor literasi                                                        | Nilai  | 3.99   | 3.25      | 2.01   | 47.8        |
|          | 6 Perbedaan skor numerasi                                                        | Nilai  | 3.99   | 1.28      | 4.52   | 49.62       |
|          | 7 Perbedaan skor numerasi                                                        | Nilai  | 74.05  | 69.45     | 6.34   | 93.78       |
|          | 8 Indeks iklim kebhinekaan                                                       | Nilai  | 72.85  | 70.26     | 14.3   | 100         |
|          | 9 Indeks iklim inklusivitas                                                      | Nilai  | 61.52  | 52.39     | 0.8    | 89.78       |
|          | 10 Kecukupan formasi guru ASN                                                    | %      | 100    | 87.6      | 8.3    | 85.7        |
|          | 11 Indeks distribusi guru                                                        | %      | 1      | 0.2       | 32     | 20          |
|          | 12 Proporsi PTK bersertifikat                                                    | %      | 75     | 65        |        | 90.24       |
|          | 13 Proporsi PTK penggerak                                                        | %      | 35     | 1         |        | 8.57        |

| NO       | JENIS LAYANAN                 | SATUAN | TARGET | TERLAYANI | SISA  | CAPAIAN (%) |
|----------|-------------------------------|--------|--------|-----------|-------|-------------|
|          | <b>SMP</b>                    |        |        |           |       |             |
| 1        | Angka partisipasi kasar       | %      | 100    | 109.71    | -9.71 | 100         |
| 2        | Angka partisipasi sekolah     | %      | 100    | 97.81     | 2.19  | 97.81       |
| 3        | Kemampuan literasi            | Nilai  | 68.66  | 67.31     | 1.35  | 98.03       |
| 4        | Kemampuan numerasi            | Nilai  | 64.92  | 63.13     | 1.79  | 97.24       |
| 5        | Perbedaan skor literasi       | Nilai  | 10     | 4.78      | 5.22  | 47.80       |
| 6        | Perbedaan skor numerasi       | Nilai  | 3.99   | 1.98      | 2.01  | 49.62       |
| 7        | Indeks iklim keamanan         | Nilai  | 72.62  | 68.1      | 4.52  | 93.78       |
| 8        | Indeks iklim kebhinekaan      | Nilai  | 69.82  | 71.29     | -1.47 | 100         |
| 9        | Indeks iklim inklusivitas     | Nilai  | 62.05  | 55.71     | 6.34  | 89.78       |
| 10       | Kecukupan formasi guru ASN    | %      | 100    | 85.7      | 14.3  | 85.70       |
| 11       | Indeks distribusi guru        | %      | 1      | 0.2       | 0.8   | 20          |
| 12       | Proporsi PTK bersertifikat    | %      | 85     | 76.7      | 8.3   | 90.24       |
| 13       | Proporsi PTK penggerak        | %      | 35     | 3         | 32    | 8.57        |
| <b>3</b> | <b>Pendidikan Kesetaraan</b>  |        |        |           |       |             |
|          | A. Jumlah yang harus dilayani | Org    | 2218   | 1577      | 641   | 71.10       |
|          | B. Jumlah Mutu                |        |        |           |       |             |
|          | 1 Angka partisipasi kasar     | %      | 100    | 43.96     | 56    | 43.96       |
|          | 2 Angka partisipasi sekolah   | %      | 100    | 43.96     | 56    | 43.96       |
|          | 3 Kemampuan literasi          | Nilai  | 75.35  | 69.82     | 5.5   | 92.66       |
|          | 4 Kemampuan numerasi          | Nilai  | 75.35  | 62.34     | 13    | 82.73       |
|          | 5 Perbedaan skor literasi     | Nilai  | 10     | 4.38      | 5.6   | 43.80       |
|          | 6 Perbedaan skor numerasi     | Nilai  | 3.99   | 2.31      | 1.68  | 57.89       |
|          | 7 Indeks iklim keamanan       | Nilai  | 71.35  | 65.82     | 5.53  | 92.25       |
|          | 8 Indeks iklim kebhinekaan    | Nilai  | 64.12  | 59.6      | 4.5   | 92.95       |
|          | 9 Indeks iklim inklusivitas   | Nilai  | 61.19  | 53.18     | 8.01  | 86.91       |
|          | 10 Kecukupan formasi guru ASN | %      | -      | -         | -     | -           |
|          | 11 Indeks distribusi guru     | %      | -      | -         | -     | -           |
|          | 12 Proporsi PTK bersertifikat | %      | -      | -         | -     | -           |
|          | 13 Proporsi PTK penggerak     | %      | -      | -         | -     | -           |

Dari table diatas didapati Jenis pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan Kabupaten Kampar dengan persentase realisasi capaian pelaksanaan yang tinggi sekitar 90.71 % yaitu pada Pelayanan Pendidikan Dasar, disusul Pelayanan Pendidikan Kesetaraan/Nonformal persentase realisasi capaian pelaksanaannya sebesar 71.10% dan Pelayanan Pendidikan anak usia dini dengan

persentase realisasi capaian pelaksanaannya sebesar 59.69%, dapat kita gambarkan pada grafik dibawah ini :

**Grafik 4.1**  
**Capain SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024**



#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal harus di dukung oleh program dan kegiatan. Alokasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Pendidikan bersumber dari APBD Kabupaten Kampar, dengan rincian sebagai berikut :

| NO | PENDANAAN                                     | PAGU              |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | APBD KAB. KAMPAR                              | 2,862,581,853,723 |
| 2  | ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH      | 826,025,859,992   |
| 3  | ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD | 826,025,859,992   |
|    | <b>APBD</b>                                   | 826,025,859,992   |
|    | A. APBD MURNI                                 | 364,277,266,992   |
|    | B. APBD DAU                                   | 90,362,164,000    |
|    | C. APBD DAK FISIK                             | 53,701,002,000    |
|    | D. APBD DAK NON FISIK                         | 317,685,427,000   |
|    | E. DANA BAGI HASIL                            | 0                 |
|    | F. KERJASAMA                                  | 0                 |
|    | G. OTONOMI KHUSUS                             | 0                 |

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                         | PERENCANAAN           | PELAKSANAAN           | SERAPAN      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                 |                       |                       |              |
|    | <b>1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                                         | <b>92,344,750,986</b> | <b>83,569,014,895</b> | <b>90.50</b> |
|    | 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 22,321,678,980        | 20,377,914,600        | 91.29        |
|    | 2 Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             | 8,470,511,000         | 5,887,656,600         | 69.51        |
|    | 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             | 3,143,132,800         | 3,118,282,460         | 99.21        |
|    | 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                    | 22,482,643,656        | 20,241,253,902        | 90.03        |
|    | 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar            | 1,528,055,300         | 1,364,715,900         | 89.31        |
|    | 6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         | 2,996,779,250         | 2,974,447,410         | 99.25        |
|    | 7 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       | 567,482,700           | 563,212,200           | 99.25        |
|    | 8 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                | 3,349,770,800         | 2,906,118,184         | 86.76        |
|    | 9 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | 9,988,862,400         | 9,505,770,165         | 95.16        |
|    | 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                      | 17,495,834,100        | 16,629,643,474        | 95.05        |
|    | <b>2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                              | <b>56,128,116,926</b> | <b>56,128,116,926</b> | <b>93.24</b> |
|    | 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  | 11,301,270,240        | 10,898,084,000        | 96.43        |
|    | 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       | 9,598,305,800         | 8,882,106,620         | 92.54        |
|    | 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             | 3,082,184,400         | 2,461,356,407         | 79.86        |
|    | 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         | 23,868,356,486        | 22,539,575,756        | 94.43        |
|    | 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | 2,004,305,600         | 1,790,071,514         | 89.31        |
|    | 6 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       | 1,109,528,400         | 912,922,041           | 82.28        |
|    | 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        | 5,164,166,000         | 4,850,954,740         | 93.93        |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                   | PERENCANAAN           | PELAKSANAAN           | SERAPAN      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3  | <b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                                             | <b>11,134,055,620</b> | <b>10,490,602,260</b> | <b>94.22</b> |
| 1  | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                       | 3,056,716,420         | 2,788,139,950         | 91.21        |
| 2  | Pengadaan Mebel PAUD                                                                            | 196,110,000           | 176,005,000           | 89.75        |
| 3  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                                    | 2,795,000,000         | 2,789,553,000         | 99.81        |
| 4  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                    | 1,695,949,500         | 1,695,939,000         | 100.00       |
| 5  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                        | 155,000,200           | 137,118,400           | 88.46        |
| 6  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                   | 760,517,500           | 692,777,850           | 91.09        |
| 7  | Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                    | 2,474,762,000         | 2,211,069,060         | 89.34        |
| 4  | <b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                              | <b>646,004,500</b>    | <b>549,284,224</b>    | <b>85.03</b> |
| 1  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 149,942,000           | 145,570,900           | 97.08        |
| 2  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                | 94,942,100            | 93,973,500            | 98.98        |
| 3  | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                 | 251,140,800           | 160,396,604           | 63.87        |
| 4  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                   | 149,979,600           | 149,343,220           | 99.58        |

#### 4.1.5. Dukungan Personil

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 050/Dikpora-Sekr/1056 tanggal 06 Februari 2024 Personil/Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan, sebagai berikut :

| NO | NAMA/NIP                                                      | JABATAN                                                               | JABATAN DALAM KEPANITIAAN |
|----|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | <b>H. AIDIL, SH, M.Si</b><br>NIP. 19711015 199108 1 001       | Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar | Pengarah/Pembina          |
| 2  | <b>DALIMI, S.Ag</b><br>NIP. 19691117 200701 1 006             | Fungsional Perencana                                                  | Ketua                     |
| 3  | <b>ADI YANTO, S. Kom. M.kom</b><br>NIP. 19810724 201406 1 004 | Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP        | Sekretaris                |
| 4  | <b>ADMIRAL, SP, M.Si</b><br>NIP. 19730706 200605 1 001        | Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan                                    | Anggota                   |



|   |                                                             |                                                                |          |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| 5 | <b>NANDANG PRIYATNA, S.Pd</b><br>NIP. 19660515 198903 1 004 | Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar                       | Anggota  |
| 6 | <b>MARIANI, M.Pd</b><br>NIP. 19690616 199310 2 001          | Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal         | Anggota  |
| 7 | <b>ALFALATEHAN, SE</b>                                      | Staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar | Operator |
| 8 | <b>SRI WENDA, SE</b>                                        | Staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar | Operator |
| 9 | <b>OKI YOLANDA, FN</b>                                      | Staf Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar | Operator |

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan tingkat capaian masih ada yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

##### Permasalahan :

1. Terdapat beberapa sekolah yang masih kekurangan ruang kelas;
2. Terdapat beberapa sekolah yang masih kekurangan Meubelles Sekolah;
3. Terdapat Sekolah yang belum memiliki Lab. IPA;
4. Masih Kekurangan Alat Praktek IPA;
5. Masih kekurangan guru, terutama di daerah sulit;
6. Kekurangan Ruang Kepala Sekolah;
7. Masih terdapat guru yang tidak linier;
8. Kekurangan guru yang bersertifikasi/belum memenuhi Kualifikasi;
9. Terdapat di sekolah swasta;
10. Masih kekurangan Buku;
11. Masih Kekurangan Buku Pengaya.

##### Solusi :

1. Penambahan Ruang Kelas Baru;
2. Pembangunan LAB IPA;
3. Pengadaan Alat Praktek IPA;
4. Pembangunan Ruang Guru SD;
5. Linierisasi Guru SMP;
6. Peningkatan Sertifikasi Guru SD dan SMP;

7. Peningkatan kualifikasi Kepala Sekolah SD;
8. Pengadaan Buku Sd dan SMP;
9. Pengadaan Alat Peraga IPA SMP;
10. Pengadaan Buku Pengaya untuk SD dan SMP;
11. Pemerataan guru sampai ke daerah tersulit.

## 4.2 URUSAN KESEHATAN

### 4.2.1 Jenis Pelayanan dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

#### Jenis dan Mutu Layanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

| No | Jenis Layanan Dasar           | Mutu Layanan Dasar                                | Penerima Layanan Dasar | Pernyataan Standar                                                   |
|----|-------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Sesuai standar pelayanan antenatal sesuai standar | Ibu Hamil              | Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar |

| No | Jenis Layanan Dasar                                 | Mutu Layanan Dasar                                            | Penerima Layanan Dasar                       | Pernyataan Standar                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                    | Sesuai standar pelayanan persalinan sesuai standar            | Ibu bersalin                                 | Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan                                                                                                                      |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                 | Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | Bayi baru lahir                              | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar                                                                                                               |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita                          | Sesuai standar pelayanan balita                               | Balita                                       | Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar + Balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar |
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar      | Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar       | Anak pada usia pendidikan dasar              | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan                                                                                                                                                                      |
| 6  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif             | Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif              | Warga Negara Indonesia usia 15 s/d 59 tahun  | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar                                                                                                                            |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                | Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut                 | Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali                                                                                                                 |
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi            | Sesuai standar pelayanan kesehatan hipertensi                 | Penderita hipertensi                         | Jumlah penderita hipertensi usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                                 |
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) | Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | Penderita Diabetes Melitus                   | Jumlah penderita diabetes mellitus usia $\geq 15$ tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                                                                          |

| No | Jenis Layanan Dasar                                                                                     | Mutu Layanan Dasar                         | Penerima Layanan Dasar                                                                                                                        | Pernyataan Standar                                                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat                                             | Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa    | Orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat                                                                                                        | Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar     |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis                                                          | Sesuai standar pelayanan kesehatan TB      | Orang dengan TB                                                                                                                               | Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang             |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) | Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV | Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS) waria/trans gender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan. | Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan sesuai standar |

#### 4.2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, target setiap jenis layanan adalah 100%. Target SPM dan perhitungan pembiayaan Bidang Kesehatan tahun 2024 sebagai berikut :

| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                   | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | <b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>                                                                            |        |        |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI                                                                                   | Orang  | 17792  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                              |        |        |
|    | Vaksin Tetanus Difteri (Td)                                                                                     | Vaksin | 2474   |
|    | Tablet tambah darah<br>(180 tablet x jumlah ibu hamil)                                                          | Tablet | 17792  |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan                                                                  | Orang  | 17792  |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB                                                                  | Paket  | 17792  |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah                                                      | Paket  | 17792  |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin<br>(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil) | Paket  | 17792  |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV      | Paket  | 17792  |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                      | SATUAN   | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                          | Paket    | 17792  |
|    | Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                                  | Buku     | 17792  |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                               | Paket    | 31     |
|    | Gel USG                                                                                                            | Botol    | 31     |
|    | (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)                           |          |        |
|    | Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;                                                    | Orang    | 31     |
|    | (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)" |          |        |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                         | Orang    | 31     |
|    | (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)                                                                          |          |        |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                           | Orang    | 31     |
|    | (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)                                                                       |          |        |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                              | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                     | Orang    | 31     |
|    | Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)                                                           | Orang    | 17792  |
|    | (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)                 |          |        |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                                                                                   |          |        |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                                                                                    | Orang    | 16984  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                 |          |        |
|    | Formulir partograf                                                                                                 | Formulir | 16984  |
|    | Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                          | Paket    | 16984  |
|    | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                                  | Buku     | 16984  |
|    | (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)                             |          |        |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                               | Paket    | 31     |
|    | Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi                                                     | Orang    | 31     |
|    | (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)  |          |        |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                           | Paket    | 31     |
|    | (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)                                                                       |          |        |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                         | Orang    | 31     |
|    | (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)                                                                        |          |        |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                              | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                     | Orang    | 31     |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                         | SATUAN   | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 3  | <b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>                                            |          |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                  | Orang    | 14194  |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                             |          |        |
|    | Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)                                  | Vaksin   | 1419   |
|    | Vitamin K1 injeksi                                                                    | Ampul    | 1419   |
|    | Salep/tetes mata antibiotik                                                           | Orang    | 1419   |
|    | Formulir bayi baru lahir                                                              | Formulir | 1419   |
|    | Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)                                         | Formulir | 1419   |
|    | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                     | Buku     | 1419   |
|    | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                  | Paket    | 1419   |
|    | Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak                                           | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                              | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                            | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                 | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku                         | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                        | Orang    | 31     |
|    | Kader Kesehatan                                                                       | Orang    | 31     |
| 4  | <b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>                                                     |          |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                | Orang    | 50659  |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                             |          |        |
|    | Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | Dokumen  | 50659  |
|    | Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)                                           | Formulir | 50659  |
|    | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                     | Orang    | 50659  |
|    | Vitamin A Biru<br>(sesuai standar 6-11 bulan)                                         | Kapsul   | 6893   |
|    | Vitamin A Merah<br>(sesuai standar 12-59 bulan)                                       | Kapsul   | 50659  |
|    | Vaksin imunisasi dasar: BCG                                                           | Vaksin   | 709    |
|    | Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes                                                   | Vaksin   | 5677   |
|    | Vaksin imunisasi dasar: IPV                                                           | Vaksin   | 5677   |
|    | Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib                                                  | Vaksin   | 8516   |
|    | Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella                                              | Vaksin   | 1419   |
|    | Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib                                              | Vaksin   | 3782   |
|    | Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella                                          | Vaksin   | 1890   |
|    | Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)                                              | Unit     | 573372 |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                   | SATUAN   | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | Peralatan Anafilaktik                                                                                                                                                           | Paket    | 31     |
|    | Formula Terapi Gizi Buruk                                                                                                                                                       | Paket    | 31     |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                           | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                        | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                      | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                  | Orang    | 31     |
|    | Guru PAUD                                                                                                                                                                       | Orang    | 31     |
|    | Kader Kesehatan                                                                                                                                                                 | Orang    | 31     |
| 5  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar                                                                                                                                  |          |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                          | Orang    | 51337  |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                       |          |        |
|    | Form pencatatan/buku rapor kesehatanku                                                                                                                                          | Buku     | 51337  |
|    | (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)                                                                                                                     |          |        |
|    | Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan                                                                                                                                       | Buku     | 51337  |
|    | (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)                                                |          |        |
|    | Kuesioner skrining kesehatan                                                                                                                                                    | Dokumen  | 51337  |
|    | (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)                                                                                                                                      |          |        |
|    | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah                                                                                        | Formulir | 51337  |
|    | (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)                                                                     |          |        |
|    | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah                                                                                         | Formulir | 646    |
|    | (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)                                                                      |          |        |
|    | Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah                                                                                             | Tablet   | 30620  |
|    | (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota) |          |        |
|    | Alat Pemeriksaan Hb                                                                                                                                                             | Alat     | 31     |
|    | (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)                                                                                 |          |        |
|    | Media promosi kesehatan                                                                                                                                                         | Paket    | 31     |
|    | (Media khusus remaja sehat)                                                                                                                                                     |          |        |
|    | Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)                                                                                              | Strip    | 51337  |
|    | (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)                                                               |          |        |
|    | Media promosi kesehatan                                                                                                                                                         | Paket    | 31     |
|    | (Media khusus remaja sehat)                                                                                                                                                     |          |        |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                              | SATUAN  | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)                                                         | Vaksin  | 13421  |
|    | (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)                          |         |        |
|    | Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi                                                                                                          | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                   | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                 | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                             | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                      | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                             | Orang   | 31     |
|    | Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru                                                                   | Orang   | 31     |
|    | Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor                             | Orang   | 31     |
| 6  | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>                                                                                             |         |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                       | Orang   | 545033 |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                  |         |        |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                       | Paket   | 31     |
|    | Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)                                                                                                | Unit    | 31     |
|    | Alat : Tensimeter                                                                                                                          | Unit    | 31     |
|    | Alat : Glukometer                                                                                                                          | Unit    | 31     |
|    | Alat: Alat Pemeriksa Hb                                                                                                                    | Unit    | 31     |
|    | Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol                                                                                         | Unit    | 545033 |
|    | Alat : KIT IVA Tes                                                                                                                         | Unit    | 31     |
|    | Strip dan Reagen pemeriksaan Hb                                                                                                            | Unit    | 545033 |
|    | Kit Ophthalmologi Komunitas                                                                                                                | Unit    | 31     |
|    | Kuesioner PUMA                                                                                                                             | Dokumen | 31     |
|    | (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)                                                                                         |         |        |
|    | Alat Pelayanan KB                                                                                                                          | Unit    | 93     |
|    | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)                                                 | Dokumen | 31     |
|    | Vaksin Tetanus Difteri (td)                                                                                                                | Ampul   | 2474   |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                      | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                   | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                 | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                             | Orang   | 35     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                             | Orang   | 70     |
|    | Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                                | Orang   | 31     |
| 7  | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>                                                                                                |         |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                       | Orang   | 37148  |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                  |         |        |
|    | Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter | Paket   | 31     |





| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                  | SATUAN   | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | Glukometer/alat pemeriksaan gula darah                                                                                                                         | Paket    | 31     |
|    | Alat pemeriksaan kolesterol                                                                                                                                    | Paket    | 31     |
|    | Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol                                                                | Paket    | 37148  |
|    | Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)                            | Paket    | 31     |
|    | Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya                                                                                                 | Buku     | 37148  |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                           | Paket    | 31     |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                          | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                       | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                     | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                 | Orang    | 35     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                 | Orang    | 31     |
|    | Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                                                    | Orang    | 31     |
| 8  | <b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>                                                                                                                |          |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                           | Orang    | 183625 |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                      |          |        |
|    | Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2) | Paket    | 183625 |
|    | Obat Hipertensi                                                                                                                                                | Paket    | 100000 |
|    | Tensimeter                                                                                                                                                     |          |        |
|    | (mengukur tekanan darah)                                                                                                                                       | Unit     | 31     |
|    | Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)                                                                                            | Aplikasi | 183625 |
|    | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                           |          |        |
|    | (peningkatan pengetahuan masyarakat)                                                                                                                           | Paket    | 31     |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                          | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                       | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                     | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                 | Orang    | 35     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku                                                                                                  | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                          | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                 | Orang    | 31     |
| 9  | <b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>                                                                                                          |          |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                           | Orang    | 6778   |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                      |          |        |
|    | Obat Diabetes Melitus                                                                                                                                          | Paket    | 50000  |
|    | Fotometer atau Glukometer                                                                                                                                      |          |        |
|    | (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)                                                                             | Unit     | 31     |
|    | BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet            | Unit     | 81336  |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                      | SATUAN   | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
|    | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)                                      | Formulir | 6778   |
|    | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                               | Paket    | 31     |
|    | <b>(minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)</b> |          |        |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                                                              | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                                                           | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                                                         | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                                                              | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                                     | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                                                     | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)                                                                                                                                           | Orang    | 31     |
| 10 | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>                                                                                                                                                 |          |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                                                                               | Orang    | 1241   |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                                                          |          |        |
|    | Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)                                                                                                    | Buku     | 31     |
|    | bentuk fisik atau elektronik)                                                                                                                                                                                      |          |        |
|    | Penyediaan Psikofarmaka                                                                                                                                                                                            | Jenis    | 11     |
|    | <b>(pengobatan/medikasi)</b>                                                                                                                                                                                       |          |        |
|    | Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi                                                                                                                                  | Formulir | 1241   |
|    | <b>(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)</b>                                                                                                                       |          |        |
|    | Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan                                                                                                                                    | Formulir | 1241   |
|    | <b>(pencatatan dan pelaporan)</b>                                                                                                                                                                                  |          |        |
|    | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                               | Media    | 1241   |
|    | Tenaga kesehatan : Dokter                                                                                                                                                                                          | Orang    | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa                                                                                                               | Orang    | 31     |
|    | <b>(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)</b>                                                                                                                                                   |          |        |
|    | Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.                                                                                                                                                                | Orang    | 31     |
|    | Tenaga profesional lainnya                                                                                                                                                                                         | Orang    | 31     |
| 11 | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>                                                                                                                                                              |          |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                                                                               | Orang    | 14371  |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                                                          |          |        |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                               | Paket    | 31     |
|    | Reagen Zn TB                                                                                                                                                                                                       | Kit      | 14371  |
|    | Masker bedah dan Masker N95                                                                                                                                                                                        | Paket    | 14371  |

| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                           | SATUAN  | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|    | Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering                     | Paket   | 14371  |
|    | Katrid tes cepat molekuler                                                                                                              | Test    | 14371  |
|    | Formulir pencatatan dan pelaporan                                                                                                       | Dokumen | 14371  |
|    | Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)                                                                                              | Dokumen | 31     |
|    | Tuberkulin                                                                                                                              | Vial    | 111    |
|    | Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru                                                             | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                              | Orang   | 19     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                   | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                          | Orang   | 9      |
|    | Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)                                                                              | Orang   | 31     |
|    | Tenaga kesehatan : Radiografer                                                                                                          | Orang   | 3      |
|    | Kader Kesehatan                                                                                                                         | Orang   | 155    |
| 12 | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b> |         |        |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI                                                                                                           | Orang   | 21916  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                                      |         |        |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                    | Paket   | 31     |
|    | Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama                                                                                       | Test    | 21916  |
|    | Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai    | Paket   | 21916  |
|    | Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK                     | Paket   | 21916  |
|    | Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin                                                | Orang   | 34     |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                | Orang   | 34     |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                              | Orang   | 34     |
|    | Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)                                                                             | Orang   | 34     |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat                                                                                          | Orang   | 34     |
|    | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan                                               | Orang   | 34     |

#### 4.2.3 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

Capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2023 sama dengan realisasi SPM, realisasi capaian SPM dapat diuraikan sebagai berikut :



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                             | SATUAN | TARGET | TERLAYANI | SISA  | CAPAIAN (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|-------------|
| 1  | <b>Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>                                                                                      |        |        |           |       |             |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI                                                                                             | Orang  | 17792  | 15676     | 2116  | 88.11       |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                        |        |        |           |       |             |
|    | Vaksin Tetanus Difteri (Td)                                                                                               | Vaksin | 2474   | 1079      | 1395  | 43.61       |
|    | Tablet tambah darah                                                                                                       | Tablet | 17792  | 15676     | 2116  | 88.11       |
|    | <b>(180 tablet x jumlah ibu hamil)</b>                                                                                    |        |        |           |       |             |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan                                                                            | Orang  | 17792  | 6184      | 11608 | 34.76       |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB                                                                            | Paket  | 17792  | 10183     | 7609  | 57.23       |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah                                                                | Paket  | 17792  | 1966      | 15826 | 11.05       |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin                                                             | Paket  | 17792  | 2223      | 15569 | 12.49       |
|    | <b>(proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)</b>                                                                     |        |        |           |       |             |
|    | Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV                | Paket  | 17792  | 15676     | 2116  | 88.11       |
|    | Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                                 | Paket  | 17792  | 15676     | 2116  | 88.11       |
|    | Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                                         | Buku   | 17792  | 15676     | 2116  | 88.11       |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                      | Paket  | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Gel USG                                                                                                                   | Botol  | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | <b>(untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)</b>                           |        |        |           |       |             |
|    | Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;                                                           | Orang  | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | <b>(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"</b> |        |        |           |       |             |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                | Orang  | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | <b>(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)</b>                                                                          |        |        |           |       |             |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                  | Orang  | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | <b>(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)</b>                                                                       |        |        |           |       |             |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                     | Orang  | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                            | Orang  | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)                                                                  | Orang  | 17792  | 14450     | 3342  | 81.22       |
|    | <b>(Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)</b>                 |        |        |           |       |             |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                       | SATUAN   | TARGET | TERLAYANI | SISA | CAPAIAN (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|------|-------------|
| 2  | <b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>                                                                                                                                             |          |        |           |      |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                                                                                                              | Orang    | 16984  | 14378     | 2606 | 84.66       |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                           |          |        |           |      |             |
|    | Formulir partograf                                                                                                                                                                  | Formulir | 16984  | 14428     | 2556 | 84.95       |
|    | Kartu ibu/rekam medis ibu                                                                                                                                                           | Paket    | 16984  | 14428     | 2556 | 84.95       |
|    | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)<br>(Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)                                                         | Buku     | 16984  | 14428     | 2556 | 84.95       |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                | Paket    | 31     | 31        | 0    | 100         |
|    | Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi<br>(angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan) | Orang    | 31     | 31        | 0    | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan<br>(angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)                                                                                                            | Paket    | 31     | 31        | 0    | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat<br>(angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)                                                                                                           | Orang    | 31     | 31        | 0    | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                               | Orang    | 31     | 31        | 0    | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                      | Orang    | 31     | 31        | 0    | 100         |
| 3  | <b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>                                                                                                                                          |          |        |           |      |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                                                | Orang    | 14194  | 14316     | -122 | 100         |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                           |          |        |           |      |             |
|    | Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)                                                                                                                                | Vaksin   | 1419   | 12239     | 1955 | 86.23       |
|    | Vitamin K1 injeksi                                                                                                                                                                  | Ampul    | 1419   | 14316     | -122 | 100         |
|    | Salep/tetes mata antibiotik                                                                                                                                                         | Orang    | 1419   | 14316     | -122 | 100         |
|    | Formulir bayi baru lahir                                                                                                                                                            | Formulir | 1419   | 14316     | -122 | 100         |
|    | Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)                                                                                                                                       | Formulir | 1419   | 14316     | -122 | 100         |
|    | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                                                                                                                   | Buku     | 1419   | 14316     | -122 | 100         |
|    | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                | Paket    | 1419   | 14316     | -122 | 100         |
|    | Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak                                                                                                                                         | Orang    | 31     | 31        | 0    | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                            | Orang    | 31     | 31        | 0    | 100         |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                         | SATUAN   | TARGET | TERLAYANI | SISA   | CAPAIAN (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-------------|
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                            | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                 | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku                         | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                        | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Kader Kesehatan                                                                       | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
| 4  | <b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>                                                     |          |        |           |        |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                | Orang    | 50659  | 42657     | 8002   | 84.20       |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                             |          |        |           |        |             |
|    | Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | Dokumen  | 50659  | 42657     | 8002   | 84.20       |
|    | Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)                                           | Formulir | 50659  | 42657     | 8002   | 84.20       |
|    | Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                                     | Orang    | 50659  | 42657     | 8002   | 84.20       |
|    | Vitamin A Biru<br>(sesuai standar 6-11 bulan)                                         | Kapsul   | 6893   | 6789      | 104    | 98.49       |
|    | Vitamin A Merah<br>(sesuai standar 12-59 bulan)                                       | Kapsul   | 50659  | 48765     | 1894   | 96.26       |
|    | Vaksin imunisasi dasar: BCG                                                           | Vaksin   | 709    | 614       | 95     | 86.60       |
|    | Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes                                                   | Vaksin   | 5677   | 4639      | 1038   | 81.72       |
|    | Vaksin imunisasi dasar: IPV                                                           | Vaksin   | 5677   | 3382      | 2295   | 59.57       |
|    | Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib                                                  | Vaksin   | 8516   | 6366      | 2150   | 74.75       |
|    | Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella                                              | Vaksin   | 1419   | 1315      | 104    | 92.67       |
|    | Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib                                              | Vaksin   | 3782   | 1872      | 1910   | 49.50       |
|    | Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella                                          | Vaksin   | 1890   | 961       | 929    | 50.85       |
|    | Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)                                              | Unit     | 573372 | 429905    | 143467 | 74.98       |
|    | Peralatan Anafilaktik                                                                 | Paket    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Formula Terapi Gizi Buruk                                                             | Paket    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                 | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                              | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                            | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                        | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Guru PAUD                                                                             | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Kader Kesehatan                                                                       | Orang    | 31     | 31        | 0      | 100         |
| 5  | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>                                 |          |        |           |        |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>                                                | Orang    | 51337  | 66120     | -14783 | 100         |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                             |          |        |           |        |             |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN   | TARGET | TERLAYANI | SISA   | CAPAIAN (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-------------|
|    | Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)                                                                                                                                                                     | Buku     | 51337  | 66120     | -14783 | 100         |
|    | Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan<br>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)                                                                                          | Buku     | 51337  | 66120     | -14783 | 100         |
|    | Kuesioner skrining kesehatan<br>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)                                                                                                                                                                                             | Dokumen  | 51337  | 66120     | -14783 | 100         |
|    | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah<br>(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)                                                                | Formulir | 51337  | 66120     | -14783 | 100         |
|    | Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah<br>(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)                                                                  | Formulir | 646    | 0         | 646    | 0.00        |
|    | Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah<br>(Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota) | Tablet   | 30620  | 0         | 30620  | 0.00        |
|    | Alat Pemeriksaan Hb<br>(Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)                                                                                                                                                 | Alat     | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Media promosi kesehatan<br>(Media khusus remaja sehat)                                                                                                                                                                                                                 |          |        |           |        |             |
|    | Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)<br>(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)                                                                | Strip    | 51337  | 0         | 51337  | 0           |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                           | SATUAN  | TARGET | TERLAYANI | SISA   | CAPAIAN (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|--------|-------------|
|    | Media promosi kesehatan<br>(Media khusus remaja sehat)                                                                                                                                                  | Paket   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)<br>(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara) | Vaksin  | 13421  | 1860      | 11561  | 13.86       |
|    | Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi                                                                                                                                                                       | Orang   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                                                | Orang   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                                              | Orang   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                                          | Orang   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                                                   | Orang   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                          | Orang   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru                                                                                                                                | Orang   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor                                                                                          | Orang   | 31     | 31        | 0      | 100         |
| 6  | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>                                                                                                                                                          |         |        |           |        |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                                                                    | Orang   | 545033 | 275162    | 269871 | 50.49       |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                                               |         |        |           |        |             |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                    | Paket   | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)                                                                                                                                                             | Unit    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Alat : Tensimeter                                                                                                                                                                                       | Unit    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Alat : Glukometer                                                                                                                                                                                       | Unit    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Alat: Alat Pemeriksa Hb                                                                                                                                                                                 | Unit    | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol                                                                                                                                                      | Unit    | 545033 | 275162    | 269871 | 50.49       |
|    | Alat : KIT IVA Tes                                                                                                                                                                                      | Unit    | 31     | 22        | 9      | 70.97       |
|    | Strip dan Reagen pemeriksaan Hb                                                                                                                                                                         | Unit    | 545033 | 275162    | 269871 | 50.49       |
|    | Kit Ophthalmologi Komunitas                                                                                                                                                                             | Unit    | 31     | 0         | 31     | 0           |
|    | Kuesioner PUMA<br>(Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)                                                                                                                                    | Dokumen | 31     | 0         | 31     | 0           |
|    | Alat Pelayanan KB                                                                                                                                                                                       | Unit    | 93     | 93        | 0      | 100         |
|    | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)                                                                                                              | Dokumen | 31     | 31        | 0      | 100         |





| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                              | SATUAN | TARGET | TERLAYANI | SISA   | CAPAIAN (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|-------------|
|    | Vaksin Tetanus Difteri (td)                                                                                                                | Ampul  | 2474   | 1079      | 1395   | 43.61       |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                      | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                   | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                 | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                             | Orang  | 35     | 35        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                             | Orang  | 70     | 70        | 0      | 100         |
|    | Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                                | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |
| 7  | <b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>                                                                                                |        |        |           |        |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                       | Orang  | 37148  | 54023     | -16875 | 100         |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                  |        |        |           |        |             |
|    | Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter | Paket  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Glukometer/alat pemeriksaan gula darah                                                                                                     | Paket  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Alat pemeriksaan kolesterol                                                                                                                | Paket  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol                                            | Paket  | 37148  | 54023     | -16875 | 100         |
|    | Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)        | Paket  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya                                                                             | Buku   | 37148  | 54023     | -16875 | 100         |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                       | Paket  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                      | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                   | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                 | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                             | Orang  | 35     | 35        | 0      | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                             | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |
|    | Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu                                                                                | Orang  | 31     | 31        | 0      | 100         |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                     | SATUAN   | TARGET | TERLAYANI | SISA  | CAPAIAN (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------|
| 8  | <b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>                                                                                                                   |          |        |           |       |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                              | Orang    | 183625 | 102060    | 81565 | 55.58       |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                         |          |        |           |       |             |
|    | Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)<br>(panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2) | Paket    | 183625 | 101160    | 82465 | 55.09       |
|    | Obat Hipertensi                                                                                                                                                   | Paket    | 100000 | 100000    | 0     | 100         |
|    | Tensimeter<br>(mengukur tekanan darah)                                                                                                                            | Unit     | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)                                                                                               | Aplikasi | 183625 | 101160    | 82465 | 55.09       |
|    | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)<br>(peningkatan pengetahuan masyarakat)                                                                      | Paket    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                             | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                          | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                        | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                    | Orang    | 35     | 35        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku                                                                                                     | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                             | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                    | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
| 9  | <b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>                                                                                                             |          |        |           |       |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                              | Orang    | 6778   | 8403      | -1625 | 100         |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                         |          |        |           |       |             |
|    | Obat Diabetes Melitus                                                                                                                                             | Paket    | 50000  | 50000     | 0     | 100         |
|    | Fotometer atau Glukometer<br>(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)                                                   | Unit     | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet               | Unit     | 81336  | 8378      | 72958 | 10.30       |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                               | SATUAN   | TARGET | TERLAYANI | SISA  | CAPAIAN (%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------|-------------|
|    | Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)                               | Formulir | 6778   | 8378      | -1600 | 100         |
|    | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                        | Paket    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular) |          |        |           |       |             |
|    | Tenaga medis : Dokter                                                                                                                                                                                       | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                                                                                                    | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                                                                                                  | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                                                                                                       | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                                                                                              | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi                                                                                                                                                                              | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)                                                                                                                                    | Orang    | 31     | 31        | 0     | 100         |
| 10 | <b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>                                                                                                                                          |          |        |           |       |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                                                                        | Orang    | 1241   | 1148      | 93    | 92.51       |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                                                   |          |        |           |       |             |
|    | Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)                                                                                             | Buku     | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | bentuk fisik atau elektronik)                                                                                                                                                                               |          |        |           |       |             |
|    | Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)                                                                                                                                                               | Jenis    | 11     | 5         | 6     | 45.45       |
|    | Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi                                                                                                                           | Formulir | 1241   | 1148      | 93    | 92.51       |
|    | (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)                                                                                                                       |          |        |           |       |             |
|    | Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan                                                                                                                             | Formulir | 1241   | 1148      | 93    | 92.51       |
|    | (pencatatan dan pelaporan)                                                                                                                                                                                  |          |        |           |       |             |
|    | Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                                                                                        | Media    | 1241   | 1148      | 93    | 92.51       |



| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                    | SATUAN  | TARGET | TERLAYANI | SISA  | CAPAIAN (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|-------|-------------|
|    | Tenaga kesehatan : Dokter                                                                                                        | Orang   | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa                             | Orang   | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)                                                                        |         |        |           |       |             |
|    | Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.                                                                              |         | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga profesional lainnya                                                                                                       | Orang   | 31     | 31        | 0     | 100         |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                                                                   |         |        |           |       |             |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI                                                                                                    | Orang   | 14371  | 13139     | 1232  | 91.43       |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                               |         |        |           |       |             |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                             | Paket   | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Reagen Zn TB                                                                                                                     | Kit     | 14371  | 541       | 13830 | 3.76        |
|    | Masker bedah dan Masker N95                                                                                                      | Paket   | 14371  | 13918     | 453   | 96.85       |
|    | Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering               | Paket   | 14371  | 14528     | -157  | 100         |
|    | Katrid tes cepat molekuler                                                                                                       | Test    | 14371  | 13139     | 1232  | 91.43       |
|    | Formulir pencatatan dan pelaporan                                                                                                | Dokumen | 14371  | 1220      | 13151 | 8.49        |
|    | Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)                                                                                       | Dokumen | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tuberkulin                                                                                                                       | Vial    | 111    | 111       | 0     | 100         |
|    | Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru                                                      | Orang   | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                       | Orang   | 19     | 19        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian                                                                                            | Orang   | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat                                                                                   | Orang   | 9      | 9         | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)                                                                       | Orang   | 31     | 31        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Radiografer                                                                                                   | Orang   | 3      | 3         | 0     | 100         |
|    | Kader Kesehatan                                                                                                                  | Orang   | 155    | 155       | 0     | 100         |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) |         |        |           |       |             |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI                                                                                                    | Orang   | 21916  | 11555     | 10361 | 52.72       |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                                                                               |         |        |           |       |             |
|    | Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                             | Paket   | 31     | 31        | 0     | 100         |

| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                          | SATUAN | TARGET | TERLAYANI | SISA  | CAPAIAN (%) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|-------|-------------|
|    | Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama                                                                                      | Test   | 21916  | 11555     | 10361 | 52.72       |
|    | Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai | Paket  | 21916  | 11555     | 10361 | 52.72       |
|    | Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK                    | Paket  | 21916  | 11555     | 10361 | 52.72       |
|    | Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin                                               | Orang  | 34     | 34        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Bidan                                                                                                               | Orang  | 34     | 26        | 8     | 76.47       |
|    | Tenaga kesehatan : Perawat                                                                                                             | Orang  | 34     | 21        | 13    | 61.76       |
|    | Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)                                                                            | Orang  | 34     | 34        | 0     | 100         |
|    | Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat                                                                                         | Orang  | 34     | 34        | 0     | 100         |
|    | Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan                                              | Orang  | 34     | 34        | 0     | 100         |

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kampar dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Pelayanan Bidang Kesehatan pada tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

| NO | PENDANAAN                                     | PAGU              |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | APBD KAB. KAMPAR                              | 2,862,581,853,723 |
| 2  | ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH      | 347,427,755,778   |
| 3  | ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD | 17,006,858,850    |
|    | <b>APBD</b>                                   | 17,006,858,850    |
|    | A. APBD MURNI                                 | 5,834,294,850     |
|    | B. APBD DAU                                   | 0                 |
|    | C. APBD DAK FISIK                             | 0                 |
|    | D. APBD DAK NON FISIK                         | 11,172,564,000    |
|    | E. DANA BAGI HASIL                            |                   |

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                               | PERENCANAAN          | PELAKSANAAN          | SERAPAN      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1  | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>          | <b>9,524,808,850</b> | <b>9,047,940,148</b> | <b>94.99</b> |
| 1  | <b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>9,524,808,850</b> | <b>9,047,940,148</b> | <b>94.99</b> |
| 1  | 1 Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil                                                 | 1,359,722,650        | 1,258,514,600        | 92.56        |
| 1  | 2 Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin                                              | 432,434,000          | 308,870,644          | 71.43        |
| 1  | 3 Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir                                           | 202,374,200          | 201,842,100          | 99.74        |
| 1  | 4 Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita                                                    | 236,536,300          | 235,121,300          | 99.40        |
| 1  | 5 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                | 1,922,811,300        | 1,813,830,550        | 94.33        |
| 1  | 6 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif                                       | 208,837,200          | 206,501,154          | 98.88        |
| 1  | 7 Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut                                          | 19,998,800           | 19,950,000           | 99.76        |
| 1  | 8 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi                                      | 43,710,000           | 43,110,000           | 98.63        |
| 1  | 9 Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus                                | 1,487,077,900        | 1,443,248,550        | 97.05        |
| 1  | 10 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat                         | 13,030,000           | 13,030,000           | 100          |
| 1  | 11 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                               | 3,453,301,500        | 3,382,426,250        | 97.95        |
| 1  | 12 Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                       | 144,975,000          | 121,495,000          | 83.80        |

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan SPM di Bidang Kesehatan adapun Personil yang mendukung pada setiap jenis pelayanan :

##### ❖ Personil Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

| NO | Kecamatan       | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                              |               |
|----|-----------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
|    |                 |                | Nama Lengkap                            | NO HP         |
| 1  | Bangkinang Kota | Bangkinang     | Leli Rahmayanti, S. S.Tr.Keb            | 6281378012012 |
| 2  | Kampar          | Air Tiris      | <a href="#">Eka Afrianita, S.Tr.Keb</a> | 08126830132   |
| 3  | Tambang         | Tambang        | DESSY HAYATI S,A.Md.Keb                 | 082297631718  |



|    |                       |                |                                                |                |
|----|-----------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Rinawanty s,Tr,Keb                             | 82172839877    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Miswarni, <a href="#">S.Tr</a> , Keb           | 82388790630    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb                        | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Sri Rezeki Kurniasih, Amd.Keb                  | 081378294601   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Henni Widya, <a href="#">S.Tr</a> .Keb         | 085271900068   |
|    |                       | Kubang Jaya    | <a href="#">BERTY DWIYANTI, S.Tr.Keb</a>       | 081275763741   |
|    |                       | Pangkalan Baru | Kurrota Ayuni,SST                              | 082383714996   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | Hasnidawati, S.Tr.Keb                          | 081261453814   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | Mailinda Yenti, S.Keb                          | 82384851821    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | <a href="#">Anita Lasri, S.Tr.Keb</a>          | 082315164676   |
|    |                       | Batu Sasak     | <a href="#">Riwen, S.Tr.Keb</a>                | 082391793599 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | Bdn. YENI AFITA, SST                           | 08127589795    |
|    |                       | Pantai Cermin  | Bd.Oktrika, S.Tr.Keb                           | 081266400734   |
|    |                       | Tapung         | Murniati, Amd.Keb                              | 082197703653   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | Jamlah,Amd.Keb                                 | 82388478653    |
|    |                       | Tanah Tinggi   | Anita Purwati, <a href="#">S.Tr</a> .Keb       | 085239661954   |
| 12 | Tapung Hulu           | Suka Ramai     | Sri Rispati Ningrum                            | 081215332733   |
|    |                       | Sinama Nenek   | Lusi Adelia, S.Keb                             | 082285605709   |
| 13 | Salo                  | Salo           | Reti Sapatri, SST                              | 081384217272   |
| 14 | Rumbio Jaya           | Rumbio         | Noprianti, Amd.Keb                             | 81371826881    |
| 15 | Bangkinang            | Laboy Jaya     | Sri Zulaikha, STr. Keb                         | 085278920561   |
| 16 | Perhentian Raja       | Pantai Raja    | Etika Novita, Amd.Keb                          | 6281378370119  |
| 17 | Kampar Timur          | Kampa          | Bdn. Wati Hartini, S.Tr.Keb                    | 082383995015   |
| 18 | Kampar Utara          | Sawah          | <a href="#">Bd. Riema Dona Silvia,S.Tr.Keb</a> | 0813-6535-8166 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah    | Simalinyang    | Arisma Jufriani, Am.Keb                        | 081276457887   |
| 20 | Gunung Sahilan        | Gunung Sahilan | YASNIDAR, Amd.Keb.                             | 81378702277    |
|    |                       | Gunung Sari    | ELMAHERA AMKEB                                 | 0852-7811-1176 |
| 21 | Koto Kampar Hulu      | Sibiruang      | Helni Ramzah,Str.Keb                           | 82386288879    |

#### ❖ Personil Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                             |               |
|----|-----------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                           | NO HP         |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Leli Rahmayanti,S. S.Tr.Keb            | 6281378012012 |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | <a href="#">Eka Afrianita,S.Tr.Keb</a> | 08126830132   |
| 3  | Tambang               | Tambang        | DESSY HAYATI S,A.Md.Keb                | 082297631718  |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Rinawanty,S,Tr,keb                     | 82172839877   |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Miswarni, <a href="#">S.Tr</a> , Keb   | 82388790630   |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb                | 82253391892   |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Nelly Suryani, S.Tr.Keb                | 085265888488  |



|    |                    |                |                                                |                |
|----|--------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| 6  | Siak Hulu          | Pandau Jaya    | Henni Widya, <a href="#">S.Tr.Keb</a>          | 085271900068   |
|    |                    | Kubang Jaya    | <a href="#">BERTY DWIYANTI, S.Tr.Keb</a>       | 081275763741   |
|    |                    | Pangkalan Baru | Kurrota Ayuni,SST                              | 082383714996   |
| 7  | Kampar Kiri        | Lipat Kain     | HASNIDAWATI, S.Tr.Keb                          | 081261453814   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir  | Sungai Pagar   | Mailinda Yenti, S.Keb                          | 82384851821    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu   | Gema           | <a href="#">Yulisma, S.Tr.Keb</a>              | 085272195067   |
|    |                    | Batu Sasak     | <a href="#">Riwen, S.Tr.Keb</a>                | 082391793599 . |
| 10 | Tapung             | Petapahan      | Bdn. YENI AFITA, SST                           | 08127589795    |
|    |                    | Pantai Cermin  | Bd.Oktrika, S.Tr.Keb                           | 081266400734   |
|    |                    | Tapung         | Murniati, Amd.Keb                              | 082197703653   |
| 11 | Tapung Hilir       | Kota Garo      | JamlaH,Amd.Keb                                 | 82388478653    |
|    |                    | Tanah Tinggi   | Anita Purwati, <a href="#">S.Tr.Keb</a>        | 085239661954   |
| 12 | Tapung Hulu        | Suka Ramai     | Sri Rispati Ningrum                            | 081215332733   |
|    |                    | Sinama Nenek   | Lusi Adelia, S.Keb                             | 082285605709   |
| 13 | Salo               | Salo           | Reti Sapatri, SST                              | 081384217272   |
| 14 | Rumbio Jaya        | Rumbio         | Noprianti, Amd.Keb                             | 81371826881    |
| 15 | Bangkinang         | Laboy Jaya     | Sri Zulaikha, STr. Keb                         | 085278920561   |
| 16 | Perhentian Raja    | Pantai Raja    | Etika Novita, Amd.Keb                          | 6281378370119  |
| 17 | Kampar Timur       | Kampa          | Bdn. Wati Hartini, S.Tr.Keb                    | 082383995015   |
| 18 | Kampar Utara       | Sawah          | <a href="#">Bd. Riema Dona Silvia,S.Tr.Keb</a> | 0813-6535-8166 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | Arisma Jufriani, Am.Keb                        | 081276457887   |
| 20 | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | YASNIDAR, Amd.Keb.                             | 81378702277    |
|    |                    | Gunung Sari    | ELMAHERA AMKEB                                 | 0852-7811-1176 |
| 21 | Koto Kampar Hulu   | Sibiruang      | Helni Ramzah,Str.Keb                           | 82386288876    |

#### ❖ Personil Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                               |               |
|----|-----------------------|----------------|------------------------------------------|---------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                             | NO HP         |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Leli Rahmayanti,S. S.Tr.Keb              | 6281378012012 |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | <a href="#">Eka Afrianita,S.Tr.Keb</a>   | 08126830132   |
| 3  | Tambang               | Tambang        | DESSY HAYATI S,A.Md.Keb                  | 082297631718  |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Rinawanty,S,Tr,Keb                       | 82172839877   |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Miswarni, <a href="#">S.Tr</a> , Keb     | 82388790630   |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb                  | 82253391892   |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Ria Dewi Yanti, STr.Keb                  | 08117502013   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Henni Widya, <a href="#">S.Tr.Keb</a>    | 085271900068  |
|    |                       | Kubang Jaya    | <a href="#">BERTY DWIYANTI, S.Tr.Keb</a> | 081275763741  |
|    |                       | Pangkalan Baru | Kurrota Ayuni,SST                        | 082383714996  |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | HASNIDAWATI, S.Tr.Keb                    | 081261453814  |





|    |                    |                |                                                |                |
|----|--------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
| 8  | Kampar Kiri Hilir  | Sungai Pagar   | Mailinda Yenti, S.Keb                          | 82384851821    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu   | Gema           | Lira Hersi, Amd.Keb                            | 081261449950   |
|    |                    | Batu Sasak     | <a href="#">Riwen, S.Tr.Keb</a>                | 082391793599 . |
| 10 | Tapung             | Petapahan      | Bdn. YENI AFITA, SST                           | 08127589795    |
|    |                    | Pantai Cermin  | Bd.Oktrika, S.Tr.Keb                           | 081266400734   |
|    |                    | Tapung         | Murniati, Amd.Keb                              | 082197703653   |
| 11 | Tapung Hilir       | Kota Garo      | Jamlah,Amd.Keb                                 | 82388478653    |
|    |                    | Tanah Tinggi   | Anita Purwati, <a href="#">S.Tr.Keb</a>        | 085239661954   |
| 12 | Tapung Hulu        | Suka Ramai     | Sri Rispati Ningrum                            | 081215332733   |
|    |                    | Sinama Nenek   | Lusi Adelia, S.Keb                             | 082285605709   |
| 13 | Salo               | Salo           | Reti Sapatri, SST                              | 081384217272   |
| 14 | Rumbio Jaya        | Rumbio         | Noprianti, Amd.Keb                             | 81371826881    |
| 15 | Bangkinang         | Laboy Jaya     | Sri Zulaikha, STr. Keb                         | 085278920561   |
| 16 | Perhentian Raja    | Pantai Raja    | Etika Novita, Amd.Keb                          | 6281378370119  |
| 17 | Kampar Timur       | Kampa          | Bdn. Wati Hartini, S.Tr.Keb                    | 082383995015   |
| 18 | Kampar Utara       | Sawah          | <a href="#">Bd. Riema Dona Silvia,S.Tr.Keb</a> | 0813-6535-8166 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | Arisma Jufriani, Am.Keb                        | 081276457887   |
| 20 | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | YASNIDAR, Amd.Keb.                             | 81378702277    |
|    |                    | Gunung Sari    | ELMAHERA AMKEB                                 | 0852-7811-1176 |
| 21 | Koto Kampar Hulu   | Sibiruang      | Helni Ramzah,Str.Keb                           | 82386288879    |

#### ❖ Personil Pelayanan Kesehatan Balita

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                                |                |
|----|-----------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                              | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Mukhtia Diana Sari, Amd. Keb              | 6281277846924  |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | Ariani                                    | 082169557747   |
| 3  | Tambang               | Tambang        | DESSY HAYATI S,A.Md.Keb                   | 082297631718   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Bd.Renny Solina,S,Tr,Keb                  | 82169081563    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Rinawati, AMD.Keb                         | 81365080505    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb                   | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Hertina, Amd.Keb                          | 081371952703   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Siti Aminah,AMG                           | 081268679086   |
|    |                       | Kubang Jaya    | <a href="#">SRI WAHYUNI, S.Tr.Keb</a>     | 081371564780   |
|    |                       | Pangkalan Baru | Elviana, Amd.Keb                          | 085271016650   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | HASNIDAWATI, S.Tr.Keb                     | 081261453814   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | Devis Hariyani, SKM, <a href="#">M.KM</a> | 81267276977    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | Anti Yulianti CA, Amd.Gz                  | 081275983662   |
|    |                       | Batu Sasak     | Sisi Asika, Amd.Gz                        | 082286832428 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | Bdn. YENI AFITA, SST                      | 08127589795    |



|    |                    |                |                                                |                |
|----|--------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------|
|    |                    | Pantai Cermin  | Bd.Oktrika, S.Tr.Keb                           | 081266400734   |
|    |                    | Tapung         | Murniati, Amd.Keb                              | 082197703653   |
| 11 | Tapung Hilir       | Kota Garo      | Jamlah,Amd.Keb                                 | 82388478653    |
|    |                    | Tanah Tinggi   | Kasmiana, Amk                                  | 082261693429   |
| 12 | Tapung Hulu        | Suka Ramai     | Yusuf Suryanto                                 | 085265639995   |
|    |                    | Sinama Nenek   | Lusi Adelia, S.Keb                             | 082285605709   |
| 13 | Salo               | Salo           | Reti Sapatri, SST                              | 081384217272   |
| 14 | Rumbio Jaya        | Rumbio         | Mauli rafni, Amg                               | 081287181582   |
| 15 | Bangkinang         | Laboy Jaya     | Liza Fahlefi, Amd. Keb                         | 082385221792   |
| 16 | Perhentian Raja    | Pantai Raja    | Etika Novita, Amd.Keb                          | 6281378370119  |
| 17 | Kampar Timur       | Kampa          | Bdn. Yeni Gusnita, S.Tr.Keb                    | 081261738088   |
| 18 | Kampar Utara       | Sawah          | <a href="#">Bd. Riema Dona Silvia,S.Tr.Keb</a> | 0813-6535-8166 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | Agustiarma Ambarita, Amd.Gz                    | 085271418569   |
| 20 | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | YASNIDAR, Amd.Keb.                             | 81378702277    |
|    |                    | Gunung Sari    | WULAN ANGGRAINI S GZ                           | 0812-7605-3629 |
| 21 | Koto Kampar Hulu   | Sibiruang      | Helni Ramzah,Str.Keb                           | 82386288879    |

#### ❖ Personil Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                         |                |
|----|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                       | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | drg. Devitri                       | 6281266549333  |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | <a href="#">NUR AL FISYAHRI.ST</a> | 081363667096   |
| 3  | Tambang               | Tambang        | drg.NATRIANA DESFARINI             | 081268333336   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Annisa Rahmayuni,A,Md,Kes          | 82170296546    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | drg. Lusy Nofrike                  | 885274880195   |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb            | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Cony Anda Renta Br S, AMKG         | 08117531991    |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | drg.Widia Ilanda                   | 082285234412   |
|    |                       | Kubang Jaya    | drg. ERVINA MARICE                 | 085272935230   |
|    |                       | Pangkalan Baru | drg.Asrina Ardila                  | 081368107484   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | YULIA ULFA,Amd.Kes                 | 082391947011   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | drg. Mella Sesmarina Anas          | 82171612160    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | Irawati, Amd.Kep                   | 082378965305   |
|    |                       | Batu Sasak     | Ns.Luzi Yenrizal, S.Kep            | 085217078624 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | drg. ADE ANGGRAENI                 | 081210015372   |
|    |                       | Pantai Cermin  | drg. Giovanni Rahmi                | 082362597268   |
|    |                       | Tapung         | drg. Adi Jasman                    | 081363990281   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | PIPIT PITRI ASTARI, AMKG           | 081331667428   |

|    |                    |                |                                    |                |
|----|--------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
|    |                    | Tanah Tinggi   | dr. Maratus Sholikha               | 081268491837   |
| 12 | Tapung Hulu        | Suka Ramai     | drg.Evi Melda                      | 081275758187   |
|    |                    | Sinama Nenek   | Hemyati S,Keb                      | 081267380066   |
| 13 | Salo               | Salo           | drg. Julitha Dewi                  | 081275222922   |
| 14 | Rumbio Jaya        | Rumbio         | drg.Helsa Camelia                  | 085264018025   |
| 15 | Bangkinang         | Laboy Jaya     | <a href="#">Zekrilacici, AM.KG</a> | 085365681235   |
| 16 | Perhentian Raja    | Pantai Raja    | drg. Maryati Angraini              | 6281363419385  |
| 17 | Kampar Timur       | Kampa          | drg. Novira                        | 081361655386   |
| 18 | Kampar Utara       | Sawah          | drg. Kenanga Sri Dewi              | 0821-2269-7258 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | drg. Alrio                         | 081363493775   |
| 20 | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | WENI, STr.Keb.                     | 82170555999    |
|    |                    | Gunung Sari    | UUN NOVBELLA PUTRI SKM             | 0821-7249-1791 |
| 21 | Koto Kampar Hulu   | Sibiruang      | dr.Zeppa Musnicu                   | 81365039888    |

#### ❖ Personil Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                          |                |
|----|-----------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                        | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Ns. Tri Witarti, S.Kep              | 6285214018950  |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | Ns.WIWIT ULFIYENI.S.Kep             | 08127643105    |
| 3  | Tambang               | Tambang        | Ns.NUR AFNI,S.Kep                   | 085271020338   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Yana Hayati, SST                    | 82283559352    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Erfinda Apriliani, Amd.Keb          | 82268403443    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb             | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Minarseh, Amk                       | 081378278873   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Anggri kemalasari                   | 081365452008   |
|    |                       | Kubang Jaya    | Ns. SUSI ANDRAYANI, S.Kep           | 082385242181   |
|    |                       | Pangkalan Baru | ISMAWATI, Amd.Keb                   | 081371563763   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | dr. NUZILA MAHDAYANI                | 082273632900   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | David Bonatua                       | 81378956901    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | <a href="#">Eli Marni, S.Tr.Keb</a> | 082171091962   |
|    |                       | Batu Sasak     | Leni Puspita, AMK                   | 081258458143 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | INDRIYANI DESILIMA R, Amd. Keb      | 081378719488   |
|    |                       | Pantai Cermin  | Marlinawati, Amd.Keb                | 082351577881   |
|    |                       | Tapung         | Ns. Susi Novita, S.Kep              | 085383823821   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | Ns.HOTMAIDA,S.Kep                   | 85218411593    |
|    |                       | Tanah Tinggi   | Lamsi Pasaribu                      | 085363806437   |
| 12 | Tapung Hulu           | Suka Ramai     | Mery Cristiani.P                    | 081365625288   |
|    |                       | Sinama Nenek   |                                     |                |

|    |                    |                |                                                 |                |
|----|--------------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 13 | Salo               | Salo           | <a href="#">Liza Apriani, S.Tr. Keb</a>         | 081277823944   |
| 14 | Rumbio Jaya        | Rumbio         | Tutik Purwati                                   | 085217019412   |
| 15 | Bangkinang         | Laboy Jaya     | dr. Desy Novita                                 | 08117594498    |
| 16 | Perhentian Raja    | Pantai Raja    | Suminarti, Amd.Keb                              | 6281365617272  |
| 17 | Kampar Timur       | Kampa          | Asmaini, Amd.Keb                                | 082213299126   |
| 18 | Kampar Utara       | Sawah          | <a href="#">Bd. Jernilan Siregar, S.Tr. Keb</a> | 0822-8471-3292 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | Arisma Jufriani, Am.Keb                         | 081276457887   |
| 20 | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | dr. OKTRI YETTA WIMARTI                         | 82169660194    |
|    |                    | Gunung Sari    | Roza Destiana AMK                               | 0813-7465-0413 |
| 21 | Koto Kampar Hulu   | Sibiruang      | Susnita ,Str.Keb                                | 82385812014    |

### ❖ Personil Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                            |                |
|----|-----------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                          | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     |                                       |                |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | Ns.ANDESTA.S.Kep                      | 082284072434   |
| 3  | Tambang               | Tambang        | Bd. KASMIDAWATI,S.Tr.Keb              | 082285420761   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Asmanidar, A,Md,Keb                   | 85264803986    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Arjulaini, AMd.Keb                    | 82268610842    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb               | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Ns. Elvi Aznita, S.Kep                | 082284730063   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Fatmawati                             | 081266312821   |
|    |                       | Kubang Jaya    | FERA Z, S.Tr.Keb                      | 082285466954   |
|    |                       | Pangkalan Baru | dr.Dewi Nur Lansia                    | 08116951290    |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | Ns.TATI SUMIRA,S.Kep                  | 085271511813   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | Ns. Rina Hidayah, S.Kep               | 82298029373    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | <a href="#">Yulianiati, S.Tr. Keb</a> | 082390508645   |
|    |                       | Batu Sasak     | Indri Rosmala Dewi, AMK               | 082289537296 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | Bdn. ELMi SUSANTI, S. Tr. Keb         | 085271708253   |
|    |                       | Pantai Cermin  | Bd.Nurhasmi Safitri, S.Tr.Keb         | 081371600040   |
|    |                       | Tapung         | Ns. Susi Novita, S.Kep                | 085383823821   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | Ns.HOTMAIDA,S.Kep                     | 85218411593    |
|    |                       | Tanah Tinggi   | Popy Utami Andayani                   | 81372233320    |
| 12 | Tapung Hulu           | Suka Ramai     | Sri Astuti Rahayu                     | 08117500148    |
|    |                       | Sinama Nenek   |                                       |                |
| 13 | Salo                  | Salo           | Ns. Hafiana. S.Kep                    | 081365205051   |
| 14 | Rumbio Jaya           | Rumbio         | Tutik Purwati                         | 085217019412   |
| 15 | Bangkinang            | Laboy Jaya     |                                       |                |



|    |                    |                |                             |                |
|----|--------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
| 16 | Perhentian Raja    | Pantai Raja    |                             |                |
| 17 | Kampar Timur       | Kampa          | Ns. Fatma Khairul, S.Kep    | 08126825981    |
| 18 | Kampar Utara       | Sawah          | NURWILIS,S.Keb              | 0821-7384-1115 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | Berlian Br Karo, Am. Kep    | 082288623445   |
| 20 | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | SUNARTI, AMd.Keb            | 82125272844    |
|    |                    | Gunung Sari    |                             |                |
| 21 | Koto Kampar Hulu   | Sibiruang      | Reski Yunita Delrah Nst.SKM | 81263229632    |

#### ❖ Personil Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                                    |                |
|----|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                                  | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Ns. Tri Witarti, S.Kep                        | 6285214018950  |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | Ns.WIWIT ULFIYENI.S.Kep                       | 08127643105    |
| 3  | Tambang               | Tambang        | Ns.NUR AFNI,S.Kep                             | 085271020338   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Yana Hayati, SST                              | 82283559352    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Erfinda Apriliani, Amd.Keb                    | 82268403443    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb                       | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Minarseh, Amk                                 | 081378278873   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Anggri kemalasari                             | 081365452008   |
|    |                       | Kubang Jaya    | Ns. SUSI ANDRAYANI, S.Kep                     | 082385242181   |
|    |                       | Pangkalan Baru | ISMAWATI, Amd.Keb                             | 081371563763   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | dr. NUZILA MAHDAYANI                          | 082273632900   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | Ns.David Bonatua                              | 81378956901    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | Riko Saputra, AMK                             | 085272337338   |
|    |                       | Batu Sasak     | Putri Siska Delvia, Amd.Keb                   | 085274626755 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | INDRIYANI DESILIMA R, Amd. Keb                | 081378719488   |
|    |                       | Pantai Cermin  | Marlinawati, Amd.Keb                          | 082351577881   |
|    |                       | Tapung         | Ns. Susi Novita, S.Kep                        | 085383823821   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | Ns.HOTMAIDA,S.Kep                             | 85218411593    |
|    |                       | Tanah Tinggi   | Kaseh, Amd Keb                                | 085213560060   |
| 12 | Tapung Hulu           | Suka Ramai     | Marthalena serly .P                           | 082217603316   |
|    |                       | Sinama Nenek   |                                               |                |
| 13 | Salo                  | Salo           | <a href="#">Liza Apriani, S.Tr. Keb</a>       | 081277823944   |
| 14 | Rumbio Jaya           | Rumbio         | Tutik Purwati                                 | 085217019412   |
| 15 | Bangkinang            | Laboy Jaya     | dr. Desy Novita                               | 08117594498    |
| 16 | Perhentian Raja       | Pantai Raja    | Suminarti, Amd.Keb                            | 6281365617272  |
| 17 | Kampar Timur          | Kampa          | Asmaini, Amd.Keb                              | 082213299126   |
| 18 | Kampar Utara          | Sawah          | <a href="#">Bd. Jernilan Siregar,S.Tr.Keb</a> | 0822-8471-3292 |



|    |                    |                |                         |                |
|----|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 19 | Kampar Kiri Tengah | Simalinyang    | Novelia Angriyani, AMK  | 081365645036   |
| 20 | Gunung Sahilan     | Gunung Sahilan | dr. OKTRI YETTA WIMARTI | 82169660194    |
|    |                    | Gunung Sari    | Roza Destiana AMK       | 0813-7465-0413 |
| 21 | Koto Kampar Hulu   | Sibiruang      | Susnita Str.Keb         | 82385812014    |

❖ **Personil Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)**

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                                    |                |
|----|-----------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                                  | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Ns. Tri Witarti, S.Kep                        | 6285214018950  |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | Ns.WIWIT ULFIYENI.S.Kep                       | 08127643105    |
| 3  | Tambang               | Tambang        | Ns.NUR AFNI,S.Kep                             | 085271020338   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Yana Hayati, SST                              | 82283559352    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Erfinda Apriliani, Amd.Keb                    | 82268403443    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb                       | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Minarseh, Amk                                 | 081378278873   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Anggri kemalasari                             | 081365452008   |
|    |                       | Kubang Jaya    | Ns. SUSI ANDRAYANI, S.Kep                     | 082385242181   |
|    |                       | Pangkalan Baru | ISMAWATI,Amd.Keb                              | 081371563763   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | dr. NUZILA MAHDAYANI                          | 082273632900   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | DNs.David Bonatua, S.Kep                      | 81378956901    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | Riko Saputra, AMK                             | 085272337338   |
|    |                       | Batu Sasak     | Putri Siska Delvia, Amd.Keb                   | 085274626755 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | INDRIYANI DESILIMA R, Amd. Keb                | 081378719488   |
|    |                       | Pantai Cermin  | Marlinawati, Amd.Keb                          | 082351577881   |
|    |                       | Tapung         | Ns. Susi Novita, S.Kep                        | 085383823821   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | Ns.HOTMAIDA,S.Kep                             | 85218411593    |
|    |                       | Tanah Tinggi   | Kaseh, Amd Keb                                | 085213560060   |
| 12 | Tapung Hulu           | Suka Ramai     | Marthalena Serly .P                           | 082217603316   |
|    |                       | Sinama Nenek   |                                               |                |
| 13 | Salo                  | Salo           | <a href="#">Liza Apriani, S.Tr. Keb</a>       | 081277823944   |
| 14 | Rumbio Jaya           | Rumbio         | Tutik Purwati                                 | 085217019412   |
| 15 | Bangkinang            | Laboy Jaya     | dr. Desy Novita                               | 08117594498    |
| 16 | Perhentian Raja       | Pantai Raja    | Suminarti, Amd.Keb                            | 6281365617272  |
| 17 | Kampar Timur          | Kampa          | Asmaini, Amd.Keb                              | 082213299126   |
| 18 | Kampar Utara          | Sawah          | <a href="#">Bd. Jernilan Siregar,S.Tr.Keb</a> | 0822-8471-3292 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah    | Simalinyang    | Novelia Angriyani, AMK                        | 081365645036   |
| 20 | Gunung Sahilan        | Gunung Sahilan | dr. OKTRI YETTA WIMARTI                       | 82169660194    |
|    |                       | Gunung Sari    | Roza Destiana AMK                             | 0813-7465-0413 |
| 21 | Koto Kampar Hulu      | Sibiruang      | Susnita,Str.Keb                               | 82385812014    |

❖ **Personil Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                              |                |
|----|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                            | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Ns. Dewi Erlita. S. Kep                 | 628126880332   |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | Bd,BENI DEA RULCI.S Tr Keb'SKM          | 08127635194    |
| 3  | Tambang               | Tambang        | Ns. ARFA, S.Kep                         | 081275428142   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Sri Hartati, SKM                        | 81276100509    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Sri Hartati, SKM                        | 85265857457    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb                 | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Ns.Titi Sumelda, S.Kep                  | 085376523072   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | dr.aArijal Azmi                         | 081267070133   |
|    |                       | Kubang Jaya    | Ns. Dewi Puspita, S.Kep                 | 085278081810   |
|    |                       | Pangkalan Baru | Pitri Yeni,AMK                          | 082387480400   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | Ns. NENENG SUSANTI, S.Kep               | 081371181855   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | dr. Anne Roseva                         | 81366692188    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | Ns.Tri Yulianto, S.Kep                  | 085374558169   |
|    |                       | Batu Sasak     | Ns.Vivi Yusmanti, S.Kep                 | 085365036572 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | SHINTANI REZEKI, S. Tr. Keb             | 089602602279   |
|    |                       | Pantai Cermin  | Ns.Yayan Sutarwan, S.kep                | 085271348685   |
|    |                       | Tapung         | Muji Iryani, Amd. Keb                   | 081277866733   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | SITI KHASANAH, AMK                      | 82288069585    |
|    |                       | Tanah Tinggi   | dr. Margaretta teter                    | 081276206281   |
| 12 | Tapung Hulu           | Suka Ramai     | Lentianna.P                             | 082388999074   |
|    |                       | Sinama Nenek   |                                         |                |
| 13 | Salo                  | Salo           | <a href="#">Haytun Nufus. S.Tr. Keb</a> | 085265818010   |
| 14 | Rumbio Jaya           | Rumbio         | Devi Suhelti                            | 0885265403201  |
| 15 | Bangkinang            | Laboy Jaya     | Jusmita, STr. Keb                       | 081363704344   |
| 16 | Perhentian Raja       | Pantai Raja    | Ns. Desna Julita, S.Kep                 | 6281267813330  |
| 17 | Kampar Timur          | Kampa          | Ns. Nelda Ningsih, S.Kep                | 081365013444   |
| 18 | Kampar Utara          | Sawah          | Ns. Lilis surianti,S.kep                | 0822-8304-1697 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah    | Simalinyang    | Ervina, Am.Keb                          | 082247085227   |
| 20 | Gunung Sahilan        | Gunung Sahilan | NELIATI, Amd.Keb.                       | 81295017490    |
|    |                       | Gunung Sari    | Rismawati AMK                           | 0812-1635-5501 |
| 21 | Koto Kampar Hulu      | Sibiruang      | Muliati,AMK                             | 81261115755    |



❖ **Personil Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis**

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                |                |
|----|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap              | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Ns.Efriani, S.Kep         | 6285265642119  |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | Ns.LILIK SUPRIYANTI,S.Kep | 085250506516   |
| 3  | Tambang               | Tambang        | Ns. SRI WAHYUNI, S.Kep    | 081275219865   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Desi Yuspera, A,Md,Kep    | 81372480248    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Dewi Asmara, AMK          | 82170005810    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb   | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Ns. Erma Yunita, S.Kep    | 082384285322   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Ririn Novazianty          | 081371850540   |
|    |                       | Kubang Jaya    | Ns. Fitri Yeni, S.Kep     | 081371873290   |
|    |                       | Pangkalan Baru | Trisma Delfira,Amd.Keb    | 085271966622   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | Ns. HERLINA, S.Kep        | 082284809623   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | Elva Adrianson, AMK       | 82173336600    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | Ns. Nurhabibi, S.Kep      | 082218225165   |
|    |                       | Batu Sasak     | Hardiyono, AMK            | 082170870093 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | Ns. Yuni Sastika, S. Kep  | 082389482823   |
|    |                       | Pantai Cermin  | Irwan, A.Md Kep           | 081270809951   |
|    |                       | Tapung         | dr. Novi Listiyani        | 081328140603   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | DIANANTA WIDOLA,Amd.Kep   | 81378948978    |
|    |                       | Tanah Tinggi   | Wakidi, Amk               | 081365557758   |
| 12 | Tapung Hulu           | Suka Ramai     | Nur ainun                 |                |
|    |                       | Sinama Nenek   |                           |                |
| 13 | Salo                  | Salo           | Ns. Lindawati. S. Kep     | 085365724830   |
| 14 | Rumbio Jaya           | Rumbio         | Murniati, Amk             | 081268627274   |
| 15 | Bangkinang            | Laboy Jaya     | Sulistiani, AMK           | 081268879973   |
| 16 | Perhentian Raja       | Pantai Raja    | Ns. Desna Julita, S.Kep   | 6281267813330  |
| 17 | Kampar Timur          | Kampa          | Eni Sriwahyuni, Amd.Kep   | 082321232804   |
| 18 | Kampar Utara          | Sawah          | Nur Aziza, S.Keb          | 0852-7141-8593 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah    | Simalinyang    | Ns. Maria Susanti, S.Kep  | 085263966162   |
| 20 | Gunung Sahilan        | Gunung Sahilan | DINA ANDRIANI,Amd.Keb     | 85117004067    |
|    |                       | Gunung Sari    | NS ARDISON SKEP           | 0823-8742-4273 |
| 21 | Koto Kampar Hulu      | Sibiruang      | Sulisna Ningsih,Amd.Keb   | 8127630917     |



❖ **Personil Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)**

| NO | Kecamatan             | Nama Puskesmas | TAHUN 2024                              |                |
|----|-----------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|
|    |                       |                | Nama Lengkap                            | NO HP          |
| 1  | Bangkinang Kota       | Bangkinang     | Nopendri                                | 628117507516   |
| 2  | Kampar                | Air Tiris      | Ns.RAHMAWATI.S.Kep                      | 085265252159   |
| 3  | Tambang               | Tambang        | dr.RESI PUSPASARI                       | 081371151787   |
| 4  | XIII Koto Kampar Hulu | Batu Besurat   | Rahma Yana, Amd,AK                      | 81213506108    |
|    |                       | Gunung Bungsu  | Dewi Asmara, AMK                        | 82170005810    |
|    |                       | Pulau Gadang   | Meila anugerah, Str.Keb                 | 82253391892    |
| 5  | Kuok                  | Kuok           | Ns. Fajar Ika Wulandari, S.Kep          | 081365525800   |
| 6  | Siak Hulu             | Pandau Jaya    | Ririn Novazianty                        | 081371850540   |
|    |                       | Kubang Jaya    | Sri Sundari, Amd.Keb                    | 085363331990   |
|    |                       | Pangkalan Baru | Ratna Sari,AMK                          | 082389962609   |
| 7  | Kampar Kiri           | Lipat Kain     | FEBRIANI PUTRI, A.Md.A.K                | 082170059017   |
| 8  | Kampar Kiri Hilir     | Sungai Pagar   | Azrina                                  | 81365641291    |
| 9  | Kampar Kiri Hulu      | Gema           | <a href="#">Cici Herlina, S.Tr.Keb</a>  | 082147771985   |
|    |                       | Batu Sasak     | Hardiyono, AMK                          | 082170870093 . |
| 10 | Tapung                | Petapahan      | Dwi Hindriyani, Amd. Keb                | 082285925359   |
|    |                       | Pantai Cermin  | dr. Ridho Nugraha Farhas                | 081363735278   |
|    |                       | Tapung         | Nurul Auliyah, AMK                      | 081270862720   |
| 11 | Tapung Hilir          | Kota Garo      | dr.YESSSI SIMARMATA                     | 85262975045    |
|    |                       | Tanah Tinggi   | winnarso wijaya, amk                    | 081374848310   |
| 12 | Tapung Hulu           | Suka Ramai     | Yusniati                                | 085324918970   |
|    |                       | Sinama Nenek   |                                         |                |
| 13 | Salo                  | Salo           | Nelda Elviba, Amd.Keb                   | 082284721997   |
| 14 | Rumbio Jaya           | Rumbio         | Murniati, Amk                           | 081268627274   |
| 15 | Bangkinang            | Laboy Jaya     | Yuli Fitria, S. Psi                     | 082260564451   |
| 16 | Perhentian Raja       | Pantai Raja    | Ns. Lina Nurhasanah, S.Kep              | 6285360345434  |
| 17 | Kampar Timur          | Kampa          | Ermianti, S.Tr.TLM                      | 08126858165    |
| 18 | Kampar Utara          | Sawah          | Ns. Misrayani,S.Kep                     | 0852-6540-9980 |
| 19 | Kampar Kiri Tengah    | Simalinyang    | <a href="#">Yulida Wansri, S.Tr.Keb</a> | 085278540405   |
| 20 | Gunung Sahilan        | Gunung Sahilan | dr. OKTRI YETTA WIMARTI                 | 82169660194    |
|    |                       | Gunung Sari    | NS DECKY VICTORY SKEP                   | 0859-3489-1681 |
| 21 | Koto Kampar Hulu      | Sibiruang      | Ns.Lisa Marina.S.Kep                    | 82210741651    |

#### 4.2.6 Permasalahan

##### a. Pengumpulan Data

- Data pasien DM dari fasyankes swasta rata-rata puskesmas belum dapat;
- Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk datang ke posbindu/melakukan pemeriksaan kadar gula darah di fasyankes secara rutin;
- Pengelola program sering berganti dan tenaga puskesmas memiliki tugas ganda, kerjasama lintas program di puskesmas belum maksimal;
- Masih rendahnya peran serta desa/kelurahan/kecamatan.

##### b. Penghitungan Kebutuhan

1. Capaian spm hiv kab kota masih rendah (kinerja kepala daerah)
2. Pelayanan antenatal/anc k1 ibu hamil harus memenuhi 10 t, salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium hiv, sifilis dan hepatitis sesuai dengan standar kualitas pelayanan antenatal, tetapi pada kenyataannya ibu hamil tidak dilakukan pemeriksaan hiv, sifilis dan hepatitis oleh puskesmas sehingga berimpact pada rendahnya capaian spm hiv pada populasi ibu hamil.
3. Puskesmas tidak melakukan langkah-langkah yang diinstruksikan oleh program hiv aids dan pims melalui beberapa surat resmi terkait penguatan dan capaian program puskesmas, serta tidak menindaklanjuti dengan menemukan solusi yang sesuai terhadap masalah yang dihadapi.
4. Pemanfaatan dana bok oleh puskesmas untuk layanan hiv luar gedung tidak optimal/sangat minim baik untuk sasaran ibu hamil maupun populasi kunci (wps, transgender/waria, Isl, dan penasun) karena sulit mengakses lokasi/hot spot.
5. Kurang berjalannya koordinasi dan tidak adanya sinkronisasi terkait anggaran dan kegiatan program hiv antara dinas

kesehatan dengan Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD)

6. Belum semua pasien TB dilakukan screening HIV dan
7. Masih ada penanggung jawab program yg belum mengisi permintaan obat dan logistik di aplikasi SITB
8. Stok utk catridge dikabupaten kosong, alokasi belum ada sehingga utk pemeriksaan sampel dahak di layanan TCM harus diperlambat waktu pemeriksaan nya sehingga terjadi penumpukan sampel

**c. Perencanaan dan Penganggaran**

1. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa
2. Kepedulian keluarga dan masyarakat masih rendah dalam hal kepatuhan minum obat pada pasien ODGJ
3. Masih rendahnya peran serta desa/kelurahan/kecamatan \*  
Pengelola program sering berganti dan tenaga puskesmas memiliki tugas ganda, kerjasama lintas program di puskesmas belum maksimal.

**d. Pelaksanaan**

1. Anggaran kegiatan usia produktif berada di seksi KesGa, tidak berada di seksi P2PTM & Keswa
2. Kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk datang ke posbindu/melakukan skrining di fasyankes
3. Pengelola program sering berganti dan tenaga puskesmas memiliki tugas ganda, kerjasama lintas program di puskesmas belum maksimal.
4. Masih rendahnya peran serta desa/kelurahan/kecamatan
5. Kendala di entryan skrining PTM oleh petugas puskesmas pada Aplikasi ASIK.
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk kebutuhan alat dan BMHP skrining PTM.

## 4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

### 4.3.2 Target Pencapaian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar dan targetnya sesuai jenis layanan pada bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 100% secara nasional seperti pada tabel berikut:

| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SATUAN       | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| 1  | <b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |              |        |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orang        | 5628   |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |
|    | <b>JARINGAN PERPIPAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |
| 1  | Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM                   | Rumah Tangga | 767    |
| 2  | Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau | Rumah Tangga | 767    |

| NO       | JENIS LAYANAN                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SATUAN       | TARGET |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|          |                                                            | <b>BUKAN JARINGAN PERPIPAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |
|          | 3                                                          | Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM                                                                                                                                                                                                                                  | Rumah Tangga | 640    |
|          | 4                                                          | Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau                                                                                                                                                                                                                | Rumah Tangga | 640    |
| <b>2</b> | <b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |
|          | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Orang        | 2000   |
|          | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |        |
|          | 1                                                          | Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rumah Tangga | 500    |
|          | 2                                                          | Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T | Rumah Tangga | 500    |
|          | 3                                                          | Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar                                                                                                                                                      | Rumah Tangga | 0      |

#### 4.3.3 Realisasi dan Capaian Pelayanan

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2024 pada Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

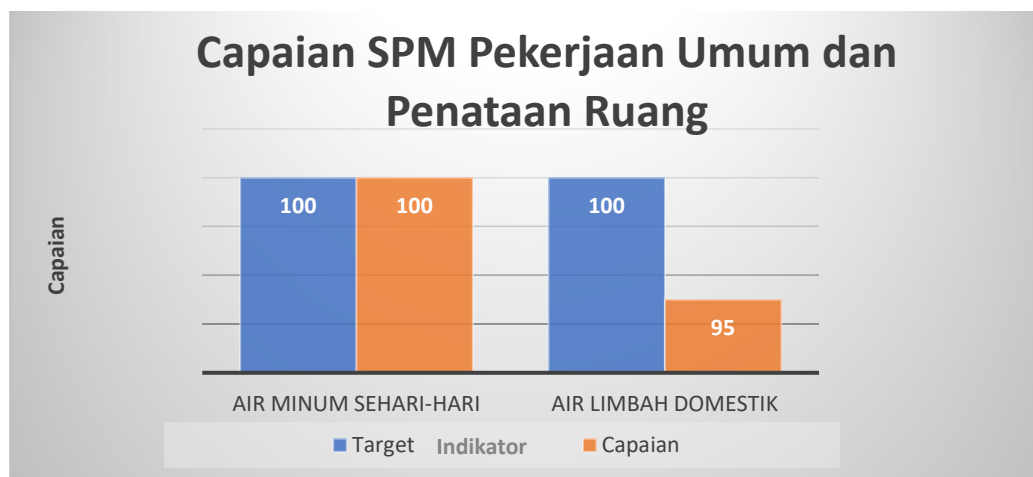


| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SATUAN       | TARGET | TERLAYANI | SISA | CAPAIAN (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-------------|
| 1  | <b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |              |        |           |      |             |
|    | <b>A. Jumlah yang harus dilayani</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Org          | 5628   | 5628      | 0    | 100%        |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |           |      |             |
|    | <b>JARINGAN PERPIPAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |        |           |      |             |
| 1  | Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM                         | Rumah Tangga | 767    | 767       | 0    | 99 %        |
| 2  | Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau       | Rumah Tangga | 767    | 767       | 0    | 100%        |
|    | <b>BUKAN JARINGAN PERPIPAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |        |           |      |             |
| 1  | Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM                   | Rumah Tangga | 640    | 640       | 0    | 100%        |
| 2  | Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau | Rumah Tangga | 640    | 640       | 0    | 100%        |

| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN       | TARGET | TERLAYANI | SISA | CAPAIAN (%) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------|------|-------------|
| 2  | <b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |        |           |      |             |
|    | <b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Orang        | 2000   | 1900      | 100  | 95.00       |
|    | <b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |        |           |      |             |
| 1  | Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rumah Tangga | 500    | 500       | 0    | 100%        |
| 2  | Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T | Rumah Tangga | 500    | 500       | 0    | 100%        |
| 3  | Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar                                                                                                                                                      | Rumah Tangga | 0      | 0         | 0    | 100%        |

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada grafik berikut :

**Grafik 4.2**  
**Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum**



#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Adapun alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam kegiatan penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum untuk tahun 2024 adalah :

| NO | PENDANAAN                                     | PAGU              |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | APBD KAB. KAMPAR                              | 2,862,581,853,723 |
| 2  | ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH      | 0                 |
| 3  | ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD | 12,633,573,514    |
|    | <b>APBD</b>                                   | 12,633,573,514    |
|    | A. APBD MURNI                                 | 12,633,573,514    |

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                     | PERENCANAAN          | PELAKSANAAN | SERAPAN   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| 1  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>                           |                      |             |           |
|    | <b>1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>6,315,832,535</b> | <b>0</b>    | <b>0%</b> |
|    | 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)           | 928,701,270          | 0           | 0%        |
|    | 2 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                               | 5,387,131,265        | 0           | 0%        |



| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                              | PERENCANAAN          | PELAKSANAAN | SERAPAN  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                                              |                      |             |          |
|    | <b>1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>       | <b>6,317,740,979</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> |
|    | 1 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat | 5,647,023,979        | 0           | 0        |
|    | 2 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                      | 670,717,000          | 0           | 0        |

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM di Bidang Pekerjaan Umum pada OPD PUPR didukung oleh personil antara lain :

- PPK Kegiatan;
- Direksi Kegiatan;
- Pengawas Kegiatan;
- Tim PIU;
- Penyedia;
- Kepala Bidang Cipta Karya;
- Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda dan
- Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama.

#### 4.3.6. Permasalahan

Dalam Pencapaian Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2024 terdapatnya beberapa kendala :

##### a. PENGUMPULAN DATA

1. Pengampu Pengumpulan Data sulit untuk menentukan kriteria dan Parameter Penerima dan Pengguna;
2. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
3. Belum ada sistem penyediaan air minum dan sistem penyediaan air limbah yang bersifat regional/lintas kabupaten kota.

b. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

1. Pengampu sulit untuk mengalokasikan anggaran;
2. Sulit untuk menterjemahkan indikator seperti Mutu layanan;
3. Berkurangnya anggaran akibat relokasi;
4. Terbatasnya sarana dan prasarana.

c. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Sistem Perencanaan dan penganggaran kegiatan/program belum murni berbasis SPM;
2. Adanya keterbatasan anggaran menyebabkan tidak semua program/kegiatan SPM tidak dapat diakomodir;
3. Perencanaan dan penganggaran belum mencapai target sasaran yang tepat;
4. Belum semua indikator SPM dapat dengan mudah diintegrasikan dengan RPJMD, Rentra SKPD, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

d. PELAKSANAAN

1. Belum maksimalnya SPAM dan SPALD yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Luasnya wilayah mengakibatkan belum meratanya akses pelayanan;
3. Sulitnya penyediaan lahan untuk pelaksanaan kegiatan SPAM dan SPAL, seperti lahan untuk reservoir SPAM dan lahan untuk tanki septick komunal;
4. Masih rendahnya pemahaman terkait fungsi dari Pembangunan SPAM dan SPALD untuk penerima manfaat, bahkan ada yang menolak Pembangunan dikarenakan system pemeliharannya bahkan retribusi yang terjadi akibat pelayanan yang diberikan. Seperti : keberatan membayar menggunakan air bersih yang dikelola PDAM atau sejenisnya.

#### 4.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Urusan wajib Perumahan Rakyat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ditetapkan 2 (dua) jenis pelayanan dasar skala Kabupaten/Kota, yaitu :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; atau:
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4.4.2 Target Pencapaian SPM

Kedua jenis pelayanan tersebut, secara nasional ditargetkan 100%, seperti terlihat pada tabel berikut :

| NO | JENIS LAYANAN                                                                                                                     | SATUAN | TARGET |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | <b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>                                     |        |        |
|    | A. Jumlah Yang Harus Dilayani                                                                                                     | Orang  | 0      |
|    | B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi                                                                     |        |        |
| 2  | <b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |        |        |
|    | A. Jumlah Yang Harus Dilayani                                                                                                     | Orang  | 0      |
|    | B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi                                                                     |        |        |

#### 4.4.3 Realisasi dan Capaian Layanan

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama tahun 2024 pada Bidang Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman adalah sebagai berikut :

| NO | JENIS LAYANAN                                                                                 | SATUAN | TARGET | TERLAYANI | SISA | CAPAIAN (%) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|------|-------------|
| 1  | <b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b> |        |        |           |      |             |
|    | A. Jumlah yang harus dilayani                                                                 | Org    | 0      | 0         | 0    | 100 %       |
|    | B. Jumlah Mutu (Barang/Jasa/Sdm) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi                                 |        |        |           |      |             |

#### 4.4.5 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk kegiatan Pelaksanaan SPM pada bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Kampar sebesar Rp. 170,015,800, dengan sumber anggaran sebagai berikut :

| NO | PENDANAAN                                     | PAGU              |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | APBD KAB. KAMPAR                              | 2,862,581,853,723 |
| 2  | ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH      | 54,185,064,592    |
| 3  | ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD | 170,015,800       |
|    | <b>APBD</b>                                   | 170,015,800       |
|    | A. APBD MURNI                                 | 170,015,800       |

| N<br>O | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB<br>KEGIATAN                                                                       | PERENCANAAN        | PELAKSANAAN        | SERAPAN       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1      | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                                    |                    |                    |               |
|        | 1 <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>170,015,800</b> | <b>151,336,235</b> | <b>89.01%</b> |
|        | 1 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani                        | 170,015,800        | 151,336,235        | 89.01 %       |
|        | 2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 | 0                  | 0                  | 0 %           |

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar Nomor 800.1/PERKIM/243 tanggal 22 januari 2024 didukung oleh :

| NO | NAMA/NIP                                               | JABATAN DALAM DINAS                                      | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | RUSDI HANIF<br>NIP. 19710707 199903 1 003              | Kepala Dinas                                             | Penanggungjawab   |
| 2  | YULITA SURYA BUANA, st<br>Nip. 19790715 200701 2 007   | Kabid Perumahan                                          | Ketua             |
| 3  | ANDRY BRILIANSAH, ST, MT<br>NIP. 19841229 201001 1 014 | Penata kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Muda | Sekretaris        |
| 4  | AHMAD RAZILAN, SE                                      | Petugas Pengolah Data & Informasi                        | Anggota           |
| 5  | RAFLI, S.hUT                                           | Petugas Pengolah Data & Informasi                        | Anggota           |
| 6  | A. HARYADI LATIF, ST                                   | Petugas Pengolah Data & Informasi                        | Anggota           |

#### **4.4.6 Permasalahan**

Dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat menghadapi kendala antara lain :

##### **1. PENGUMPULAN DATA**

Sudah melakukan pengumpulan data sebagaimana mestinya - Pada tahap pengumpulan data banyak desa tidak memberikan data sesuai format yang ada pada Aplikasi SPM - Sulitnya koordinasi dengan desa yang terpencil karena jarang berkantor - Sebagian desa tidak mau memberikan data karena menganggap pendataan SPM ini tidak ditindaklanjuti.

##### **2. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

Penganggaran dari kegiatan SPM ini hanya bersifat operasional, belum ada penganggaran yang mengarah kepada Pembangunan rumah akibat bencana - Perencanaan untuk Pembangunan rumah akibat bencana sudah dibuat & bisa ditindaklanjuti jika sudah ada regulasinya

#### **4.5 URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Tiga OPD, yaitu:

1. Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

##### **4. 5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

#### 4.5.2 Target SPM

Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Satpol PP terdiri dari 1 (satu) jenis pelayanan dasar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari 1 (satu) jenis pelayanan dasar dan 3 (tiga) jenis pelayanan pada BPBD seperti pada tabel berikut:

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                   | INDIKATOR                                                                               | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum              | Penindakan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum yang melanggar Perda & Perkada | 100 %  |
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Memberikan Informasi Daerah Rawan Bencana kepada Masyarakat                             | 100 %  |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Memberikan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana                           | 100 %  |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Memberikan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                          | 100 %  |
| 5. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                                    | 100 %  |

#### 4.5.3 Realisasi SPM

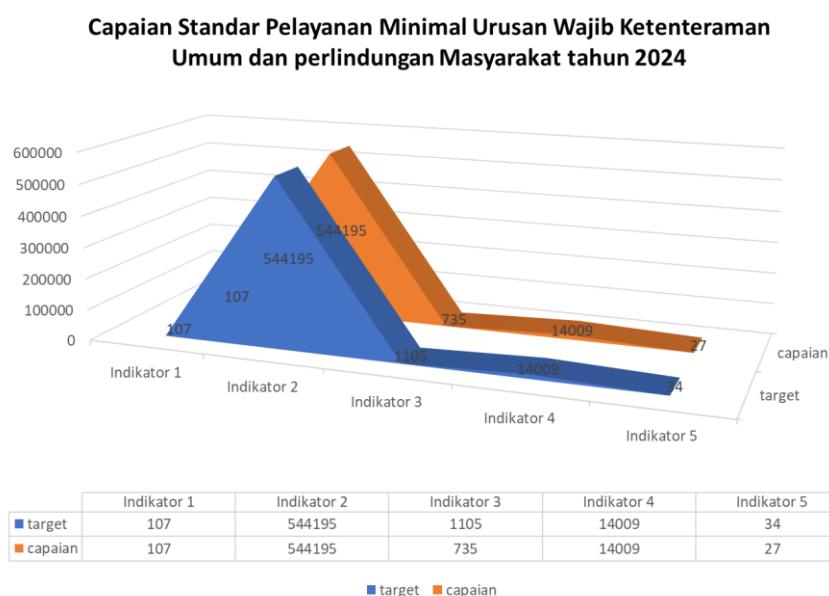
Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Pelayanan, Satpol PP dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2024, adalah seperti pada tabel berikut :

##### a. DPKP, Satpol PP dan BPBD

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                   | INDIKATOR                                                                               | TARGET CAPAIAN | REALISASI / CAPAIAN (Jmlh/%) |
|----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 1. | Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum               | Penindakan terhadap Masyarakat, Aparatur dan Badan Hukum yang melanggar Perda & Perkada | 107            | 107/<br>100%                 |
| 2. | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Penyusunan Kajian Resiko bencana Kabupaten/Kota                                         | 544195         | 544195/<br>100%              |
| 3. | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;                               | 1105           | 735/<br>66.52 %              |
| 4. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Penyediaan logistic penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota             | 14009          | 14009/<br>100 %              |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                | INDIKATOR                                             | TARGET CAPAIAN | REALISASI / CAPAIAN (Jmlh/%) |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 5. | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; | 34             | 27/<br>79.41%                |

Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Ketenteraman Umum dan perlindungan Masyarakat tahun 2024 diatas dapat dilihat pada grafik berikut :



Dari capaian pelayanan dasar pada Bidang Trantibumas telah berada rata-rata hamper 100 % dengan pencapaian keseluruhan adalah sebesar 92,48 %.

### 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

Pada jenis pelayananan dasar ketentraman dan ketertiban umum yang bertindak sebagai opd pengampu adalah Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

| No | Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum                           | Dampak Kegiatan                                                 | Perhitungan Mutu Minimal Layanan Kebuta                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kebutuhan Penyusunan SOP                                                | Pedoman, acuan dan prosedur dalam pelaksanaan tugas di lapangan | Persentase pelaksanaan SOP                                                    |
| 2  | Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM (Satpol PP, PP, PPNS dan Satlinmas) | Kemampuan dan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas         | Jumlah SDM yang sudah mengikuti Diklat                                        |
| 3  | Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana Satpol PP                          | Penegakan Perda                                                 | Terjangkau cakupan wilayah trantibum                                          |
| 4  | Pelayanan perbaikan materil                                             | Penegakan Perda                                                 | Kemampuan Pemerintah dalam hal mengganti kerugian warga negara yang terdampak |
| 5  | Pelayanan Pengobatan                                                    | Penegakan Perda                                                 | Kemampuan Pemerintah dalam hal biaya pengobatan                               |
| 6  | Kebutuhan lainnya                                                       | Penegakan Perda                                                 | Kemampuan Pemda dalam hal pemenuhan dana yang tak terduga                     |

## 2. Pelayanan informasi rawan bencana

Pada jenis Pelayanan informasi rawan bencana yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana yang meliputi kegiatan penyusunan kajian resiko bencana Kabupaten/Kota dan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana) secara terperinci kepada warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar rawan bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah



melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman / dampak bencana. Dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar pada tahun 2024 yang sudah ditargetkan untuk pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sudah terpenuhi dengan capaian 100%.

### **3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang dilaksanakan di Kabupaten Kampar yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan, Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota dan Penyembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten/Kota pada tahun 2024 telah mencapai 66.52 %.

- 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana** Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang diberikan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana. Pada tahun 2024 pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sudah mencapai 100 %.

### **5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran**

Dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar melakukan latihan dan simulasi yang bertujuan untuk memperkuat peran dan kapasitas masing-masing personel dalam menghadapi berbagai hal termasuk ancaman dan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Kampar. Selain simulasi dilaksanakan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan melakukan tindakan evakuasi terhadap

korban kebakaran. Diharapkan melalui pelatihan ini setiap personel selalu siap siaga dan tanggap atas setiap kejadian kebakaran yang setiap saat selalu mengancam sebagaimana yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengatur system pelayanan kebakaran dan evakuasi korban kebakaran baik dalam setiap operasi kebakaran dan operasi non kebakaran. Pada tahun 2024 ini capaian pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah mencapai 79.41%.

Aparatur personil Damkar yang telah mengikuti Diklat dan Bimtek Pemadam sampai dengan tahun 2024 sebanyak 133 orang dengan data sebagai berikut:

| TAHUN                        | 2019 | 2022 | 2023 | 2024 | JUMLAH |
|------------------------------|------|------|------|------|--------|
| JUMLAH YANG MENGIKUTI DIKLAT | 8    | 38   | 87   | 0    | 133    |

#### REKAP PESERTA BIMBINGAN TEKNIS DIKLAT PEMADAM I TAHUN 2019-2024

| NO | NAMA                 | STATUS | NO SERTIFIKAT                | TAHUN |
|----|----------------------|--------|------------------------------|-------|
| 1  | A GAFAR ARISON       | THL    | P.1/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 2  | ABDILLAH IRWAN       | THL    | P.2/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 3  | AFKI MARVICO         | THL    | P.3/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 4  | AFRIAL RONALDI       | THL    | P.4/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 5  | AIDIL SABIRO, SE     | THL    | P.5/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 6  | AKMAL FIKRI          | THL    | P.6/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 7  | ALDI CHANDRA         | THL    | P.7/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 8  | ALVENDRI             | THL    | P.8/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 9  | ANANDA REZKI ALJUNDI | THL    | P.9/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023  | 2023  |
| 10 | ANDRI KURNIAWAN      | THL    | P.10/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023  |
| 11 | ARDIAN               | THL    | P.11/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023  |
| 12 | ARSAN                | THL    | P.12/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023  |
| 13 | ASRIL, SH            | PNS    | P.13/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023  |



|    |                          |     |                              |      |
|----|--------------------------|-----|------------------------------|------|
| 14 | AZWAJINI HANUM, A.Md     | THL | P.14/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 15 | BAYU PRIADI, S.Sos       | THL | P.15/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 16 | BINTANG AMRI             | THL | P.16/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 17 | BOBY KURNIAWAN, SE       | THL | P.17/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 18 | DALI SADLI               | THL | P.18/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 19 | DENI NURFAHMI            | THL | P.19/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 20 | ECKY KURNIAWAN, SE       | THL | P.20/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 21 | ENHADI                   | THL | P.21/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 22 | ERMA NILA YANTI, SH      | THL | P.22/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 23 | FAKHUR ROZI              | THL | P.23/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 24 | FIRDAUS                  | THL | P.24/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 25 | HERMAN JONI Z, SE        | THL | P.25/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 26 | IKHSAN AFIBRI MAULANA    | THL | P.26/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 27 | ILHAM AHLUL FIKRI        | THL | P.27/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 28 | INDRA LASMANA            | THL | P.28/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 29 | IRVAN SUARDI             | THL | P.29/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 30 | IZKI RAMADHAN            | THL | P.30/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 31 | JOHAN WAHYUDI            | THL | P.31/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 32 | JOKO EFRYADY             | THL | P.32/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 33 | JUFRI NUR                | THL | P.33/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 34 | JUM ARIS SAPUTRA         | THL | P.34/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 35 | KESUMA WARDANI, A.Md     | THL | P.35/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 36 | LISA WIDAYANTI, SE, M.Si | PNS | P.36/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 37 | M ADRIAN SYAH            | THL | P.37/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 38 | M AKMAL                  | THL | P.38/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 39 | M ANDRA MULYADI          | THL | P.39/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 40 | M FAJRI                  | THL | P.40/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 41 | M PAUZAN                 | THL | P.41/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 42 | M. RIFQI JULIARDI        | THL | P.42/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 43 | MARYONO                  | THL | P.43/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |



|    |                          |     |                              |      |
|----|--------------------------|-----|------------------------------|------|
| 44 | MECHLIN JHORDI           | THL | P.44/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 45 | MHD. RIDHO, S.Pd         | THL | P.45/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 46 | MUHAMMAD ALFARISI        | THL | P.46/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 47 | MUHAMMAD ANUGRAH PRATAMA | THL | P.47/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 48 | MUHAMMAD DANIEL          | THL | P.48/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 49 | MUHAMMAD HAMBALI         | THL | P.49/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 50 | MUHAMMAD IBNU SYUKRON    | THL | P.50/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 51 | MUHAMMAD RIDHO           | THL | P.51/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 52 | MUHAMMAD RIZKI YURMAN    | THL | P.52/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 53 | MUHAMMAD RONALDO         | THL | P.53/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 54 | MUHAMMAD SYUKUR          | THL | P.54/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 55 | MUHLIS, Amd              | THL | P.55/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 56 | NOPRI HIDAYAT            | THL | P.56/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 57 | NUR AZMAN, SE            | THL | P.57/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 58 | PANDU SUPRATMAN PUTRA    | THL | P.58/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 59 | READYKA PRATAMA PUTRA    | THL | P.59/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 60 | RESCHI AMELCA            | THL | P.60/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 61 | REZKI DITO PRASETYO      | THL | P.61/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 62 | RIKI DARMADI             | THL | P.62/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 63 | RIKO SETIADI             | THL | P.63/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 64 | RISKI ADE PUTRA          | THL | P.64/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 65 | RIYAD ADRA               | THL | P.65/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 66 | RIZKI HIDAYAT            | THL | P.66/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 67 | RUDI HARTONO             | THL | P.67/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 68 | RUSDI                    | THL | P.68/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 69 | RYAN ISMANIZAN, Amd.T    | THL | P.69/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 70 | SUKASDI                  | THL | P.70/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 71 | SURGA SETIAWAN           | THL | P.71/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |
| 72 | TAHMID AFRIWAHTUDI       | THL | P.72/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023 | 2023 |



|    |                       |     |                                   |      |
|----|-----------------------|-----|-----------------------------------|------|
| 73 | TAUFIK HIDAYAT        | THL | P.73/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023      | 2023 |
| 74 | TEDI KURNIAWAN        | THL | P.74/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023      | 2023 |
| 75 | WAHYU KURNIAWAN       | THL | P.75/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023      | 2023 |
| 76 | WAHYU NALDI           | THL | P.76/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023      | 2023 |
| 77 | YUKI MARDIUS          | THL | P.77/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023      | 2023 |
| 78 | ZULFANDRIE HZ         | THL | P.78/361/TU/DAMKAR/MPBK/2023      | 2023 |
| 79 | BUDI HIDAYAT, SE      | PNS | 03/331.1/019/ROHIL-BPSDM/14/2019  | 2023 |
| 80 | RIO KUSUMA WARDANI    | PNS | 03/331.1/0 19/ROHIL-BPSDM/14/2019 | 2023 |
| 81 | AZWIR                 | PNS | 03/364.1/120/ROHIL-BPSDM/14/2019  | 2023 |
| 82 | RICKY FAUZAN RIZA     | THL | 03/331.1/01/ROHIL-BPSDM/14/2019   | 2023 |
| 83 | FARSO PADLI           | THL | 03/364.1/029/ROHIL-BPSDM/14/2019  | 2023 |
| 84 | HENDRI NUR EFENDI, ST | THL | 03/364.1/87/ROHIL-BPSDM/14/2019   | 2023 |
| 85 | NUR AZAIMI            | THL | 03/364.1/028/ROHIL-BPSDM/14/2019  | 2023 |
| 86 | MA'RUF HIDAYAT        | THL | 03/331.1/02/ROHIL-BPSDM/14/2019   | 2023 |
| 87 | WAN ANDRE             | THL | 3610/XI/17/-084.31                | 2023 |
| 88 | ADE KURNIAWAN         | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/001     | 2022 |
| 89 | AFRIYANDI             | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/002     | 2022 |
| 90 | AFWAN                 | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/003     | 2022 |
| 91 | AGUSTIAN HADINATA     | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/004     | 2022 |
| 92 | ALEX SANDRA           | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/005     | 2022 |
| 93 | ALFARIZAL             | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/006     | 2022 |
| 94 | ALTA VIVIN            | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/007     | 2022 |
| 95 | ANDI HASAN            | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/008     | 2022 |
| 96 | ARHAMDANI             | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/009     | 2022 |
| 97 | BAMBANG NOFRIADI      | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/010     | 2022 |
| 98 | DANI NURPIAN          | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/011     | 2022 |
| 99 | DONI HENDRA           | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/012     | 2022 |



|     |                    |     |                               |      |
|-----|--------------------|-----|-------------------------------|------|
| 100 | EFRIZON            | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/013 | 2022 |
| 101 | FIRDAUS NICO M     | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/014 | 2022 |
| 102 | FUJI WAHYUDI       | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/015 | 2022 |
| 103 | FUTRA HIDAYAT      | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/016 | 2022 |
| 104 | HENDRI DARIS       | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/017 | 2022 |
| 105 | HENDRIZAL          | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/018 | 2022 |
| 106 | HENRI YUNAN        | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/019 | 2022 |
| 107 | ISMAIL, S.IP       | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/020 | 2022 |
| 108 | JASMI              | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/021 | 2022 |
| 109 | KHAIRUDDIN         | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/022 | 2022 |
| 110 | KHAIRUL AZMI       | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/023 | 2022 |
| 111 | KHUDRI YANI        | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/024 | 2022 |
| 112 | M.RIDWAN           | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/025 | 2022 |
| 113 | MASRUL H           | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/026 | 2022 |
| 114 | NURDYAMSIR         | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/027 | 2022 |
| 115 | RAHMAD, S.Pdi      | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/028 | 2022 |
| 116 | RIZKY AFDHAL       | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/029 | 2022 |
| 117 | RONAL              | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/030 | 2022 |
| 118 | SATRIA GAUTAMA     | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/031 | 2022 |
| 119 | SUGITOPAN          | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/032 | 2022 |
| 120 | TITO               | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/033 | 2022 |
| 121 | TRYA NUGRAHA       | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/034 | 2022 |
| 122 | WAZIRMAN           | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/035 | 2022 |
| 123 | YOGGIE YUZAR       | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/036 | 2022 |
| 124 | ZUL FADLI          | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/037 | 2022 |
| 125 | ZULFAHRI           | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/038 | 2022 |
| 126 | RIO KUSUMA WARDANI | PNS | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/039 | 2019 |
| 127 | BUDI HIDAYAT, SE   | PNS | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/040 | 2019 |
| 128 | AZWIR              | PNS | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/041 | 2019 |
| 129 | MA'RUF HIDAYAT     | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/042 | 2019 |

|     |                      |     |                               |      |
|-----|----------------------|-----|-------------------------------|------|
| 130 | RICKY FAUZAN RIZA    | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/043 | 2019 |
| 131 | HENDRI NUR EFENDI,ST | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/044 | 2019 |
| 132 | FARSO PADLI S.Pd     | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/045 | 2019 |
| 133 | NUR AZAIMI           | THL | 03/364.1/KAMPAR-DPKP/2022/046 | 2019 |

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam penerapan dan pencapaian pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

1. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar sebesar Rp. Rp.17.616.606.107,-
2. PD Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan Anggaran sebesar Rp. 3.588.448.900,-
2. Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp. 1.163.726.870,-

| NO | PENDANAAN                                     | PAGU              |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | APBD KAB. KAMPAR                              | 2,862,581,853,723 |
| 2  | ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH      | 40,688,599,070    |
| 3  | ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD | 5,911,543,080     |
|    | <b>APBD</b>                                   | 5,911,543,080     |
|    | A. APBD MURNI                                 | 5,911,543,080     |

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM                                                                         | KEGIATAN (DPA)                                                                                                                                                                             | PERENCANAAN   | PELAKSANAAN   | SERAPAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1  | PENGEMBANGAN PERUMAHANPENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANSTIBUM) |                                                                                                                                                                                            | 3,588,448,900 | 3,282,377,284 | 91.47   |
|    |                                                                                 | 1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/KotaPenanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 3,588,448,900 | 3,282,377,284 | 91.47   |
|    |                                                                                 | 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota                                                                                                                 | 0             | 0             | 0       |

|   |                                                                                                   |   |                                                                                                                                     |                      |                      |              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|   |                                                                                                   | 3 | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                                                                       | 0                    | 0                    | 0            |
| 2 | <b>PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)</b>                                                       |   |                                                                                                                                     | <b>1,163,727,603</b> | <b>846,954,550</b>   | <b>72.78</b> |
|   |                                                                                                   | 1 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                                    | 0                    | 0                    | 0            |
|   |                                                                                                   | 2 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                             | 316,778,870          | 255,292,350          | 80.59        |
|   |                                                                                                   | 3 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                                  | 492,298,500          | 307,300,500          | 62.42        |
|   |                                                                                                   | 4 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                                        | 354,650,233          | 284,361,700          | 80.18        |
| 3 | <b>PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)</b> |   |                                                                                                                                     | <b>1,594,433,250</b> | <b>1,166,916,268</b> | <b>73.19</b> |
|   |                                                                                                   | 1 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 1,134,856,750        | 744,579,976          | 65.61        |
|   |                                                                                                   | 2 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran                                                                                               | 52,824,900           | 46,496,722           | 88.02        |
|   |                                                                                                   | 3 | Investigasi Kejadian Kebakaran                                                                                                      | 47,850,200           | 47,733,000           | 99.76        |
|   |                                                                                                   | 4 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran                                                                                  | 218,593,450          | 203,666,170          | 93.17        |
|   |                                                                                                   | 5 | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                                             | 140,307,950          | 124,440,400          | 88.69        |

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan pelayanan dasar di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat didukung oleh personil yaitu:

- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kampar** yang menjadi personil pendukung terdiri dari 10 orang, antara lain :

| NO | NAMA                   | KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS     | JABATAN DALAM TIM |
|----|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1  | Hendry Dunan, SP, MMA  | Kepala Dinas                      | Penanggung Jawab  |
| 2  | Eko Wahyudi, SKM, M.Si | PLt. Sekretaris                   | Ketua             |
| 3  | Zuridayati, SE, M.IP   | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan | Sekretaris        |
| 4  | Khairil Amri, S.Pd     | Kabid Pencagahan                  | Anggota           |



|    |                         |                                                      |          |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 5  | Nafiaruddin, S,KM, M.Si | Kabid Pemadam dan Penyelamatan                       | Anggota  |
| 6  | Firman Abdi, S.Sos      | Kasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana | Anggota  |
| 7  | Lisa Widayanti, SE      | Kasi Pemadam dan Investigasi                         | Anggota  |
| 8  | Asmi Delvi, SKM         | Kasi penyelamatan dan evakuasi                       | Anggota  |
| 9  | Retni Noviasari, SE     | Tenaga Harian Lepas                                  | Operator |
| 10 | Badrah khairiah         | Tenaga Harian Lepas                                  | Operator |

## 2. Personil Trantimb OPD SATPOL PP

| NO | NAMA                     | KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS                          | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | ARIZON, SE               | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja                      | Ketua             |
| 2  | AHMAD ZAKI, M.M          | Sekretaris                                             | Wakil Ketua       |
| 3  | HAMIDI, S.Sos            | Kasubbag Perencanaan dan Program                       | Sekretaris        |
| 4  | Dr.HAMDANIS, S.PdI, M.Pd | Kepala Bidang ketertibang umum, ketentratan masyarakat | Anggota           |
| 5  | SAWIR,S.P, M.Si          | Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah               | Anggota           |
| 6  | RUSLI HASYI, S.Pd,M.H    | Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur                     | Anggota           |
| 7  | EDY BAHREIN,SP           | Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat                  | Anggota           |
| 8  | ADAM RIZKY RAMADONI, M.M | Tenaga Bantu Sat Pol PP                                | Operator          |
| 9  | ADE IRAWAN, S.KOM        | Tenaga Bantu Sat Pol PP                                | Operator          |
| 10 | SYAFRIZON, A.Md          | Tenaga Bantu Sat Pol PP                                | Operator          |

## 3. Personil Trantib OPD BPBD

| NO | NAMA                 | JABATAN DALAM TIM |
|----|----------------------|-------------------|
| 1  | Kepala Pelaksana     | Admin             |
| 2  | Sekretaris           | Ketua             |
| 3  | Kasubbag Perencanaan | Sekretaris        |
| 4  | Herman Idrus, Se     | Operator          |
| 5  | Muhammad Ridha       | Operator          |
| 6  | Syafrinaldi          | Operator          |

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

##### PERMASALAHAN

dalam kegiatan ditemukan hambatan atau kendala dalam proses pencapaian pelayanan antara lain :

##### 1. Tahapan Pendataan

Pengumpulan Data Dalam Pelaksanaan Spm Yang Terbatas Seperti Kurangnya Koordinasi Dengan Instansi Terkait Sehingga Pelayanan Trantibum Tidak Optimal Di Laksanakan;

##### 2. Tahapan Penghitungan

Tidak ada Kendala

##### 3. Tahapan Perencanaan

- Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan operasi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada yang telah ditetapkan;
- Rendahnya dukungan anggaran Tim Yustisi;
- Kurangnya Dukungan Anggaran Sarana dan Prasarana sehingga belum bisa menjangkau seluruh wilayah Kab. Kampar dalam Penerapan SPM;

##### 4. Tahapan Pelaksanaan

- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang memadai Sehingga Pelaksanaan SPM Tidak bisa Maksimal.
- Tidak ada dukungan dana sosialisasi Penegakkan Perda dan Perkada
- Masih Ada Anggota Sat Pol PP Kab. Kampar belum mendapatkan Diklatsar
- Masih Ada Anggota Sat Pol PP Kab. Kampar belum mendapatkan Diklatsar
- Minimnya pelatihan lanjutan (khusus / spesialis) peningkatan SDM penegak hukum PPNS Pemerintah Kabupaten Kampar

## SOLUSI

Dalam menyikapi permasalahan tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan langkah-langkah (solusi) dalam mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis tentang Penanggulangan Bencana;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar tercipta sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Melakukan koordinasi secara intens ke Provinsi dan pusat guna mendapatkan bantuan baik sarana dan prasarana maupun anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana/pasca bencana;
4. Sinkronisasi dokumen RPJM, Renstra dan Renja SKPD;
5. Adanya koordinasi dalam penerapan SPM;
6. Dukungan anggaran sesuai dengan kemampuan APBD;

### 4.6. BIDANG SOSIAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar teknis Pelayanan dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial di Provinsi Riau Daerah Kabupaten/Kota.

#### 4. 6.1 Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada Bidang Sosial antara lain :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.

#### 4. 6.2 Target Pencapaian SPM pada Bidang Sosial

Adapun target yang dicapai pada pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial terdiri dari 5 (lima) indikator seperti dijelaskan pada pada tabel berikut :

| NO. | JENIS PELAYANAN DASAR                                                                          | INDIKATOR                                                                                                        | TARGET |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti                        | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                      | 100 %  |
| 2.  | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti                                          | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                           | 100 %  |
| 3.  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti                                   | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                       | 100 %  |
| 4.  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti         | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100 %  |
| 5.  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                      | 100 %  |

#### 4. 6.3. Realisasi dan Pencapaian SPM bidang Sosial

Realisasi SPM bidang Sosial dari target yang dicapai pada tahun 2024 memiliki capaian kinerja seperti pada tabel berikut :

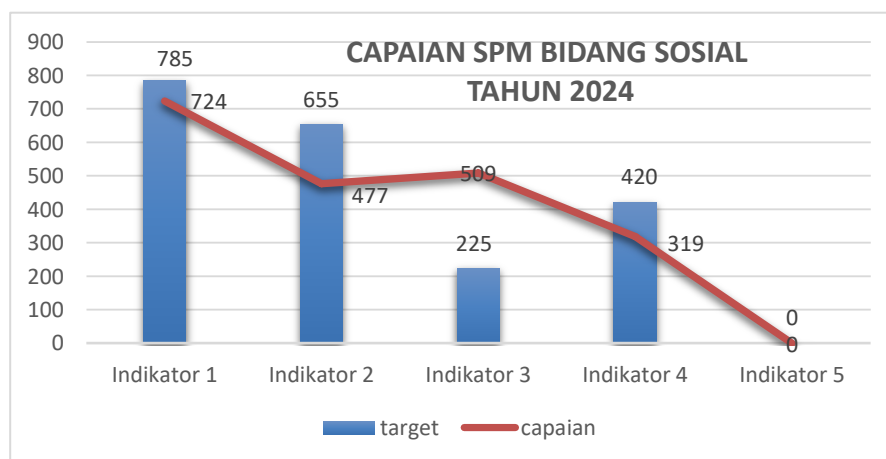
| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                                   | INDIKATOR                                                                                   | TARGET CAPAIAN TAHUN 2024 | REALISASI/CA PAIAN TAHUN 2024 (JLH/%) |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 785                       | 724/<br>92.23 %                       |

|    |                                                                                                |                                                                                                                  |     |                 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|
| 2. | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti                                          | Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                                            | 655 | 477/<br>72.82 % |
| 3. | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti                                   | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                       | 225 | 509/<br>100%    |
| 4. | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti         | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 420 | 319/<br>75.95%  |
| 5. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota | Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social                      | 0   | 0<br>/<br>0 %   |

m

a) jenis pelayanan dasar di Bidang Sosial pencapaian dengan persentase terendah terdapat pada jenis pelayanan dasar Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota sebesar 0 % sedangkan pencapaian dengan persentase tertinggi pada jenis pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter diluar panti pada angka 100%. Secara keseluruhan persentase pelayanan dasar pada bidang sosial adalah sebesar 69.88%.

Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :



#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Adapun sumber anggaran dalam pelaksanaan pelayanan dasar di Bidang Sosial bersumber dari APBD Kabupaten Kampar sebesar Rp. 1.191.449.900,-

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM             | KEGIATAN (DPA)                                                                                                                                       | PERENCANAAN   | PELAKSANAAN   | SERAPAN |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| 1  | REHABILITASI SOSIAL |                                                                                                                                                      | 1.929.758.472 | 1.746.487.390 | 91      |
|    |                     | 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | 964.879.236   | 873.243.695   | 91      |
|    |                     | 2 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                                                                                  | 964.879.236   | 873.243.695   | 91      |

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan kegiatan pelayanan Dasar di Bidang sosial melibatkan Personil antara lain :

1. Kepala Bidang Rehsos Dinas Sosial Kabupaten Kampar
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar
3. Analis Masalah Sosial Muda Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar
4. Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar
5. Analis Mitigasi Bencana Dinas Sosial Kabupaten Kampar
6. Pendamping Rehsos Kementerian Sosial RI
7. Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar
8. Staf Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Kampar
7. TSKK se-Kab. Kampar;
8. PSM se-Kab. Kampar.

#### 4. 6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM pada pelayanan dasar bidang sosial adalah :

##### Permasalahan :

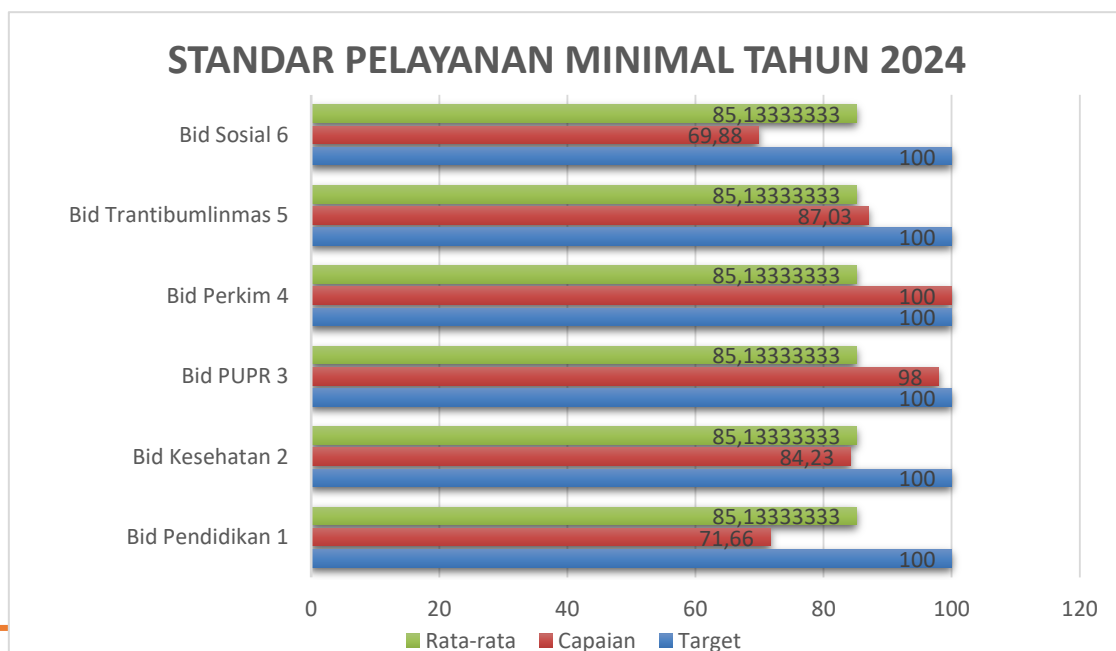
1. Terbatasnya persediaan Anggaran Dana;
2. Sulitnya melakukan pendataan terhadap Gepeng yang ada di setiap Wilayah Kab. Kampar;
3. Calon Penerima manfaat mengundurkan diri dikarenakan faktor permasalahan keluarga.

##### Solusi :

Dari permasalahan yang dihadapi penyelesaian/solusi dapat ditempuh dengan langkah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan agar pagu anggaran dana tersedia sesuai dengan kebutuhan;
2. Melakukan identifikasi terhadap calon penerima manfaat pendidikan dan pelatihan bagi penyandang Disabilitas.

Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kampar Tahun 2024 dengan rata-rata dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kampar capaian tahun 2024 berada pada rata-rata keseluruhan Bidang sebesar 85.13 %, sedangkan Bidang yang Tingkat capain yang paling rendah adalah Bidang Sosial sebesar 69.88 % dan capaian tertinggi adalah Bidang Perumahan Rakyat mencapai target 100 %

#### 4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal harus di dukung oleh program dan kegiatan. Berikut program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) :

##### A. URUSAN PENDIDIKAN

Pada Bidang pendidikan sebagai OPD Pengampu adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                     |
| 1  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                 |
|    | <b>1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                                         |
|    | 1 Pembangunan Sarana, Prasaranadan Utilitas Sekolah                                                   |
|    | 2 Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             |
|    | 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             |
|    | 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                    |
|    | 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar            |
|    | 6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         |
|    | 7 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       |
|    | 8 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                |
|    | 9 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        |
|    | 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                      |
|    | <b>2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                              |
|    | 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  |
|    | 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       |
|    | 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             |
|    | 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |
|    | 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
|    | 6 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       |
|    | 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        |



|  |                                                                                                   |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                                             |
|  | 1 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                       |
|  | 2 Pengadaan Mebel PAUD                                                                            |
|  | 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                                    |
|  | 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                    |
|  | 5 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                                        |
|  | 6 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                   |
|  | 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                    |
|  | <b>4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>                                              |
|  | 1 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |
|  | 2 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan                                |
|  | 3 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan                 |
|  | 4 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                   |

## B. URUSAN KESEHATAN

Berikut rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Standar Pelayanan Minimal pada Bidang Kesehatan sebagai OPD Pengampu adalah Dinas Kesehatan antara lain :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                     |
| 1  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                                                 |
|    | <b>1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>                                                         |
|    | 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  |
|    | 2 Pengadaan Mebel Sekolah                                                                             |
|    | 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             |
|    | 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar                    |
|    | 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar            |
|    | 6 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                                         |
|    | 7 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       |
|    | 8 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                                                |
|    | 9 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        |
|    | 10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                      |
|    | <b>2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>                                              |
|    | 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                                                  |
|    | 2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                                                       |
|    | 3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                                             |
|    | 4 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |
|    | 5 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
|    | 6 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                       |
|    | 7 Pembangunan Ruang Kelas Baru                                                                        |
|    | <b>3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>                                                 |

|  |   |                                                                           |
|--|---|---------------------------------------------------------------------------|
|  | 1 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD |
|  | 2 | Pengadaan Mebel PAUD                                                      |
|  | 3 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                              |
|  | 4 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD              |
|  | 5 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD                                  |

### C. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                           |                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b> |                                                                                                          |
|    | 1                                                                       | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>          |
|    | 1                                                                       | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)                    |
|    | 2                                                                       | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan                                        |
| 2  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>           |                                                                                                          |
|    | 2                                                                       | <b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>       |
|    | 1                                                                       | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat |
|    | 2                                                                       | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                      |

### D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Bidang Perumahan Rakyat memiliki Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2024 antara lain:

| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN         |                                                                                                        |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b> |                                                                                                        |
|    | 1                                     | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> |
|    | 1                                     | Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani                        |
|    | 2                                     | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 |

## E. URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas terdiri dari 3 (tiga) OPD Pengampu dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

| NO  | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | <b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</b>                                                                                             |
| 1   | <b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                    |
| 1   | Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota                                                     |
| 2   | Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum                                                                                   |
| 3   | Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia            |
| 4   | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |
| 5   | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |
| 6   | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah                                                                 |
| 7   | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum                                                                                     |
| 2   | <b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>                                                                                     |
| 3   | <b>Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota</b>                                                                                                |
| II  | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)</b>                                                                                                                 |
| 4   | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                                                                                             |
| 5   | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                                                                                      |
| 1   | Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota                                                                                                            |
| 2   | Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota                                                                                                |
| 3   | Penyusunan rencana kontijensi                                                                                                                                       |
| 4   | Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                                                                |
| 6   | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>                                                                                                           |
| 1   | Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                         |
| 2   | Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota                                                                                                   |
| 3   | Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota                                                                                         |
| 7   | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                                                                                                                 |
| 1   | Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota                                                                                                           |
| 2   | Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                                                                                                            |
| 3   | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                                                                   |
| III | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)</b>                                                           |

|    |                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | <b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |
| 1  | Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota                                                                                           |
| 2  | Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota                                                                           |
| 3  | Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran                                                                               |
| 4  | Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota                                                               |
| 5  | Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                             |
| 6  | Pembinaan aparatur pemadam kebakaran                                                                                                       |
| 7  | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)                                                              |
| 8  | Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                                |
| 9  | Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga                                                                                            |
| 9  | <b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>                                                                                               |
| 1  | Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran                                                                                              |
| 2  | Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran                                                                                              |
| 10 | <b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>                                                                                                      |
| 1  | Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran                                              |
| 11 | <b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>                                                                                  |
| 1  | Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat                           |
| 2  | Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran                                                                                        |
| 3  | Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana                                         |
| 12 | <b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>                                             |
| 1  | Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia        |
| 2  | Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi                |
| 3  | Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi                               |
| 4  | Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi                   |

## F. URUSAN SOSIAL

Dinas Sosial yang menjadi OPD Pengampu Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial mempunyai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :



| NO | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL                                                                                                                        |
| 1  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |
| 1  | Penyediaan permakanaan                                                                                                                             |
| 2  | Penyediaan sandang                                                                                                                                 |
| 3  | Penyediaan alat bantu                                                                                                                              |
| 4  | Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social                                                                                           |
| 5  | Pemberian layanan kedaruratan                                                                                                                      |
| 6  | Pelayanan dukungan Psikososial                                                                                                                     |

## BAB V

## PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Dari penyelenggaraan urusan dan tugas tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya, disamping masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 merupakan perwujudan tertib pelaksanaan fungsi Pemerintahan Daerah dan pemenuhan kewajiban pelaporan serta pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sistematika penyusunan LPPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 telah berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 sebagaimana disampaikan melalui Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 terkait Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Bupati Kampar kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, melengkapai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang bersifat horizontal.

Berbagai keberhasilan pembangunan daerah memotivasi Pemerintah Kabupaten Kampar untuk semakin meningkatkan kinerja pembangunan. Namun demikian, kita juga menyadari bahwa masih ada berbagai kelemahan yang perlu menjadi perhatian dan penyelesaian untuk tahun kedepan. Kelemahan-kelemahan tersebut akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk diperbaiki di masa selanjutnya.

Beberapa langkah penting dan strategi yang akan ditempuh agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih baik adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat berdasarkan prioritas, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama dengan stakeholders, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal.
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.

3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
4. Mekanisme pengumpulan data kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat regional maupun nasional, maka perencanaan pembangunan daerah akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasil potensi daerah yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator pembangunan daerah yang tersedia di beberapa instansi akan lebih diberdayakan.
5. Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
6. Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
7. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.
8. Merekrut sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya sehingga dapat mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kampar.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara maksimal dapat menggambarkan kondisi riil yang sebenarnya, namun demikian melalui Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam tahun 2024 termasuk didalamnya beberapa keberhasilan dan kelemahannya yang dihadapi. Pemerintah Kabupaten Kampar harus berjalan efektif, selaras dengan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kampar akan membantu mengoreksi kelemahan dan kekurangannya.



Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan stakeholder lainnya serta dapat menjadi sumber informasi untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Insya Allah kita semua dapat mewujudkan Visi Kabupaten Kampar yaitu “Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025”.

Sebagai penutup, LPPD Kabupaten Kampar Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun-tahun selanjutnya, agar pencapaian kinerja menjadi lebih optimal sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijalankan dapat menjadi sebuah hasil yang bermanfaat, diberikan catatan dan rekomendasi yang membangun, serta mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Kampar yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan berkebangsaan.